

# Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta

November 2025





Lokasi: Pantai Indah Kapuk I

# LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI DKI JAKARTA

---

November 2025

Kantor Perwakilan Bank Indonesia  
Provinsi DKI Jakarta

# Visi, Misi & Nilai Strategis Bank Indonesia

## Visi

“Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara *emerging markets* untuk Indonesia Maju”

## Misi

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
5. Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang andal, serta peran internasional yang proaktif.

## Nilai-nilai Strategis Organisasi

Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah :



Kejujuran dan integritas  
(*trust and integrity*)



Profesionalisme  
(*professionalism*)



Keunggulan  
(*excellence*)



Mengutamakan  
kepentingan umum  
(*public interest*)



Koordinasi dan kerjasama tim  
(*coordination and teamwork*)  
yang belandaskan keluhuran  
nilai-nilai agama (religi).



# Visi & Misi

## Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

### Visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

Menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang kredibel dan digital terdepan dengan tata kelola kuat dalam mendukung kebijakan Bank Indonesia dan berkontribusi secara nyata bagi pembangunan ekonomi daerah dan nasional

### Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

# Kata Pengantar

Kami memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya buku Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta edisi November 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta ini diterbitkan rutin secara triwulanan, dimana pada edisi November 2025 ini menganalisis dan mengevaluasi kondisi perekonomian DKI Jakarta, khususnya pada triwulan III 2025 dan triwulan IV 2025.

Pada triwulan III 2025, ekonomi Jakarta mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,96% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,18% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Nasional (5,04%; yoy). Dari sisi permintaan, pertumbuhan ditopang oleh kinerja Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah. Selain itu, kinerja Investasi dan Ekspor juga tetap tumbuh positif. Dari sisi Lapangan Usaha (LU) utama, pertumbuhan ditopang oleh LU Informasi dan Komunikasi (Infokom), LU Perdagangan, dan LU Jasa Perusahaan. Selain itu, LU Konstruksi juga tetap mencatatkan pertumbuhan positif. Kendati demikian, kinerja LU Jasa Keuangan berkontraksi dan menjadi penahan pertumbuhan.

Secara keseluruhan tahun 2025, ekonomi DKI Jakarta diprakirakan tetap tumbuh kuat pada kisaran titik tengah 4,6%-5,4% (yoy). Adapun, inflasi juga diprakirakan tetap terkendali pada kisaran titik tengah 2,5±1% (yoy). Prakiraan tersebut terutama didukung oleh program ketahanan pangan serta penguatan program pengendalian inflasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada berbagai pihak, antara lain BPS Provinsi DKI Jakarta, OPD Provinsi DKI Jakarta, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, kalangan pelaku usaha, narasumber dalam berbagai *Focus Group Discussion* dan pihak-pihak lainnya, atas perolehan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan buku ini. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi sumber referensi bagi para pemangku kepentingan dan pemerhati ekonomi Jakarta, dan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi Provinsi DKI Jakarta. Masukan dan saran dari berbagai pihak juga kami harapkan untuk dapat meningkatkan kualitas laporan ini. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan ridha-Nya dan melindungi kita dalam berkarya. .

Jakarta, November 2025  
Kepala Perwakilan  
Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

ttd.

**Iwan Setiawan**  
Direktur



# Daftar Isi

Visi Misi Bank Indonesia	III
Kata Pengantar	IV
Daftar Isi	VI
Daftar Tabel	VIII
Daftar Gambar	IX
Daftar Grafik	X
Ringkasan Eksekutif	XIV
Tabel Indikator	XVIII
Tim Penyusun	103

<b>Bab I</b>	
<b>Perekonomian Global &amp; Nasional</b>	<b>1</b>
A. Perekonomian Global	3
B. Perekonomian Nasional	3
C. Bauran Kebijakan Bank Indonesia	6

<b>Bab II</b>	
<b>Ekonomi Makro Regional</b>	<b>9</b>
a. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2025	11
B. <i>Tracking</i> Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2025	20
<b>BOKS 1</b>	
JEF 2025: Mengorkestrasi Transformasi Jakarta Menuju Kota Global Melalui Penguatan Talenta dan Ekosistem Ekonomi Kreatif	25



<b>Bab III</b>	
<b>Keuangan Pemerintah</b>	<b>29</b>
A. Gambaran Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi DKI Jakarta 2025	31
B. Realisasi Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	31
C. Belanja Daerah APBD	32
D. Pengeluaran Pembiayaan Daerah APBD	33
E. Realisasi Pendapatan dan Belanja Kementerian Negara/Lembaga di DKI Jakarta	33

<b>Bab IV</b>	
<b>Inflasi</b>	<b>37</b>
a. Kinerja Inflasi Provinsi Triwulan III 2025	39
B. <i>Tracking</i> Inflasi Triwulan IV 2025	41
C. Program Pengendalian Inflasi Triwulan III 2025	45
<b>BOKS 2</b>	
Dinamika Harga di Jakarta Menjelang Momentum Nataru	49



Lokasi: Pantai Indah Kapuk I

<b>Bab V</b>	
<b>Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM</b>	<b>51</b>
A. Perkembangan Kinerja Bank Umum	53
B. Perkembangan Kinerja Sektor Korporasi	58
C. Perkembangan Kinerja Sektor Rumah Tangga	63
D. Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	66
E. Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Lainnya	69

<b>Bab VI</b>	
<b>Sistem Pembayaran</b>	<b>71</b>
A. Kondisi Umum	73
B. Perkembangan Sistem Pembayaran di Provinsi DKI Jakarta	73
C. Upaya Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran	77
<b>BOKS 3</b>	
Implementasi QRIS Tap: Memperkuat Transformasi Pembayaran Sektor Transportasi di DKI Jakarta	79

<b>Bab VII</b>	
<b>Ketenagakerjaan &amp; Kesejahteraan</b>	<b>83</b>
A. Ketenagakerjaan	85
B. Kemiskinan	87
C. Upah Tenaga Kerja	90

<b>Bab VIII</b>	
<b>Prospek Perekonomian</b>	<b>91</b>
A. Prospek Perekonomian Global dan Nasional	93
B. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Jakarta	96
<b>BOKS 4</b>	
Dampak Stimulus 8+4+5 Terhadap Perekonomian Jakarta	99

# Daftar Tabel

<b>Tabel 1.1</b>	Tabel Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (% , yoy)	<b>3</b>
<b>Tabel 1.2</b>	Pertumbuhan Ekonomi Domestik Sisi Pengeluaran	<b>4</b>
<b>Tabel 1.3</b>	Pertumbuhan Ekonomi Domestik Sisi Lapangan Usaha	<b>4</b>
<b>Tabel 3.1</b>	Perkembangan Pagu APBD Provinsi DKI Jakarta 2025	<b>34</b>
<b>Tabel 3.2</b>	Rincian Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Triwulan III 2025	<b>35</b>
<b>Tabel 3.3</b>	Perkembangan Pagu Belanja APBN di DKI Jakarta	<b>36</b>
<b>Tabel 3.4</b>	Rincian Realisasi APBN di DKI Jakarta Triwulan III 2025	<b>36</b>
<b>Tabel B2.1</b>	Andil Inflasi Tahun Kalender Komoditas Pangan (Oktober 2025)	<b>49</b>
<b>Tabel 5.1</b>	Perkembangan Kinerja Bank Umum di Provinsi DKI Jakarta	<b>53</b>
<b>Tabel 5.2</b>	Tabel Rasio Keuangan Korporasi Nonkeuangan	<b>60</b>
<b>Tabel 5.3</b>	Kredit Korporasi menurut sektor ekonomi	<b>61</b>
<b>Tabel 6.1</b>	Perkembangan Transaksi Uang Kartal	<b>73</b>
<b>Tabel 6.2</b>	Persebaran KUPVA BB	<b>78</b>
<b>Tabel 6.3</b>	Perkembangan Transaksi PJP LR	<b>79</b>
<b>Tabel 7.1</b>	Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan	<b>85</b>
<b>Tabel 7.2</b>	Perkembangan Status Pekerjaan Utama	<b>86</b>
<b>Tabel 7.3</b>	Profil Kemiskinan DKI Jakarta	<b>88</b>
<b>Tabel 8.1</b>	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (Persen (yoy))	<b>93</b>
<b>Tabel 8.2</b>	Proyeksi PDB Nasional	<b>95</b>

# Daftar Gambar

Gambar 1.1	Peta Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Triwulan III 2025 (% , yoy)	4
Gambar 1.2	Peta Inflasi Daerah Bulan September 2025 (% yoy)	5
Gambar B1.1	JEF Dialogue	26
Gambar B1.2	JEF Policy Discussion	26
Gambar B1.3	Booth UMKM	26
Gambar B1.4	Band Competition	26
Gambar B1.5	Closing Ceremony	26
Gambar B3.3	Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta Ket: a, b) Pangan Bersubsidi Bagi Masyarakat Tertentu; c, d) Monitoring Ketersediaan dan Harga Pangan; e, f) Kegiatan Urban Farming Jakarta	50
Gambar B4.1	Insentif dan Stimulus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	102
Gambar B4.2	Insentif dan Stimulus	102

# Daftar Grafik

Grafik 1.1	Inflasi Global	3	Grafik 2.24	Perkembangan Impor DKI Jakarta	16
Grafik 1.2	Aliran Modal ke Negara Berkembang	3	Grafik 2.25	Perkembangan Ekspor Otomotif CBU Jakarta	17
Grafik 1.3	Indeks Keyakinan Konsumen	5	Grafik 2.26	Perkembangan Aktivitas Bongkar Muat Tj. Priok	17
Grafik 1.4	<i>Purchasing Manager's Index</i> (PMI) Manufaktur	5	Grafik 2.27	Perkembangan Penyaluran Kredit LU Transgud	17
Grafik 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan DKI Jakarta Triwulanan	11	Grafik 2.28	Perkembangan Wisatawan Mancanegara (Wisman) dan TPK Hotel Berbintang Jakarta	17
Grafik 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Triwulan III 2025 Sisi Pengeluaran	11	Grafik 2.29	Pertumbuhan ekspor komoditas industri DKI Jakarta Triwulan III 2025	18
Grafik 2.3	Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Triwulan III 2025 Sisi Pengeluaran	11	Grafik 2.30	Perkembangan Impor Bahan Baku Triwulan III 2025	18
Grafik 2.4	Perkembangan Indeks Penjualan Eceran	12	Grafik 2.31	Pertumbuhan LU Konstruksi dan PMTB	18
Grafik 2.5	Perkembangan Penjualan <i>E-Commerce</i> Jakarta	12	Grafik 2.32	Perkembangan DPK di Jakarta Berdasarkan Kepemilikan	18
Grafik 2.6	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen Jakarta	12	Grafik 2.33	Perkembangan Realisasi Pengadaan Semen di Jakarta	18
Grafik 2.7	Realisasi Belanja Utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (APBD)	12	Grafik 2.34	Perkembangan Penyaluran Kredit di Jakarta	20
Grafik 2.8	Perkembangan Nilai Impor Barang Modal Jakarta	13	Grafik 2.35	Perkembangan Penyaluran Kredit Konsumsi, Investasi, dan Modal Kerja di Jakarta	20
Grafik 2.9	Perkembangan Realisasi Pengadaan Semen di Jakarta	13	Grafik 2.36	Perkembangan Penyaluran Kredit Sektor Konstruksi serta Perantara Keuangan	20
Grafik 2.10	Neraca Perdagangan Luar Negeri DKI Jakarta	13	Grafik 2.37	Perkembangan DPK di Jakarta Berdasarkan Kepemilikan	20
Grafik 2.11	Perkembangan Ekspor HS 71 dan HS 15 Jakarta	13	Grafik 2.38	Perkembangan DPK Berdasarkan Rekening di Jakarta	20
Grafik 2.12	Perkembangan Kedatangan dan Keberangkatan Penumpang Tj. Priok	14	Grafik 2.39	Perkembangan Penjualan Eceran Jakarta	21
Grafik 2.13	Perkembangan Nilai Impor Barang Konsumsi, Barang Modal, dan Bahan Baku Jakarta	14	Grafik 2.40	Perkembangan Ekspektasi Konsumen Jakarta	21
Grafik 2.14	Perkembangan Nilai Impor HS 84, HS 85, dan HS 87 Jakarta	14	Grafik 2.41	Realisasi Pengadaan Semen Jakarta	21
Grafik 2.15	Konsumsi Listrik Kategori Sosial di Jakarta	14	Grafik 2.42	Nilai Impor Barang Konsumsi	21
Grafik 2.16	Perkembangan Pertumbuhan Lima LU Utama	15	Grafik 2.43	Nilai Impor Barang Modal	22
Grafik 2.17	Perkembangan Pertumbuhan LU Akmamin, LU Transgud, dan LU Jasa Perusahaan	15	Grafik 2.44	Nilai Impor Besi dan Baja	22
Grafik 2.18	Porsi LU Utama terhadap PDRB DKI Jakarta Triwulan III 2025	15	Grafik 2.45	Ekspor Mobil CBU	22
Grafik 2.19	Kontribusi Pertumbuhan PDRB DKI Jakarta Berdasarkan Lapangan Usaha	15	Grafik 2.46	Nilai Impor Barang Konsumsi	22
Grafik 2.20	Perkembangan LU Infokom dan PDRB Jakarta	15	Grafik 2.47	Nilai Impor Mobil Jakarta	23
Grafik 2.21	Perkembangan Penjualan <i>E-Commerce</i> Tiket & Voucher Jakarta	16	Grafik 2.48	Perkembangan Kegiatan Usaha LU Perdagangan	23
Grafik 2.22	Perkembangan Survei Penjualan Eceran DKI Jakarta	16	Grafik 2.49	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen Jakarta	23
Grafik 2.23	Perkembangan Indeks Kondisi Konsumen	16	Grafik 2.50	Perkembangan Indeks Penjualan Eceran DKI Jakarta	23
			Grafik 2.51	Perkembangan DPK Berdasarkan Kepemilikan (Tw IIV 2025)	23
			Grafik 2.52	Prakiraan SKDU LU Jasa Keuangan DKI Jakarta	24
			Grafik 2.53	Prakiraan SKDU LU Konstruksi DKI Jakarta	24

# Daftar Grafik

Grafik 2.54	Perkembangan Nilai Impor Bahan Baku DKI Jakarta	24	Grafik 4.11	Perkembangan Harga Emas Global	42
Grafik 2.55	Perkembangan Transaksi Komoditas Unggulan E-commerce di Jakarta (Tw IV 2025)	24	Grafik 4.12	Perkembangan Harga Cabai Merah	42
Grafik 2.56	Perkembangan Nilai Transaksi Transportasi Online (Tw IV 2025)	24	Grafik 4.13	Perkembangan Stok Cabai Merah	43
Grafik B1.1	Nilai Ekonomi Penjualan	27	Grafik 4.14	Perkembangan Harga Telur Ayam Ras	43
Grafik B1.2	Jumlah UMKM Terlibat	27	Grafik 4.15	Perkembangan Stok Telur Ayam Ras	43
Grafik 3.1	Realisasi Kumulatif Pendapatan Daerah	31	Grafik 4.16	Perkembangan Harga Wortel	43
Grafik 3.2	Perkembangan Capaian PAD dan Transfer DKI Jakarta Tw III 2025	31	Grafik 4.17	Perkembangan Harga Beras	44
Grafik 3.3	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah	31	Grafik 4.18	Perkembangan Stok Beras	44
Grafik 3.4	Pertumbuhan PAD dan Pendapatan Transfer	31	Grafik 4.19	Perkembangan Harga Tomat	44
Grafik 3.5	Pertumbuhan Komponen PAD	32	Grafik 4.20	Inflasi Tahunan Kelompok Pengeluaran Agustus - Oktober 2025	45
Grafik 3.6	Realisasi Kumulatif Belanja Daerah	32	Grafik 4.21	Inflasi Gabungan Provinsi di Jawa	45
Grafik 3.7	Perkembangan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal	32	Grafik 4.22	Inflasi Jakarta dan Nasional	45
Grafik 3.8	Pertumbuhan Belanja Daerah dan Komponen Utamanya	32	Grafik 5.1	Komposisi Aset Berdasarkan Kelompok Bank	53
Grafik 3.9	Pertumbuhan Belanja Hibah dan Belanja Subsidi	32	Grafik 5.2	Pertumbuhan DPK Jakarta	54
Grafik 3.10	Realisasi Kumulatif Total Belanja APBN di DKI Jakarta	33	Grafik 5.3	Komposisi DPK Jakarta	54
Grafik 3.11	Realisasi Total Belanja K/L di DKI Jakarta	33	Grafik 5.4	Komposisi Pemilik DPK Jakarta	54
Grafik 3.12	Perkembangan Belanja Barang dan Pegawai (APBN dan APBD)	34	Grafik 5.5	Perkembangan DPK Spasial Jakarta	54
Grafik 3.13	Perkembangan Belanja Modal (APBN dan APBD)	34	Grafik 5.6	Kontribusi DPK Jakarta terhadap DPK Nasional	55
Grafik 4.1	Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	39	Grafik 5.7	Pertumbuhan DPK Jakarta dan Nasional	55
Grafik 4.2	Sumbangan Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	39	Grafik 5.8	Pertumbuhan Kredit Jakarta	55
Grafik 4.3	Perkembangan Harga Daging Ayam Ras	40	Grafik 5.9	Komposisi Kredit Jakarta Berdasarkan Penggunaan	55
Grafik 4.4	Perkembangan Harga Beras	40	Grafik 5.10	Komposisi Kredit Berdasarkan Kepemilikan	56
Grafik 4.5	Perkembangan Harga Bawang Merah	40	Grafik 5.11	Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Kepemilikan	56
Grafik 4.6	Perkembangan Harga Emas Perhiasan Jakarta	40	Grafik 5.12	Pertumbuhan Kredit Sektoral	56
Grafik 4.7	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Kondisi Ekonomi (IKE)	41	Grafik 5.13	Sebaran Kredit di Provinsi DKI Jakarta	56
Grafik 4.8	Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Agustus - Oktober 2025	42	Grafik 5.14	Perkembangan LDR Berdasarkan Lokasi Bank dan Lokasi Proyek	56
Grafik 4.9	Perkembangan Inflasi Bulanan Emas Perhiasan DKI Jakarta (%; mtm)	42	Grafik 5.15	Perkembangan NPL DKI Jakarta	57
Grafik 4.10	Perkembangan Harga Emas Perhiasan DKI Jakarta (%; mtm)	42	Grafik 5.16	Perkembangan LaR DKI Jakarta	57
			Grafik 5.17	NPL di Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Penggunaan	57
			Grafik 5.18	Perbandingan NPL di Provinsi DKI Jakarta dan Nasional	57
			Grafik 5.19	Pertumbuhan Ekonomi Mitra Dagang Utama	58

# Daftar Grafik

Grafik 5.20	Pertumbuhan Volume Ekspor ke Negara Tujuan Utama DKI Jakarta	58	Grafik 5.49	Pertumbuhan Kredit UMKM di Jakarta	66
Grafik 5.21	Pertumbuhan Volume Ekspor Industri DKI Jakarta	59	Grafik 5.50	Porsi Kredit UMKM di Jakarta Berdasarkan Jenis Penggunaan	66
Grafik 5.22	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Unggulan DKI Jakarta	59	Grafik 5.51	UMKM Berdasarkan Skala Usaha	67
Grafik 5.23	Penjualan Korporasi DKI Jakarta	59	Grafik 5.52	Porsi Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi	67
Grafik 5.24	Profitabilitas Korporasi DKI Jakarta	60	Grafik 5.53	Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Utama	67
Grafik 5.25	Likuiditas Korporasi DKI Jakarta	60	Grafik 5.54	NPL Kredit UMKM	67
Grafik 5.26	Produktivitas Korporasi DKI Jakarta	60	Grafik 5.55	NPL Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha	67
Grafik 5.27	Kemampuan Membayar Korporasi DKI Jakarta	61	Grafik 6.1	Perkembangan <i>Inflow</i> , <i>Outflow</i> , dan <i>Net Flow</i> Uang Kartal	73
Grafik 5.28	Pertumbuhan kredit Korporasi	61	Grafik 6.2	<i>Inflow</i> , <i>Outflow</i> , dan <i>Net Flow</i> per Pecahan	73
Grafik 5.29	Penyaluran Kredit pada Sektor Utama Korporasi	61	Grafik 6.3	Perkembangan Temuan Uang yang Diragukan Keasliannya	74
Grafik 5.30	NPL pada Sektor Korporasi	62	Grafik 6.4	Perkembangan Nilai Transaksi RTGS	74
Grafik 5.31	Perkembangan DPK Korporasi	62	Grafik 6.5	Perkembangan Volume Transaksi RTGS	74
Grafik 5.32	Pertumbuhan Komponen DPK Korporasi	62	Grafik 6.6	Perkembangan Nilai Transaksi SKNBI	74
Grafik 5.33	Komposisi DPK Korporasi	62	Grafik 6.7	Perkembangan Volume Transaksi SKNBI	74
Grafik 5.34	Indeks Harga Saham Gabungan BEI	63	Grafik 6.8	Perkembangan Nilai Transaksi Kartu Kredit dan Debet	75
Grafik 5.35	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen dan Konsumsi RT	63	Grafik 6.9	Perkembangan Jumlah Kartu Kredit, Debet dan ATM	75
Grafik 5.36	Perkembangan Indeks Ketersediaan Lap.Kerja, Penghasilan Konsumen, dan Konsumsi Barang Tahan Lama	63	Grafik 6.10	Perkembangan Transaksi <i>E-commerce</i> Berdasarkan Metode Pembayaran	75
Grafik 5.37	Perkembangan Kredit Rumah Tangga	64	Grafik 6.11	Pangsa Transaksi <i>E-commerce</i> Berdasarkan Metode Pembayaran	75
Grafik 5.38	Perkembangan Jenis Penggunaan Kredit Rumah Tangga	64	Grafik 6.12	Perkembangan Transaksi Uang Elektronik	76
Grafik 5.39	Komposisi Jenis Penggunaan Kredit Rumah Tangga	64	Grafik 6.13	Perkembangan Instrumen dan Mesin Reader Uang Elektronik	76
Grafik 5.40	Komposisi Kredit RT dan Non-RT	64	Grafik 6.14	Perkembangan Pengguna QRIS di DKI Jakarta	76
Grafik 5.41	NPL Kredit Rumah Tangga	65	Grafik 6.15	Perkembangan <i>Merchant</i> QRIS di DKI Jakarta	76
Grafik 5.42	Perkembangan Kredit Konsumsi Rumah Tangga	65	Grafik 6.16	Pangsa <i>Merchant</i> QRIS per Wilayah	76
Grafik 5.43	Komposisi Kredit Konsumsi Rumah Tangga	65	Grafik 6.17	Pangsa <i>Merchant</i> QRIS per Jenis Usaha	77
Grafik 5.44	NPL Kredit Konsumsi Rumah Tangga	65	Grafik 6.18	Perkembangan Volume transaksi QRIS di DKI Jakarta	77
Grafik 5.45	Pertumbuhan DPK Rumah Tangga	66	Grafik 6.19	Perkembangan Transaksi KUPVA BB	77
Grafik 5.46	Pertumbuhan DPK per jenis Simpanan	66	Grafik 6.20	<i>Market Share</i> Valuta Asing	77
Grafik 5.47	Komposisi DPK	66	Grafik 6.21	Perkembangan Transaksi PJP LR	78
Grafik 5.48	Komposisi DPK Rumah Tangga	66			

# Daftar Grafik

Grafik 7.1	Pertumbuhan Jumlah Orang Bekerja dan Pertumbuhan Ekonomi Jakarta	85	Grafik 7.17	Tingkat Kemiskinan Provinsi di Jawa	89
Grafik 7.2	Persentase Penyerapan Suplai Tenaga Kerja	85	Grafik 7.18	Garis Kemiskinan Provinsi di Jawa	89
Grafik 7.3	Proporsi Penduduk Bekerja Berdasarkan Jam Kerja	85	Grafik 7.19	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	89
Grafik 7.4	Perkembangan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan	86	Grafik 7.20	Rasio Gini Jakarta dan Nasional	89
Grafik 7.5	Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	86	Grafik 7.21	Distribusi Pendapatan DKI Jakarta	90
Grafik 7.6	Pertumbuhan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan	86	Grafik 7.23	UMP Provinsi di Indonesia	90
Grafik 7.7	Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta (Juta Rupiah)	86	Grafik 7.22	Perkembangan UMP DKI Jakarta	90
Grafik 7.8	Produktivitas TK menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2024 (Juta Rupiah)	87	Grafik 8.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta 2025	96
Grafik 7.9	Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha	87	Grafik 8.2	Perkembangan Pagu APBD DKI Jakarta 2025	98
Grafik 7.10	Indeks Kondisi Ekonomi, Penghasilan, dan Ketersediaan Lapangan Kerja	87	Grafik 8.3	Perkembangan Pagu Belanja APBN di DKI Jakarta 2025	98
Grafik 7.11	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta	87	Grafik 8.4	Proyeksi Inflasi DKI Jakarta 2025	99
Grafik 7.12	Tingkat Kemiskinan Jakarta dan Nasional	88	Grafik B4.1	Pertumbuhan ekonomi dan Konsumsi RT di Jakarta	101
Grafik 7.13	Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta	88	Grafik B4.2	Jumlah Tenaga Kerja Ter-PHK di Jakarta	101
Grafik 7.14	Garis Kemiskinan DKI Jakarta	88	Grafik B4.3	Kondisi Tenaga Kerja di Jakarta	101
Grafik 7.15	Pertumbuhan Garis Kemiskinan dan Inflasi IHK Jakarta	88			
Grafik 7.16	Porsi Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan	89			

# Ringkasan Eksekutif

Perekonomian dunia masih dalam tren melambat sebagai dampak kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) yang masih menimbulkan tingginya ketidakpastian. Di pasar keuangan global, probabilitas penurunan kembali *Fed Funds Rate* (FFR) semakin besar sejalan dengan kondisi ketenagakerjaan di AS yang lemah. Sejalan dengan itu, *yield US Treasury* jangka pendek kembali menurun dan indeks mata uang dolar AS (DXY) cenderung melemah. Aliran modal ke *emerging market* (EM) masih berfluktuasi seiring dengan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Secara global, berbagai indikator menunjukkan kebijakan tarif AS memperlemah kinerja perdagangan global, tecermin dari melambatnya ekspor dan impor di sebagian besar negara. AS sendiri kembali mengenakan tambahan tarif kepada sektor farmasi, mebel, dan otomotif sejak 1 Oktober 2025 serta mengumumkan rencana pengenaan tarif tambahan sebesar 100% terhadap produk asal Tiongkok. Di AS, pertumbuhan ekonomi masih lemah sehingga mendorong berlanjutnya penurunan kondisi ketenagakerjaan. Sementara itu, ekonomi Jepang, Eropa, dan Tiongkok belum kuat dipengaruhi oleh belum kuatnya konsumsi rumah tangga, di tengah stimulus fiskal-moneter yang telah dilakukan. Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi dunia 2025 sebesar 3,1%, sedikit di atas prakiraan sebelumnya 3,0%. Namun, perkembangan ini menuntut kewaspadaan dan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi dampak rambatan ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global yang masih tinggi tersebut terhadap perekonomian domestik.

Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan perlu terus didorong agar sesuai dengan kapasitas perekonomian. Pada triwulan III 2025, laju pertumbuhan tercatat 5,04 % (yoy), sedikit dibawah pertumbuhan di triwulan II 2025 sebesar 5,12 % (yoy). Dari domestik, Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan melalui penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi dengan kebijakan Pemerintah, berupa stimulus fiskal dan sektor riil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun pertumbuhan kredit 2025, diperkirakan berada pada batas bawah kisaran 8-11% dengan potensi meningkat pada 2026.

Pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2025 diperkirakan berada sedikit di atas titik tengah kisaran 4,6-5,4% dan meningkat pada 2026. Ketahanan eksternal ekonomi Indonesia juga diperkirakan tetap stabil didukung komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Inflasi tahun 2025 dan 2026 tetap terjaga dalam sasaran  $2,5 \pm 1\%$ .

Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan III 2025 tumbuh positif dengan pertumbuhan sebesar 4,96% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (5,18%, yoy).

Dari sisi permintaan, pertumbuhan terutama ditopang oleh masih positifnya kinerja Konsumsi Rumah Tangga dan tingginya pertumbuhan Konsumsi Pemerintah. Di sisi lain, kinerja Investasi, Ekspor, Impor, dan Konsumsi LNPRT tertahan, meski masih mencatatkan pertumbuhan positif. Dari sisi sektoral atau lapangan usaha, pertumbuhan terutama bersumber dari LU Informasi dan Komunikasi (Infokom), LU Perdagangan, dan LU Jasa Perusahaan. LU utama lainnya yaitu LU Konstruksi dan LU Industri Pengolahan juga tetap tumbuh positif, sementara LU Jasa Keuangan berkontraksi. Selain LU utama, LU lainnya seperti LU Transportasi dan Pergudangan (Transgud), dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akamamin) tetap tumbuh tinggi dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta.

# Ringkasan Eksekutif

Memasuki triwulan IV 2025, perekonomian Jakarta diperkirakan tumbuh meningkat dibandingkan triwulan III 2025, didorong oleh prakiraan meningkatnya kinerja Konsumsi RT seiring momentum HBKN Natal dan Tahun baru 2026, meningkatnya kinerja Konsumsi Pemerintah seiring prakiraan akselerasi fiskal dalam pemenuhan realisasi APBD dan APBN bagi Kementerian dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta kinerja investasi seiring perilaku *front loading* akselerasi penyelesaian proyek menjelang tutup buku akhir tahun dan masih berlanjutnya investasi untuk proyek-proyek strategis Pemerintah dan swasta yang bersifat multitahun. Dari sisi LU utama, sejalan dengan sisi pengeluaran, pertumbuhan LU Perdagangan juga diperkirakan meningkat dari triwulan sebelumnya, sejalan dengan kinerja Konsumsi RT yang diperkirakan tumbuh meningkat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. APBD-P tahun 2025 mengalami peningkatan dari APBD murni menjadi sekitar Rp91,86 triliun, atau lebih tinggi 10,81% dari APBD-P tahun sebelumnya. Anggaran tersebut terdiri dari Pendapatan Daerah Rp84,45 triliun dan Pembiayaan Daerah Rp7,40 triliun. Pembiayaan Daerah sebesar Rp7,40 triliun tersebut secara rinci terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan sebesar Rp4,43 triliun dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp2,97 triliun.

Sampai dengan triwulan III 2025, secara kumulatif capaian realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 69,91% dari pagu APBD-P 2025, lebih tinggi dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya yang sebesar 67,44% dari pagu APBD-P 2024. Capaian realisasi pendapatan yang lebih tinggi pada periode laporan jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya didukung oleh realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer yang masing-masing sebesar 72,69% dan 65,31% dari pagu APBD-P 2025.

Dari sisi Belanja Daerah, capaian realisasi pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 49,43% dari pagu APBD-P 2025, lebih rendah dari capaian triwulan sama tahun sebelumnya yang sebesar 52,53% dari pagu APBD-P 2024. Realisasi capaian yang lebih rendah disebabkan oleh realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal yang masing-masing sebesar 57,92% dan 20,31% dari pagu APBD-P 2025, lebih rendah dari capaian realisasi pada triwulan sama tahun sebelumnya.

Sementara itu berdasarkan rilis data oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, kinerja APBN regional DKI Jakarta sampai dengan triwulan III 2025 mencapai Rp1.299,89 triliun atau 71,64% dari target. Adapun, capaian tersebut terdiri dari realisasi kinerja Pajak yang menunjukkan tren positif, ditopang oleh PPN Impor. Dari sisi belanja K/L di Jakarta, pada triwulan III 2025 terdapat realisasi sebesar Rp208,68 triliun atau sebesar 28,67% dari pagu, atau secara kumulatif telah mencapai 112,74% dari pagu. Beberapa highlight belanja terbesar menurut kementerian dan lembaga diantaranya adalah (1) Kementerian Pertahanan sebesar Rp21,63 triliun, mayoritas untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin, (2) Badan Gizi Nasional Rp9,07 triliun, mayoritas untuk Kegiatan MBG, (3) Polri sebesar Rp7,78 triliun, mayoritas untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dan (4) Kementerian Kesehatan sebesar Rp6,88 triliun, mayoritas untuk Jaminan Sosial Kesehatan. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Jakarta pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 2,40% (yoy).

# Ringkasan Eksekutif

Inflasi Jakarta tetap terkendali dalam rentang sasaran meskipun lebih tinggi dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 2,07% (yoy). Capaian inflasi ini tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi nasional. Terkendalinya inflasi Jakarta merupakan sinergi dan kolaborasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, utamanya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Berdasarkan komoditasnya, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan III 2025 yaitu tarif air minum PAM, emas perhiasan, daging ayam ras, beras, dan bawang merah. Memasuki triwulan IV 2025, perkembangan inflasi Jakarta pada Oktober 2025 tercatat mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,69% (yoy). Ke depan, inflasi IHK Jakarta diperkirakan tetap terkendali di dalam rentang sasaran 2,5±1% pada 2025.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan laporan yang mengalami perlambatan, laju intermediasi perbankan di DKI Jakarta agak tertahan dengan profil risiko yang tetap terjaga. Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit ditopang oleh kondisi likuiditas bank yang memadai seiring permodalan yang solid serta masih kuatnya pertumbuhan DPK. Bank Indonesia terus menerapkan kebijakan makroprudensial longgar dan akomodatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketahanan bank tetap kuat, ditunjukkan oleh rasio kredit bermasalah yang rendah jauh di bawah *threshold* 5%.

Dari sisi permintaan, sektor korporasi masih menjadi penopang pertumbuhan kredit di triwulan laporan meskipun pertumbuhannya lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Profitabilitas korporasi non-keuangan juga masih pada level tinggi meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya. Kemampuan membayar korporasi tetap kuat tercermin dari meningkatnya *current ratio* dan rendahnya rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loans*) korporasi.

Sejalan dengan terjaganya kinerja sektor korporasi, secara umum kinerja sektor rumah tangga juga membaik meskipun terbatas. Kinerja sektor rumah tangga yang masih berdaya tahan tercermin dari meningkatnya Indeks Keyakinan Konsumen pada level optimis. Kredit sektor rumah tangga tumbuh positif setelah mengalami pertumbuhan negatif sejak akhir tahun 2024. Kenaikan kredit rumah tangga tersebut dipengaruhi oleh kenaikan kredit konsumsi rumah tangga ditopang oleh peningkatan kredit Multiguna, KPR, dan KKB. Risiko kredit rumah tangga masih terjaga dibawah 3% namun perlu menjadi perhatian karena menunjukkan peningkatan. Kredit sektor UMKM meningkat namun dengan risiko kredit yang cenderung meningkat. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta terus melakukan berbagai program untuk mendukung perbaikan produktivitas serta peningkatan kapasitas UMKM baik dari sisi SDM maupun pengembangan usaha.

Pada triwulan III 2025, peredaran uang kartal di DKI Jakarta tercatat mengalami *net outflow*, sementara transaksi pembayaran nontunai terus menguat sejalan dengan perekonomian Jakarta yang tetap tumbuh kuat. Perkembangan nilai transaksi sistem pembayaran pada triwulan III 2025 mengonfirmasi masih kuatnya pertumbuhan ekonomi Jakarta. Hal ini terindikasi dari arus kas yang mencatat *net outflow* dan transaksi nontunai BI-RTGS yang tumbuh meningkat. Selain itu, tren transaksi digital semakin berkembang, seiring peningkatan transaksi QRIS. Sementara transaksi kartu kredit dan kartu debit menurun. Dari sisi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), nilai transaksi jual dan beli valuta asing (dalam Rupiah) mengalami pertumbuhan sebesar 13,19% (yoy) pada triwulan III 2025, melanjutkan tren pertumbuhan positif triwulan sebelumnya sebesar 11,98% (yoy). Dari sisi Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR), tetap mengalami pertumbuhan positif sebesar 7,30% (yoy) meskipun sedikit melambat

# Ringkasan Eksekutif

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 15,77% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan pertumbuhan nilai transaksi *outgoing* (dari DKI Jakarta ke luar negeri) dan domestik (di wilayah DKI Jakarta) yang tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara, transaksi *incoming* (dari luar negeri ke DKI Jakarta) tercatat mengalami perbaikan pertumbuhan meskipun tetap berkontraksi.

Ditengah kinerja ekonomi yang tertahan, serapan tenaga kerja di DKI Jakarta periode Agustus 2025 masih mencatat kenaikan, yang diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran. Berdasarkan status pekerjaan utama, sektor formal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Dari sisi LU, peningkatan serapan tenaga kerja terutama terjadi pada LU Perdagangan Besar dan Eceran. Kemudian, diikuti oleh LU sektor-sektor utama Jakarta lainnya yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, LU Transportasi dan Pergudangan, LU Industri Pengolahan, LU Jasa Lainnya.

Sementara itu, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta juga mengalami penurunan menjadi 4,28% pada Maret 2025, dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 4,30%. Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta juga tercatat lebih rendah dibandingkan Nasional yang pada September 2024 berada pada level 8,47%. Menurunnya tingkat kemiskinan tersebut sejalan dengan upaya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang secara konsisten terus melakukan program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial antara lain melalui program pemberian subsidi pangan dan transportasi serta pemberian bantuan sosial bagi warga penerima manfaat.

Pada 2025, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta diperkirakan masih tetap tumbuh kuat pada kisaran titik tengah 4,6-5,4% (yoy). Dari sisi pengeluaran, meningkatnya perekonomian Jakarta pada 2025 terutama ditopang oleh investasi khususnya investasi bangunan sejalan dengan masih berlangsungnya pembangunan proyek strategis baik Pemerintah maupun swasta yang sudah berjalan dan bersifat multitaluh seperti LRT dan MRT. Selain itu, realisasi investasi juga didorong oleh meningkatnya target pencapaian investasi Jakarta pada 2025 yaitu sebesar 13,38% dari target nasional, meningkat dibandingkan tahun lalu (12,00%). Konsumsi Pemerintah pada 2025 juga diperkirakan tumbuh lebih baik didorong oleh penyaluran berbagai stimulus dan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Ekspor diperkirakan tumbuh meningkat sejalan dengan diversifikasi negara tujuan ekspor Jakarta seperti ke Amerika Latin dan Timur Tengah untuk komoditas otomotif, serta meningkatnya ekspor komoditas utama Jakarta lainnya seperti alas kaki dan perhiasan/permata didorong oleh meningkatnya permintaan. Adapun pertumbuhan komponen lainnya seperti konsumsi RT tetap tumbuh positif meski diperkirakan tidak setinggi tahun sebelumnya. Tetap positifnya pertumbuhan konsumsi RT sejalan dengan adanya beberapa insentif fiskal yang diberikan oleh Pemerintah yaitu antara lain berupa diskon tarif listrik, diskon pajak, dan bantuan pangan. Dari sisi lapangan usaha (LU) perekonomian DKI Jakarta pada 2025 masih akan ditopang oleh pertumbuhan positif 5 (lima) sektor ekonomi utama yaitu perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan. Namun demikian, beberapa risiko yang perlu dicermati yang dapat menahan perbaikan lebih lanjut utamanya yaitu perlambatan ekonomi global, berlanjutnya ketegangan tensi geopolitik, fragmentasi perdagangan serta dinamika kebijakan AS.

Dari sisi harga, inflasi DKI Jakarta pada 2025 diperkirakan akan tetap terkendali pada kisaran titik tengah 2,5±1% (yoy). Prakiraan tersebut terutama didukung oleh implementasi berbagai kebijakan Pemerintah dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, serta penguatan program pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

# Tabel Indikator

INDIKATOR	2022					2023					2024					2025		
	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III
<b>Ekonomi Makro Regional</b>																		
<b>Produk Domestik Regional Bruto (% , yoy)</b>	<b>4,61</b>	<b>5,61</b>	<b>5,93</b>	<b>4,85</b>	<b>5,25</b>	<b>4,95</b>	<b>5,13</b>	<b>4,93</b>	<b>4,85</b>	<b>4,96</b>	<b>4,78</b>	<b>4,90</b>	<b>4,93</b>	<b>5,01</b>	<b>4,90</b>	<b>4,95</b>	<b>5,18</b>	<b>4,96</b>
Berdasarkan Lapangan Usaha:																		
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0,16	3,11	4,38	2,60	2,51	0,07	-10,87	-5,85	1,32	-3,94	9,19	6,98	5,62	-0,43	5,17	0,57	3,19	<b>0,63</b>
2 Pertambangan dan Penggalian	0,45	-5,07	-7,78	-9,34	-5,42	-8,16	-23,33	-12,67	-6,63	-12,75	-11,43	4,52	-6,26	-6,35	-5,27	-3,64	-8,60	<b>-8,14</b>
3 Industri Pengolahan	9,64	6,83	4,95	2,66	5,95	1,58	1,18	2,13	2,54	1,86	-0,53	2,46	1,33	1,35	1,14	1,61	0,98	<b>1,44</b>
4 Pengadaan Listrik dan Gas	-13,27	2,83	-0,20	3,67	-2,38	-7,69	-6,29	-5,19	-10,34	-7,20	-15,17	-19,04	-16,57	-13,80	-16,32	-15,24	-19,09	<b>-11,73</b>
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,35	-0,65	0,93	2,11	0,51	5,36	4,37	5,06	8,68	6,33	5,22	0,59	0,28	-3,84	0,48	-4,93	-3,26	<b>-3,09</b>
6 Konstruksi	0,75	4,80	3,36	-1,81	1,69	0,11	2,36	3,01	4,53	2,50	6,27	6,55	5,65	9,39	6,99	2,61	3,64	<b>3,17</b>
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,87	8,25	9,65	6,41	7,78	5,70	4,67	3,99	3,78	4,52	5,39	6,87	7,99	7,26	6,87	4,35	5,91	<b>5,15</b>
8 Transportasi dan Pergudangan	3,46	1,47	11,82	11,92	7,19	17,43	18,05	13,96	7,76	14,05	6,48	6,15	7,10	8,07	6,96	7,96	9,90	<b>9,06</b>
9 Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	6,14	6,29	13,63	11,26	9,31	8,27	10,49	11,59	8,40	9,69	9,56	7,57	7,31	8,87	8,31	9,64	9,79	<b>9,55</b>
10 Informasi dan Komunikasi	6,17	7,14	6,09	8,39	6,96	7,65	8,26	8,42	5,57	7,45	6,43	4,19	4,27	4,36	4,80	5,93	5,65	<b>6,72</b>
11 Jasa keuangan dan Asuransi	0,57	2,54	-1,01	3,02	1,28	6,04	0,61	4,69	10,24	5,39	2,02	10,99	6,09	2,60	5,36	5,84	4,71	<b>-0,15</b>
12 Real Estate	2,51	2,36	2,45	0,85	2,04	0,92	1,01	0,68	0,37	0,74	1,31	1,35	1,64	1,76	1,51	1,97	2,68	<b>3,48</b>
13 Jasa Perusahaan	3,91	5,53	7,27	6,63	5,84	6,77	8,18	6,06	5,03	6,49	6,57	3,57	3,65	5,05	4,71	6,32	7,62	<b>8,58</b>
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib	-4,01	0,59	5,56	6,25	2,01	0,22	1,72	-1,92	0,02	0,04	14,16	-5,96	0,93	-2,53	1,25	4,64	2,92	<b>5,21</b>
15 Jasa Pendidikan	0,10	-0,52	0,76	-0,76	-0,11	0,33	5,55	-0,79	-0,19	1,20	3,69	0,96	6,97	5,52	4,26	7,19	5,99	<b>7,22</b>
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14,73	15,66	6,51	1,53	9,28	1,44	6,07	6,59	9,27	5,85	9,09	6,71	3,36	2,79	5,41	4,37	3,72	<b>6,02</b>
17 Jasa Lainnya	13,10	15,02	18,28	14,77	15,27	13,16	14,20	11,82	7,55	11,60	3,45	3,87	6,09	8,20	5,42	8,98	8,31	<b>8,29</b>
Berdasarkan Permintaan:																		
1 Konsumsi																		
a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,09	5,12	7,62	5,74	5,64	4,18	5,26	5,49	5,23	5,05	5,25	5,28	5,26	5,14	5,23	5,36	5,13	<b>5,01</b>
b. Pengeluaran Konsumsi LNPR	5,99	6,03	6,68	6,28	6,25	7,95	9,53	6,27	15,43	9,84	19,70	9,69	11,99	6,84	11,82	3,45	4,58	<b>2,42</b>
c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-15,90	-9,79	-9,93	-4,48	-9,41	1,79	6,06	-16,18	-5,04	-3,86	30,30	-5,62	10,81	5,20	8,72	9,75	5,16	<b>20,06</b>
3 PMTB	4,85	5,71	6,37	1,23	4,48	1,32	4,22	4,38	5,17	3,89	4,36	4,66	4,27	7,54	5,20	2,89	5,50	<b>3,67</b>
4 Perubahan Inventori	268,06	-36,83	3,34	72,67	1028,62	-27,79	37,25	209,14	44,75	-8,82	-75,78	-12,18	38,88	38,67	-51,17	90,39	-284,84	<b>-132,41</b>
5 Ekspor	8,54	10,96	17,60	13,19	12,60	11,89	8,93	5,93	4,46	7,67	3,23	7,06	13,40	14,66	9,64	17,72	17,26	<b>8,57</b>
6 Impor	5,63	6,52	13,73	7,87	8,48	7,01	8,19	2,96	3,16	5,25	6,30	5,32	13,50	14,51	10,09	16,44	16,99	<b>7,92</b>
<b>Ekspor</b>																		
- Nilai Ekspor Non Migas (USD Juta)	2,938	2,657	2,934	2,940	11,469	2,799	2,475	2,813	2,899	10,986	2,694	2,856	3,875	4,217	10,786	4,387	3,593	<b>4,570</b>
- Volume Ekspor Non Migas (ribu ton)	779	716	901	924	3,320	849	764	809	922	3,344	820	894	1,032	1,119	1,716	1,016	959	<b>1,170</b>
<b>Impor</b>																		
- Nilai Impor Non Migas (USD Juta)	18,922	18,608	20,187	19,295	77,012	18,439	17,926	18,703	17,868	72,936	16,409	16,597	20,637	20,431	74,074	17,522	19,331	<b>19,544</b>
- Volume Impor Non Migas (ribu ton)	8,218	8,142	8,134	8,271	32,765	8,345	7,831	8,378	8,925	33,479	8,269	8,047	9,541	9,913	35,770	8,226	8,938	<b>9,157</b>
Indeks Harga Konsumen	108,49	109,67	111,50	112,11	112,11	112,83	113,18	113,76	114,67	114,67	104,81	105,10	104,97	105,69	105,69	105,88	105,48	<b>105,85</b>
Laju Inflasi Tahunan (% , yoy)	2,00	2,88	4,61	4,21	4,21	3,69	3,20	2,08	2,28	2,28	2,18	2,23	1,70	1,48	1,48	1,02	2,07	<b>2,16</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia

# Tabel Indikator

INDIKATOR	2022					2023					2024					2025		
	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III
<b>Perbankan</b>																		
Dana Pihak Ketiga (Rp Triliun)	3.849	3.887	3.910	4.321	4.321	4.211	4.234	4.235	4.461	4.461	4.539	4.560	4.505	4.596	4.596	4.742	4.994	5.253
Kredit Lokasi Proyek (Rp Triliun)	1.784	1.949	1.965	2.006	2.006	2.010	2.103	2.193	2.324	2.324	2.401	2.522	2.572	2.690	2.690	2.717	2.817	2.847
- Modal Kerja	990	1.110	1.105	1.120	1.120	1.130	1.186	1.236	1.315	1.315	1.353	1.434	1.461	1.486	1.486	1.469	1.526	1.526
- Investasi	578	615	621	645	645	640	672	703	749	749	783	818	834	915	915	955	995	1.021
- Konsumsi	216	224	238	241	241	240	244	253	260	260	265	270	277	289	289	291	296	301
Pertumbuhan Kredit Lokasi Proyek (% yoy)	4,7	11,4	8,8	14,6	14,6	12,7	8,0	11,6	15,83	15,8	19,41	19,90	17,30	15,76	15,76	13,16	11,69	10,69
- Modal Kerja	9,1	16,3	13,9	15,7	15,7	14,2	6,9	11,9	17,5	17,50	19,6	20,8	18,2	12,9	12,9	8,7	6,4	4,5
- Investasi	-1,9	4,6	-0,4	13,3	13,3	10,7	9,3	13,2	16,0	16,00	22,3	21,6	18,5	22,1	22,1	22,1	21,6	22,4
- Konsumsi	4,4	7,6	13,0	12,5	12,5	11,0	9,2	6,2	7,8	7,80	10,6	10,6	9,7	11,3	11,3	9,8	9,7	8,4
Kredit UMKM Lokasi Proyek (Rp Triliun)	139	143	140	144	144	140	144	146	150	150	149	147	150	155	155	150	154	155
Loan to Deposit Ratio Lokasi Proyek(%)	46,36	50,13	50,25	46,42	46,42	47,75	50,18	50,46	49,68	49,68	52,90	55,31	57,10	58,52	58,52	57,30	56,41	54,20
NPL Gross Lokasi Proyek (%)	1,94	1,70	1,62	1,42	1,42	1,37	1,41	1,45	1,33	1,33	1,34	1,22	1,20	1,14	1,14	1,14	1,08	1,13
<b>Sistem Pembayaran</b>																		
- Volume Total Kartu Kredit (juta)	21,80	16,82	17,56	18,43	18,43	19,07	18,51	19,42	20,88	20,88	20,35	21,20	22,79	25,56	25,56	23,99	24,47	24,25
- Nominal Total Kartu Kredit (Rp triliun)	18,58	15,55	16,94	20,11	20,11	21,10	19,94	19,26	21,20	21,20	19,53	19,50	21,55	23,32	23,32	21,15	21,36	20,79
- Nominal Transaksi E-Commerce (Rp Triliun)	22,20	23,12	25,27	28,48	28,23	21,55	20,59	22,86	24,45	24,45	22,21	19,15	20,71	22,21	22,21	20,84	17,49	15,84
- Jumlah Merchant QRIS (Juta)	3,42	3,60	3,90	4,28	4,28	4,52	4,63	5,03	5,16	5,16	5,28	5,43	5,62	5,78	5,78	6,04	6,17	6,38
- Volume Transaksi UE (Juta)	1.049	1.151	1.391	1.587	2.978	1.631	1.972	2.136	2.311	8.050	2.513	2.811	2.868	3.309	11.501	4.106	4.676	4.573
Nominal Transaksi UE (Rp Triliun)	56	67	90	97	187	103	127	136	151	518	165	190	207	220	782	250	283	271

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia

## BAB 1

# PEREKONOMIAN GLOBAL & NASIONAL

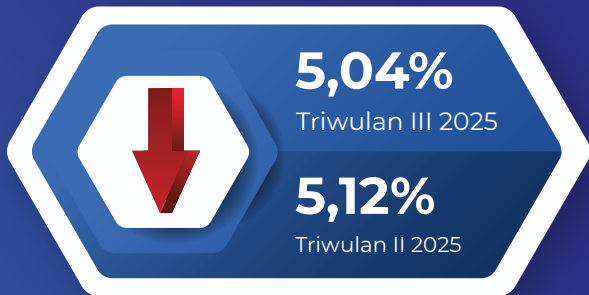
Perekonomian dunia masih dalam tren melambat sebagai dampak kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) yang masih menimbulkan tingginya ketidakpastian. Di pasar keuangan global, probabilitas penurunan kembali *Fed Funds Rate* (FFR) semakin besar sejalan dengan kondisi ketenagakerjaan di AS yang lemah. Sejalan dengan itu, *yield US Treasury* jangka pendek kembali menurun dan indeks mata uang dolar AS (DXY) cenderung melemah. Aliran modal ke *emerging market* (EM) masih berfluktuasi seiring dengan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Secara global, berbagai indikator menunjukkan kebijakan tarif AS memperlemah kinerja perdagangan global, tecermin dari melambatnya ekspor dan impor di sebagian besar negara. AS sendiri kembali mengenakan tambahan tarif kepada sektor farmasi, mebel, dan otomotif sejak 1 Oktober 2025 serta mengumumkan rencana pengenaan tarif tambahan sebesar 100% terhadap produk asal Tiongkok. Di AS, pertumbuhan ekonomi masih lemah sehingga mendorong berlanjutnya penurunan kondisi ketenagakerjaan. Sementara itu, ekonomi Jepang, Eropa, dan Tiongkok belum kuat dipengaruhi oleh belum kuatnya konsumsi rumah tangga, di tengah stimulus fiskal-moneter yang telah dilakukan. Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi dunia 2025 sebesar 3,1%, sedikit di atas prakiraan sebelumnya 3,0%. Namun, perkembangan ini menuntut kewaspadaan dan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi dampak rambatan ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global yang masih tinggi tersebut terhadap perekonomian domestik.

Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan perlu terus didorong agar sesuai dengan kapasitas perekonomian. Pada triwulan III 2025, laju pertumbuhan tercatat 5,04 % (yoy), sedikit dibawah pertumbuhan di triwulan II 2025 sebesar 5,12 % (yoy). Dari domestik, Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan melalui penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi dengan kebijakan Pemerintah, berupa stimulus fiskal dan sektor riil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun pertumbuhan kredit 2025, diperkirakan berada pada batas bawah kisaran 8-11% dengan potensi meningkat pada 2026.

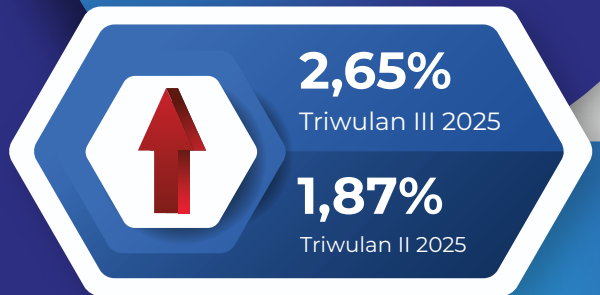
Pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2025 diperkirakan berada sedikit di atas titik tengah kisaran 4,6-5,4% dan meningkat pada 2026. Ketahanan eksternal ekonomi Indonesia juga diperkirakan tetap stabil didukung komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Inflasi tahun 2025 dan 2026 tetap terjaga dalam sasaran  $2,5 \pm 1\%$ .



**Pertumbuhan  
Ekonomi Nasional (yoy)**



**Inflasi  
IHK Nasional (yoy)**



**Capital Adequacy Ratio  
(CAR)**  
Perbankan Nasional



**BI 7-Days  
Reverse Repo Rate**



## A. PEREKONOMIAN GLOBAL<sup>1</sup>

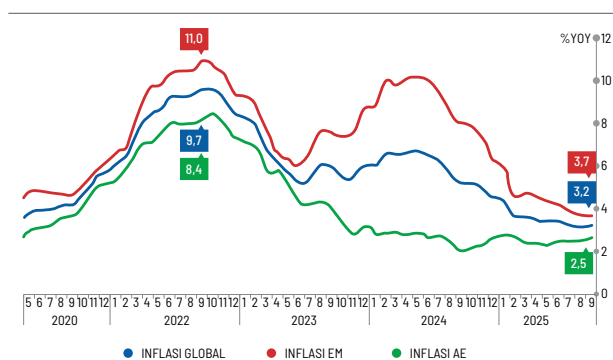
Prospek perekonomian dunia masih dalam tren melambat akibat dampak tarif resiprokal AS dengan ketidakpastian yang tetap tinggi. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi dunia 2025 tetap sekitar 3,1%. Di AS, pertumbuhan ekonomi masih lemah sehingga mendorong berlanjutnya pelemahan kondisi ketenagakerjaan; kondisi ini mendorong probabilitas penurunan kembali *Fed Funds Rate* (FFR) yang semakin besar. Sejalan dengan itu, yield US Treasury jangka pendek kembali menurun dan indeks mata uang dolar AS (DXY) cenderung melemah. Di pasar keuangan global, aliran modal ke *emerging market* (EM) masih berfluktuasi seiring dengan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, menuntut kewaspadaan dan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi dampak rambatan ketidakpastian tersebut terhadap perekonomian domestik.

Meskipun probabilitas penurunan Fed Funds Rate (FFR) semakin besar, sejalan dengan kondisi ketenagakerjaan di AS yang lemah, aliran modal ke negara *emerging market* (EM) masih berfluktuasi seiring dengan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Perkembangan

Tabel 1.1 Tabel Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (% , yoy)

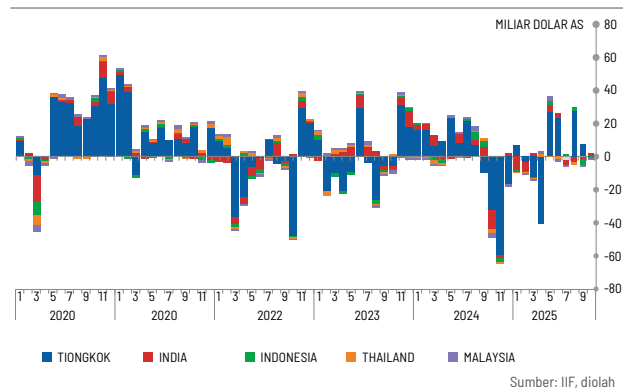
NEGARA	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dunia	-2,8	6,3	3,5	3,3	3,3	3,1
Negara Maju	-4,2	5,6	2,6	1,7	1,8	1,7
Amerika Serikat	-2,8	5,9	1,9	2,5	1,7	2,0
Kawasan Euro	-6,1	5,6	3,4	0,5	0,9	1,3
Jepang	-4,2	2,2	1,0	1,9	0,1	1,0
Negara Berkembang	-1,8	6,9	4,1	4,4	4,3	4,1
Tiongkok	2,2	8,4	3,0	5,2	5,0	4,8
India (Fiscal Year for CF)	-6,6	8,3	6,8	7,7	6,5	6,6
ASEAN-5	-4,4	4,0	5,5	4,1	4,6	4,4
Amerika Latin	-7,0	7,4	4,2	2,3	2,4	1,9
Negara Berkembang Eropa	-1,6	7,3	1,2	3,2	3,4	2,1
Timur Tengah & Asia Tengah	-2,6	4,3	5,4	2,0	2,4	3,4

Sumber: IMF WEO.  
\*Proyeksi Bank Indonesia



Sumber: Bloomberg dan IMF, diolah

Grafik 1.1 Inflasi Global



Grafik 1.2 Aliran Modal ke Negara Berkembang

tersebut menuntut kewaspadaan dan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi dampak rambatan ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global terhadap perekonomian domestik.

## B. PEREKONOMIAN NASIONAL<sup>2</sup>

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi triwulan III 2025 tumbuh sebesar 5,04% (yoy), lebih rendah dari realisasi triwulan sebelumnya sebesar 5,12% (yoy). Penurunan PDB sejalan dengan perlambatan aktivitas domestik khususnya konsumsi rumah tangga dan investasi, meskipun konsumsi pemerintah tumbuh meningkat sebesar 5,49% (yoy). Dari sisi Lapangan Usaha (LU), seluruh LU menunjukkan kinerja positif, kecuali LU Pertambangan. Perlambatan kinerja terjadi di LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi, dan LU Pertambangan. Kinerja LU terkait mobilitas masyarakat (LU Perdagangan, LU Transportasi dan Pergudangan, LU Informasi dan Komunikasi, serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan masih terjaganya mobilitas masyarakat. Kinerja net ekspor juga meningkat seiring perlambatan ekspor yang menjadi 9,91% (yoy), tidak sedalam perlambatan impor yang menjadi 1,18% (yoy).

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan III 2025 tertinggi tercatat di wilayah Jawa, diikuti Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), Sumatera, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), dan Kalimantan. Pertumbuhan ekonomi daerah triwulan III 2025 melambat di mayoritas wilayah, kecuali Balinusra. Perlambatan di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan dipengaruhi kinerja permintaan domestik khususnya investasi, sementara Sulampua akibat perlambatan ekspor.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2025 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%. IHK pada Oktober 2025 mengalami inflasi sebesar 2,86% (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar 2,65% (yoy). Peningkatan inflasi Oktober 2025 terutama disumbang oleh kelompok inti terutama dipengaruhi oleh tekanan harga emas global yang lebih tinggi dari prakiraan dan nilai tukar yang

2 Asesmen lengkap dapat dilihat pada Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2024 dan Tinjauan Kebijakan Moneter Februari 2025

1 Asesmen lengkap dapat dilihat pada Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2024 dan Tinjauan Kebijakan Moneter Februari 2024

**Tabel 1.2** Pertumbuhan Ekonomi Domestik Sisi Pengeluaran

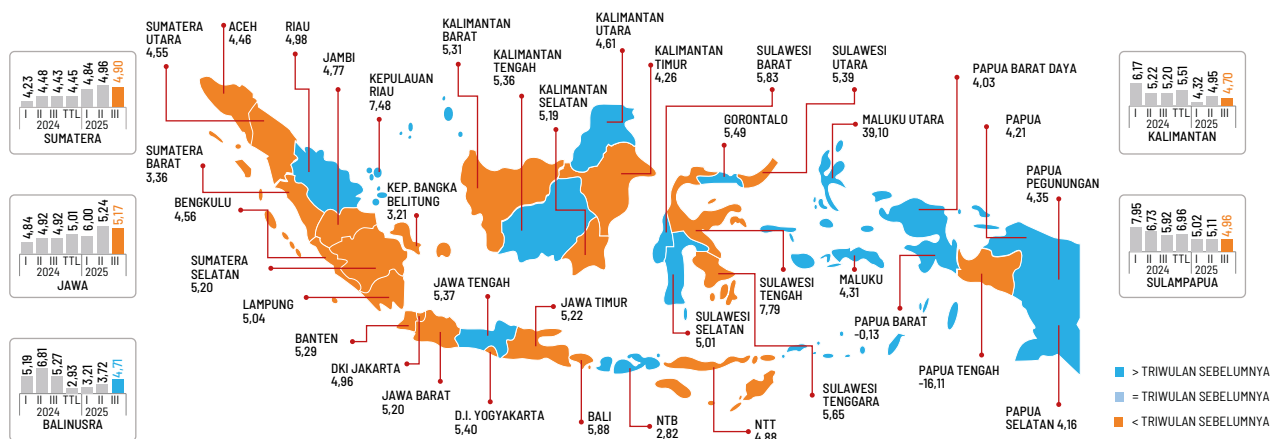
KOMODITAS	2022	2023				2023	2024				2024	2025		
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III
Konsumsi Rumah Tangga	4,94	4,53	5,22	5,05	4,47	4,82	4,91	4,93	4,91	4,98	4,94	4,95	4,97	4,89
Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga	5,66	6,16	8,59	6,18	18,11	9,83	24,29	9,98	11,69	6,06	12,48	3,07	7,82	4,28
Konsumsi Pemerintah	-4,47	3,31	10,47	-3,93	2,81	2,95	19,90	1,42	4,62	4,17	6,61	-1,37	-0,33	5,49
Investasi (PMTDB)	3,87	2,11	4,63	5,77	5,02	4,40	3,79	4,43	5,15	5,03	4,61	2,12	6,99	5,04
Investasi Bangunan	0,91	0,08	3,32	6,31	6,42	4,04	5,46	5,31	6,02	5,26	5,51	1,35	4,89	3,02
Investasi Nonbangunan	12,53	7,93	8,30	4,45	1,60	5,34	-0,64	2,08	2,98	4,40	2,23	4,32	12,93	10,34
Ekspor	16,23	11,74	-2,91	-3,91	1,64	1,32	0,50	8,28	9,09	7,63	6,51	6,46	10,67	9,91
Impor	15,00	4,15	-3,23	-6,75	-0,15	-1,65	1,77	8,57	11,47	10,36	7,95	4,17	11,65	1,18
<b>PDB</b>	<b>5,31</b>	<b>5,04</b>	<b>5,17</b>	<b>4,94</b>	<b>5,04</b>	<b>5,04</b>	<b>5,11</b>	<b>5,05</b>	<b>4,95</b>	<b>5,02</b>	<b>5,03</b>	<b>4,87</b>	<b>5,12</b>	<b>5,04</b>

Sumber: BPS, diolah

**Tabel 1.3** Pertumbuhan Ekonomi Domestik Sisi Lapangan Usaha

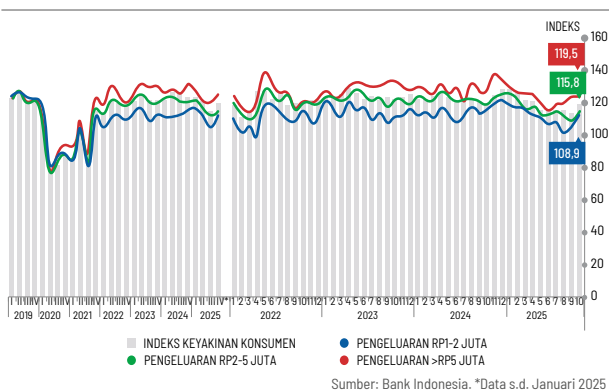
KOMODITAS	2022	2023				2023	2024				2024	2025		
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,25	0,44	2,03	1,49	1,13	1,31	-3,54	3,25	1,69	0,71	0,67	10,52	1,65	4,93
Pertambangan dan Penggalian	4,38	4,92	5,01	6,95	7,46	6,12	9,31	3,17	3,46	3,95	4,90	-1,23	2,03	-1,98
Industri Pengolahan	4,89	4,43	4,88	5,19	4,07	4,61	4,13	3,95	4,72	4,89	4,43	4,55	5,68	5,54
Pengadaan Listrik dan Gas	6,61	2,67	3,15	5,06	8,68	4,91	5,35	5,39	5,02	3,42	4,77	5,11	0,90	2,66
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,23	5,70	4,78	4,48	4,66	4,90	4,44	0,84	0,03	1,06	1,56	0,18	0,82	3,32
Konstruksi	2,01	0,32	5,23	6,39	7,68	4,91	7,59	7,29	7,48	5,81	7,02	2,18	4,98	4,21
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,53	4,94	5,30	5,10	4,09	4,85	4,58	4,85	4,82	5,19	4,86	5,03	5,37	5,49
Transportasi dan Pergudangan	19,87	15,93	15,28	14,74	10,33	13,96	8,66	9,56	8,64	7,92	8,69	9,01	8,52	8,62
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,94	11,54	9,91	10,93	7,88	10,00	9,34	10,15	8,32	6,61	8,56	5,75	8,04	8,41
Informasi dan Komunikasi	7,73	7,11	8,03	8,51	6,74	7,59	8,41	7,66	6,82	7,45	7,57	7,72	7,92	9,65
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,93	4,45	2,86	5,24	6,56	4,77	3,93	7,90	5,49	1,74	4,74	3,98	3,20	0,77
Real Estat	1,72	0,37	0,96	2,21	2,18	1,43	2,54	2,16	2,32	2,97	2,50	2,94	3,71	3,95
Jasa Perusahaan	8,77	6,37	9,59	9,37	7,62	8,24	9,63	7,96	7,93	8,08	8,38	9,27	9,31	9,94
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,52	2,13	8,18	-6,24	1,63	1,51	18,89	2,81	3,94	1,16	6,40	4,79	4,69	4,33
Jasa Pendidikan	0,55	1,02	5,42	-2,09	2,63	1,77	7,43	2,44	2,56	2,95	3,75	5,04	1,40	10,59
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,75	4,77	8,27	2,92	3,09	4,67	11,65	8,57	7,65	5,20	8,11	5,78	3,80	6,83
Jasa lainnya	9,47	8,90	11,89	11,14	10,15	10,52	8,92	8,85	9,95	11,36	9,80	9,84	11,31	9,92
<b>PDB</b>	<b>5,31</b>	<b>5,04</b>	<b>5,17</b>	<b>4,94</b>	<b>5,04</b>	<b>5,05</b>	<b>5,11</b>	<b>5,05</b>	<b>4,95</b>	<b>5,02</b>	<b>5,03</b>	<b>4,87</b>	<b>5,12</b>	<b>5,04</b>

Sumber: BPS, diolah

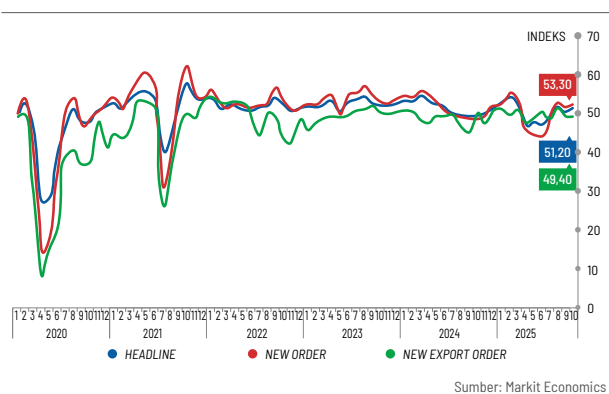


Sumber: BPS, diolah

**Gambar 1.1** Peta Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Triwulan III 2025 (% yoy)



Grafik 1.3 Indeks Keyakinan Konsumen



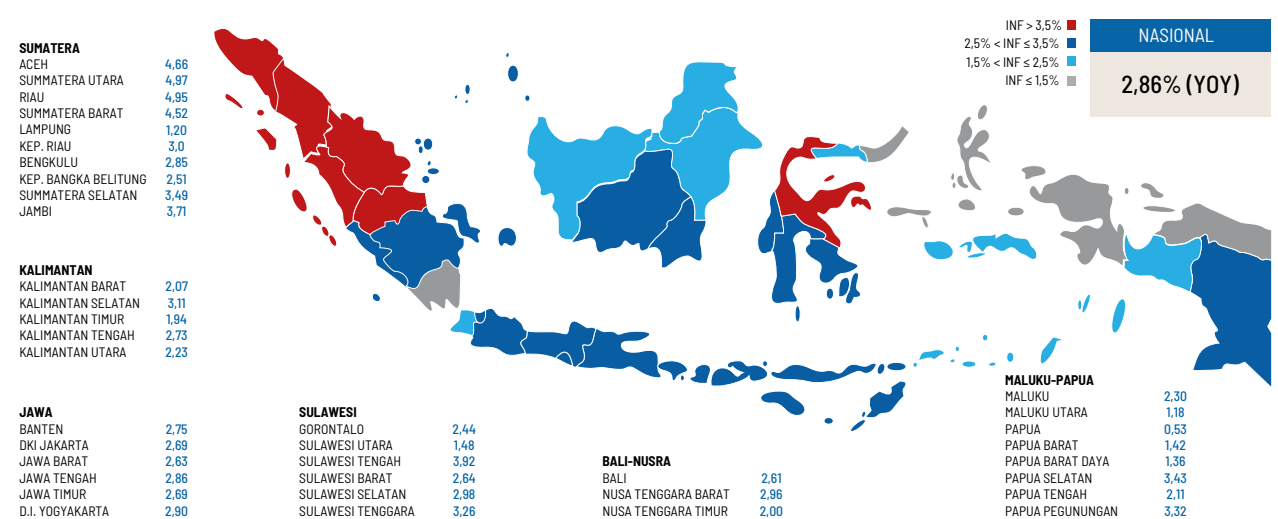
Grafik 1.4 Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur

lebih depresiatif. Inflasi inti tercatat sebesar 2,36% (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 2,19% (yoy), sejalan dengan konsistensi suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI-Rate) untuk mengarahkan ekspektasi inflasi. Kelompok VF mengalami inflasi sebesar 6,59% (yoy), meningkat dari 6,44% (yoy) pada bulan sebelumnya, didorong oleh pasokan yang lebih baik dari prakiraan. Inflasi Oktober 2025 yang tetap

terjaga didukung oleh kebijakan moneter serta sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

Secara spasial, inflasi tahunan IHK Oktober 2025 di mayoritas wilayah relatif terjaga, dengan tekanan inflasi terjadi di wilayah Sumatera dan Sulampua. Inflasi tahunan tertinggi tercatat di Sumatera Utara sebesar 4,97% (yoy), utamanya disebabkan inflasi cabai merah, emas perhiasan, daging dan telur ayam ras. Sementara itu, inflasi gabungan kota IHK tahunan terendah tercatat di wilayah Kalimantan sebesar 2,34% (yoy). Sementara dari sektor keuangan, ketahanan perbankan tetap kuat. Permodalan terjaga pada level tinggi, likuiditas tetap memadai, dan risiko kredit masih relatif rendah. Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan pada September 2025 meningkat menjadi sebesar 26,15% sehingga semakin mampu menyerap risiko. Rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) perbankan terjaga rendah sebesar 2,24% (bruto) dan 0,87% (neto) pada September 2025. NPL (bruto) UMKM cenderung meningkat dari 4,46% pada September 2025 menjadi 4,51% pada Oktober 2025. Hasil stress test Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat, ditopang oleh kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko ekonomi global dan domestik yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Oktober 2025 tetap tumbuh positif didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Volume transaksi pembayaran digital mencapai 4,45 miliar transaksi atau tumbuh 31,20% (yoy) pada Oktober 2025 didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital. Volume transaksi aplikasi mobile dan internet masing-masing tumbuh sebesar 2,91% (yoy) dan 12,03% (yoy), termasuk transaksi QRIS yang tumbuh 139,45% (yoy). Kinerja positif tersebut didukung oleh peningkatan jumlah



Gambar 1.2 Peta Inflasi Daerah Bulan September 2025 (% yoy)

pengguna dan *merchant*. Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 446,77 juta transaksi atau tumbuh 31,96% (yoy) dengan nilai transaksi mencapai Rp1.115,09 triliun pada Oktober 2025. Volume transaksi nilai besar yang diproses melalui Sistem BI-RTGS tercatat sebanyak 0,99 juta transaksi, dengan nilai sebesar Rp22.524,61 triliun pada Oktober 2025. Sementara dari sisi pengelolaan uang Rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 13,37% (yoy) menjadi Rp1.213,76 triliun pada Oktober 2025.

Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Infrastruktur yang stabil tecermin pada penyelenggaraan SPBI dan sistem pembayaran industri yang lancar dan andal serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai pada Oktober 2025. Struktur industri yang sehat tergambar pada interkoneksi antarpelaku dalam sistem pembayaran yang terus menguat dan diikuti oleh ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) yang meluas. Perluasan adopsi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) mendukung penguatan interkoneksi, tecermin dari transaksi pembayaran berbasis SNAP yang terus meningkat. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memastikan keamanan dan keandalan infrastruktur SPBI, baik ritel maupun wholesale, serta infrastruktur sistem pembayaran industri. Selain itu, struktur industri sistem pembayaran akan terus diperkuat, khususnya pada aspek manajemen risiko dan keandalan infrastruktur teknologi pelaku industri. Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).

## C. BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18–19 November 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50%. Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan jangka pendek pada stabilisasi nilai tukar Rupiah dan menarik aliran masuk investasi portofolio asing dari dampak meningkatnya ketidakpastian global, dengan tetap memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga BI-Rate lebih lanjut sejalan dengan prakiraan inflasi 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5±1%, serta perlunya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pelonggaran kebijakan makroprudensial diperkuat dengan meningkatkan efektivitas implementasi pemberian likuiditas kepada perbankan dalam mempercepat penurunan suku bunga dan kenaikan pertumbuhan kredit/pembiayaan ke sektor riil, khususnya sektor-sektor prioritas Pemerintah. Kebijakan sistem pembayaran tetap

diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan peningkatan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran.

Sinergi antara kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran tersebut akan diwujudkan melalui langkah-langkah berikut:

1. Penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi baik transaksi *Non-Deliverable Forward* (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF) di pasar domestik. Strategi ini disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
2. Penguatan strategi operasi moneter pro-market dalam mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah dan memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter dengan:
  - a. mengelola struktur suku bunga instrumen moneter dan swap valas untuk menjaga daya tarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik;
  - b. menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur untuk mengelola kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan;
  - c. memperluas instrumen operasi moneter valuta asing dengan instrumen *spot* dan *swap* dalam valuta Chinese Yuan (CNY) dan Japanese Yen (JPY) terhadap Rupiah yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valas.
3. Mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing dalam memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter dan mendukung pembiayaan perekonomian dengan:
  - a. memperkuat efektivitas penerbitan BI-FRN (*Floating Rate Note*) dan pengembangan *Overnight Index Swap* (OIS) tenor di atas overnight untuk membentuk struktur suku bunga yang efisien di pasar uang;
  - b. memperkuat peran dealer utama untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi *repurchase agreement* (repo) antarpelaku pasar melalui *Central Counterparty* (CCP);
  - c. mengembangkan transaksi pasar uang dan pasar valas domestik dengan instrumen *spot*, *forward*, dan *swap* dalam valuta Chinese Yuan (CNY) dan Japanese Yen (JPY) terhadap Rupiah untuk mendukung penguatan Local Currency Transaction (LCT).
4. Penguatan implementasi pelonggaran Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) melalui pemberian insentif likuiditas kepada perbankan dalam mempercepat penurunan suku bunga (*interest-rate channel*) dan kenaikan pertumbuhan kredit/pembiayaan (*lending channel*) ke sektor-sektor prioritas Pemerintah;

5. Penguatan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM);
6. Akselerasi akseptasi pembayaran digital melalui perluasan literasi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), *merchant* dan masyarakat terkait QRIS Tap, penguatan implementasi QRIS Antarnegara Indonesia-Tiongkok dan Indonesia-Korea Selatan melalui pelaksanaan *sandboxing*, implementasi program Kapasitas dan Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (KATALIS P2DD) untuk percepatan digitalisasi Pemerintah Daerah;
7. Penataan struktur industri sistem pembayaran melalui reformasi pengaturan untuk memperkuat aspek manajemen risiko dan infrastruktur teknologi dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.

Bank Indonesia terus memperluas kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Bank Indonesia juga terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah diperkuat untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah.



## BAB 2

# EKONOMI MAKRO REGIONAL

Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan III 2025 tumbuh positif dengan pertumbuhan sebesar 4,96% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (5,18%, yoy).

Dari sisi permintaan, pertumbuhan terutama ditopang oleh masih positifnya kinerja Konsumsi Rumah Tangga dan tingginya pertumbuhan Konsumsi Pemerintah. Di sisi lain, kinerja Investasi, Ekspor, Impor, dan Konsumsi LNPRT tertahan, meski masih mencatatkan pertumbuhan positif. Dari sisi sektoral atau lapangan usaha, pertumbuhan terutama bersumber dari LU Informasi dan Komunikasi (Infokom), LU Perdagangan, dan LU Jasa Perusahaan. LU utama lainnya yaitu LU Konstruksi dan LU Industri Pengolahan juga tetap tumbuh positif, sementara LU Jasa Keuangan berkontraksi. Selain LU utama, LU lainnya seperti LU Transportasi dan Pergudangan (Transgud), dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akamamin) tetap tumbuh tinggi dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta.

Memasuki triwulan IV 2025, perekonomian Jakarta diperkirakan tumbuh meningkat dibandingkan triwulan III 2025, didorong oleh prakiraan meningkatnya kinerja Konsumsi RT seiring momentum HBKN Natal dan Tahun baru 2026, meningkatnya kinerja Konsumsi Pemerintah seiring prakiraan akselerasi fiskal dalam pemenuhan realisasi APBD dan APBN bagi Kementerian dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta kinerja investasi seiring perilaku front loading akselerasi penyelesaian proyek menjelang tutup buku akhir tahun dan masih berlanjutnya investasi untuk proyek-proyek strategis Pemerintah dan swasta yang bersifat multitalahun. Dari sisi LU utama, sejalan dengan sisi pengeluaran, pertumbuhan LU Perdagangan juga diperkirakan meningkat dari triwulan sebelumnya, sejalan dengan kinerja Konsumsi RT yang diperkirakan tumbuh meningkat.



### Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta (yoy)



**4,96%**  
Triwulan III 2025

**5,18%**  
Triwulan II 2025

### Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (yoy)



**5,01%**  
Triwulan III 2025

**5,13%**  
Triwulan II 2025

### Pertumbuhan Investasi (yoy)



**3,67%**  
Triwulan III 2025

**5,50%**  
Triwulan II 2025

### Pertumbuhan Ekspor (yoy)

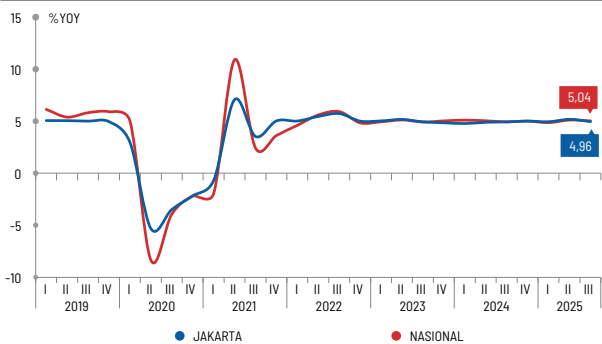


**8,57%**  
Triwulan III 2025

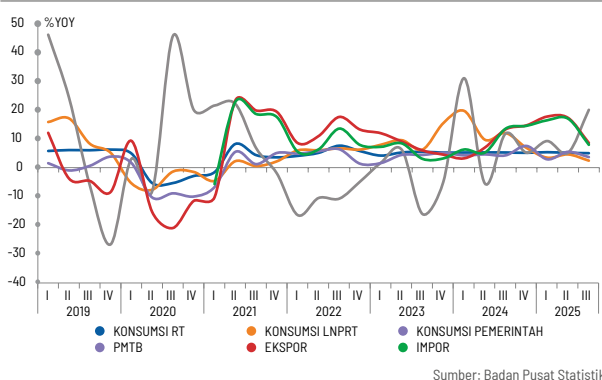
**17,26%**  
Triwulan II 2025

## A. PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN III 2025

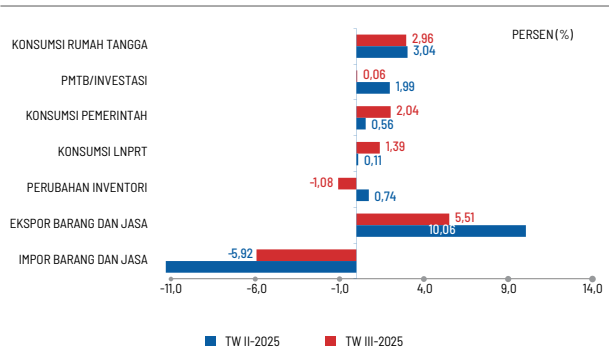
Di tengah tingginya ketidakpastian serta dinamika kondisi ekonomi global dan domestik, perekonomian Jakarta pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 4,96% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (5,18% yoy)(Grafik 2.1). Dari sisi permintaan, pertumbuhan terutama ditopang oleh masih positifnya kinerja Konsumsi Rumah Tangga dan tingginya pertumbuhan Konsumsi Pemerintah. Di sisi lain, kinerja Investasi, Ekspor, Impor, dan Konsumsi LNPRT tertahan, meski masih mencatatkan pertumbuhan positif. Dari sisi Lapangan Usaha (LU) utama, pertumbuhan terutama didorong oleh LU Infokom, LU Perdagangan, dan LU Jasa Perusahaan. LU Industri Pengolahan juga mengalami peningkatan kinerja pada triwulan III 2025 meskipun dengan kontribusi yang relatif rendah. Di sisi lain, LU utama lainnya seperti Konstruksi dan Jasa Keuangan tumbuh melambat pada triwulan III 2025. Pertumbuhan ekonomi Jakarta yang termoderasi juga sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional. Adapun, pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 5,04% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (5,12%, yoy).



Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan DKI Jakarta Triwulanan



Grafik 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Triwulan III 2025 Sisi Pengeluaran



Grafik 2.3 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Triwulan III 2025 Sisi Pengeluaran

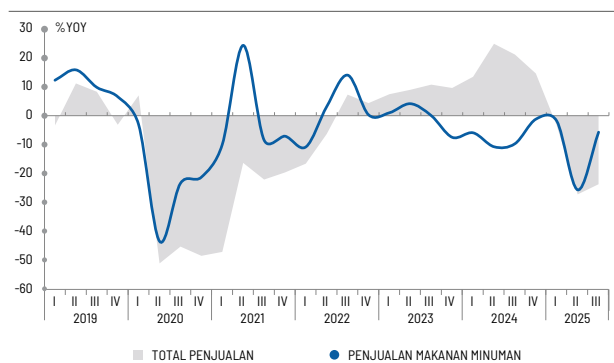
### Komponen Pengeluaran (Permintaan)

Dari sisi pengeluaran, perekonomian Jakarta yang masih tumbuh positif pada triwulan III 2025 terutama ditopang oleh kinerja Konsumsi Rumah Tangga (RT) dan Konsumsi Pemerintah. Konsumsi RT dengan pangsa 59,14% tetap tumbuh 5,01% (yoy) meski tidak setinggi angka pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Adapun, Konsumsi RT memberikan kontribusi 2,96% (yoy) terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta triwulan III 2025 (grafik 2.3). Selanjutnya, dengan pangsa 11,61%, Konsumsi Pemerintah mencatatkan pertumbuhan tinggi sebesar 20,06% (yoy) pada triwulan III 2025 dan berkontribusi sebesar 2,04% (yoy). Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau Investasi dengan pangsa 37,51% juga tetap tumbuh positif 3,67% (yoy) dan memberikan kontribusi sebesar 1,39% (yoy). Adapun Konsumsi LNPRT tumbuh 2,42% (yoy) dengan kontribusi 0,06% (yoy) pada triwulan III 2025. Dari sisi eksternal, dampak dari perang tarif dagang Amerika Serikat mempengaruhi kinerja ekspor DKI Jakarta yang tumbuh melambat dari 17,26% (yoy) pada triwulan II 2025, menjadi 8,57% (yoy) pada triwulan III 2025. Adapun ekspor memegang pangsa 66,57% dan menyumbang 5,51% (yoy). Sejalan dengan kinerja ekspor, impor Jakarta pada triwulan III 2025 juga tumbuh 5,92% (yoy), melambat dari triwulan II 2025 disebabkan perlambatan impor barang modal. Adapun impor memegang pangsa 76,86% dan menyumbang -5,92% (yoy) terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta triwulan III 2025.

### Konsumsi Rumah Tangga (RT)

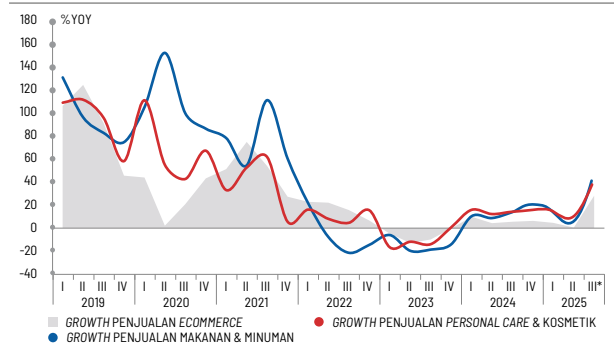
Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan III 2025. Konsumsi RT pada triwulan III 2025 tetap tumbuh 5,01% (yoy) dengan kontribusi sebesar 2,96% (yoy), meski sedikit melambat dari triwulan sebelumnya (5,13%; yoy) (Grafik 2.2). Perlambatan diperkirakan terkait dengan berkurangnya mobilitas masyarakat setelah periode HBKN di triwulan sebelumnya dan berakhirnya masa libur sekolah. Masih tetap tingginya kinerja Konsumsi RT didukung oleh konsumsi makanan dan minuman selain restoran, seperti bahan makanan untuk memasak, roti, biskuit, buah, hingga konsumsi produk *personal care* dan kosmetik yang masih meningkat. Hal ini tercermin dari Indeks Penjualan Eceran Jakarta yang pada triwulan III 2025 terkontraksi 23,67% (yoy), membaik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 27,18% (yoy). Perbaikan ini salah satunya

didukung oleh indeks penjualan makanan dan minuman yang juga membaik, dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 25,59% (yoy), menjadi terkontraksi 18,33% (yoy) di triwulan III 2025 (Grafik 2.4). Lebih lanjut, penjualan e-commerce di Jakarta untuk komponen makanan dan minuman pada triwulan III 2025 juga mencatatkan pertumbuhan tinggi mencapai 42,10% (yoy) dari triwulan sebelumnya (3,41%; yoy). Penjualan *personal care* dan kosmetik juga tumbuh tinggi 36,25% (yoy) dari triwulan sebelumnya (8,11%;yoy) (Grafik 2.5). Selain itu, Indeks Keyakinan Konsumen Jakarta pada triwulan III 2025 juga mencatatkan peningkatan menjadi 148,40 dari triwulan sebelumnya yang sebesar 145,57. Peningkatan ini didukung oleh seluruh komponennya, baik Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini yang naik dari triwulan sebelumnya yang sebesar 134,77 menjadi 135,50, serta Indeks Ekspektasi Konsumen yang juga naik dari 156,40 di triwulan sebelumnya menjadi 161,27 (Grafik 2.6).



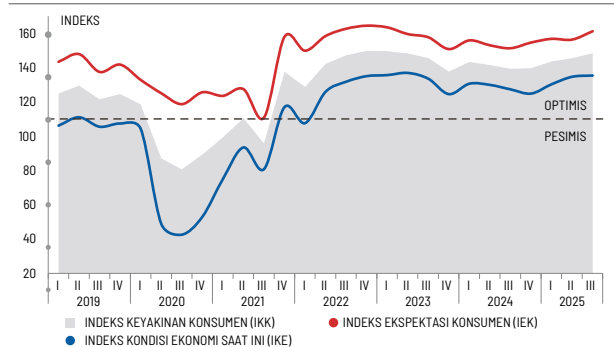
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 2.4 Perkembangan Indeks Penjualan Eceran



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2.5 Perkembangan Penjualan E-Commerce Jakarta

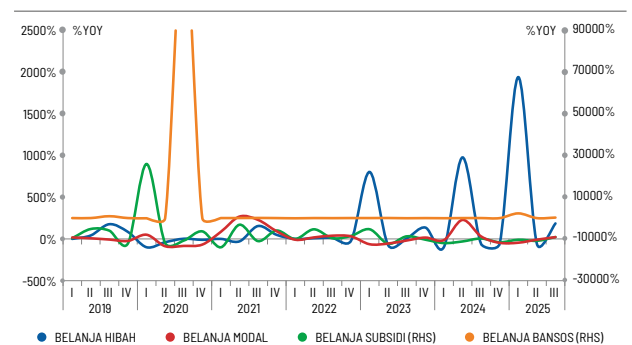


Sumber: BI, diolah

Grafik 2.6 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen Jakarta

## Konsumsi Pemerintah

**Konsumsi Pemerintah tumbuh tinggi dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Jakarta di triwulan III 2025.** Dengan kontribusi 2,04% (yoy), Konsumsi Pemerintah mencatatkan pertumbuhan tinggi sebesar 20,06% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,16% (yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh realisasi belanja pegawai dari APBN, belanja barang dan jasa dari APBN dan APBD, hingga belanja bansos APBD dalam bentuk barang pada triwulan III 2025. Hal ini tercermin dari belanja Bansos APBD yang pada triwulan III 2025 tumbuh tinggi 228,98% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 27,24% (yoy). Belanja barang dan jasa juga tetap tumbuh positif 10,83% (yoy) pada triwulan laporan, meski lebih rendah dari triwulan sebelumnya (19,65%; yoy)(Grafik 2.7). Selain itu, Belanja Modal APBD juga tumbuh 20,95% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan kontraksi 9,51% (yoy). Peningkatan utamanya didorong oleh belanja modal tanah yang tumbuh tinggi 400,45% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 93,23% (yoy). Selanjutnya, dari sisi belanja K/L di Jakarta, berdasarkan data dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) DKI Jakarta, pada triwulan III 2025 sudah mencapai Rp540,83 triliun atau 68,71% dari pagu, tumbuh 17,38% (yoy). Secara lebih rinci, belanja tersebut terdiri dari (1) Kementerian Pertahanan sebesar Rp21,63 triliun, mayoritas untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin; (2) Badan Gizi Nasional Rp9,07 triliun, mayoritas untuk Kegiatan MBG; (3) Polri sebesar Rp7,78 triliun, mayoritas untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin; dan (4) Kementerian Kesehatan sebesar Rp 6,88 triliun, mayoritas untuk Jaminan Sosial Kesehatan. Dari sisi belanja non K/L telah mencapai Rp789,16 triliun atau 70,75% dari pagu, di antaranya untuk Program Pengelolaan Subsidi sebesar Rp26,60 triliun dalam bentuk Subsidi Energi BBM, Subsidi Non BBM, dan Subsidi Bunga.



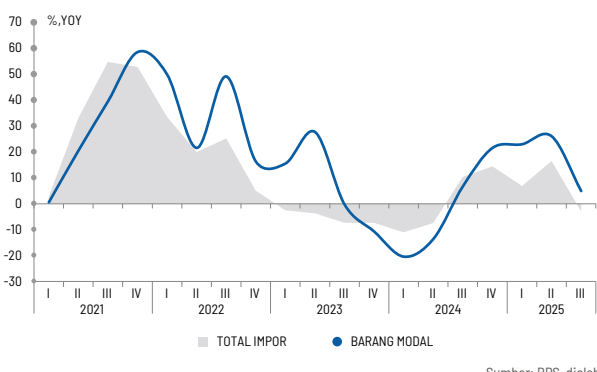
Sumber: BPKD Jakarta, diolah

Grafik 2.7 Realisasi Belanja Utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (APBD)

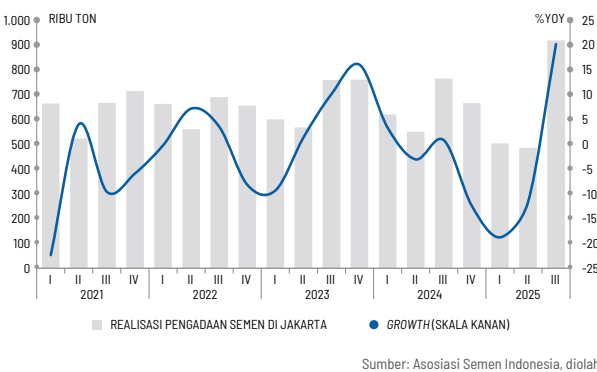
## Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

**Investasi tetap tumbuh positif meski melambat dari triwulan sebelumnya.** Pada triwulan III 2025, Investasi tumbuh 3,67% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya (5,05%; yoy). Adapun, Investasi memberikan kontribusi sebesar 1,39% (yoy) terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan III 2025. Melambatnya kinerja investasi disebabkan oleh perlambatan kinerja investasi non-bangunan, hal ini

seiring masih tingginya ketidakpastian ekonomi yang menyebabkan investor cenderung *wait and see*, serta menahan ekspansi bisnisnya. Kinerja Investasi yang melambat tercermin dari nilai impor barang modal yang pada triwulan III 2025 tumbuh melambat menjadi 4,87% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 26,01% (yoy) (Grafik 2.8). Kendati demikian, perlambatan lebih lanjut tertahan oleh kinerja investasi bangunan yang tetap tumbuh, seiring masih terus berlanjutnya berbagai proyek strategis pemerintah maupun swasta yang bersifat *multiyears* di Jakarta. Hal ini salah satunya tercermin dari realisasi pengadaan semen di Jakarta pada triwulan III 2025 yang tumbuh tinggi 20,10% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi 11,76% (yoy) (Grafik 2.9).



Grafik 2.8 Perkembangan Nilai Impor Barang Modal Jakarta

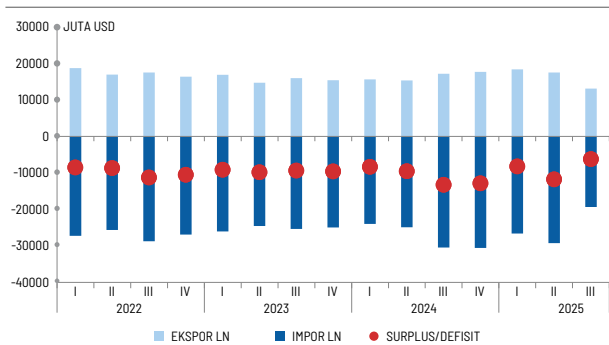


Grafik 2.9 Perkembangan Realisasi Pengadaan Semen di Jakarta

### Net Ekspor

Pada triwulan III 2025, secara keseluruhan Net Ekspor DKI Jakarta tercatat defisit Rp57,95 triliun, lebih dalam dibandingkan defisit pada triwulan sebelumnya yang sebesar Rp51,01 triliun (Grafik 2.10). Dari sisi neraca perdagangan luar negeri, Jakarta mencatatkan defisit Net Ekspor USD6,25 miliar pada triwulan III 2025. Defisit tersebut lebih rendah dibandingkan defisit neraca perdagangan pada triwulan sebelumnya yang sebesar USD11,79 miliar. Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya, ekspor luar negeri melalui Jakarta mengalami kontraksi 23,65% (yoy) pada triwulan III 2025, berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 14,01% (yoy). Sama halnya dengan kinerja

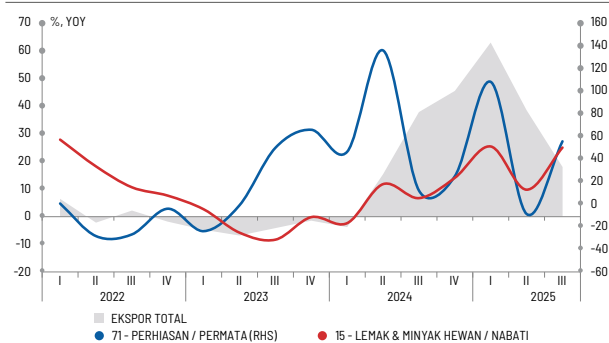
Ekspor, kinerja Impor luar negeri juga terkontraksi 36,45% (yoy), dari periode sebelumnya yang tumbuh 17,56% (yoy).



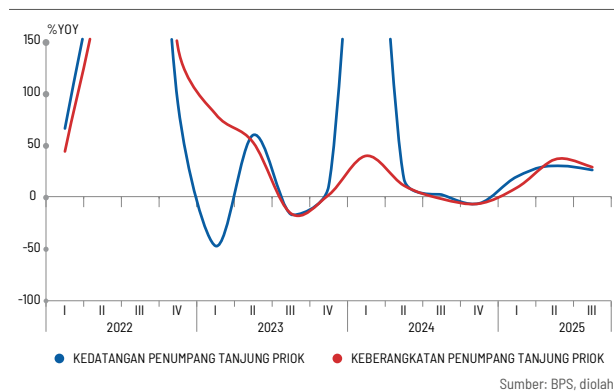
Grafik 2.10 Neraca Perdagangan Luar Negeri DKI Jakarta

### Ekspor

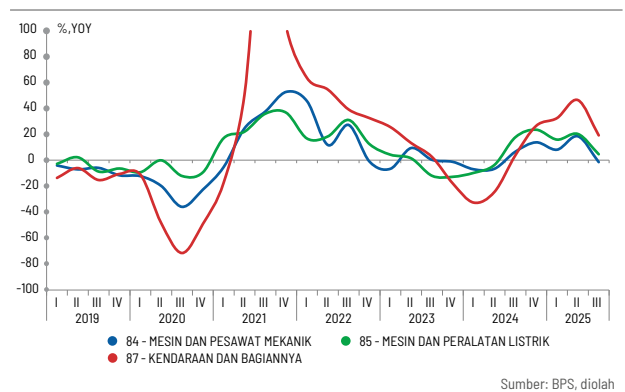
Ditengah gejala perdagangan global sebagai dampak tarif perdagangan AS, ekspor tetap tumbuh meski melambat dari triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2025, Ekspor tumbuh 8,57% (yoy), tetap positif meski melambat dari triwulan sebelumnya (17,26%; yoy). Masih tetap positifnya kinerja Ekspor didukung oleh peningkatan ekspor beberapa komoditas unggulan Jakarta yakni, perhiasan/permata dan lemak dan minyak hewan/nabati. Ekspor perhiasan/permata pada triwulan III 2025 tumbuh tinggi sebesar 55,42% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 8,67% (yoy). Selanjutnya, ekspor lemak dan minyak hewan/nabati tumbuh 49,91% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 12,75% (yoy) (Grafik 2.11). Dari sisi negara utama, peningkatan ekspor terdapat pada ekspor ke negara Tiongkok dan Singapura. Lebih lanjut, dari sisi ekspor jasa, pada triwulan III 2025 mengalami perlambatan, utamanya pada kategori transportasi dan perjalanan (jasa travel). Hal ini tercermin dari pergerakan penumpang dalam negeri dari Bandara Halim Perdanakusuma yang pada triwulan III 2025 terkontraksi 23,99% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 2,71% (yoy). Selain itu, jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang di Pelabuhan Tanjung Priok juga mencatatkan penurunan dengan masing-masing tumbuh 24,11% (yoy) dan 27,79% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang masing-masing tumbuh 27,72% (yoy) dan 35,39% (yoy) (Grafik 2.12).



Grafik 2.11 Perkembangan Ekspor HS 71 dan HS 15 Jakarta



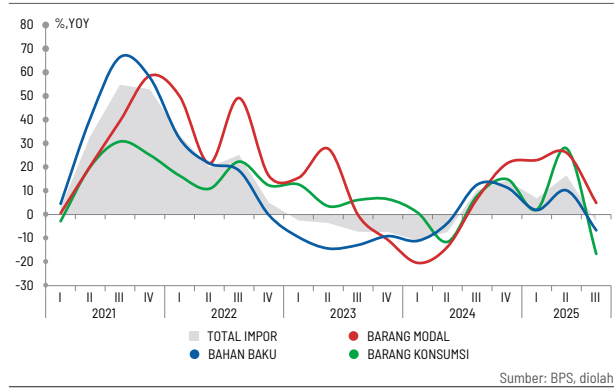
Grafik 2.12 Perkembangan Kedatangan dan Keberangkatan Penumpang Tj. Priok  
Sumber: BPS, diolah



Grafik 2.14 Perkembangan Nilai Impor HS 84, HS 85, dan HS 87 Jakarta  
Sumber: BPS, diolah

## Impor

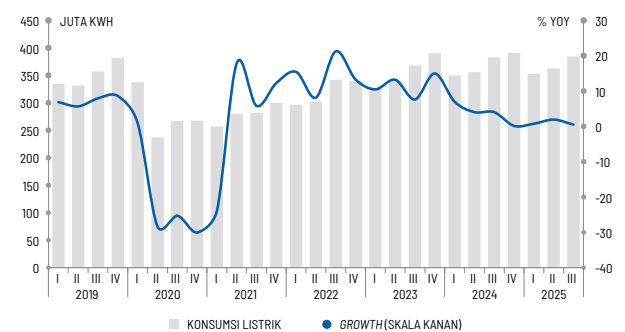
Sejalan dengan kinerja Ekspor, Impor juga tumbuh melambat pada triwulan III 2025. Kinerja Impor Jakarta pada triwulan III 2025 tumbuh melambat menjadi sebesar 7,92% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 16,99% (yoy). Melambatnya kinerja Impor tercermin dari seluruh komponennya. Impor Barang Konsumsi dan Bahan Baku masing-masing terkontraksi 16,60% (yoy) dan 6,70% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan masing-masing sebesar 27,88% (yoy) dan 10,13% (yoy). Dari sisi impor Barang Modal juga tumbuh melambat menjadi sebesar 4,87% (yoy) pada triwulan III 2025, dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 26,01% (yoy) (Grafik 2.13). Dari perkembangan impor komoditas, 3 (tiga) komoditas utama impor Jakarta yakni mesin dan pesawat mekanik (HS-84), mesin dan peralatan listrik (HS-85), hingga kendaraan dan bagiannya (HS-87) mengalami perlambatan dengan masing-masing terkontraksi 1,51% (yoy), tumbuh 4,2% (yoy), dan 19,06% (yoy), dari triwulan sebelumnya yang masing-masing tumbuh 18,36% (yoy), 20,14% (yoy), dan 46,22% (yoy) (Grafik 2.14).



Grafik 2.13 Perkembangan Nilai Impor Barang Konsumsi, Barang Modal, dan Bahan Baku Jakarta  
Sumber: BPS, diolah

## Konsumsi LNPRT

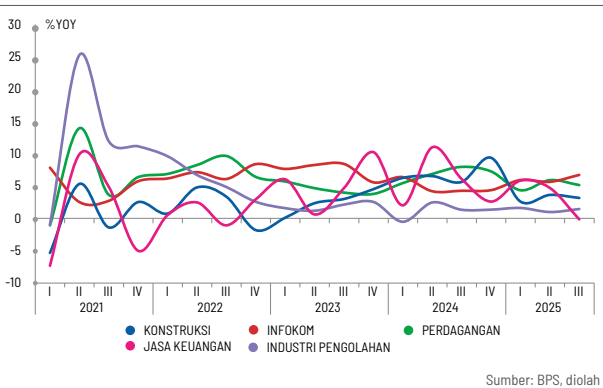
Konsumsi LNPRT tumbuh melambat. Konsumsi LNPRT pada triwulan III 2025 tumbuh 2,27% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya (2,36%; yoy) (Grafik 2.2). Perlambatan seiring tidak adanya kegiatan perayaan hari besar keagamaan pada periode triwulan III 2025. Perlambatan kinerja Konsumsi LNPRT tercermin salah satunya dari pertumbuhan konsumsi listrik sosial pada triwulan III 2025 yang sebesar 0,49% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,89% (yoy) (Grafik 2.15).



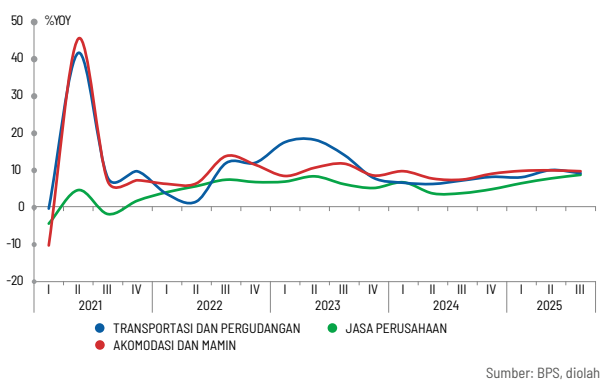
Grafik 2.15 Konsumsi Listrik Kategori Sosial di Jakarta  
Sumber: PLN, diolah

## Komponen Lapangan Usaha (Penawaran)

Dari sisi Lapangan Usaha utama DKI Jakarta, pertumbuhan ekonomi di triwulan III 2025 terutama bersumber dari LU Informasi dan Komunikasi (Infokom), LU Perdagangan, dan LU Jasa Perusahaan. Pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh LU utama lainnya, yaitu LU Jasa Konstruksi dan LU Industri Pengolahan yang tetap tumbuh positif. Adapun pada LU Jasa Keuangan, di triwulan laporan mengalami kontraksi pertumbuhan. Selain 5 (lima) LU utama, LU lainnya seperti LU Transportasi dan Pergudangan (Transgud) dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akamamin) tetap tumbuh tinggi dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta (Grafik 2.16 dan 2.17). Pada triwulan III 2025, LU Perdagangan masih menjadi penopang utama perekonomian Jakarta, disusul oleh LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi, LU Jasa Keuangan, dan LU Infokom dengan porsi masing-masing sebesar 18,31%, 11,24%, 10,77%, 10,21%, dan 9,45% (Grafik 2.16).

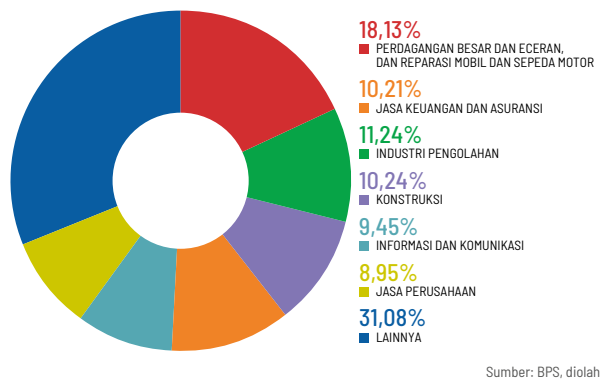


Grafik 2.16 Perkembangan Pertumbuhan Lima LU Utama

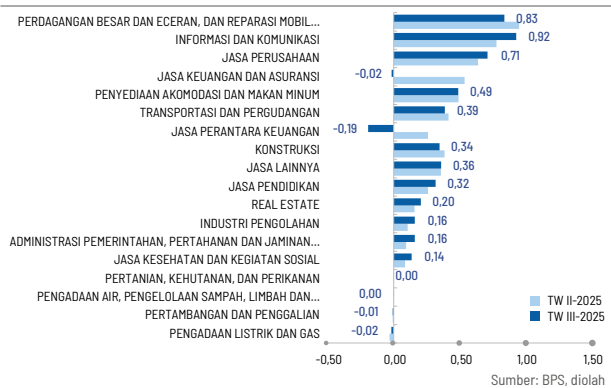


Grafik 2.17 Perkembangan Pertumbuhan LU Akmamin, LU Transgud, dan LU Jasa Perusahaan

LU utama tersebut di atas juga memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan laporan, utamanya LU Infokom, LU Perdagangan, dan LU Jasa Perusahaan yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 0,92% (yoy), 0,83% (yoy), dan 0,71% (yoy) (Grafik 2.18). Masih kuatnya pertumbuhan pada ketiga sektor ekonomi utama tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan wisman dan wisnus tujuan Jakarta, serta peningkatan aktivitas MICE dan event yang diselenggarakan di Jakarta pada triwulan laporan. Selain itu, terdapat rilis film dan series besar pada bioskop dan layanan *streaming* lainnya juga berdampak pada tingginya pertumbuhan LU Infokom pada triwulan laporan. Selanjutnya pada LU



Grafik 2.18 Porsi LU Utama terhadap PDRB DKI Jakarta Triwulan III 2025

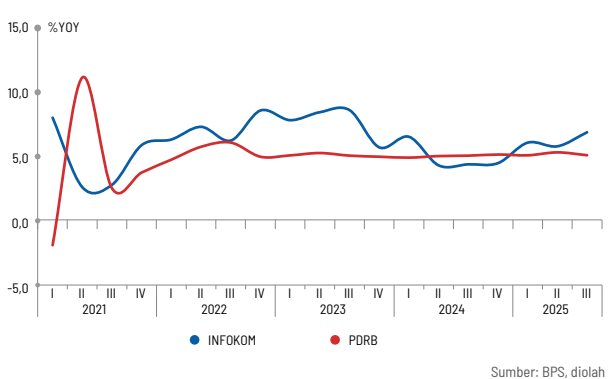


Grafik 2.19 Kontribusi Pertumbuhan PDRB DKI Jakarta Berdasarkan Lapangan Usaha

Penyediaan Akamamin dan LU Transportasi & Pergudangan, juga turut memberikan kontribusi sebesar 0,49% (yoy) dan 0,39% (yoy) (Grafik 2.19). Hal ini antara lain terindikasi dari meningkatnya aktivitas bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok pada triwulan laporan.

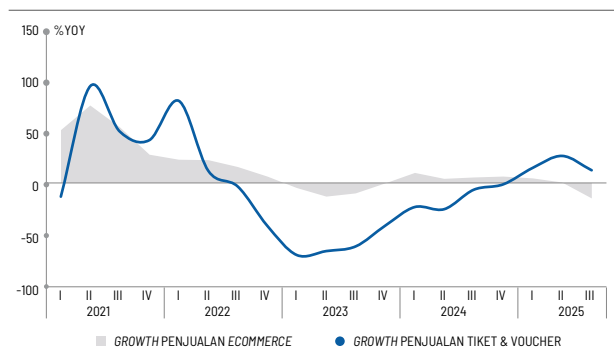
### Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi dan Jasa Perusahaan

LU Informasi dan Komunikasi (Infokom) dengan kontribusi 0,92% (yoy) menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan III 2025, mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,72% (yoy), lebih tinggi dari triwulan II 2025 yang tumbuh sebesar 5,65% (yoy) (Grafik 2.20). Pertumbuhan LU Infokom DKI Jakarta pada triwulan III 2025 terpantau tetap kuat, ditopang oleh beberapa faktor utama. Dari sisi konektivitas, penetrasi internet nasional meningkat signifikan mencapai 229 juta pengguna atau sekitar 80,66% dari total populasi pada pertengahan 2025, naik dari 212 juta pengguna pada awal tahun. Jakarta tercatat memiliki tingkat penetrasi tertinggi yaitu mencapai 91,35% (Survey APJII, 2025). Kenaikan jumlah pengguna internet tersebut turut didukung oleh Jakarta sebagai pusat teknologi nasional dengan infrastruktur digital yang semakin matang, contohnya, pada Mei 2025 Microsoft resmi membuka *region cloud* pertama di Indonesia (Indonesia Central) yang berpusat di Jakarta, sebagai bagian dari rencana investasi sebesar USD1,7 miliar tahun 2024–2028 untuk infrastruktur AI dan cloud di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, sektor infokom merupakan salah satu sektor dengan nilai investasi



Grafik 2.20 Perkembangan LU Infokom dan PDRB Jakarta

terbesar di Jakarta sepanjang tahun 2025. Beberapa contoh investasi besar di sektor ini antara lain: ekspansi jaringan oleh operator seluler (Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata) untuk meningkatkan kapasitas 4G/5G; investasi perusahaan *tech giants* global (selain Microsoft, Google dan Amazon) juga telah membuka *region cloud/data center* di sekitar Jakarta sebelumnya; serta maraknya pendanaan startup di ekosistem digital Jakarta (*fintech, e-commerce, ride-hailing, edutech*, dll. yang berbasis di ibu kota). Momentum ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan sektor Infokom di Jakarta tidak hanya ditopang oleh tren peningkatan konektivitas internet, tetapi juga diperkuat oleh ekosistem infrastruktur digital yang semakin siap, daya beli masyarakat yang terjaga, serta intensitas kegiatan masyarakat yang memacu permintaan terhadap layanan digital, yang salah satunya tercermin dari penjualan *e-commerce* untuk komoditas tiket & voucher yang tumbuh 26,33% (yoy) pada triwulan III 2025 lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (14,80%; yoy) (Grafik 2.21).

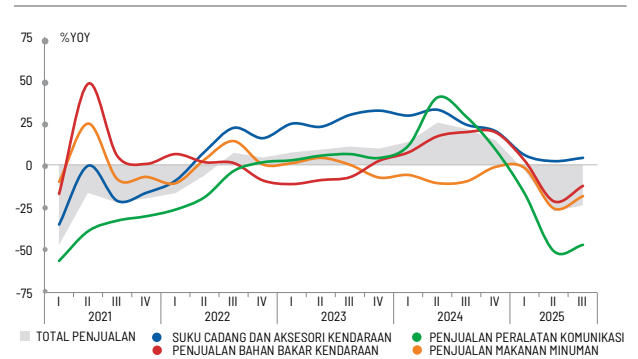


Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.21 Perkembangan Penjualan E-Commerce Tiket & Voucher Jakarta

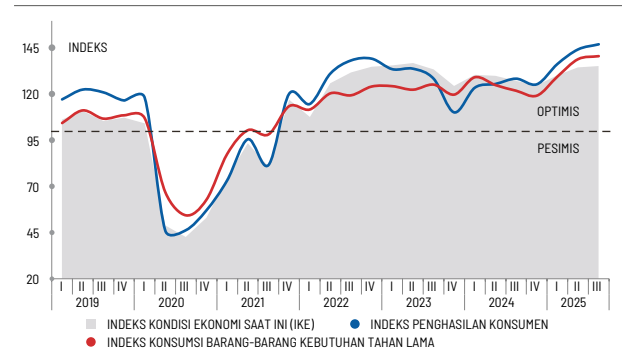
### Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

LU Perdagangan dengan kontribusi 0,83% (yoy) menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan III 2025, mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,15% (yoy), meskipun masih di bawah laju pertumbuhan triwulan sebelumnya (5,91%; yoy) (Grafik 2.22). Pertumbuhan LU Perdagangan yang melambat sejalan dengan perkembangan indeks penjualan eceran yang masih berkontraksi walaupun cenderung membaik pada triwulan III 2025. Nilai pertumbuhan total penjualan eceran mengalami kontraksi 23,57% (yoy), membaik dari triwulan sebelumnya yang juga berkontraksi 27,18% (yoy) (Grafik 2.22). Kendati demikian, keyakinan konsumen masih menunjukkan optimisme terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan nilai Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini pada triwulan III 2025 sebesar 135,50; lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (134,77). Begitu juga dengan Indeks Konsumsi Barang Tahan Lama yang meningkat menjadi 140,87 dari 139,23 pada triwulan sebelumnya (Grafik 2.23). Perlambatan LU Perdagangan juga dipengaruhi oleh perlambatan kinerja impor DKI Jakarta yang terlihat dari nilai impor yang berkontraksi sebesar 16,48% (yoy). Penurunan impor tersebut mempengaruhi perlambatan



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.22 Perkembangan Survei Penjualan Eceran DKI Jakarta

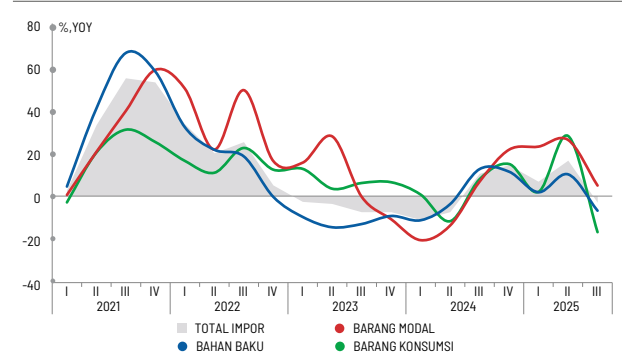


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.23 Perkembangan Indeks Kondisi Konsumen

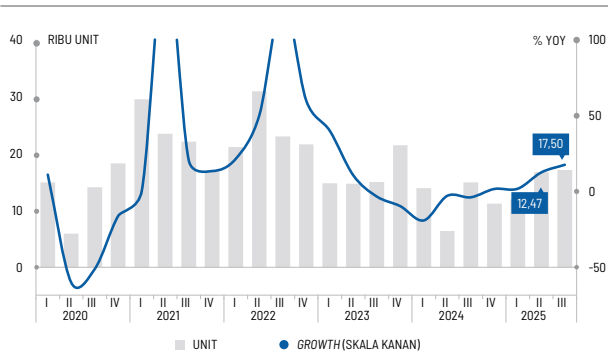
kinerja LU Perdagangan, terutama dengan pertumbuhan impor barang konsumsi yang berkontraksi 16,50%, dari posisi triwulan II 2025 yang masih tumbuh positif 27,88% (yoy).

Dari sisi ekspor otomotif, kinerja perdagangan juga didukung oleh membaiknya permintaan global yang tercermin dari membaiknya kinerja ekspor kendaraan tipe *Completely Build Up* (CBU) secara tahunan yang tumbuh sebesar 17,50% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (12,47%; yoy) (Grafik 2.25). Hal ini seiring dengan normalisasi kinerja ekspor otomotif Jakarta sejak tahun 2024, dimana ekspor ke beberapa negara tujuan utama a.l. Jepang, Meksiko, Uruguay, dan Equador kembali berlanjut, serta beberapa masalah perubahan



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.24 Perkembangan Impor DKI Jakarta



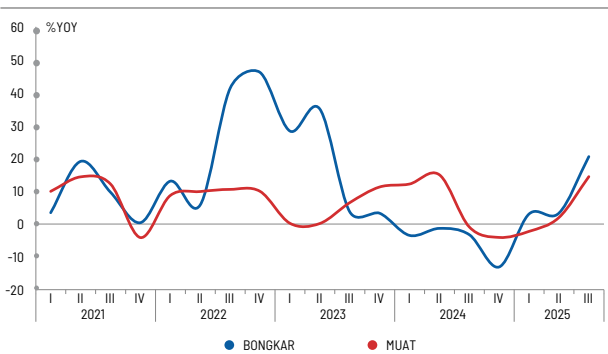
Sumber: GAIKINDO diolah

Grafik 2.25 Perkembangan Ekspor Otomotif CBU Jakarta

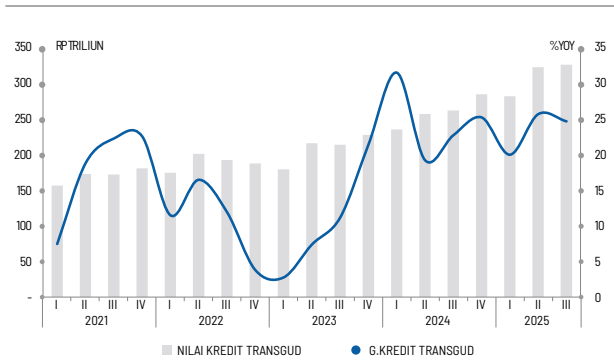
regulasi yang sudah terselesaikan dengan negara Timur Tengah dan Amerika Selatan, ditambah dengan minimalnya dampak daripada tensi geopolitik di Timur Tengah terhadap rute ekspor barang otomotif Jakarta yang saat ini dapat melewati jalur alternatif yakni Jeddah dan Damman.

### Lapangan Usaha Jasa Perusahaan, Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin), serta Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan (Transgud)

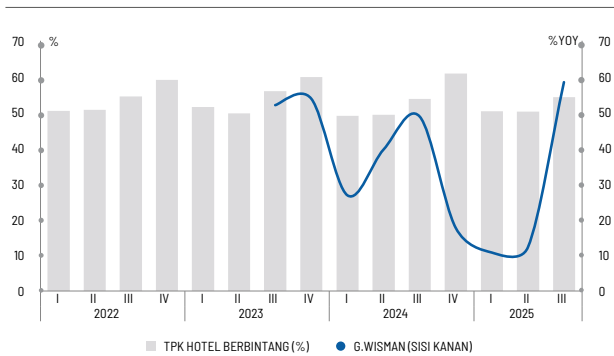
LU Jasa Perusahaan, LU Akmamin, dan LU Transgud dengan andil masing-masing sebesar 0,71%, 0,49%, dan 0,39%, pada triwulan III 2025 mencatatkan pertumbuhan masing-masing sebesar 8,58% (yoy), 9,55% (yoy), dan 9,06% (yoy), nilai ini meningkat atau tetap tinggi dibandingkan triwulan II 2025 (7,62% yoy; 9,79% yoy; dan 9,90% yoy). Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan wisman dan wisnus tujuan Jakarta, banyaknya pelaksanaan MICE dan event, serta meningkatnya aktivitas pemerintahan sejalan dengan akselerasi realisasi belanja APBN dan APBD menjelang akhir tahun anggaran. Sejalan dengan itu, meningkatnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok juga mencerminkan aktivitas transportasi pergudangan yang meningkat. Peningkatan pada LU Transportasi dan Pergudangan juga tercermin dari meningkatnya penyaluran kredit kepada sektor tersebut di triwulan III 2025 dengan pertumbuhan yang tetap kuat sebesar 24,51%



Grafik 2.26 Perkembangan Aktivitas Bongkar Muat Tj. Priok



Grafik 2.27 Perkembangan Penyaluran Kredit LU Transgud

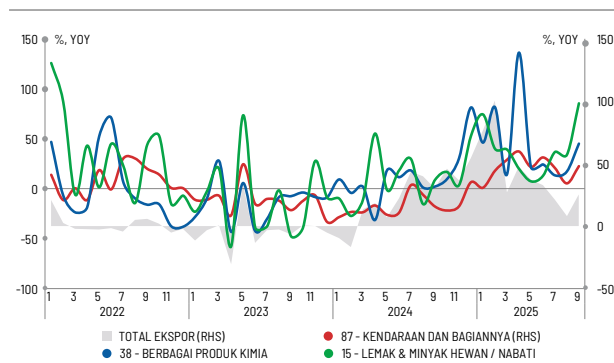


Grafik 2.28 Perkembangan Wisatawan Mancanegara (Wisman) dan TPK Hotel Berbintang Jakarta

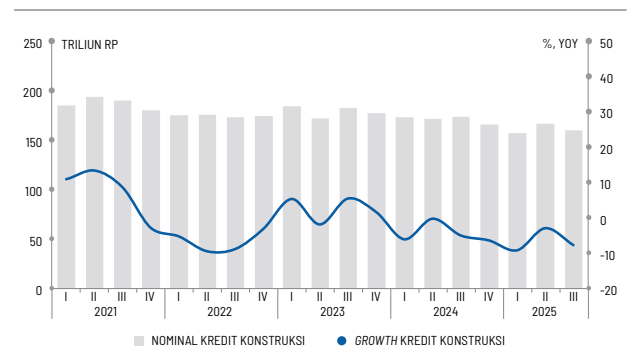
(yoy). Selanjutnya, peningkatan LU Akmamin juga dapat dilihat dari peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara di Jakarta yang tumbuh 58,37% (yoy) di triwulan laporan.

### Lapangan Usaha Industri Pengolahan

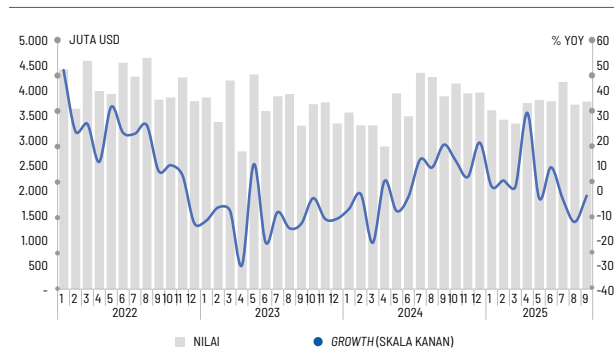
Sebagai salah satu LU utama, LU Industri Pengolahan mengalami peningkatan pertumbuhan pada triwulan III 2025 walaupun tidak setinggi LU Utama lainnya. Dengan andil terhadap pertumbuhan triwulan III 2025 sebesar 0,16%, LU Industri Pengolahan tumbuh sebesar 1,44% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya (0,98% yoy). Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya kinerja industri makanan dan minuman (mamin), industri kimia dan farmasi, serta industri alat angkutan. Hal tersebut tercermin dari ekspor komoditas berbagai produk kimia, kendaraan dan bagiannya, serta lemak & minyak hewan/nabati yang meningkat pada akhir triwulan III 2025 masing-masing sebesar 45,01% (yoy); 22,44% (yoy); dan 85,03% (yoy) lebih tinggi dari awal triwulan III 2025 (13,34%;yoy, 20,56%;yoy, 36,57%;yoy) (Grafik 2.29). Peningkatan juga diikuti oleh membaiknya impor bahan baku, walaupun masih terkontraksi sebesar 2,60% (yoy) pada akhir triwulan III 2025, dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 13,08% (yoy)(Grafik 2.30).



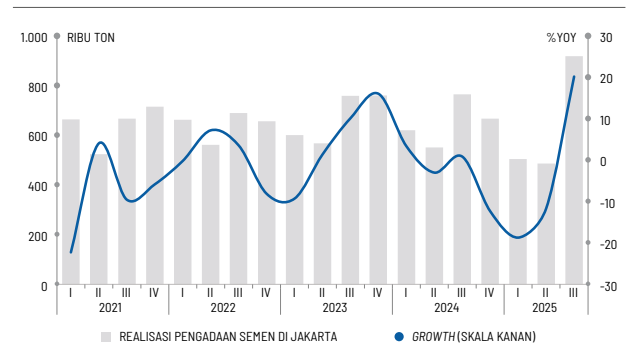
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah  
**Grafik 2.29** Pertumbuhan ekspor komoditas industri DKI Jakarta Triwulan III 2025



Sumber: Survei Bank Indonesia, diolah  
**Grafik 2.32** Perkembangan DPK di Jakarta Berdasarkan Kepemilikan



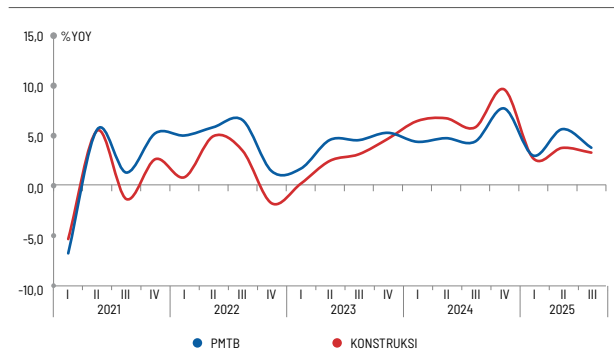
Sumber: Kubus Impor, DSta  
**Grafik 2.30** Perkembangan Impor Bahan Baku Triwulan III 2025



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah  
**Grafik 2.33** Perkembangan Realisasi Pengadaan Semen di Jakarta

### Lapangan Usaha Konstruksi

Sejalan dengan meningkatnya kinerja Investasi di Jakarta, LU Konstruksi juga mencatatkan peningkatan, dengan pertumbuhan sebesar 3,17% (yoy), sedikit melambat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 3,64% (yoy) (Grafik 2.31). Perlambatan tersebut tercermin dari perkembangan realisasi penyaluran kredit pada triwulan III 2025 yang terkontraksi sebesar 7,78% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 2,99% (yoy) (Grafik 2.32). Kendati demikian, perlambatan lebih lanjut tertahan oleh perkembangan realisasi pengadaan semen di Jakarta pada triwulan III 2025 yang melonjak sebesar 20,10% (yoy), lebih baik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 11,76% (yoy) (Grafik 2.33).



Sumber: BPS, diolah  
**Grafik 2.31** Pertumbuhan LU Konstruksi dan PMTB

Selanjutnya, kinerja LU Konstruksi di Jakarta diiringi dengan beberapa proyek strategis pemerintah maupun swasta yang masih berlanjut pada triwulan II 2025, diantaranya: Proyek Jakarta Sewerage Development Project (Zone 1) yang berlokasi di Pluit, Jakarta Utara masih dalam proses konstruksi. Jakarta Sewerage Development Project (Zone 1) dikerjakan oleh 4 (empat) penyedia jasa yang disebut OJJJ (Obayashi, Wijaya Karya, Jaya Konstruksi, JFE Engineering Joint Venture) dengan nilai pekerjaan Rp3,23 triliun. Pekerjaan ini mempunyai masa pelaksanaan 1.634 hari dimulai sejak 18 April 2023 dan direncanakan akan selesai pada 16 Oktober 2027, progres pekerjaan saat ini *package 1* : construction of WWTP 33,63% (fisik) & 40,03% (keu), *package 2* : construction of sewers area 1-1 39,39% (fisik) & 39,11% (keu), *package 3* : construction of sewers 1-2 39,67% (fisik) & 37,56% (keu), *package 4* : construction of pilot area 59,15% (fisik) & 57,41% (keu).

Pengerjaan 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta (Tahap I Seksi B & C, Tahap II, dan Tahap III) masih berjalan dan sebagian besar masih dalam proses pembebasan lahan. Jalan tol ini terdiri dari 6(enam) ruas dan secara keseluruhan memiliki panjang 69,77 kilometer yang terbagi dalam 3(tiga) tahap pembangunan, tahap I sepanjang 29,67 kilometer, tahap II sepanjang 22,25 kilometer, dan tahap III sepanjang 17,86 kilometer. Sesi A ruas Kelapa Gading - Pulo Gebang telah 100% selesai dan sudah beroperasi sejak 2021, sesi B ruas Semanan - Grogol sepanjang 9,51 kilometer saat ini sedang dalam proses konstruksi dengan realisasi progress fisik sebesar 0,77% dan progress tanah bebas

sebesar 16,73%, sesi C ruas Grogol –Kelapa Gading dengan progress fisik sebesar 0,55 % dan progress tanah bebas sebesar 10,53%. Sesi B (Semanan–Grogol) dan Sesi C (Grogol–Kelapa Gading) masih belum masuk fase konstruksi dan masih berada pada tahap pembebasan lahan hingga akhir 2023, dengan progres rendah. Lambatnya progres disebabkan penerbitan Penetapan Lokasi (Penlok) yang belum terbit meski telah dimohon sejak 14 Maret 2025. Selain itu, ada permasalahan aset kementerian: HPL milik Kementerian Setneg seluas 4 ha yang terkena tol, belum selesai kompensasinya karena usulan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) ditolak Kemenkeu, dan aset Kodam Jaya yang juga berstatus BMN telah dikuasai ±400 KK bersertifikat, namun usulan penghapusannya juga ditolak Kemenkeu. Kondisi ini membuat konstruksi baru dapat berjalan setelah progres pembebasan lahan minimal mencapai 70%.

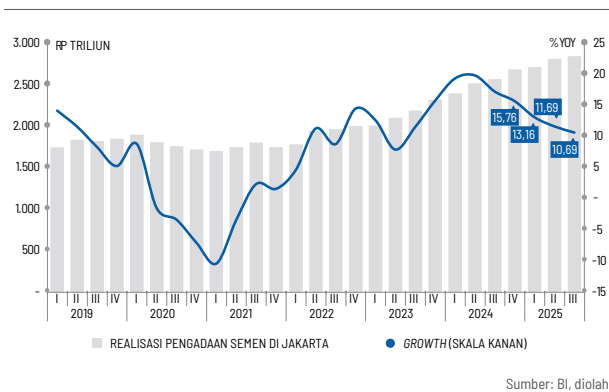
Proyek tanggul Pantai/laut/ NCICD progress konstruksinya diproyeksikan akan selesai akhir tahun 2025 dan akan mulai beroperasi pada 2027. Pekerjaan pembangunan pengaman pantai di pesisir Teluk Jakarta tahap 7 terbagi dalam tiga paket dengan progres fisik dan keuangan sekitar 28,07%. Paket 1 meliputi pembangunan 100 meter tanggul dan saluran drainase dengan kontrak dimulai Juli 2025, sementara paket 2 dan 3 fokus pada pembangunan tanggul 850 meter dan satu unit polder dengan pembiayaan SBSN dan rencana anggaran 2026-2027. Hambatan utama pada paket 1 adalah adanya bangunan warga di trase drainase dan kapal nelayan yang bersandar di trase timbunan batu boulder, yang ditindaklanjuti dengan strategi komunikasi efektif, penyesuaian desain teknis, serta penyediaan jalur relokasi kapal nelayan agar pekerjaan berjalan lancar tanpa konflik sosial.

Proyek LRT Jakarta Fase 1B dengan rute Velodrome–Manggarai s.d. 4 November 2025 menunjukkan perkembangan positif yaitu telah mencapai 77,90% yang meliputi pekerjaan struktur, arsitektur, dan trackwork. Secara umum, progres pembangunan telah memasuki perkembangan suplai material pembangunan juga terus berjalan. Pengadaan beton *precast* dan *readymix* dilakukan dengan cepat dan terjamin kualitasnya. Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome–Manggarai ditargetkan selesai Juni 2026. Waskita Karya terlibat dalam pembangunan LRT Jakarta melalui KSO Waskita-Nindya LRS sebagai kontraktor utama pembangunan. KSO ini ditunjuk oleh PT Jakarta Propertindo selaku pemilik proyek melalui proses tender. Total anggaran pembangunan sebesar Rp 4,1 triliun. Dana ini berasal dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) ke PT Jakarta Propertindo (Perseroda) yang bersumber dari APBD DKI Jakarta. Keberadaan tambahan jalur ke Manggarai, akan menambah panjang jaringan LRT Jakarta Fase 1A yang sudah beroperasi dengan enam stasiun yaitu Stasiun Pegangsaan Dua, Stasiun Boulevard Utara, Stasiun Boulevard Selatan, Stasiun Pulomas, Stasiun Equestrian dan Stasiun Velodrome. Secara keseluruhan total panjang jalur LRT Jakarta dari Stasiun Pegangsaan Dua (Kelapa Gading) hingga Stasiun Manggarai mencapai 12,2 km dengan waktu tempuh sekitar 26 menit.

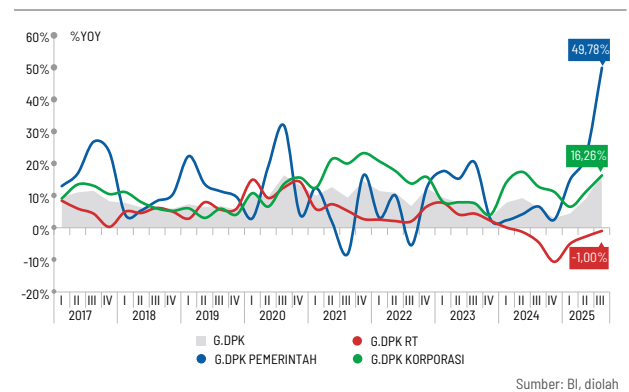
Proses konstruksi proyek MRT Fase II CP 201 (Stasiun Bundaran HI–Monas) s.d. Oktober 2025 menunjukkan perkembangan yang positif yaitu telah mencapai 90,20% dengan sejumlah pekerjaan utama di Stasiun Thamrin meliputi test pit utilitas dan pemasangan *traffic decking* pada entre 1, pemasangan *boredpile* pada entre 3, pemasangan *waterproofing* dan *rebar base slab* & pekerjaan arsitektural pemasangan dinding pada *combine building* entre 4 CTVT, pemasangan rebar untuk dinding entre 5, 7, dan 8, serta *jet grouting* di entre 6. Selain itu, tim konstruksi juga melanjutkan pekerjaan instalasi *homogeneous tile*, dinding ACP, dinding *drywall* dan rangka *ceiling* pada *level concourse* dan *platform*, serta instalasi pipa, *ducting*, *cable tray*, *fireboard* dan *hydrant box*. Stasiun Thamrin merupakan stasiun dengan *entrance* terbanyak, yaitu sembilan, serta stasiun terpanjang hingga 440 meter. Stasiun ini juga akan menjadi stasiun transit dengan lin timur barat. Di Stasiun Monas, pekerjaan utama meliputi *reinstatement* entre 1, pengecoran dinding dan atap entre 2, penyelesaian arsitektural pada koridor entre 1 & 2, instalasi *steel structure elevator* 1 pada *level ground*, instalasi granit dan *handrail* tangga, serta *shutter* pada entre 1, dan instalasi *travelator*, *pipa*, *ducting*, serta *partial acceptance test* untuk *station fan*, *socket outlet*, dan *lighting fixtures*. Kedua stasiun ini ditargetkan beroperasi pada 2027 mendatang. Target paket kontrak CP202 pun terlampaui, yakni dari 55,78 persen, per Oktober 2025, perkembangannya mencapai 59,36 persen. Sejumlah pekerjaan utama seperti ekskavasi boks stasiun, pengecoran *base slab* dan *waterproofing canal underpass*, hingga persiapan *breakthrough* TBM 1 di sisi utara Stasiun Sawah Besar. Sedangkan pada paket kontrak CP203, per Oktober 2025, telah menyelesaikan 79,11 persen pekerjaannya dari target 78,31 persen. Sejumlah pekerjaan utama terus dikerjakan seperti struktur kolom pada entre stasiun, *backfill*, hingga instalasi *hanging wall* pintu tepi peron (*platform screen doors*). Khusus di Stasiun Glodok, tim konstruksi sedang mempersiapkan *breakthrough* TBM 1 ke Stasiun Mangga Besar.

## Lapangan Usaha Jasa Keuangan

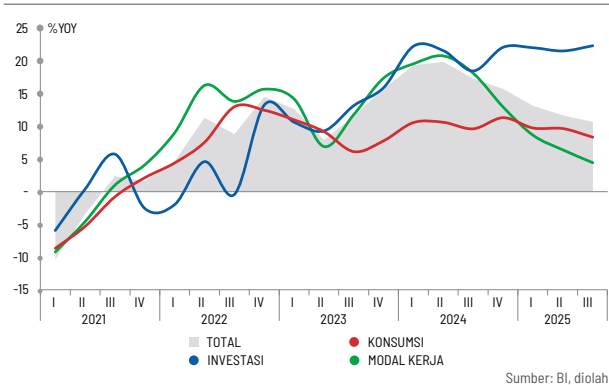
Di sisi lain, LU Jasa Keuangan mencatat kontraksi pada triwulan III 2025, yang dipengaruhi oleh belum optimalnya penyaluran kredit seiring iklim usaha yang masih cenderung melemah. Pada triwulan III 2025, LU Jasa Keuangan mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,15% (yoy) dengan andil negatif sebesar 0,02%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (4,71%; yoy). Melambatnya pertumbuhan LU Jasa Keuangan sejalan dengan melambatnya pertumbuhan penyaluran kredit dari 11,69% (yoy) di triwulan sebelumnya menjadi 10,69% (yoy) (Grafik 2.34). Lebih lanjut jika dilihat dari jenis penggunaannya, penurunan kredit utamanya disebabkan oleh melambatnya kinerja pada kredit modal kerja dan konsumsi yang tumbuh sebesar 4,46% (yoy) dan 8,36% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya (6,42%;yoy dan 9,69%;yoy) (Grafik 2.35). Adapun secara sektoral, melambatnya kinerja kredit terutama dipengaruhi penurunan kredit ke sektor Konstruksi yang terkontraksi 7,78% (yoy) serta perlambatan pada kredit kepada sektor Perantara Keuangan dari 6,37% (yoy) di triwulan II 2025 menjadi 2,83% di triwulan laporan (Grafik 2.36).



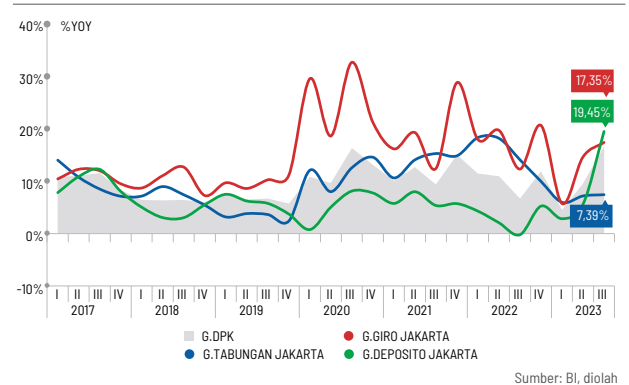
Grafik 2.34 Perkembangan Penyaluran Kredit di Jakarta



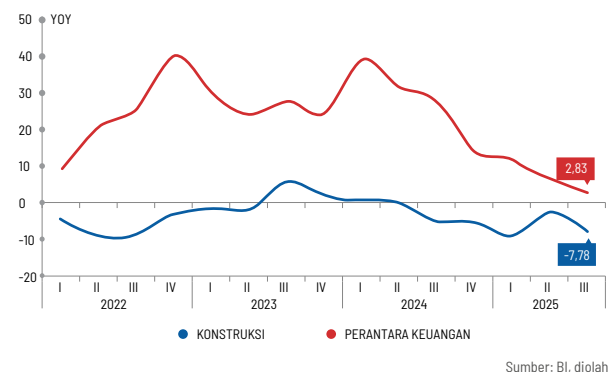
Grafik 2.37 Perkembangan DPK di Jakarta Berdasarkan Kepemilikan



Grafik 2.35 Perkembangan Penyaluran Kredit Konsumsi, Investasi, dan Modal Kerja di Jakarta



Grafik 2.38 Perkembangan DPK Berdasarkan Rekening di Jakarta



Grafik 2.36 Perkembangan Penyaluran Kredit Sektor Konstruksi serta Perantara Keuangan

Selanjutnya, dari sisi perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Jakarta, pada triwulan III 2025 masih tumbuh lebih kuat sebesar 16,62% (yoy), dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,08% (yoy). Hal ini terutama ditopang membaiknya pertumbuhan DPK Pemerintah, DPK Korporasi dan DPK Rumah Tangga yang masing-masing tumbuh sebesar 49,78% (yoy), 16,26% (yoy), dan -1,00% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang masing-masing tumbuh sebesar 22,47% (yoy), 11,26% (yoy), dan -2,72% (yoy) (Grafik 2.37). Dari sisi kepemilikan rekening, meningkatnya perkembangan DPK di Jakarta ditopang oleh pertumbuhan pada rekening deposito, giro, maupun tabungan rumah tangga dan non-rumah tangga di Jakarta yang tumbuh pada triwulan III 2025 sebesar 19,45% (yoy), 17,35% (yoy), dan 7,39% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang masing-masing tumbuh 5,59% (yoy), 14,59% (yoy), dan 7,16% (yoy) (Grafik 2.38).

## B. TRACKING PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN IV 2025

Perekonomian Jakarta pada triwulan IV 2025 diperkirakan meningkat, didorong oleh prakiraan meningkatnya kinerja Konsumsi RT seiring momentum HBKN Natal dan Tahun baru 2026, meningkatnya kinerja Konsumsi Pemerintah seiring prakiraan akselerasi fiskal dalam pemenuhan realisasi APBD dan APBN bagi Kementerian dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta kinerja investasi seiring perilaku *front loading* akselerasi penyelesaian proyek menjelang tutup buku akhir tahun dan masih berlanjutnya investasi untuk proyek-proyek strategis Pemerintah dan swasta yang bersifat multitaluh. Di sisi lain, kinerja perdagangan luar negeri Jakarta diperkirakan tertahan sebagai dampak akibat penerapan tarif resiprok Amerika Serikat sebesar 19% yang mulai berlaku sejak Agustus 2025 lalu, serta prakiraan permintaan negara tujuan ekspor utama Jakarta yang cenderung masih tertahan akibat *domestic demand* yang masih belum pulih serta pertumbuhan ekonomi yang masih termoderasi. Dari sisi LU utama, sejalan dengan sisi pengeluaran, pertumbuhan LU Perdagangan juga diperkirakan meningkat dari triwulan sebelumnya, sejalan dengan kinerja Konsumsi RT yang diperkirakan tumbuh meningkat.

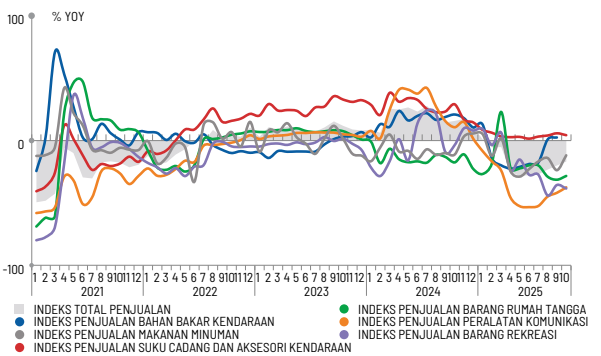
### Komponen Pengeluaran (Permintaan) Konsumsi Rumah Tangga

**Kinerja Konsumsi RT diperkirakan meningkat pada triwulan IV 2025.** Peningkatan kinerja Konsumsi RT didorong oleh optimisme

meningkatkan konsumsi dan mobilitas masyarakat Jakarta pada momen HBKN Natal dan Tahun Baru 2026. Selain itu, prakiraan ini juga didorong oleh maraknya penyelenggaraan event dan MICE pada triwulan IV 2025 yang akan mendorong konsumsi.

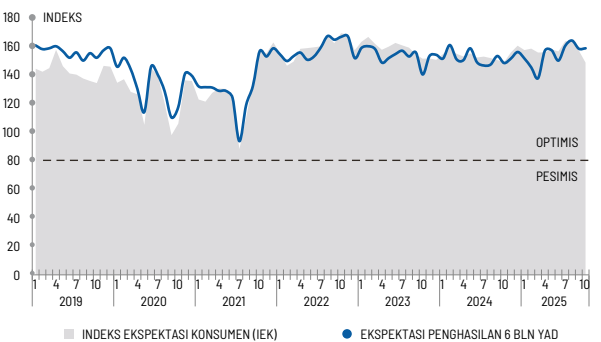
Prakiraan meningkatnya kinerja konsumsi RT pada triwulan IV 2025 tercermin dari Indeks Penjualan Eceran Jakarta pada Oktober 2025 terkontraksi 16,91% (yoy), namun membaik dari bulan sebelumnya yang terkontraksi 20,12% (yoy) dan rata-rata triwulan sebelumnya yang terkontraksi 23,54% (yoy) (Grafik 2.39). Kondisi ini didorong oleh perbaikan kinerja penjualan eceran makanan dan minuman, bahan bakar dan kendaraan, peralatan komunikasi, dan barang rumah tangga.

Selanjutnya, pertumbuhan konsumsi RT ini juga terindikasi dari Indeks Ekspektasi Penghasilan 6 Bulan Yang Akan Datang dari hasil survei konsumen Jakarta yang pada Oktober 2025 sebesar 158,30, lebih tinggi dari bulan sebelumnya (158,00) (Grafik 2.40). Konsumsi listrik rumah tangga Jakarta pada Oktober 2025 juga mendukung optimisme ini dengan konsumsi sebesar 1,06 juta kWh atau terkontraksi 3,11% (yoy), namun lebih baik dari bulan sebelumnya yang terkontraksi 3,47% (yoy) (Grafik 2.41). Selain itu menjelang triwulan IV 2025, impor barang konsumsi di Jakarta meski masih terkontraksi 19,65% (yoy), namun membaik dari bulan sebelumnya yang terkontraksi 23,92% (yoy) (Grafik 2.42).



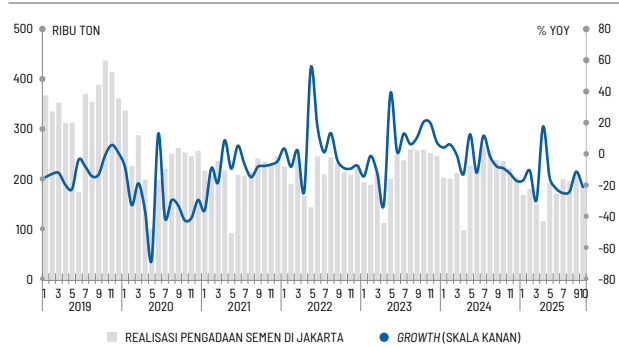
Sumber: BI, diolah

Grafik 2.39 Perkembangan Penjualan Eceran Jakarta



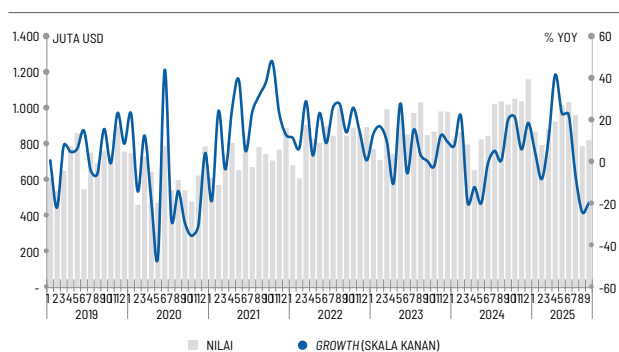
Sumber: BI, diolah

Grafik 2.40 Perkembangan Ekspektasi Konsumen Jakarta



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

Grafik 2.41 Realisasi Pengadaan Semen Jakarta



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.42 Nilai Impor Barang Konsumsi

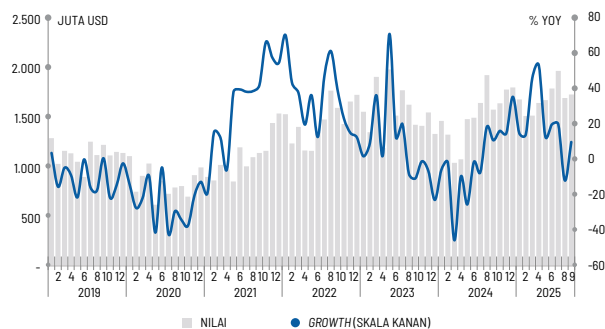
## Konsumsi Pemerintah

Konsumsi Pemerintah diprakirakan tumbuh meningkat pada triwulan IV 2025 didorong oleh pembukaan *blocking* anggaran pasca kebijakan efisiensi. Hal tersebut mendukung optimisme banyak instansi untuk meningkatkan realisasi anggaran yang pada beberapa triwulan sebelumnya masih tergolong rendah. Selain itu, belanja akhir tahun utamanya untuk memenuhi realisasi APBD dan APBN di Jakarta juga diprakirakan terakselerasi.

Kondisi tersebut terindikasi dari realisasi belanja APBN pada triwulan IV 2025 (data s.d. 20 Nov 2025) yang sebesar 40,08% dari pagu atau tumbuh 12,66% (yoy). Pertumbuhan belanja Pemerintah Pusat tersebut terutama didorong oleh Belanja Pegawai yang tumbuh 32,93% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,84% (yoy). Selanjutnya, Belanja Bantuan Sosial juga tumbuh 83,45% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 2,91% (yoy). Indikasi terakselerasinya Konsumsi Pemerintah pada triwulan IV 2025 juga tercermin dari capaian realisasi jumlah Belanja Pemerintah melalui APBD yang hingga 20 November 2025 mencapai 60,46% dari pagu. Capaian ini didukung oleh realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal yang masing-masing telah terealisasi sebesar 69,33% dan 32,10% dari pagu.

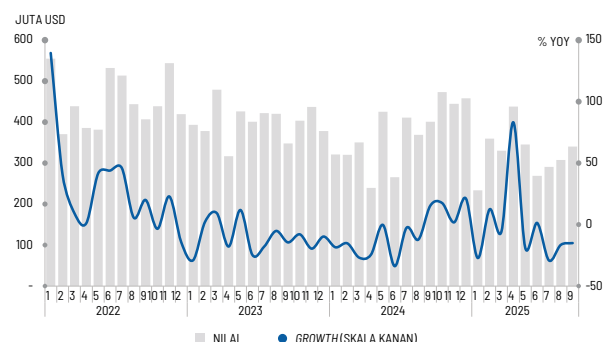
## Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

**Kinerja PMTB pada triwulan IV 2025 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.** Prakiraan peningkatan ini terutama didorong oleh masih berlanjutnya investasi khususnya untuk proyek strategis multitanah Pemerintah antara lain MRT, LRT, dan TOD, serta prakiraan perilaku *front loading* akselerasi penyelesaian berbagai proyek menjelang tutup buku akhir tahun. Selanjutnya, optimisme juga didorong oleh capaian realisasi investasi Jakarta yang hingga akhir triwulan III 2025 sebesar 80,06% dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi (BKPM RI) atau sebesar Rp204,15 triliun dari target yang sebesar Rp255 triliun. Prakiraan ini selanjutnya juga didukung oleh peningkatan impor barang modal menjelang triwulan IV 2025 yang tumbuh 9,79% (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya yang berkontraksi 11,84% (yoy) (Grafik 2.43). Selain itu, nilai impor besi dan baja meski masih berkontraksi 15,08% (yoy), namun membaik dari bulan sebelumnya yang berkontraksi 16,55% (yoy) (Grafik 2.44). Meningkatnya PMTB juga didukung oleh berlanjutnya berbagai proyek strategis swasta yang juga sedang berlangsung di Jakarta yaitu Thamrin Nine - Autograph Tower 1 (Waldorf Astoria) & Luminary Tower 2 (Pan Pacific, Park Royal) & Leparc senilai USD326,96 juta, New Priok Container Terminal (NPTC) 2 & 3 (Phase 1B) senilai USD257,3 juta, Benhil Central - Hotel & Serviced Apartment senilai USD115,38 juta, Mandiri IT Tower - Bumi Slipi Jakarta Barat senilai USD57,42 juta, jalan Kamal-Teluk Naga-Rajeg Toll Road Development: SS Kosambi-SS Teluk Naga-SS Tanjung Pasir (Section 2) dan Kamal (JC Sedyatmo-SS Kosambi (Section 1) senilai USD109,87 juta serta berbagai proyek *green investment* seperti *waste management*, infrastruktur EV, dan *green commercial/industrial zone*.



Sumber: BI, diolah

Grafik 2.43 Nilai Impor Barang Modal

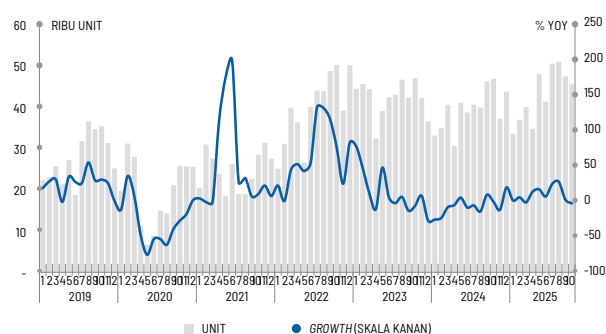


Sumber: BI, diolah

Grafik 2.44 Nilai Impor Besi dan Baja

## Ekspor

**Kinerja ekspor pada triwulan IV 2025 diperkirakan tumbuh melambat.** Perlambatan sebagai dampak penerapan tarif resipikal Amerika Serikat sebesar 19% yang mulai berlaku sejak Agustus 2025. Selain itu, masih tertahannya permintaan negara tujuan ekspor Jakarta seiring *domestic demand* yang belum pulih, hingga kondisi ketegangan geopolitik global yang terus berlanjut juga diperkirakan menahan kinerja ekspor Jakarta. Prakiraan ini salah satunya tercermin dari ekspor mobil CBU Jakarta yang pada Oktober 2025 berkontraksi 2,83% (yoy), melambat dari bulan sebelumnya yang tumbuh 2,67% (yoy), serta lebih rendah dari pertumbuhan rata-rata tiga bulan sebelumnya yang sebesar 19,65% (yoy) (Grafik 2.45).

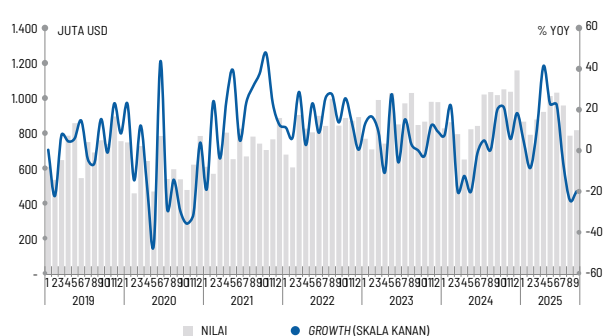


Sumber: Gaikindo, diolah

Grafik 2.45 Ekspor Mobil CBU

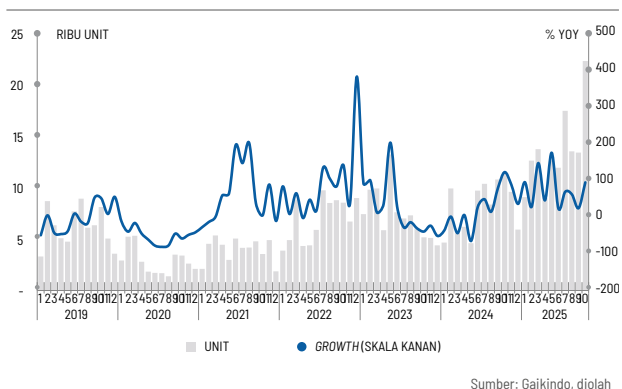
## Impor

**Kinerja impor pada triwulan IV 2025 diperkirakan tumbuh lebih tinggi.** Meningkatnya kinerja impor terutama diperkirakan oleh meningkatnya impor barang konsumsi dan bahan baku seiring prakiraan meningkatnya kinerja konsumsi RT pada momen HBKN Nataru. Hal ini kemudian tercermin dari impor barang konsumsi di Jakarta meski masih berkontraksi 19,65% (yoy), namun membaik dari bulan sebelumnya yang berkontraksi 23,92% (yoy) (Grafik 2.46). Selain itu, impor mobil CBU pada Oktober 2025 tercatat sebesar 22,26 ribu unit atau tumbuh 94,16% (yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tumbuh 24,18% (yoy), serta lebih tinggi pula dari rata-rata pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 51,41% (yoy) (Grafik 2.47).

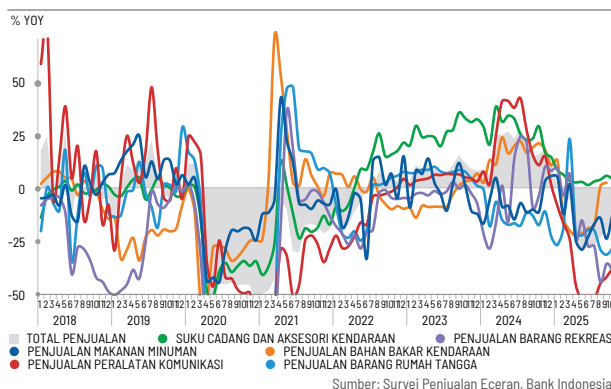


Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.46 Nilai Impor Barang Konsumsi



Grafik 2.47 Nilai Impor Mobil Jakarta

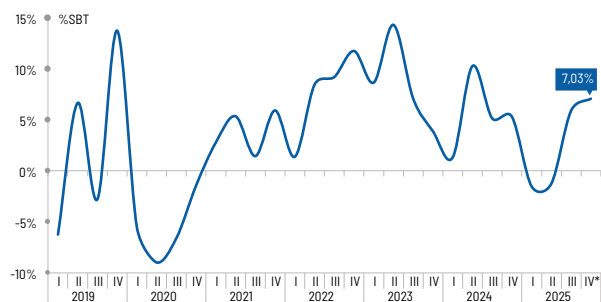


Grafik 2.50 Perkembangan Indeks Penjualan Eceran DKI Jakarta

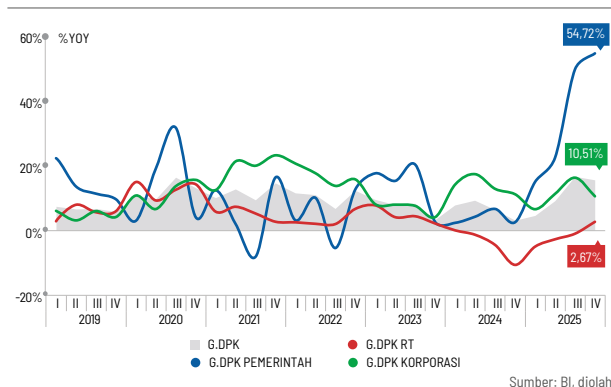
### Komponen Lapangan Usaha (Penawaran)

Pada Triwulan IV 2025, **LU Perdagangan** diprakirakan akan mengalami peningkatan kinerja seiring meningkatnya konsumsi Rumah Tangga seiring periode HBKN Nataru serta membaiknya kinerja ekspor. Hal ini tercermin dari angka sementara hasil SKDU Bank Indonesia, untuk LU Perdagangan pada triwulan IV 2025 yang lebih tinggi dari angka pada triwulan III 2025 (Grafik 2.48). Selanjutnya, Indeks Keyakinan Konsumen dan Indeks Ekspektasi Konsumen Jakarta pada Oktober 2025 masing-masing tercatat sebesar 139,10 dan 148,30 masih dalam level tinggi dan optimis (Grafik 2.49). Hal tersebut menunjukkan optimisme konsumen terhadap kegiatan usaha ke depan di Jakarta. Selain itu, indeks penjualan eceran pada triwulan IV 2025 juga mulai membaik walaupun masih terkontraksi sebesar 16,91% (yoy), dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 23,67% (yoy) (Grafik 2.50).

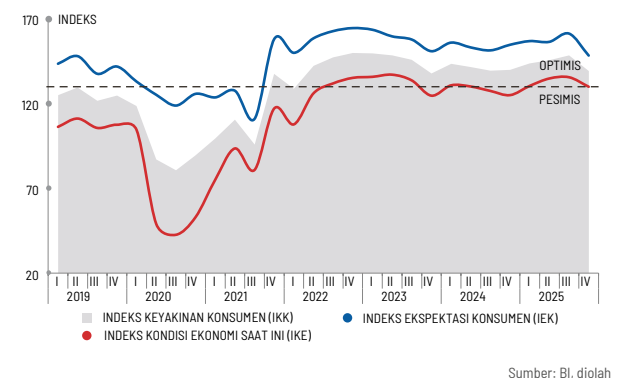
Selanjutnya, **LU Jasa Keuangan** pada triwulan IV 2025 juga diprakirakan mengalami peningkatan kinerja dari triwulan sebelumnya. Membaiknya kinerja LU Jasa Keuangan terutama dipengaruhi oleh mulai membaiknya penyaluran kredit kepada sektor Perantara Keuangan dan sektor Perdagangan, seiring dengan potensi peningkatan konsumsi Rumah Tangga menjelang periode akhir tahun. Kredit kepada sektor Perantara Keuangan sampai dengan Oktober 2025, tumbuh 3,23% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,83% (yoy). Adapun kredit kepada sektor Perdagangan di Oktober 2025 juga tumbuh meningkat 6,38% (yoy) dari sebelumnya 5,59% (yoy). Hal ini didukung oleh kuatnya pertumbuhan DPK secara total yaitu per Oktober 2025 tumbuh 16,91% (yoy), meningkat dari triwulan laporan (16,62%; yoy). Dari sisi kepemilikan rekening, pertumbuhan DPK ditopang oleh rekening Pemerintah dan Korporasi. Pertumbuhan DPK Pemerintah dan DPK Korporasi per Oktober 2025 masing-masing tumbuh sebesar 60,56% (yoy) dan 16,44% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang masing-masing tumbuh sebesar 49,78% (yoy) dan 16,26% (yoy) (Grafik 2.51). Peningkatan pertumbuhan DPK ini mengindikasikan perbaikan likuiditas perbankan yang dapat membantu aktivitas jasa keuangan.



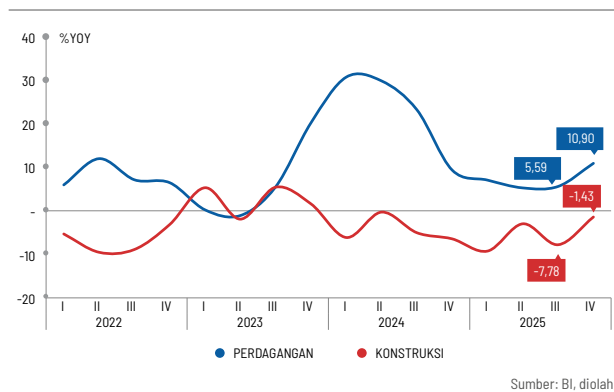
Grafik 2.48 Perkembangan Kegiatan Usaha LU Perdagangan



Grafik 2.51 Perkembangan DPK Berdasarkan Kepemilikan (Tw IIV 2025)

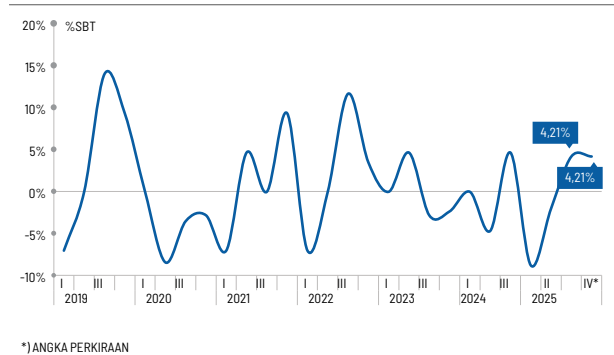


Grafik 2.49 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen Jakarta



Grafik 2.52 Prakiraan SKDU LU Jasa Keuangan DKI Jakarta

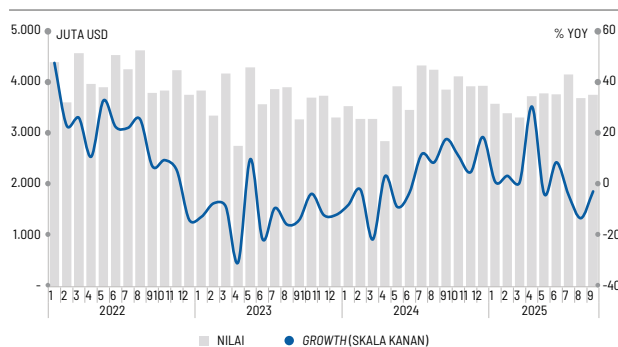
LU Konstruksi dan LU Industri Pengolahan juga diprakirakan mengalami peningkatan kinerja pada triwulan IV 2025. Peningkatan LU Konstruksi tercermin dari hasil SKDU Bank Indonesia pada triwulan IV yang diprakirakan tetap tumbuh kuat sebesar 4,21% SBT, lebih tinggi dari triwulan III yang terkontraksi sebesar 4,21% SBT (Grafik 2.53). Selain itu, peningkatan kinerja sektor industri pengolahan diprakirakan meningkat seiring dengan membaiknya impor bahan baku pada akhir triwulan III (September) walaupun masih terkontraksi sebesar 2,60% (yoy), namun lebih baik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi lebih dalam 13,08% (yoy) (Grafik 2.54).



\*]ANGKA PERKIRAAN

Sumber: BI, diolah

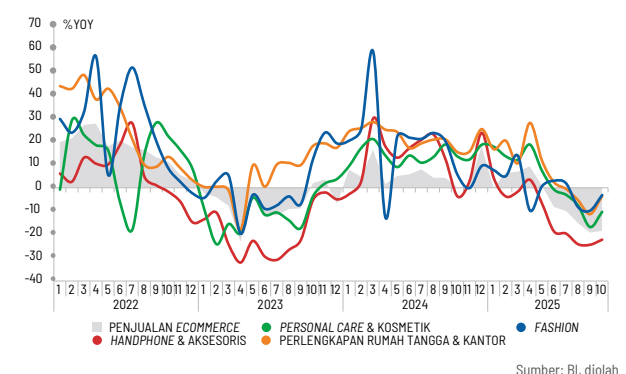
Grafik 2.53 Perkiraan SKDU LU Konstruksi DKI Jakarta



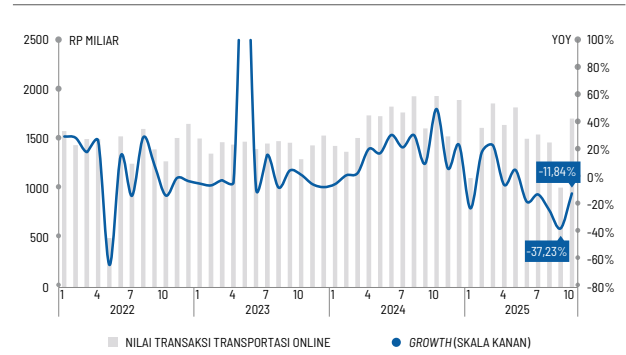
Sumber: Survei Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.54 Perkembangan Nilai Impor Bahan Baku DKI Jakarta

Selanjutnya, LU Infokom diprakirakan akan mengalami peningkatan pada triwulan IV 2025 seiring membaiknya aktivitas transaksi transportasi *online* seiring peningkatan mobilitas masyarakat serta peningkatan aktivitas *e-commerce* pada periode HBKN Nataru di akhir tahun (Grafik 2.55 dan 2.56). Nilai transaksi transportasi *online* pada awal triwulan IV 2025 tumbuh lebih baik, meskipun terkontraksi 11,84% (yoy), tetapi lebih baik dari kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 37,23% (yoy). Begitu juga dari nominal transaksi *e-commerce*, di periode awal triwulan IV 2025 tumbuh membaik walaupun masih terkontraksi sebesar 18,45% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi lebih dalam sebesar 19,17% (yoy).



Grafik 2.55 Perkembangan Transaksi Komoditas Unggulan E-commerce di Jakarta (Tw IV 2025)



Sumber: BI, diolah

Grafik 2.56 Perkembangan Nilai Transaksi Transportasi Online (Tw IV 2025)



## BOKS 1

# JEF 2025:

## Mengorkestrasi Transformasi Jakarta Menuju Kota Global Melalui Penguatan Talenta dan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Sebagai Kota Metropolitan yang ekonominya ditopang sektor jasa dengan pangsa 56,40%, Jakarta memiliki potensi besar untuk bertransformasi menjadi Kota Global Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Inklusif. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta. Peran strategis ini menempatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekrif) sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dan motor penggerak penguatan daya saing kota. Pentingnya sektor ini juga tecermin dari kontribusinya terhadap PDRB DKI Jakarta yang mencapai hampir 11%.

Dalam rangka mempercepat realisasi mandat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) telah menandatangani nota kesepakatan pada Maret 2025. Kesepakatan ini menjadi fondasi kebijakan untuk

mengembangkan sektor Parekrif, mencakup pengembangan event tematik, optimalisasi koridor kreatif, hingga fasilitasi pasar global, sekaligus mendukung peran baru Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional.

Selaras dengan kebijakan strategis tersebut, Jakarta *Economic Forum* (JEF) 2025 yang telah memasuki tahun ketiga penyelenggaraan, dieskalasi menjadi format yang lebih besar dengan melibatkan unsur *pentahelix*: pemerintah, akademisi, dunia usaha, media dan komunitas termasuk masyarakat dalam mendukung semangat #JagaJakarta untuk menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi ibu kota. Kegiatan ini diwujudkan sebagai aksi konkret yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, melalui kolaborasi masif antara Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, OJK, Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, Perbankan Jakarta, dan stakeholder terkait lainnya.



Gambar B1.1 JEF Dialogue



Gambar B1.3 Booth UMKM



Gambar B1.2 JEF Policy Discussion



Gambar B1.4 Band Competition

Rangkaian kegiatan JEF 2025 telah dilaksanakan sejak awal tahun, dimulai dengan Diskusi Panel dan Peluncuran Buku "Transformasi Ekonomi Jakarta Untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan" pada Februari 2025. Aspek akademis dan konseptual diperkuat melalui Lomba Karya Tulis (LKT) JEF 2025 yang berhasil menjangkau partisipasi lebih dari 400 karya, meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Puncak dari fase konseptual tersebut adalah penyelenggaraan JEF Dialogue (23 September 2025) dan JEF Policy Discussion (22 Oktober 2025), yang diselenggarakan KPw BI Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jakarta. Mengusung tema utama "Unlocking Jakarta's Potential Through Tourism and Creative Economy", forum ini berhasil menjangkau 516 peserta dan menggali gagasan komprehensif dari berbagai perspektif, mulai dari sisi wisatawan (diwakili *Travel Influencer*, Kadek Arini), penyelenggara acara (*Event Management*, Inyo Tanius Saleh), hingga produsen film domestik (Anggia Kharisma).

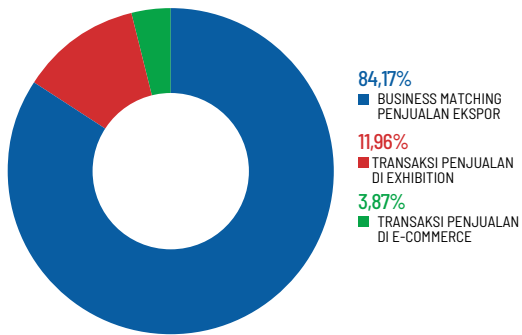
Penyelenggaraan JEF 2025 diakhiri dengan aksi konkret melalui Gelar Karya UMKM, Pangan Olahan, dan Pasar Murah di Plaza Tenggara kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta pada 25-26 Oktober 2025. Kegiatan ini menampilkan 80 booth partisipan yang terdiri dari 40 booth UMKM binaan kolaborasi lintas instansi yaitu BI, Pemprov DKI, OJK, Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, dan perbankan, 20 booth layanan dan edukasi, serta 17 booth komunitas yang



Gambar B1.5 Closing Ceremony

menampilkan inovasi dan gaya hidup kreatif warga Jakarta. Pada acara tersebut, Tim Perlindungan Konsumen melaksanakan edukasi Perlindungan Konsumen kepada lebih dari 1.200 pengunjung & 567 pengunjung juga ikut aktif pada kegiatan permainan interaktif. Dalam kesempatan tersebut, KPw BI DKI Jakarta juga berhasil memperoleh apresiasi rekor MURI sebagai kantor perwakilan Bank Indonesia dengan Penanganan Pengaduan Konsumen Sistem Pembayaran Terbanyak yaitu 4.211 Penanganan Pengaduan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yang disahkan pada *Closing Ceremony* JEF.

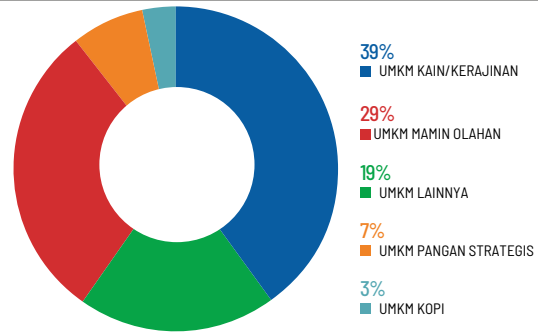
Partisipasi UMKM dalam kegiatan ini menghasilkan total realisasi transaksi penjualan dari *Exhibition* dan *E-Commerce* yang tercatat mencapai Rp668,2 juta. Dampak yang lebih substansial terlihat dari



Sumber : Laporan JEF 2025(diolah)

Grafik B1.1 Nilai Ekonomi Penjualan

keberhasilan fasilitasi komitmen bisnis melalui *Business Matching* (BM) Ekspor dengan nilai total mencapai Rp3,55 miliar. Dengan demikian, total nilai ekonomi yang terorkestrasi dalam kegiatan JEF 2025 diperkirakan mencapai lebih dari Rp4,22 miliar; menegaskan bahwa kolaborasi event berskala besar seperti JEF mampu mendukung upaya pengembangan ekonomi, sekaligus mendukung upaya peningkatan kesejahteraan pelaku industri kreatif di Ibu Kota.



Sumber : Laporan JEF 2025(diolah)

Grafik B1.2 Jumlah UMKM Terlibat

Ke depan, sinergi antara KPwBI DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta, dan seluruh stakeholder akan terus diperkuat, memastikan bahwa inisiatif ini berkelanjutan dalam mencapai visi Jakarta sebagai kota global, berdaya saing, dan berbudaya.



## BAB 3

# KEUANGAN PEMERINTAH

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. APBD-P tahun 2025 mengalami peningkatan dari APBD murni menjadi sekitar Rp91,86 triliun, atau lebih tinggi 10,81% dari APBD-P tahun sebelumnya. Anggaran tersebut terdiri dari Pendapatan Daerah Rp84,45 triliun dan Pembiayaan Daerah Rp7,40 triliun. Pembiayaan Daerah sebesar Rp7,40 triliun tersebut secara rinci terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan sebesar Rp4,43 triliun dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp2,97 triliun.

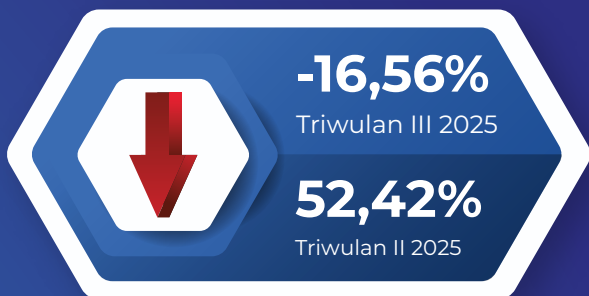
Sampai dengan triwulan III 2025, secara kumulatif capaian realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 69,91% dari pagu APBD-P 2025, lebih tinggi dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya yang sebesar 67,44% dari pagu APBD-P 2024. Capaian realisasi pendapatan yang lebih tinggi pada periode laporan jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya didukung oleh realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer yang masing-masing sebesar 72,69% dan 65,31% dari pagu APBD-P 2025.

Dari sisi Belanja Daerah, capaian realisasi pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 49,43% dari pagu APBD-P 2025, lebih rendah dari capaian triwulan sama tahun sebelumnya yang sebesar 52,53% dari pagu APBD-P 2024. Realisasi capaian yang lebih rendah disebabkan oleh realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal yang masing-masing sebesar 57,92% dan 20,31% dari pagu APBD-P 2025, lebih rendah dari capaian realisasi pada triwulan sama tahun sebelumnya.

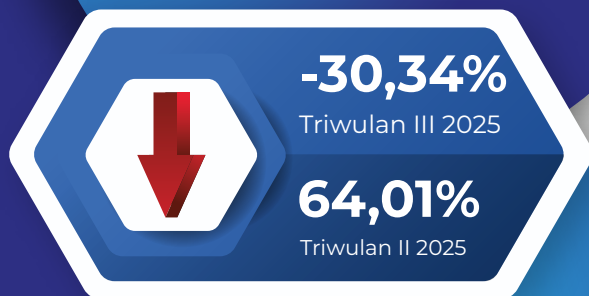
Sementara itu berdasarkan rilis data oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, kinerja APBN regional DKI Jakarta sampai dengan triwulan III 2025 mencapai Rp1.299,89 triliun atau 71,64% dari target. Adapun, capaian tersebut terdiri dari realisasi kinerja Pajak yang menunjukkan tren positif, ditopang oleh PPN Impor. Dari sisi belanja K/L di Jakarta, pada triwulan III 2025 terdapat realisasi sebesar Rp208,68 triliun atau sebesar 28,67% dari pagu, atau secara kumulatif telah mencapai 112,74% dari pagu. Beberapa highlight belanja terbesar menurut kementerian dan lembaga diantaranya adalah (1) Kementerian Pertahanan sebesar Rp21,63 triliun, mayoritas untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin, (2) Badan Gizi Nasional Rp9,07 triliun, mayoritas untuk Kegiatan MBG, (3) Polri sebesar Rp7,78 triliun, mayoritas untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dan (4) Kementerian Kesehatan sebesar Rp6,88 triliun, mayoritas untuk Jaminan Sosial Kesehatan.



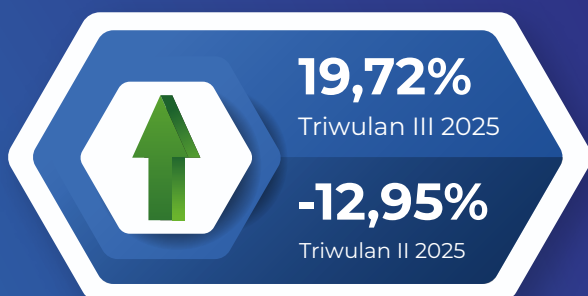
**Realisasi  
Pendapatan Daerah (yoy)**



**Realisasi Pendapatan  
Asli Daerah (yoy)**



**Realisasi  
Belanja Daerah (yoy)**



## A. GAMBARAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P) PROVINSI DKI JAKARTA 2025

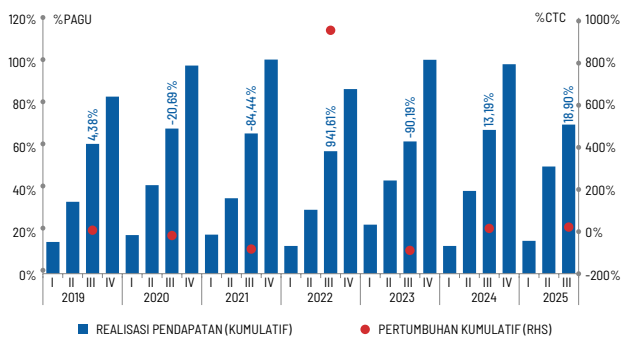
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. APBD-P tahun 2025 mengalami peningkatan dari APBD murni menjadi sekitar Rp91,86 triliun, atau lebih tinggi 10,81% dari APBD-P tahun sebelumnya (Tabel 3.1). Anggaran tersebut terdiri dari Pendapatan Daerah Rp84,45 triliun dan Pembiayaan Daerah Rp7,40 triliun. Pembiayaan Daerah sebesar Rp7,40 triliun tersebut secara rinci terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan sebesar Rp4,43 triliun dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp2,97 triliun.

## B. REALISASI PENDAPATAN DAERAH DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Sampai dengan triwulan III 2025, secara kumulatif capaian realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 69,91% dari pagu APBD-P 2025, lebih tinggi dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya yang sebesar 67,44% dari pagu APBD-P 2024 (Grafik 3.1). Capaian realisasi pendapatan yang lebih tinggi pada periode laporan jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya didukung oleh realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer yang masing-masing sebesar 72,69% dan 65,31% dari pagu

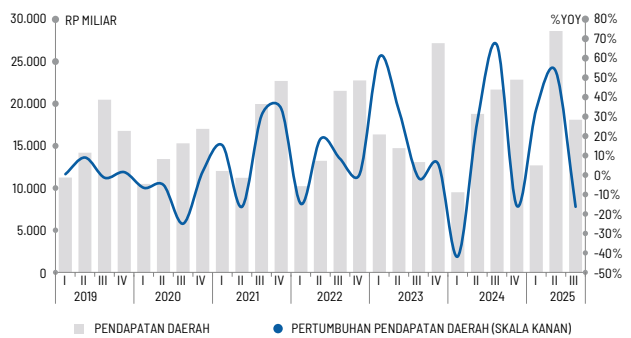
APBD-P2025, lebih tinggi dari capaian pada triwulan yang sama tahun sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 71,49% dan 59,40% dari pagu APBD-P 2024 (Grafik 3.2).

Kinerja Pendapatan Daerah di Provinsi DKI Jakarta pada triwulan III 2025 terkontraksi 16,56% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 52,42% (yoy), dengan nominal realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp17,97 triliun (Tabel 3.2). Terkontraksinya Pendapatan Daerah seiring kinerja komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada triwulan III 2025 terkontraksi 30,34% (yoy), dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 64,01% (yoy) dan triwulan sama tahun sebelumnya yang tumbuh 69,49% (yoy) (Grafik 3.4). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kinerja Pajak Daerah yang terkontraksi 36,46% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 64,01% (yoy) dan triwulan sama tahun sebelumnya yang tumbuh 86,14% (yoy) (Grafik 3.5). Selain itu, Retribusi Daerah juga tumbuh lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh tinggi sebesar 191,91% (yoy) menjadi 98,30% (yoy) pada triwulan III 2025. Komponen Lain-Lain PAD tumbuh 4,14% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 55,20% (yoy). Kendati demikian, komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencatatkan pertumbuhan tinggi sebesar 446,12% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 91,04% (yoy). Selanjutnya, dari sisi Pendapatan Transfer pada triwulan III 2025 tumbuh 59,87% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 35,87% (yoy), serta lebih tinggi dari kinerja triwulan sama tahun sebelumnya (48,64%; yoy) (Grafik 3.4). Adapun, kinerja Pendapatan Transfer didukung oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.



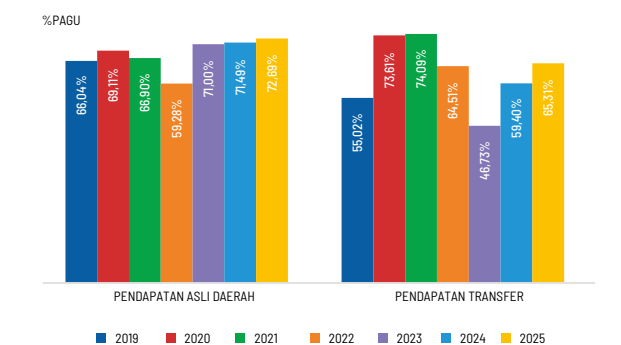
Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

Grafik 3.1 Realisasi Kumulatif Pendapatan Daerah



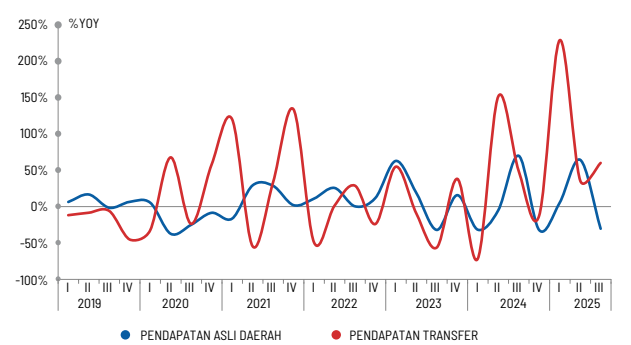
Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

Grafik 3.3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah



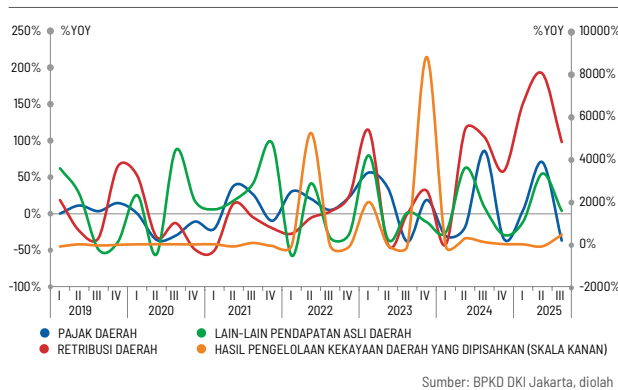
Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

Grafik 3.2 Perkembangan Capaian PAD dan Transfer DKI Jakarta Tw III 2025

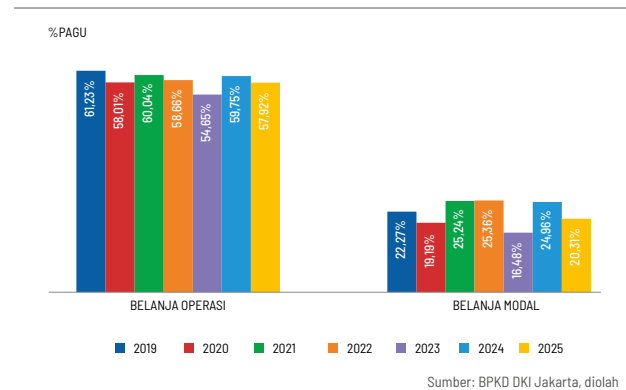


Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

Grafik 3.4 Pertumbuhan PAD dan Pendapatan Transfer



Grafik 3.5 Pertumbuhan Komponen PAD

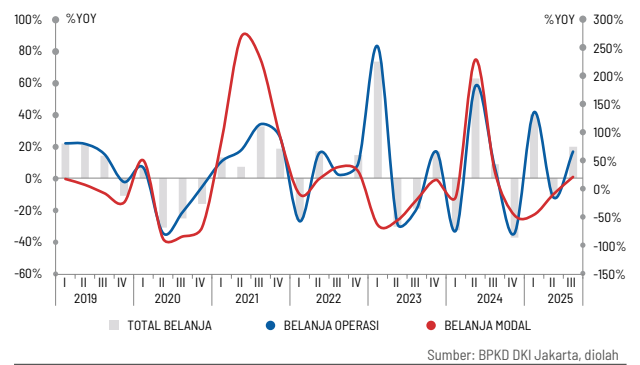


Grafik 3.7 Perkembangan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal

### C. BELANJA DAERAH APBD

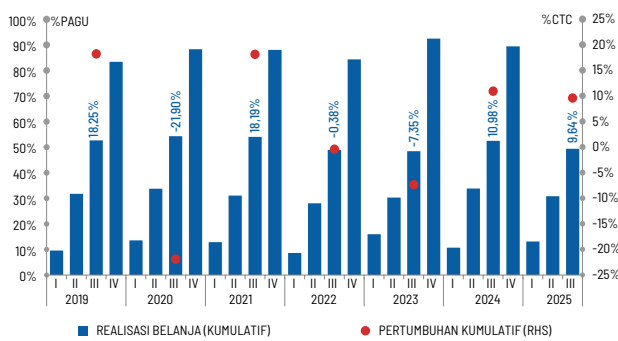
Dari sisi Belanja Daerah, capaian realisasi pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 49,43% dari pagu APBD-P 2025, lebih rendah dari capaian triwulan sama tahun sebelumnya yang sebesar 52,53% dari pagu APBD-P 2024 (Grafik 3.6). Realisasi capaian yang lebih rendah disebabkan oleh realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal yang masing-masing sebesar 57,92% dan 20,31% dari pagu APBD-P 2025, lebih rendah dari capaian realisasi pada triwulan sama tahun sebelumnya.

Sebagai komponen utama Belanja Daerah di Provinsi DKI Jakarta, Belanja Operasi mencatatkan pertumbuhan sebesar 16,64% (yoy) pada triwulan III 2025, meningkat dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 12,19% (yoy), serta lebih tinggi pula jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sama tahun sebelumnya yang sebesar 6,39% (yoy) (Grafik 3.8). Peningkatan ini didukung oleh kinerja Belanja Subsidi yang tumbuh 22,83% (yoy) pada triwulan III 2025, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 22,49% (yoy). Adapun, Belanja Subsidi salah satunya disalurkan untuk belanja subsidi transportasi bagi pengguna Transjakarta, MRTJ, dan LRTJ. Selanjutnya, Belanja Hibah tumbuh tinggi 185,47% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 58,35% (yoy) (Grafik 3.9), yang disalurkan untuk memperkuat layanan keamanan dan kerukunan masyarakat. Belanja Bantuan Sosial juga mencatatkan pertumbuhan tinggi 228,98% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 27,24% (yoy).

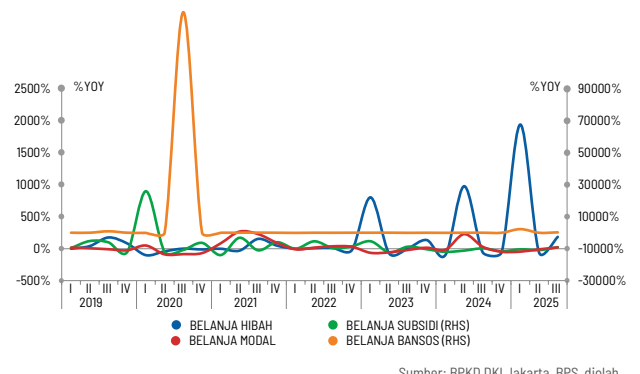


Grafik 3.8 Pertumbuhan Belanja Daerah dan Komponen Utamanya

Selanjutnya, komponen Belanja Modal juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 20,95% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 9,51% (yoy), kendati demikian, pertumbuhan tersebut masih tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan kinerja triwulan sama tahun sebelumnya yang tumbuh 29,47% (yoy) (Grafik 3.9). Lebih lanjut, Belanja Modal pada tiwulan III 2025 digunakan untuk pengadaan tanah, pembangunan dan rehabilitasi gedung layanan publik, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, peningkatan konektivitas jalan, serta pengadaan peralatan dan teknologi untuk pendidikan, pengendalian banjir, proteksi kebakaran, layanan kependudukan, dan sistem digital pemerintah. Beberapa hal tersebut kemudian tercermin dari kinerja Belanja Modal Tanah yang tumbuh tinggi 400,45% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 93,23% (yoy), Belanja Modal Aset Lainnya yang juga tumbuh tinggi



Grafik 3.6 Realisasi Kumulatif Belanja Daerah



Grafik 3.9 Pertumbuhan Belanja Hibah dan Belanja Subsidi

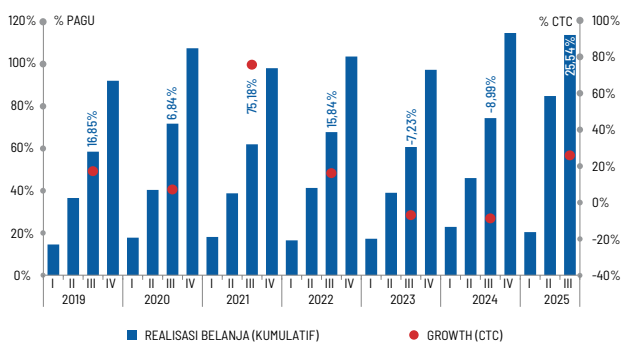
396,73% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 31,57% (yoy), Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang tumbuh 12,82% (yoy) setelah triwulan sebelumnya berkontraksi 54,96% (yoy), hingga Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang meski masih berkontraksi 16,18% (yoy), namun membaik dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 58,63% (yoy).

#### D. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH APBD

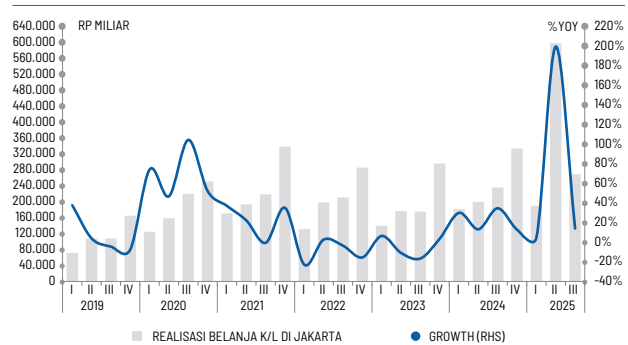
Dari sisi Penerimaan Pembiayaan pada triwulan III 2025, Provinsi DKI Jakarta mencatatkan realisasi sebesar Rp 657,28 miliar atau 68,72% dari pagu. Realisasi ini seiring dengan realisasi penerimaan pinjaman daerah, serta realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sementara itu, dari sisi realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada triwulan III 2025, Provinsi DKI Jakarta mencatatkan realisasi sebesar Rp900 miliar atau sebesar 23,39% dari pagu. Realisasi ini seiring dengan realisasi penyertaan modal daerah dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

#### E. REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DI DKI JAKARTA

Berdasarkan rilis data oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi DKI Jakarta, kinerja APBN regional DKI Jakarta sampai dengan triwulan III 2025 mencapai Rp1.299,89 triliun atau 71,64% dari target. Adapun, capaian tersebut terdiri dari realisasi kinerja Pajak yang menunjukkan tren positif, ditopang oleh PPN impor. Hingga triwulan III 2025, penerimaan Pajak netto mencapai Rp990,71 triliun atau 64,68% dari target, tumbuh 3,28% (yoy). Selanjutnya, dari sisi penerimaan Kepabeanaan dan Cukai mencapai Rp16,49 triliun atau 62,96% dari target APBN, berkontraksi 4,47% (yoy) akibat moderasi penerimaan bea masuk. Hal ini salah satunya disebabkan oleh masih berlangsungnya insentif Bea Masuk 0% untuk Importasi Kendaraan bermotor listrik sampai dengan Desember 2025. Sementara itu, Penerimaan Cukai mencatatkan peningkatan yang berasal dari importasi MMEA dan EA serta Cukai Hasil Tembakau. Lebih lanjut, realisasi Penerimaan Negara



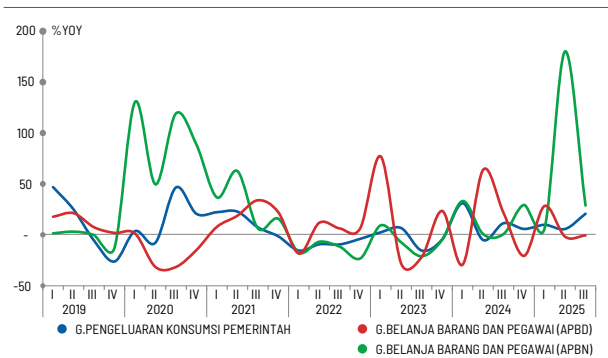
Grafik 3.10 Realisasi Kumulatif Total Belanja APBN di DKI Jakarta



Grafik 3.11 Realisasi Total Belanja K/L di DKI Jakarta

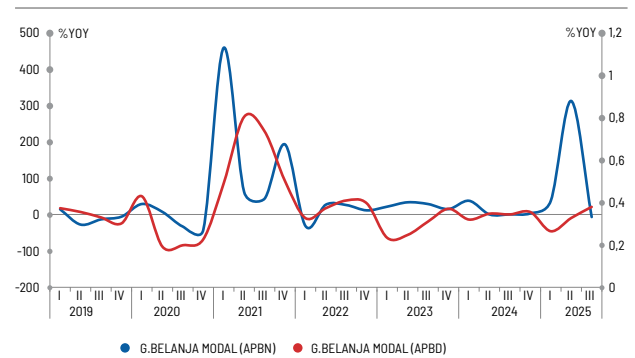
Bukan Pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp290,90 triliun atau 113,64% dari target, berkontraksi 23,09% (yoy). Meski secara keseluruhan PNBP berkontraksi, namun realisasi PNBP Pengelolaan Aset, Piutang dan Lelang sampai dengan posisi September 2025 masih tumbuh 19,02% (yoy), dengan total realisasi sebesar Rp552,05 miliar.

Dari sisi belanja K/L di Jakarta, pada triwulan III 2025 terdapat realisasi sebesar Rp208,68 triliun atau sebesar 28,67% dari pagu, atau secara kumulatif telah mencapai 112,74% dari pagu (Grafik 3.10) dan tumbuh 13,94% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 199,47% (yoy), serta triwulan sama tahun sebelumnya yang tumbuh 34,55% (yoy) (Grafik 3.11). Capaian tersebut seiring kinerja Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial yang berkontraksi masing-masing sebesar 6,66% (yoy) dan 2,91% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang masing-masing tumbuh tinggi 312,26% (yoy) dan 185,00% (yoy). Selanjutnya, realisasi Belanja Barang dan Belanja Pegawai masing-masing juga tumbuh melambat menjadi sebesar 7,84% (yoy) dan 45,61% (yoy), dari triwulan sebelumnya yang juga tumbuh tinggi masing-masing sebesar 181,07% (yoy) dan 175,27% (yoy). Adapun, sebagaimana rilis dari Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, kinerja belanja APBN akan terus diakselerasi untuk mendorong program-program prioritas pemerintah. Selama triwulan III 2025, beberapa *highlight* belanja terbesar menurut kementerian dan lembaga diantaranya adalah (1) Kementerian Pertahanan sebesar Rp21,63 triliun, mayoritas untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin, (2) Badan Gizi Nasional Rp9,07 triliun, mayoritas untuk Kegiatan MBG, (3) Polri sebesar Rp7,78 triliun, mayoritas untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dan (4) Kementerian Kesehatan sebesar Rp6,88 triliun, mayoritas untuk Jaminan Sosial Kesehatan. Lebih lanjut, belanja non K/L mayoritas digunakan untuk Program Pengelolaan Subsidi sebesar Rp26,60 triliun dalam bentuk Subsidi Energi BBM, Subsidi Non BBM, dan Subsidi Bunga. Dukungan APBN kepada APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) juga telah terealisasi Rp17,35 triliun atau 58,32% dari pagu. Penyaluran per bulan September utamanya berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp667,28 miliar, DAU sebesar Rp20,84 miliar, dan BOP PAUD sebesar Rp12,55 miliar.



Sumber: DJPb DKI Jakarta, BPKD DKI Jakarta, diolah

Grafik 3.12 Perkembangan Belanja Barang dan Pegawai (APBN dan APBD)



Sumber: DJPb DKI Jakarta, BPKD DKI Jakarta, BPS, diolah

Grafik 3.13 Perkembangan Belanja Modal (APBN dan APBD)

Tabel 3.1 Perkembangan Pagu APBD Provinsi DKI Jakarta 2025

URAIAN	APBD-P 2023		APBD-P 2024		APBD-P 2025	
	Rp Miliar	%yoy	Rp Miliar	%yoy	Rp Miliar	%yoy
<b>PENDAPATAN</b>	<b>70.662,94</b>	<b>-9,17%</b>	<b>73.636,07</b>	<b>4,21%</b>	<b>84.454,42</b>	<b>14,69%</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>48.442,04</b>	<b>-12,97%</b>	<b>52.398,08</b>	<b>8,17%</b>	<b>54.199,20</b>	<b>3,44%</b>
Pajak Daerah	43.000,00	-5,91%	46.240,00	7,53%	48.000,00	3,81%
Retribusi Daerah	462,11	-42,73%	699,69	51,41%	1.396,30	99,56%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	545,87	-31,23%	823,00	50,77%	774,00	-5,95%
Lain-Lain PAD	4.434,07	-46,97%	4.635,39	4,54%	4.028,90	-13,08%
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>20.224,32</b>	<b>17,40%</b>	<b>20.515,70</b>	<b>1,44%</b>	<b>30.082,65</b>	<b>46,63%</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>1.996,58</b>	<b>-59,31%</b>	<b>722,29</b>	<b>-63,82%</b>	<b>172,58</b>	<b>-76,11%</b>
<b>BELANJA</b>	<b>72.144,89</b>	<b>-6,27%</b>	<b>73.790,69</b>	<b>2,28%</b>	<b>85.979,18</b>	<b>16,52%</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>60.383,69</b>	<b>2,39%</b>	<b>59.750,93</b>	<b>-1,05%</b>	<b>67.401,44</b>	<b>12,80%</b>
Belanja Pegawai	18.778,03	0,75%	20.059,08	6,82%	21.494,74	7,16%
Belanja Barang dan Jasa	27.281,51	8,82%	27.332,26	0,19%	31.382,42	14,82%
Belanja Bunga	258,00	-67,32%	256,00	-0,78%	143,00	-44,14%
Belanja Subsidi	5.908,31	-9,69%	5.603,71	-5,16%	7.011,14	25,12%
Belanja Hibah	3.707,37	31,71%	3.357,24	-9,44%	3.014,48	-10,21%
Belanja Bantuan Sosial	4.450,48	-13,00%	3.142,64	-29,39%	4.355,66	38,60%
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>10.850,18</b>	<b>0,46%</b>	<b>11.554,91</b>	<b>6,50%</b>	<b>15.253,24</b>	<b>32,01%</b>
Belanja Modal Tanah	837,73	-56,02%	496,57	-40,72%	1.160,30	133,66%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.085,13	52,67%	2.215,62	-28,18%	3.792,58	71,17%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.556,81	24,45%	3.445,38	34,75%	4.322,66	25,46%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.222,74	-9,37%	5.145,68	21,86%	5.652,34	9,85%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	147,78	-8,48%	117,37	-20,57%	169,04	44,02%
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>554,56</b>	<b>-91,74%</b>	<b>2.166,54</b>	<b>290,67%</b>	<b>2.956,60</b>	<b>36,47%</b>
Belanja Tidak Terduga	554,56	-91,74%	2.166,54	290,67%	2.956,60	36,47%
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>356,45</b>	<b>-26,47%</b>	<b>318,31</b>	<b>-10,70%</b>	<b>367,90</b>	<b>15,58%</b>
Belanja Bantuan Keuangan	356,45	-26,47%	318,31	-10,70%	367,90	15,58%
<b>SURPLUS / (DEFISIT) = PENDAPATAN - BELANJA</b>	<b>(1.481,95)</b>		<b>(154,61)</b>		<b>(1.524,75)</b>	
<b>PEMBIAYAAN</b>						
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>8.895,32</b>	<b>77,37%</b>	<b>9.270,19</b>	<b>4,21%</b>	<b>7.408,47</b>	<b>-20,08%</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	8.600,10	113,09%	3.859,86	-55,12%	4.433,85	14,87%
Penerimaan Pinjaman Daerah	295,22	-69,85%	5.410,33	1732,64%	2.974,59	-45,02%
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>7.413,37</b>	<b>26,95%</b>	<b>9.115,58</b>	<b>22,96%</b>	<b>5.883,71</b>	<b>-35,45%</b>
Penyertaan Modal Daerah	5.434,68	15,08%	7.253,91	33,47%	3.902,04	-46,21%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.802,67	74,24%	1.861,67	3,27%	1.981,67	6,45%
Pemberian Pinjaman Daerah	176,02	113,87%	-	0,00%	-	0,00%
<b>PENDAPATAN + PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>79.558,25</b>	<b>-3,93%</b>	<b>82.906,26</b>	<b>4,21%</b>	<b>91.862,89</b>	<b>10,80%</b>
<b>BELANJA + PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>79.558,25</b>	<b>-3,93%</b>	<b>82.906,26</b>	<b>4,21%</b>	<b>91.862,89</b>	<b>10,80%</b>
<b>SILPA</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	

Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

**Tabel 3.2** Rincian Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Triwulan III 2025

URAIAN	REALISASI S.D. TW III 2023			REALISASI S.D. TW III 2024			REALISASI S.D. TW III 2025		
	Rp Miliar	% APBD-P	%ctc	Rp Miliar	% APBD-P	%ctc	Rp Miliar	% APBD-P	%ctc
<b>PENDAPATAN</b>	<b>43.872,57</b>	<b>58,98%</b>	<b>-1,86%</b>	<b>49.657,94</b>	<b>67,44%</b>	<b>13,19%</b>	<b>59.043,39</b>	<b>69,91%</b>	<b>18,90%</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>34.395,08</b>	<b>65,17%</b>	<b>4,24%</b>	<b>37.458,02</b>	<b>71,49%</b>	<b>8,91%</b>	<b>39.396,91</b>	<b>72,69%</b>	<b>5,18%</b>
Pajak Daerah	30.799,41	70,64%	4,11%	33.404,04	72,24%	8,46%	34.224,15	71,30%	2,46%
Retribusi Daerah	309,67	51,61%	16,08%	413,66	59,12%	33,58%	977,55	70,01%	136,32%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	430,58	79,37%	7,34%	506,32	61,52%	17,59%	455,43	58,84%	-10,05%
Lain-Lain PAD	2.855,42	35,55%	4,05%	3.134,00	67,61%	9,76%	3.739,78	92,82%	19,33%
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>9.451,63</b>	<b>51,21%</b>	<b>-14,90%</b>	<b>12.186,24</b>	<b>59,40%</b>	<b>28,93%</b>	<b>19.646,48</b>	<b>65,31%</b>	<b>61,22%</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>25,86</b>	<b>0,82%</b>	<b>-95,71%</b>	<b>13,68</b>	<b>1,89%</b>	<b>-47,08%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>BELANJA</b>	<b>34.927,89</b>	<b>46,81%</b>	<b>-7,35%</b>	<b>38.761,77</b>	<b>52,53%</b>	<b>10,98%</b>	<b>42.496,59</b>	<b>49,43%</b>	<b>9,64%</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>33.001,22</b>	<b>55,33%</b>	<b>-4,44%</b>	<b>35.701,32</b>	<b>59,75%</b>	<b>8,18%</b>	<b>39.035,73</b>	<b>57,92%</b>	<b>9,34%</b>
Belanja Pegawai	12.435,04	67,87%	-5,51%	14.515,56	72,36%	16,73%	13.681,03	63,65%	-5,75%
Belanja Barang dan Jasa	14.449,50	52,48%	0,07%	15.241,31	55,76%	5,48%	17.729,33	56,49%	16,32%
Belanja Bunga	165,17	64,02%	-19,72%	142,65	55,72%	-13,64%	110,07	76,98%	-22,83%
Belanja Subsidi	2.038,17	33,88%	-16,38%	1.831,52	32,68%	-10,14%	2.033,61	29,01%	11,03%
Belanja Hibah	1.813,79	61,21%	-3,17%	2.086,04	62,14%	15,01%	2.342,28	77,70%	12,28%
Belanja Bantuan Sosial	2.099,53	46,07%	-13,18%	1.884,24	59,96%	-10,25%	3.139,41	72,08%	66,61%
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.788,21</b>	<b>13,05%</b>	<b>-34,72%</b>	<b>2.883,80</b>	<b>24,96%</b>	<b>61,27%</b>	<b>3.098,22</b>	<b>20,31%</b>	<b>7,44%</b>
Belanja Modal Tanah	93,37	4,90%	-71,63%	31,89	6,42%	-65,85%	38,78	3,34%	21,62%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	663,79	20,63%	65,52%	614,39	27,73%	-7,44%	1.181,81	31,16%	92,36%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	155,61	3,93%	-76,22%	488,86	14,19%	214,16%	358,24	8,29%	-26,72%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	823,07	18,61%	-37,74%	1.618,40	31,45%	96,63%	1.410,98	24,96%	-12,82%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	52,38	26,28%	58,63%	6,32	5,38%	-87,94%	42,38	25,07%	570,99%
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Belanja Tidak Terduga	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>176,65</b>	<b>55,49%</b>	<b>0,00%</b>	<b>362,64</b>	<b>98,57%</b>	<b>105,29%</b>
Belanja Bantuan Keuangan	-	0,00%	0,00%	176,65	55,49%	0,00%	362,64	98,57%	105,29%
<b>PEMBIAYAAN</b>									
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>8.600,10</b>	<b>91,49%</b>	<b>-19,63%</b>	<b>6.542,42</b>	<b>70,57%</b>	<b>-23,93%</b>	<b>5.091,17</b>	<b>68,72%</b>	<b>-22,18%</b>
Penerimaan Pinjaman Daerah	8.600,10	107,80%	-11,54%	6.542,42	169,50%	-23,93%	4.433,85	100,00%	-32,23%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	657,27	22,10%	-32,23%
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>1.607,95</b>	<b>17,54%</b>	<b>56,71%</b>	<b>925,99</b>	<b>10,16%</b>	<b>-42,41%</b>	<b>1.370,06</b>	<b>23,29%</b>	<b>47,96%</b>
Penyertaan Modal Daerah	533,00	7,39%	-1,24%	213,68	2,95%	-59,91%	657,27	16,84%	207,59%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.074,95	60,31%	121,00%	712,31	38,26%	-33,74%	712,79	35,97%	0,07%
<b>PENDAPATAN + PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>52.472,67</b>			<b>56.200,36</b>			<b>64.134,56</b>		
<b>BELANJA + PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>36.535,84</b>			<b>39.687,76</b>			<b>43.866,65</b>		
<b>SILPA</b>	<b>15.936,83</b>			<b>16.512,61</b>			<b>20.267,91</b>		

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta

**Tabel 3.3** Perkembangan Pagu Belanja APBN di DKI Jakarta

KOMPONEN BELANJA	PAGU 2023		PAGU 2024		PAGU 2025	
	Rp Miliar	%yoy	Rp Miliar	%yoy	Rp Miliar	%yoy
Belanja Pegawai	264.318	3,97%	292.352	10,61%	316.245	8,17%
Belanja Barang	218.137	-21,38%	257.413	18,00%	327.466	27,21%
Belanja Modal	105.892	-17,72%	135.358	27,83%	160.016	18,22%
Belanja Bantuan Sosial	142.601	-1,13%	151.459	6,21%	133.932	-11,57%
<b>Total</b>	<b>730.949</b>	<b>-9,15%</b>	<b>836.582</b>	<b>14,45%</b>	<b>937.658</b>	<b>12,08%</b>

Sumber: DJPb Provinsi DKI Jakarta

**Tabel 3.4** Rincian Realisasi APBN di DKI Jakarta Triwulan III 2025

KOMPONEN BELANJA	REALISASI TW III 2023			REALISASI TW III 2024			REALISASI TW III 2025		
	Rp Miliar	% APBN	%yoy	Rp Miliar	% APBN	%yoy	Rp Miliar	% APBN	%yoy
Belanja Pegawai	55.822	21,70%	-3,92%	63.096	21,58%	13,03%	68.040	21,52%	7,84%
Belanja Barang	51.664	21,39%	-34,41%	72.932	28,33%	41,17%	106.194	32,43%	45,61%
Belanja Modal	37.088	23,03%	29,04%	64.400	47,58%	73,64%	60.113	37,57%	-6,66%
Belanja Bantuan Sosial	30.762	19,62%	-31,32%	35.486	23,43%	15,36%	34.453	25,72%	-2,91%
<b>Total</b>	<b>175.336</b>	<b>21,47%</b>	<b>-16,67%</b>	<b>235.914</b>	<b>28,20%</b>	<b>34,55%</b>	<b>268.800</b>	<b>28,67%</b>	<b>13,94%</b>

Sumber: DJPb Provinsi DKI Jakarta

## BAB 4

# INFLASI

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Jakarta pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 2,40% (yoy). Inflasi Jakarta tetap terkendali dalam rentang sasaran meskipun lebih tinggi dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 2,07% (yoy). Capaian inflasi ini tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi nasional. Terkendalnya inflasi Jakarta merupakan sinergi dan kolaborasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, utamanya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Berdasarkan komoditasnya, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan III 2025 yaitu tarif air minum PAM, emas perhiasan, daging ayam ras, beras, dan bawang merah. Memasuki triwulan IV 2025, perkembangan inflasi Jakarta pada Oktober 2025 tercatat mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,69% (yoy). Ke depan, inflasi IHK Jakarta diperkirakan tetap terkendali di dalam rentang sasaran  $2,5\pm 1\%$  pada 2025.



**Inflasi IHK  
DKI Jakarta (yoy)**



**2,40%**  
Triwulan III 2025

**2,07%**  
Triwulan II 2025

**0,13%**

September 2025, mtm

**Rata-rata  
Inflasi IHK (yoy)**

**2,00%**

Rerata Inflasi Tw III 2023-2025, yoy

**Inflasi IHK  
DKI Jakarta (ytd)**

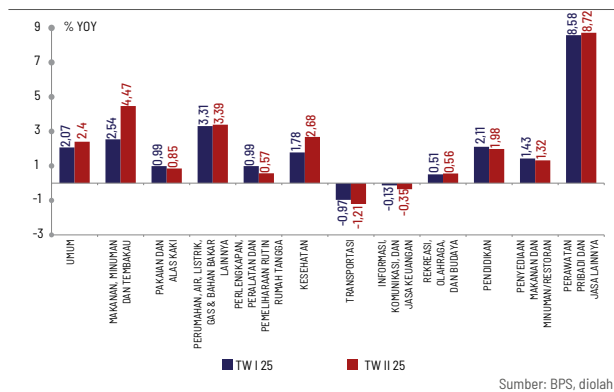
**1,70%**

September 2025, ytd

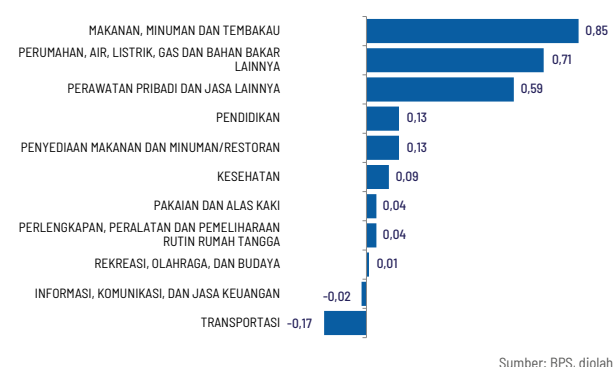
## A. KINERJA INFLASI PROVINSI TRIWULAN III 2025

**Indeks Harga Konsumen (IHK) Jakarta pada triwulan III 2025 tetap terkendali.** Inflasi IHK Jakarta tercatat sebesar 2,40% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya (2,07%; yoy). Upaya pengendalian inflasi terus diperkuat untuk menjaga inflasi tetap berada dalam rentang sasaran 2,5% ± 1%, sekaligus mengantisipasi potensi rambatan kenaikan harga komoditas global yang masih tinggi terhadap tekanan harga domestik. TPID Jakarta terus memperkuat sinergi untuk memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif, terutama melalui pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Inflasi yang lebih tinggi pada triwulan III 2025 terutama dipengaruhi oleh peningkatan harga pada seluruh kelompok pengeluaran, kecuali kelompok Transportasi serta kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan yang mengalami deflasi (Grafik 4.1). Berdasarkan kontribusinya, kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau memberikan sumbangan inflasi yang paling besar, disusul oleh kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga serta kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (Grafik 4.2). Berdasarkan komoditasnya, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan ini di antaranya adalah tarif air minum PAM, emas perhiasan, daging ayam ras, beras, dan bawang merah. Namun demikian, tekanan inflasi lebih lanjut tertahan oleh penurunan harga tarif angkutan udara, bensin, tarif kereta api, telepon seluler, dan sabun cuci piring.



Grafik 4.1 Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran



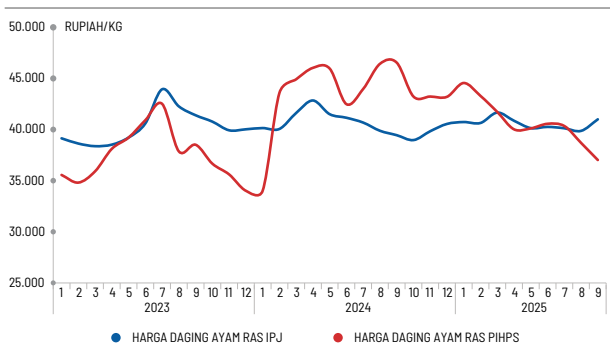
Grafik 4.2 Sumbangan Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

**Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau** menjadi penyumbang terbesar inflasi IHK Jakarta pada triwulan III 2025. Dengan andil sebesar 0,85%, kelompok ini tercatat inflasi sebesar 4,47% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 2,54% (yoy). Kontribusi inflasi terbesar berasal dari komoditas daging ayam ras, beras, dan bawang merah dengan andil masing-masing sebesar 0,20%, 0,10%, dan 0,10%. Selain itu, sejumlah komoditas turut memberikan sumbangan inflasi, antara lain minyak goreng (0,06%), cabai merah (0,05%), tomat, kopi bubuk, dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) masing-masing sebesar 0,04%, serta telur ayam ras sebesar 0,03%.

Adapun kenaikan harga pada komoditas daging ayam ras, menjadi salah satu sumber utama tekanan inflasi pada triwulan III 2025. Berdasarkan pantauan Informasi Pangan Jakarta (IPJ), rata-rata harga daging ayam ras pada triwulan III 2025 sebesar Rp40.314/kg (Grafik 4.3). Secara tahunan, rata-rata harga tersebut meningkat sebesar 0,82% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami penurunan sebesar 3,38%. Kenaikan harga ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan biaya pakan ternak serta kenaikan harga *livebird* di tingkat produsen.

Sementara komoditas beras juga masih mencatat kenaikan harga, tercermin pada hasil pantauan IPJ. Rata-rata harga beras meningkat dari Rp14.921/kg pada triwulan sebelumnya menjadi Rp15.088/kg, atau naik 2,72% (yoy) (Grafik 4.4). Peningkatan harga tersebut juga lebih tinggi dari kenaikan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 0,18% (yoy). Dalam mengantisipasi tekanan harga tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta (BI Jakarta) bersama TPID DKI Jakarta—meliputi Perum Bulog Kanwil Jakarta-Banten, BUMD pangan, serta OPD terkait—memperkuat langkah *debottlenecking* pada isu beras, khususnya melalui percepatan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Pada triwulan III 2025, BI Jakarta melakukan koordinasi intensif untuk memastikan kelancaran distribusi SPHP, antara lain melalui kerjasama dengan Perumda Pasar Jaya untuk menyalurkan beras SPHP di gerai pangan yang dikelola Pasar Jaya. Dari sisi pasokan, stok beras Jakarta juga terjaga pada level yang tinggi dengan dominasi pasokan milik Bulog (79%) dengan rata-rata sebesar 240.329 ribu ton pada triwulan III 2025.

Komoditas bawang merah juga menjadi komoditas yang mencatat kenaikan harga, tercermin dari hasil pantauan IPJ serta aplikasi Pemantauan Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) DKI Jakarta. Berdasarkan PIHPS, harga rata-rata bawang merah mencapai Rp72.544/kg, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar Rp66.042/kg (Grafik 4.5). Secara tahunan, harga bawang merah meningkat signifikan sebesar 54,73% (yoy), melampaui kenaikan pada triwulan sebelumnya yang hanya sebesar 4,36% (yoy). Kenaikan harga tersebut dipengaruhi oleh mundurnya masa tanam karena anomali iklim yang juga berdampak pada penurunan luas tanam pada dua bulan sebelumnya. Dari sisi pasokan, rata-rata stok bawang merah selama triwulan III 2025 hanya sebesar 88 ton, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang bisa mencapai 112 ton.



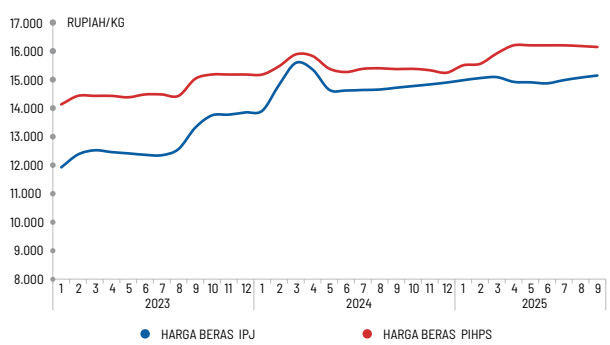
Sumber: IPJ, PIHPS, diolah

Grafik 4.3 Perkembangan Harga Daging Ayam Ras



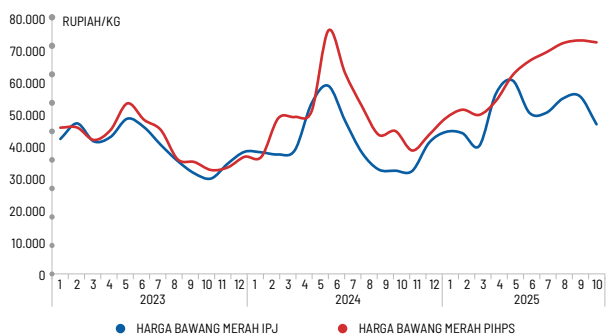
Sumber: SPH, diolah

Grafik 4.6 Perkembangan Harga Emas Perhiasan Jakarta



Sumber: IPJ, PIHPS, diolah

Grafik 4.4 Perkembangan Harga Beras



Sumber: IPJ, PIHPS, diolah

Grafik 4.5 Perkembangan Harga Bawang Merah

**Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Rumah Tangga** menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua inflasi IHK Jakarta pada triwulan III 2025. Kelompok ini mencatat inflasi 3,39% (yoy) dengan andil 0,71%, sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 3,31% (yoy). Tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh penyesuaian tarif air minum PAM pada awal 2025, dengan andil mencapai 0,63%. Kenaikan tarif PAM tersebut sebelumnya sempat terkompensasi oleh kebijakan stimulus diskon tarif listrik pada awal tahun, mengingat tarif listrik memiliki bobot terbesar dalam kelompok ini. Selain itu, sewa rumah, upah tukang mandor, dan uran pembuangan sampah turut memberikan kontribusi masing-masing sebesar 0,05%, 0,02%, dan 0,01%.

**Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya** juga turut berkontribusi terhadap inflasi Jakarta pada triwulan laporan. Kelompok ini mencatat andil sebesar 0,59% dengan inflasi yang meningkat dari 8,58% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 8,72% (yoy). Tekanan inflasi masih didominasi oleh kenaikan harga emas perhiasan, yang menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar Jakarta sepanjang satu tahun terakhir. Pada triwulan III 2025, emas perhiasan mencatat inflasi 36,96% (yoy), meningkat dari 34,83% (yoy) pada triwulan sebelumnya, dengan andil 0,46%. Kenaikan harga tersebut sejalan dengan lonjakan harga emas dunia akibat meningkatnya ketidakpastian situasi global. Berdasarkan pantauan Survei Pemantauan Harga (SPH) Bank Indonesia, rata-rata harga emas perhiasan mencapai Rp1.495.347/gram atau naik 35,54% (yoy). Selain emas, komoditas seperti pasta gigi dan parfum ikut berkontribusi masing-masing sebesar 0,02%, serta sabun mandi, deodorant, sampo, dan bedak masing-masing sebesar 0,01%.

Pada triwulan III 2025, **kelompok Pendidikan** memberikan kontribusi sebesar 0,13% terhadap inflasi IHK Jakarta. Inflasi pada kelompok ini sedikit melandai dari 2,11% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 1,98% (yoy). Tekanan inflasi terutama berasal dari kenaikan tarif biaya sekolah jenjang SMP dan SD, dengan andil masing-masing sebesar 0,06% dan 0,04%. Selain itu, biaya bimbingan belajar juga turut menyumbang inflasi kelompok ini dengan andil sebesar 0,01%.

Inflasi IHK Jakarta pada triwulan II 2025 juga disumbang oleh kelompok **Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran** yang memberikan andil sebesar 0,13%. Kelompok ini mencatat inflasi sebesar 1,32% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 1,43% (yoy). Tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga nasi dengan lauk, kue kering berminyak, dan es, yang masing-masing menyumbang andil 0,02%. Selain itu, sejumlah komoditas seperti ketoprak, sop, soto, ayam goreng, hamburger, dan mie turut memberikan kontribusi masing-masing sebesar 0,01%. Inflasi yang lebih landai pada kelompok ini disebabkan oleh masih terbatasnya konsumsi masyarakat.

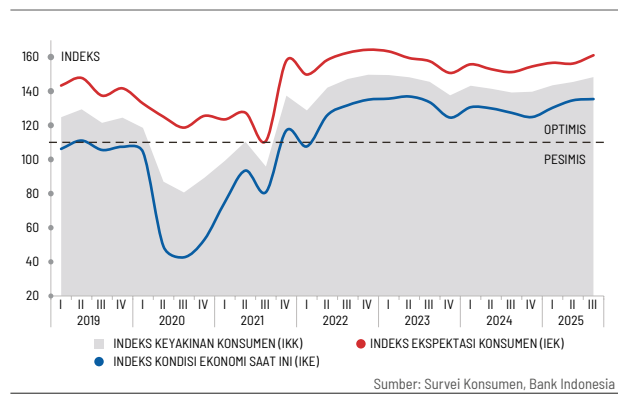
**Kelompok Kesehatan** juga memberikan andil inflasi sebesar 0,09% pada triwulan III 2025. Kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 2,68% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya (1,78%; yoy). Tekanan

inflasi terutama berasal dari kenaikan tarif rumah sakit dengan andil sebesar 0,04%. Selain itu, sejumlah komoditas seperti obat flu, obat gosok, obat dengan resep, vitamin, tarif pemeriksaan kesehatan (*check up*), dan tarif dokter umum turut menyumbang inflasi masing-masing sebesar 0,01%.

**Kelompok Pakaian dan Alas Kaki** memberikan kontribusi sebesar 0,04% terhadap inflasi IHK Jakarta pada triwulan III 2025. Tekanan inflasi kelompok ini bersumber dari peningkatan harga komoditas baju muslim pria yang memberikan andil sebesar 0,01%, namun tekanan inflasi melandai dari triwulan sebelumnya sebesar 0,99% (yoy) menjadi 0,85% (yoy). **Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga** turut berkontribusi pada inflasi Jakarta dengan andil sebesar 0,04%. Inflasi pada kelompok ini juga melandai dari triwulan sebelumnya yang sebesar 0,99% (yoy) menjadi 0,57% (yoy). Tekanan inflasi terutama berasal dari peningkatan upah asisten rumah tangga yang menyumbang andil inflasi sebesar 0,04%, sejalan dengan pola historis penyesuaian upah di pertengahan tahun. Selain itu, komoditas lemari pakaian turut memberikan kontribusi sebesar 0,01%. **Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya** menyumbang andil sebesar 0,01% terhadap inflasi Jakarta pada triwulan laporan. Kelompok ini mencatat inflasi 0,56% (yoy), meningkat dibandingkan 0,51% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi terutama berasal dari kenaikan tarif bioskop sebesar 0,01%, seiring tingginya jumlah penonton yang didorong oleh berbagai film produksi lokal yang memiliki rating tinggi pada periode tersebut.

Tekanan inflasi IHK Jakarta pada triwulan III 2025 tertahan oleh deflasi pada kelompok **Transportasi**. Kelompok ini mengalami deflasi 1,21% (yoy), dengan andil sebesar -0,17%, lebih dalam dari deflasi 0,97% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Deflasi terutama bersumber dari penurunan tarif angkutan udara, seiring penurunan harga avtur, yang memberikan andil sebesar -0,12% terhadap inflasi kelompok ini. Selain itu, deflasi kelompok ini juga bersumber dari komoditas bensin yang memberikan andil sebesar -0,08% seiring dengan adanya penurunan harga BBM non subsidi pada periode ini. Tarif kereta api juga berkontribusi pada deflasi kelompok ini dengan andil sebesar -0,02% seiring dengan adanya pemberian diskon tarif kereta api oleh PT KAI. Lebih lanjut, deflasi pada **kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan** juga turut menahan tekanan inflasi pada triwulan ini. Dengan andil sebesar -0,02%, deflasi kelompok ini tercatat lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 0,13% (yoy) menjadi 0,35% (yoy). Komoditas utama yang menjadi sumber deflasi tersebut berasal dari telepon seluler yang memberikan andil sebesar -0,02% dan juga komoditas laptop/notebook, komputer tablet, dan flash disk dengan andil masing-masing sebesar -0,01%.

Inflasi yang terkendali pada triwulan III 2025 turut mendukung optimisme masyarakat terhadap berlanjutnya pemulihan ekonomi Jakarta. Hal ini tercermin dari hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia pada triwulan III 2025, yang menunjukkan bahwa Indeks



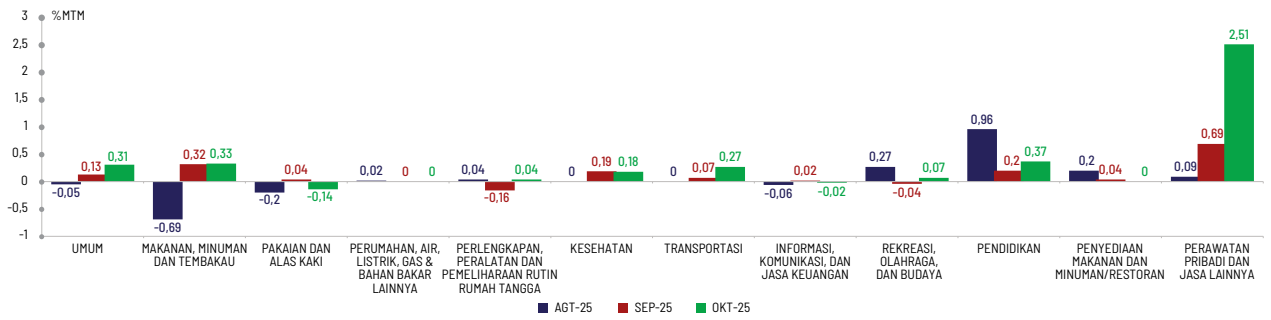
Grafik 4.7 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Kondisi Ekonomi (IKE)  
Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia

Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) dan Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE) seluruhnya berada pada level optimis (berada di atas 100) sebagaimana Grafik 4.7. Pada triwulan III 2025, IKK meningkat dari 145,57 pada triwulan sebelumnya menjadi 148,40. Kenaikan optimisme juga tercermin pada IKE yang meningkat dari 134,77 menjadi 135,50. Selanjutnya, IEK tercatat sebesar 161,27, meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 156,40.

## B. TRACKING INFLASI TRIWULAN IV 2025

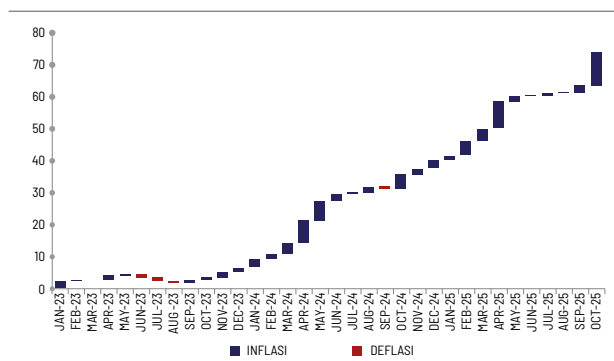
**Pada pertengahan triwulan IV 2025, laju inflasi tetap terjaga ditengah tekanan harga beberapa komoditas.** IHK Jakarta pada Oktober 2025 terpantau mengalami inflasi sebesar 0,31% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,13% (mtm). Tekanan inflasi Oktober 2025 utamanya bersumber dari meningkatnya harga pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya seiring dengan peningkatan harga emas perhiasan; kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau seiring dengan penurunan produksi cabai merah dan tingginya permintaan telur ayam ras untuk mendukung perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG); kelompok Transportasi yang disebabkan oleh kenaikan tarif angkutan udara akibat biaya operasional dan penyesuaian tarif kendaraan roda dua *online* saat musim hujan; serta kelompok Pendidikan yang bersumber dari biaya akademi/perguruan tinggi. Sementara itu, tekanan inflasi lebih lanjut tertahan oleh kelompok Pakaian dan Alas Kaki yang mengalami penurunan harga, terutama pada komoditas sepatu olahraga pria (Grafik 4.8).

**Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya** menjadi penyumbang utama inflasi Jakarta pada Oktober 2025. Dengan andil sebesar 0,18%, kelompok ini mencatat inflasi sebesar 2,51% (mtm), meningkat dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,69% (mtm) (Grafik 4.9). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan. Berdasarkan hasil Survei Pemantauan Harga (SPH), rata-rata harga emas perhiasan pada Oktober 2025 sebesar Rp1.772.070/gram, meningkat 12,85% dibandingkan rata-rata harga bulan sebelumnya sebesar Rp1.570.233/gram (Grafik 4.10). Kenaikan harga emas perhiasan ini telah berlangsung sepanjang 2025 dan sejalan



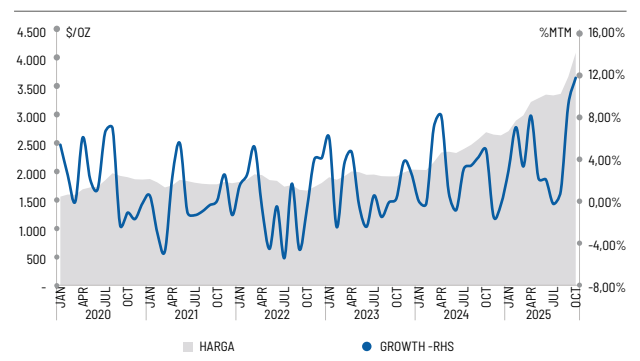
Sumber: BPS, diolah

Grafik 4.8 Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Agustus - Oktober 2025



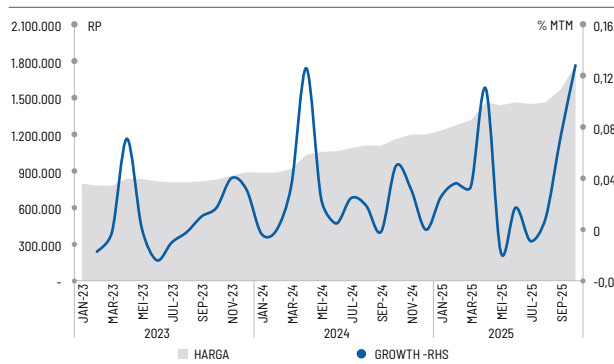
Sumber: BPS

Grafik 4.9 Perkembangan Inflasi Bulanan Emas Perhiasan DKI Jakarta (%; mtm)



Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 4.11 Perkembangan Harga Emas Global

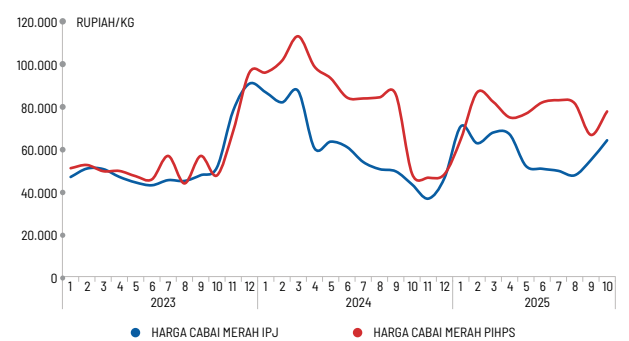


Sumber: SPH, diolah

Grafik 4.10 Perkembangan Harga Emas Perhiasan DKI Jakarta (%; mtm)

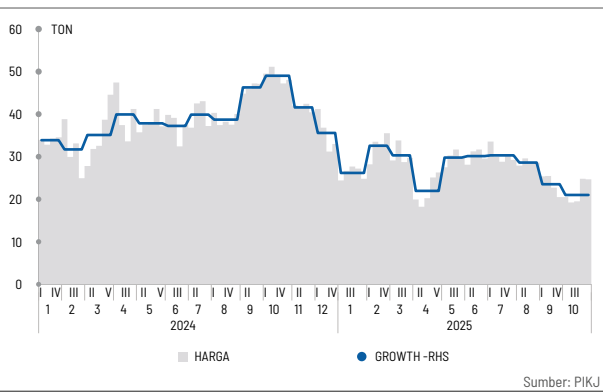
dengan tren kenaikan harga emas global di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik dunia. Secara global, harga emas pada Oktober 2025 mencapai USD4.088/Oz, meningkat 11,46% dari bulan sebelumnya dan kembali menyentuh level tertinggi (Grafik 4.11). Dengan perkembangan tersebut, inflasi tahunan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mencapai 10,42% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya (8,72%, yoy).

**Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau** juga turut menjadi penyumbang inflasi IHK Jakarta pada Oktober 2025. Dengan andil sebesar 0,07%, kelompok ini mencatat inflasi 0,33% (mtm), sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,32% (mtm). Kenaikan tersebut terutama dipicu oleh komoditas cabai merah yang memberikan andil inflasi bulanan sebesar 0,05%. Berdasarkan pemantauan Informasi Pangan Jakarta (IPJ), rata-rata harga cabai merah pada Oktober 2025 sebesar Rp64.041/kg, meningkat 15,97% dari rata-rata bulan sebelumnya sebesar Rp55.222/kg (Grafik 4.12). Kenaikan harga ini dipengaruhi oleh penurunan produksi di daerah sentra yang tercatat sebagai level terendah sepanjang tahun 2025.



Sumber: IPJ, diolah

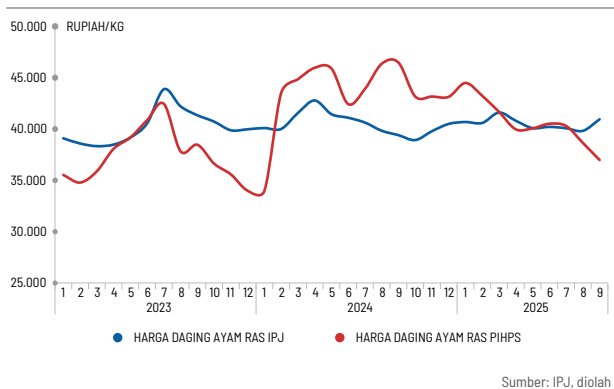
Grafik 4.12 Perkembangan Harga Cabai Merah



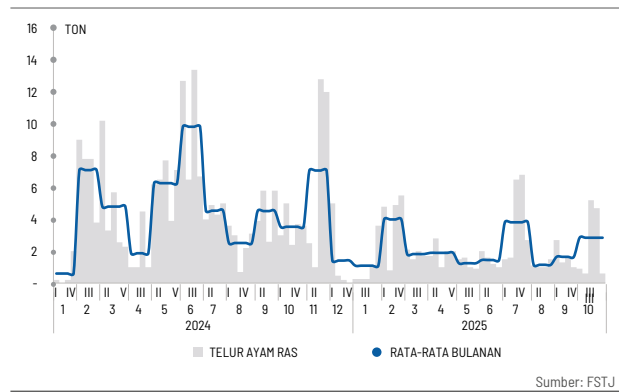
Grafik 4.13 Perkembangan Stok Cabai Merah

Kondisi tersebut tercermin dari rata-rata stok cabai merah yang sebesar 20,93 ton pada Oktober 2025, menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 23,43 ton (Grafik 4.13).

Komoditas telur ayam ras turut menyumbang inflasi pada Oktober 2025 dengan andil sebesar 0,02%. Berdasarkan data Informasi Pangan Jakarta (IPJ), rata-rata harga telur ayam ras tercatat sebesar Rp30.503/kg, meningkat 5,90% dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp28.804/kg (Grafik 4.14). Kenaikan harga ini dipicu oleh tingginya kebutuhan untuk mendukung perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta masih tingginya harga input produksi, terutama pakan dan vitamin. Sampai dengan pertengahan Oktober 2025, DKI Jakarta telah memiliki 206 unit Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) dengan penerima manfaat terdiri dari 762.021 peserta didik, 16.002 balita, 3.077 ibu hamil, dan 4.971 ibu menyusui. Telur ayam ras menjadi salah satu komponen utama menu MBG tersebut. Dari sisi pasokan, rata-rata stok telur ayam ras yang berada di gudang PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) tercatat sebesar 2,85 ton, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 1,65 ton (Grafik 4.15). Namun demikian, stok tersebut mayoritas dialokasikan untuk program Pangan Bersubsidi di Provinsi DKI Jakarta sehingga pasokan ke pasar umum diperkirakan tetap relatif terbatas.

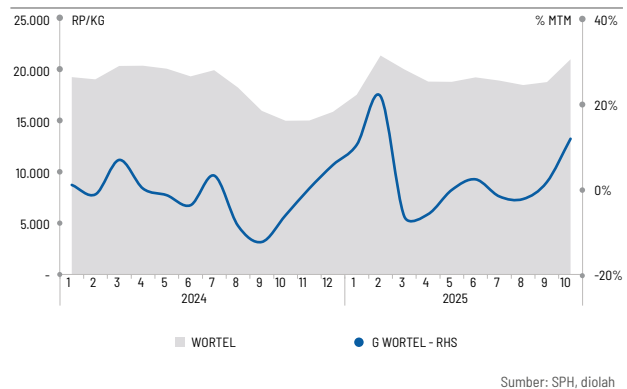


Grafik 4.14 Perkembangan Harga Telur Ayam Ras

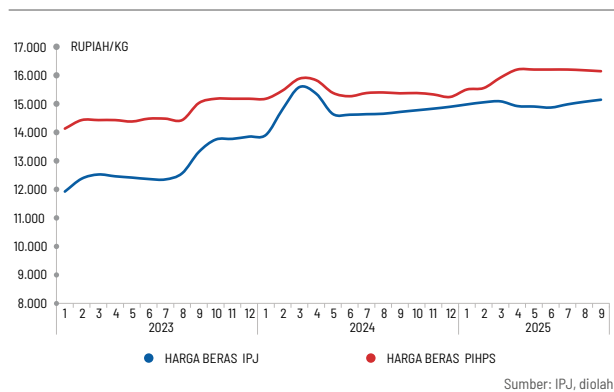


Grafik 4.15 Perkembangan Stok Telur Ayam Ras

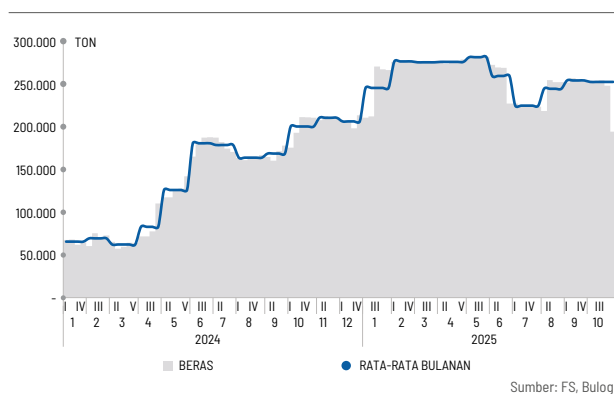
Komoditas wortel turut memberikan kontribusi terhadap inflasi bulanan DKI Jakarta pada Oktober 2025 dengan andil sebesar 0,01%, dipicu oleh kondisi cuaca yang kurang kondusif di daerah sentra produksi. Hasil SPH Bank Indonesia menunjukkan rata-rata harga wortel pada Oktober 2025 sebesar Rp21.050/kg, naik 11,86% dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp18.819/kg (Grafik 4.16). Selain itu, beras juga menjadi pendorong inflasi pada kelompok ini dengan andil sebesar 0,01%. Berdasarkan data Informasi Pangan Jakarta (IPJ), rata-rata harga beras pada Oktober 2025 tercatat Rp15.209/kg, meningkat 0,27% dari bulan sebelumnya (Grafik 4.17). Kenaikan ini relatif lebih terkendali dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,50%, sejalan dengan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta dalam mempercepat penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Hingga Oktober 2025, realisasi penyaluran SPHP beras Jakarta secara kumulatif telah mencapai 18.826 ton, atau sebesar 41,08% dari target Januari - Oktober yang sebesar 45.826 ton. Adapun channel distribusi didominasi melalui instansi pemerintah/GPM (seperti POLRI/TNI) dan ritel modern. Dari sisi pasokan, rata-rata stok beras Jakarta pada Oktober 2025 tercatat sebesar 252.986 ton, sedikit turun dari bulan sebelumnya yang sebesar 254.695 ton (Grafik 4.18).



Grafik 4.16 Perkembangan Harga Wortel

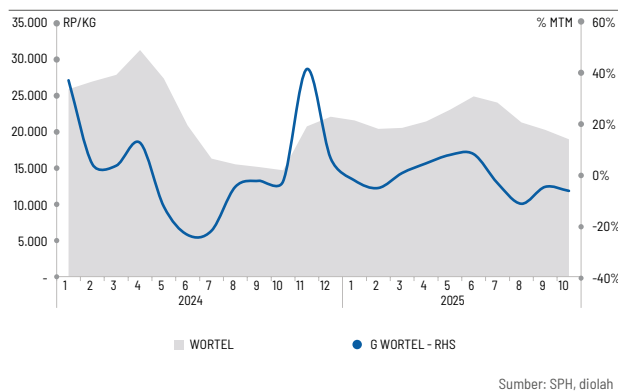


Grafik 4.17 Perkembangan Harga Beras



Grafik 4.18 Perkembangan Stok Beras

Di sisi lain, inflasi kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tertahan oleh penurunan harga tomat dan alpukat seiring dengan meningkatnya pasokan. Tomat memberikan andil deflasi bulanan sebesar 0,01%, sementara alpukat relatif kecil (~0). Penurunan harga tomat terkonfirmasi pada hasil SPH yang menunjukkan rata-rata harga pada Oktober 2025 sebesar Rp18.790/kg, turun 6,43% dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp20.082/kg (Grafik 4.19).



Grafik 4.19 Perkembangan Harga Tomat

Lebih lanjut, **kelompok Transportasi** turut memberikan kontribusi sebesar 0,04% terhadap inflasi IHK Jakarta pada Oktober 2025. Kelompok ini mencatat inflasi sebesar 0,27% (mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,07% (mtm). Kenaikan

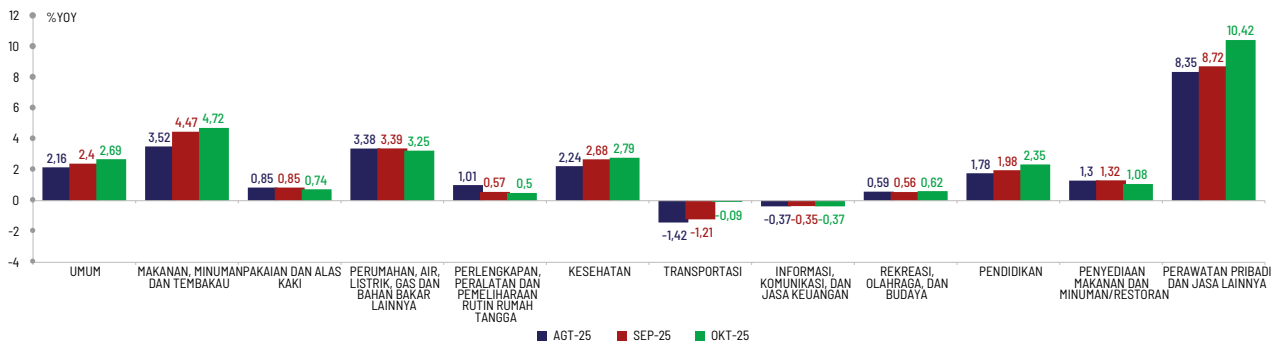
tersebut terutama dipicu oleh peningkatan tarif angkutan udara seiring meningkatnya biaya operasional sejumlah maskapai. Selain itu, penyesuaian tarif kendaraan roda dua daring turut menambah tekanan inflasi sebesar 0,01%, sejalan dengan meningkatnya frekuensi hujan di wilayah Jakarta yang mendorong kenaikan permintaan layanan transportasi daring. Sementara itu, pemberlakuan diskon tarif Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) membantu menahan tekanan inflasi lebih lanjut dengan andil deflasi sebesar sebesar 0,01%. Dengan perkembangan tersebut, kelompok Transportasi secara tahunan masih mencatat deflasi 0,09% (yoy), meskipun tidak sedalam bulan sebelumnya (-1,21%; yoy).

**Kelompok Pendidikan** memberikan kontribusi sebesar 0,02% terhadap inflasi Jakarta bulan Oktober 2025. Kelompok ini mencatat inflasi 0,37% (mtm), meningkat dari bulan sebelumnya (0,20%; mtm). Tekanan inflasi terutama bersumber dari kenaikan biaya akademi/perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta, dengan kontribusi sebesar 0,02% terhadap inflasi bulanan. Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan kelompok Pendidikan mencatat inflasi sebesar 2,35% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya (1,98%; yoy).

Kelompok lainnya yang turut berkontribusi dalam pembentukan inflasi bulanan Jakarta pada Oktober 2025 adalah kelompok **Kesehatan**. Kelompok ini mengalami inflasi sebesar 0,18% (mtm), dengan andil sebesar 0,01% atau relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya (0,19%; mtm). Tekanan inflasi kelompok ini bersumber dari peningkatan harga masker. Di sisi lain, kelompok **Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga**, kelompok **Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga**, kelompok **Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan**, serta kelompok **Rekreasi, Olahraga, dan Budaya** tidak memberikan sumbangan yang signifikan terhadap inflasi bulanan Jakarta pada Oktober 2025.

Inflasi IHK DKI Jakarta pada Oktober 2025 tertahan oleh deflasi pada kelompok **Pakaian dan Alas Kaki** yang tercatat mengalami penurunan harga sebesar 0,14% (mtm) dengan andil sebesar -0,01%. Deflasi terutama bersumber dari turunnya harga sepatu olahraga pria yang memberikan sumbangan sebesar 0,01%. Dengan perkembangan tersebut, inflasi tahunan kelompok ini tercatat 0,74% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,85% (yoy).

Secara tahunan, inflasi IHK Jakarta pada Oktober 2025 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, namun tetap berada dalam rentang sasaran. Inflasi Jakarta pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,69% (yoy) (Grafik 4.20). Tekanan inflasi tahunan terutama dipicu oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil 0,90% dan inflasi 4,72% (yoy), diikuti oleh kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil 0,71% dan inflasi 10,42% (yoy), serta kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga yang berkontribusi 0,68% dengan inflasi 3,25% (yoy). Dari sisi komoditas, penyumbang utama inflasi tahunan Jakarta pada Oktober 2025 berasal dari kenaikan tarif



Grafik 4.20 Inflasi Tahunan Kelompok Pengeluaran Agustus - Oktober 2025

Sumber: BPS, diolah

air minum PAM dan emas perhiasan, masing-masing dengan kontribusi 0,63% dan 0,59%, dengan inflasi mencapai 32,06% (yoy) dan 45,12% (yoy). Selain itu, sejumlah komoditas pangan seperti daging ayam ras, cabai merah, dan bawang merah juga turut memberikan kontribusi signifikan masing-masing sebesar 0,18%, 0,12%, dan 0,11%. Namun demikian, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta senantiasa memperkuat strategi pengendalian inflasi, termasuk dalam implementasi program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sehingga inflasi tahunan Jakarta pada Oktober 2025 lebih rendah dibandingkan nasional dan relatif stabil dibandingkan dengan inflasi gabungan provinsi di Jawa (Grafik 4.21-4.22).

### C. PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI TRIWULAN III 2025

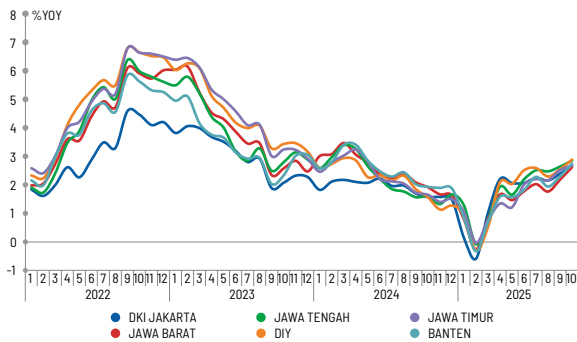
Terkendalnya inflasi di Jakarta dalam rentang sasaran tidak terlepas dari dukungan berbagai program pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta. Program pengendalian inflasi TPID di Provinsi DKI Jakarta mengacu pada kerangka 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Upaya pengendalian dilakukan dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan komoditas strategis agar tetap tersedia, mudah dijangkau, dan terjangkau harganya, terutama di tengah kenaikan permintaan masyarakat, risiko gangguan produksi pangan, serta peningkatan harga komoditas global.

Sebagai upaya merespon dinamika inflasi pangan, TPID DKI Jakarta memperkuat implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Kegiatan ini mencakup di antaranya perluasan Kerjasama Antar Daerah, program Digitalisasi Data, penguatan kelembagaan, kegiatan *Capacity Building* TPID, komitmen penyelenggaraan Operasi Pasar Murah, Fasilitasi Distribusi Pangan, Hilirisasi Pangan maupun Implementasi Gerakan *Urban Farming* dan *Digital Farming*.

#### Keterjangkauan Harga

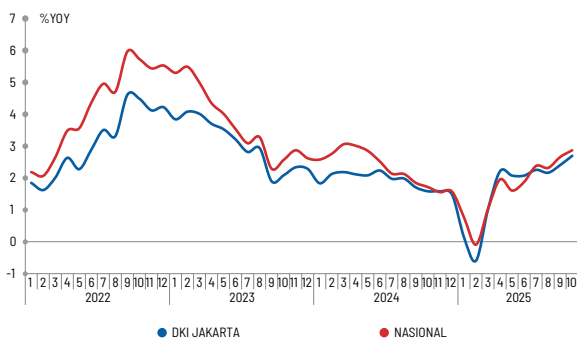
Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga, TPID Provinsi DKI Jakarta melakukan beberapa upaya di antaranya:

- 1. Program pangan bersubsidi.** Pangan bersubsidi berlangsung di seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta sepanjang triwulan III 2025 dengan penerima program yaitu masyarakat yang tergolong dalam kategori penerima manfaat pangan subsidi. Program ini merupakan kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta, BUMD Pangan DKI Jakarta bersama para *stakeholder* yang terlibat. Adapun lokasi pengambilan pangan subsidi telah ditentukan oleh Dinas KP KP Provinsi DKI Jakarta, yaitu di antaranya RPTRA, gerai kelurahan, kecamatan, serta seluruh gerai milik Perumda Pasar Jaya, Pasar Induk Beras Cipinang, dan gerai milik Perumda Dharma Jaya.
- 2. Program Pasar Murah.** Pasar Murah dilakukan secara rutin oleh BUMD pangan (PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Dharma



Grafik 4.21 Inflasi Gabungan Provinsi di Jawa

Sumber: BPS, diolah



Grafik 4.22 Inflasi Jakarta dan Nasional

Sumber: BPS, diolah

Jaya, dan Perumda Pasar Jaya) dengan menggunakan truk keliling ke seluruh wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta sepanjang bulan Juli-Agustus 2025. Adapun komoditas yang rutin disediakan antara lain berupa beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, aneka cabai, aneka bawang dan aneka daging.

- 3. Program bazar pangan murah.** Kegiatan ini berupa BULOG Goes to Rusun yang dilakukan sepanjang bulan Juli-September 2025.

### Ketersediaan Pasokan

Selanjutnya, beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan pasokan melalui pengamanan pasokan komoditas pangan, di antaranya:

1. Program Penguatan Penjajakan dan Perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD)
  - a. Penandatanganan nota kesepahaman antara PT Food Station Tjipinang Jaya dengan Koperasi Produsen Induk KUD Indonesia dan disaksikan oleh Wakil Menteri Koperasi RI dalam rangka kerja sama memperkuat usaha koperasi desa melalui kegiatan penyediaan dan distribusi pangan bagi masyarakat Indonesia.
  - b. Penandatanganan MoU kerja sama antara Perumda Dharma Jaya dengan PT Karminah Sejahtera Abadi, Blitar untuk memperkuat ketahanan pangan daerah pada 14 Agustus 2025.
2. Program penguatan *urban farming*, yang terdiri dari:
  - a. Festival *Urban Farming*, Sosialisasi, Edukasi, Promosi, dan Pendampingan
    - 1) Festival *Urban Farming* 2025 yang diselenggarakan oleh DKPKP Provinsi DKI Jakarta pada 10-12 Juli 2025, meliputi pameran produk lokal, demo tanam, lomba, talkshow edukatif, dan pemberian apresiasi kepada penggiat *urban farming* tingkat provinsi.
    - 2) Penguatan kualitas *urban farming* melalui kunjungan Mobil Klinik Tanaman ke RPTRA Ranggon Kusuma Baru (Jakarta Timur) dan Tanah Aset Kalisari (Pasar Rebo), serta pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan (lahan terbatas).
    - 3) Sosialisasi dan bimbingan teknis *urban farming* melalui pengembangan kampung mandiri pangan (MAPAN) dan pemanfaatan *rooftop* untuk *urban farming*.
    - 4) Lomba *urban farming* (budidaya melon) di 65 kelurahan dan 10 kecamatan yang diprakarsai Tim PKK Kota Administrasi Jakarta Timur.
    - 5) Pasar Tumbuh Jakarta Timur oleh Sudin KPKP Kota Administrasi Jakarta Timur setiap Jumat di minggu terakhir, sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan lokal, promosi *urban farming*, serta pemberdayaan penggiat *urban farming*, UMKM, dan komunitas di wilayah Jakarta Timur.

- b. Tanam dan Panen Serentak
  - 1) Tanam Serentak bersama PKK se-DKI Jakarta secara *hybrid* di lima wilayah kota dan satu kabupaten pada Juli 2025.
  - 2) Gerakan Menanam Serentak Jagung Ketang oleh Sudin KPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan pada 26 Agustus 2025, diikuti oleh seluruh RPTRA, kelompok tani, dan penggiat *urban farming* dengan total peserta dari 177 lokasi.
  - 3) Panen hasil *urban farming* di Pojok Garden, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, pada 28 Agustus 2025, meliputi komoditas cabai, kembang kol, terong, dan labu.
  - 4) Panen raya melon program UTI TAMELA (Untuk Timur Tanam Melon New Madesta) di kawasan *urban farming* Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar pada 16 September 2025.
  - 5) Panen melon New Modesta dan Golden Alisa sebanyak 115 kg dan 49 kg di RPTRA Bunga Rampai, Kecamatan Duren Sawit pada 25 September 2025.
- c. Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana
  - 1) Penyerahan bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian beserta pendampingan selama 6 bulan oleh PT Tabungan Negara Tbk kepada Kelompok Tani Delima Ciracas, Jakarta Timur, pada 28 Agustus 2025.
3. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Olahan Makanan dan Minuman Penyedia e-Order dengan peserta UMKM binaan dari 5 wilayah DKI Jakarta oleh Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta.
4. Perancangan sistem informasi "Si Ikan" oleh Sudin KPKP Jakarta Selatan untuk mendukung Pembinaan Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) secara berjenjang dan berkelanjutan untuk memperlancar komunikasi dan konsultasi Pokdakan dengan penyuluh pertanian.
5. Bimbingan teknis pembenihan ikan oleh Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta di Balai Benih Ikan Ciganjur.
6. Pelatihan diversifikasi olahan pangan ternak oleh Sudin KPKP Jakarta Pusat di RPTRA MH Thamrin, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen.
7. Festival Ayam, Telur, dan Susu oleh Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan ILDEX Indonesia dan pemangku kepentingan perunggasan dan persusuan, serta didukung oleh Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, lembaga teknis, dan akademisi.
8. Pelatihan diversifikasi olahan pangan ternak oleh Sudin KPKP Jakarta Timur di TC Klender.
9. Pengawasan produk pangan oleh Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta bersama Sudin KPKP Kota Jakarta Pusat pada 5 Agustus 2025 di lima lokasi (Pasar Baru Metro Atom, Pasar Timbul Kartini, Pasar

Karang Anyar, Pasar Jembatan Merah, dan Pasar Lokbin Cempaka Sari); hasil pengujian menunjukkan 100% sampel aman dari bahan berbahaya (50 sampel pertanian dan 8 sampel peternakan).

10. Pembinaan pra-Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala UKM di Jakarta Utara pada 13 Agustus 2025.
11. Penyerahan satu unit cooling system berkapasitas 500 liter oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta kepada Koperasi Produsen Sapi Perah Sapi Potong (PPSP) Jakarta Selatan pada 26 Agustus 2025.

### Kelancaran Distribusi

Adapun upaya untuk mendorong kelancaran distribusi di antaranya adalah:

1. TPID Provinsi DKI Jakarta masih terus melangsungkan kegiatan pasar murah yang menjangkau seluruh wilayah DKI Jakarta, mulai dari level kelurahan hingga rusun melalui kegiatan penjualan rutin yang dilakukan oleh BUMD Pangan dengan menggunakan truk keliling di wilayah administratif Jakarta sepanjang Juli-September 2025.
  2. Penandatanganan nota kesepahaman kolaborasi pengembangan bisnis antara PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI Perjuangan) pada 21 Agustus 2025. Kerja sama ini bertujuan memperkuat ekosistem perdagangan pangan, membuka peluang kolaborasi yang lebih inklusif, serta meningkatkan daya saing pedagang kaki lima melalui dukungan distribusi dan ketersediaan produk pangan yang berkualitas.
  3. Penandatanganan nota kesepahaman kerja sama antara Perumda Dharma Jaya dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI Perjuangan) pada 20 Agustus 2025 dalam rangka memperkuat sinergi pengembangan bisnis dan meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima.
  4. Penjualan beras SPHP melalui Jakmart (gerai pangan milik Perumda Pasar Jaya).
  5. Perluasan penjualan beras SPHP melalui ritel modern, bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Jakarta.
1. *Capacity Building* dan Rapat Koordinasi Tim Teknis TPID DKI Jakarta dengan tema “Sinergi Anggota TPID dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Global dan Domestik” sebagai upaya memperkuat koordinasi dan perumusan strategi pengendalian inflasi daerah.
  2. Kunjungan kerja ke fasilitas peternakan KIBIF di Subang oleh Perumda Dharma Jaya bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat kolaborasi pengembangan usaha peternakan serta peningkatan kapasitas produksi dan kualitas daging.
  3. Kolaborasi PT Food Station Tjipinang Jaya dengan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman dalam rangka peningkatan pengujian mutu produk pangan guna memastikan kualitas dan keamanan pangan bagi masyarakat Jakarta.
  4. *Launching* Lomba Digitalisasi Pasar Jakarta bersama Gubernur DKI Jakarta sebagai dukungan terhadap inklusi keuangan, peningkatan literasi digital, serta efisiensi transaksi belanja di pasar tradisional.
  5. PT Food Station Tjipinang Jaya meraih Penghargaan Indonesia Best BUMD Awards 2025, kategori BUMD Terbaik dengan Kemitraan Strategis dalam mendukung petani lokal dan distribusi pangan perkotaan berkelanjutan.
  6. Rapat rutin “Kamis” Tim Teknis TPID Provinsi DKI Jakarta sebagai forum monitoring perkembangan harga dan stok pangan strategis serta perumusan tindak lanjut pengendalian inflasi.
  7. Kunjungan kerja DPRD Pemalang ke Perumda Dharma Jaya pada 20 Agustus 2025 untuk membahas peningkatan kualitas rumah potong hewan serta penguatan pelayanan kesehatan hewan.
  8. Kunjungan kerja BUMD Kabupaten Pringsewu ke Perumda Dharma Jaya guna memperkuat sinergi dan membuka peluang kemitraan bisnis antardaerah dalam mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
  9. Rapat Dengar Pendapat BUMD klaster pangan DKI Jakarta bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta pada 16 September 2025 terkait ketersediaan stok pangan dan langkah pengendalian harga di wilayah DKI Jakarta.
  10. Diskusi TPID antara BI DKI Jakarta dan Perum Bulog Wilayah Jakarta-Banten pada 19 September 2025 mengenai rencana percepatan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), termasuk pemetaan kendala dan strategi pelaksanaan.
  11. Diskusi TPID antara BI DKI Jakarta dan PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) pada 25 September 2025 mengenai isu operasional PT FS serta langkah antisipasi untuk mendukung Program Pasar Murah dan Pangan Bersubsidi hingga akhir tahun 2025.

### Komunikasi Efektif

Dalam hal komunikasi efektif, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh TPID Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan koordinasi serta membangun persepsi positif masyarakat, di antaranya:





## BOKS 2

# Dinamika Harga di Jakarta Menjelang Momentum Nataru

Menjelang penutupan tahun 2025, harga bahan pangan di Jakarta menunjukkan gerak yang cukup dinamis, **namun tetap terjaga dalam kisaran yang stabil**. Beberapa komoditas bahan pangan masih memberikan tekanan inflasi, sementara sejumlah insentif dan upaya *front-loading* dari pemerintah bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan DKI Jakarta membantu menjaga stabilitas harga menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Dari sisi bahan pangan, tekanan inflasi pada tahun 2025 (sampai bulan Oktober) terutama bersumber dari komoditas daging ayam ras dan cabai merah, yang dipengaruhi oleh kenaikan biaya pakan serta penurunan produksi musiman. Selain itu, sejumlah komoditas lain juga turut memberikan andil terhadap inflasi pangan. Harga beras sempat meningkat sejak pertengahan tahun seiring kenaikan harga gabah dan terbatasnya pasokan beras premium di ritel modern. Bawang

merah mengalami kenaikan harga akibat pergeseran musim tanam dan meningkatnya harga benih, sementara harga telur ayam ras juga terdorong naik mengikuti kenaikan biaya pakan. Adapun, santan jadi dan ikan kembung mengalami peningkatan harga seiring tingginya permintaan, baik dari pasar domestik maupun ekspor.

Memasuki November 2025, dinamika harga dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan keuangan global serta kebijakan stabilisasi di tingkat domestik. Harga emas dunia kembali berada pada level tertinggi seiring tingginya permintaan sebagai aset *safe haven*, sementara harga minyak dunia cenderung menurun sejalan dengan moderasi prospek permintaan global. Di dalam negeri, harga beras mulai turun didukung oleh stabilnya pasokan dan distribusi melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dimulainya penyaluran bantuan pangan, serta adanya pemantauan harga di pasar. Harga daging ayam ras dan telur ayam juga mengalami koreksi, meski masih berada pada level relatif tinggi akibat biaya produksi dan permintaan yang meningkat. Namun demikian, harga cabai merah dan bawang merah masih menunjukkan kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi terbatasnya pasokan dari sentra produksi yang terdampak cuaca, sehingga kedua komoditas tersebut menjadi perhatian khusus untuk menjaga kelancaran pasokan dan mencegah tertahannya penurunan inflasi pangan ke depan.

Memasuki Desember dan momentum Nataru, peningkatan permintaan musiman serta curah hujan tinggi menjadi faktor risiko yang perlu

Tabel B2.1 Andil Inflasi Tahun Kalender Komoditas Pangan (Oktober 2025)

NO	KOMODITAS INFLASI	ANDIL YTD (%)
1	Daging Ayam Ras	0,15
2	Cabai Merah	0,10
3	Beras	0,06
4	Bawang Merah	0,04
5	Santan Jadi	0,02
6	Telur Ayam Ras	0,02
7	Ikan Kembung	0,02

diwaspadai. Secara historis, tekanan inflasi pada periode ini banyak bersumber dari komoditas bahan pangan, terutama bawang merah dan daging ayam ras. Meski demikian, terdapat beberapa faktor penahan inflasi yang diperkirakan dapat menyeimbangkan tekanan tersebut, di antaranya (i) pasokan bawang merah dan aneka cabai diperkirakan cukup aman pada akhir tahun, (ii) stok beras masih memadai, ditopang penyaluran SPHP dan bantuan pangan pemerintah, serta (iii) pemberian diskon tarif tol dan transportasi pada momen Nataru. Dengan kombinasi faktor risiko dan penahan tersebut, inflasi Jakarta pada momen Nataru 2025/2026 diprakirakan tetap terkendali dalam sasaran  $2,5\pm 1\%$ .

Di luar kondisi inflasi akhir tahun, perkembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta membuka peluang strategis bagi BUMD pangan untuk memperkuat peran dalam penyediaan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga pertengahan November 2025, realisasi SPPG Jakarta mencapai 279 titik (37% dari target rencana 763 SPPG). Dengan terus meluasnya implementasi MBG, kebutuhan berbagai komoditas seperti daging ayam ras, telur ayam, beras, gula pasir, daging sapi, dan minyak goreng akan meningkat. Keterlibatan aktif BUMD pangan dapat membuat pasokan lebih terencana sehingga meminimalkan risiko lonjakan harga.

Dari sisi produksi, *outlook* 2025-2026 tetap menunjukkan kondisi yang optimis. Produksi beras nasional tahun 2025 meningkat sekitar 13,55% dibanding tahun sebelumnya dan bahkan melampaui target pemerintah, memberikan sinyal positif bagi ketahanan pangan beras. Sementara itu, untuk komoditas hortikultura, perkembangan bersifat lebih dinamis. Produksi bawang merah diproyeksikan meningkat tahun depan, sedangkan produksi cabai besar dan cabai rawit diperkirakan mengalami penyesuaian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komoditas cabai masih memerlukan perhatian khusus melalui penguatan pasokan dan kelancaran distribusi agar tidak menjadi pemicu gejolak harga.

Meski sejumlah tekanan harga dan tantangan pasokan masih mewarnai akhir tahun, kondisi inflasi Jakarta secara keseluruhan tetap berada dalam rentang kendali yang solid. Berbagai langkah stabilisasi, dukungan kebijakan, serta koordinasi lintas lembaga yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa fondasi pengendalian harga Jakarta semakin kuat. Dengan kerja bersama dan respons yang cepat terhadap setiap potensi risiko, masyarakat tidak perlu merasa terlalu khawatir. Jakarta menutup tahun ini dengan prospek yang tetap positif, sekaligus pijakan yang kokoh untuk menjaga stabilitas hingga memasuki tahun 2026. Masyarakat dapat menjalani musim liburan tanpa kekhawatiran berlebih soal lonjakan harga dan menyambut tahun baru dengan harga pangan yang lebih bersahabat.



Sumber Foto: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

**Gambar B3.3** Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta Ket: a, b) Pangan Bersubsidi Bagi Masyarakat Tertentu; c, d) Monitoring Ketersediaan dan Harga Pangan; e, f) Kegiatan Urban Farming Jakarta

## BAB 5

# PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan III yang mengalami perlambatan, laju intermediasi perbankan di DKI Jakarta agak tertahan dengan profil risiko yang tetap terjaga. Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit ditopang oleh kondisi likuiditas bank yang memadai seiring permodalan yang solid serta masih kuatnya pertumbuhan DPK. Bank Indonesia terus menerapkan kebijakan makroprudensial longgar dan akomodatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketahanan bank tetap kuat, ditunjukkan oleh rasio kredit bermasalah yang rendah jauh di bawah *threshold* 5%.

Dari sisi permintaan, sektor korporasi masih menjadi penopang pertumbuhan kredit meskipun pertumbuhannya lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Profitabilitas korporasi non-keuangan juga masih pada level tinggi meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya. Kemampuan membayar korporasi tetap kuat tercermin dari meningkatnya *current ratio* dan rendahnya rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loans*) korporasi.

Sejalan dengan terjaganya kinerja sektor korporasi, secara umum kinerja sektor rumah tangga juga membaik meskipun terbatas. Kinerja sektor rumah tangga yang masih berdaya tahan tercermin dari meningkatnya Indeks Keyakinan Konsumen pada level optimis. Kredit sektor rumah tangga tumbuh positif setelah mengalami pertumbuhan negatif sejak akhir tahun 2024. Kenaikan kredit rumah tangga tersebut dipengaruhi oleh kenaikan kredit konsumsi rumah tangga ditopang oleh peningkatan kredit Multiguna, KPR, dan KKB. Risiko kredit rumah tangga masih terjaga dibawah 3% namun perlu menjadi perhatian karena menunjukkan peningkatan. Kredit sektor UMKM meningkat namun dengan risiko kredit yang juga cenderung meningkat. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta terus melakukan berbagai program untuk mendukung perbaikan produktivitas serta peningkatan kapasitas UMKM baik dari sisi SDM maupun pengembangan usaha.



**Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (yoy)**



**16,62%**

Triwulan III 2025

**9,52%**

Triwulan II 2025

**Pertumbuhan Kredit (Lokasi Proyek), yoy**



**10,69%**

Triwulan III 2025

**11,69%**

Triwulan II 2025

**Pertumbuhan Kredit UMKM, yoy**



**3,35%**

Triwulan III 2025

**4,02%**

Triwulan II 2025

**Loan-to-deposit Ratio (Lokasi Proyek), yoy**



**54,20%**

Triwulan III 2025

**56,41%**

Triwulan II 2025

**Non-Performing Loan (Lokasi Proyek), yoy**



**1,13%**

Triwulan III 2025

**1,08%**

Triwulan II 2025

## A. PERKEMBANGAN KINERJA BANK UMUM

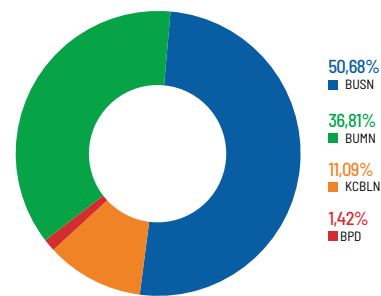
Pada triwulan III 2025, intermediasi bank umum di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kinerja yang positif dengan profil risiko yang tetap terjaga. Penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek di DKI Jakarta masih tumbuh pada tingkat yang cukup tinggi sebesar 10,69% (yoy), meskipun dibawah pertumbuhan triwulan sebelumnya (11,69%, yoy). Tertahannya laju pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh kondisi pelaku usaha yang cenderung *wait & see* melihat dampak gejolak global serta pengaruh dari paket stimulus yang dikeluarkan Pemerintah. Kondisi likuiditas perbankan cukup memadai, ditandai dengan dana pihak ketiga (DPK) bank umum yang tumbuh sebesar 16,62% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 9,52% (yoy). Dari sisi ketahanan, rasio kredit bermasalah tetap terjaga pada tingkat yang rendah yaitu sebesar 1,08%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,14% (Tabel 5.1).

Dalam upaya meningkatkan kinerja bank umum menopang pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia senantiasa mendukung konsistensi, inovasi dan sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia sebagai bauran kebijakan nasional. Bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*) melalui kebijakan moneter dan mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) melalui kebijakan makroprudensial longgar. Kedua kebijakan ini didukung oleh kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, dan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, serta berbagai kebijakan struktural yang memperkuat fondasi ekonomi dan sistem keuangan.

Bauran berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga kapasitas perbankan untuk tetap berperan positif dalam pembiayaan perekonomian domestik di tengah masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global. Kapasitas perbankan yang terjaga baik, antara

lain dapat dilihat dari kondisi kecukupan likuiditas perbankan dengan diiringi risiko kredit yang terjaga rendah jauh dibawah *threshold* 5%. Kondisi likuiditas bank yang memadai serta ditopang kebijakan insentif likuiditas dapat meringankan bank dalam hal *cost of fund*. Dengan *cost of fund* yang lebih ringan, bank berpeluang memberikan kredit/pembiayaan dengan suku bunga yang lebih rendah sehingga memacu pertumbuhan kredit.

Seiring dengan kinerja intermediasi dan ketahanan bank yang tetap kuat, total aset bank umum meningkat menjadi sebesar Rp8.587 triliun dengan pertumbuhan sebesar 9,86% (yoy) meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,44% (yoy). Jika dilihat berdasarkan kelompok bank, pangsa aset terbesar berada pada kelompok Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) yaitu 50,68%, diikuti oleh kelompok Bank Umum Milik Negara (BUMN) 36,81%, Kantor Cabang Bank Luar Negeri (KCBLN) 11,09%, dan Bank Pemerintah Daerah (BPD) 1,42% (Grafik 5.1).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.1 Komposisi Aset Berdasarkan Kelompok Bank

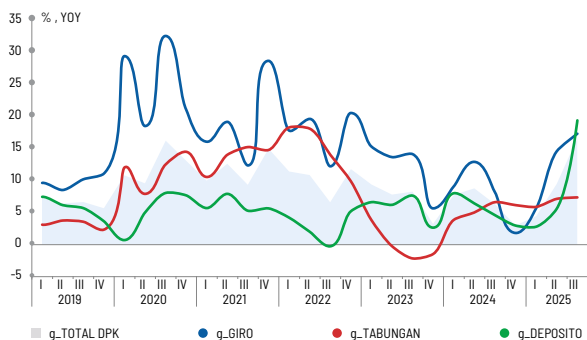
Tabel 5.1 Perkembangan Kinerja Bank Umum di Provinsi DKI Jakarta

NO	KOMPONEN BELANJA	2022				2023				2024				2025		
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
1	Total Asset	6.589	6.652	6.797	7.298	7.203	7.201	7.283	7.661	7.721	7.810	7.817	7.994	8.246	8.313	8.587
2	Dana Pihak Ketiga (DPK)	3.849	3.887	3.910	4.321	4.211	4.192	4.235	4.461	4.539	4.560	4.505	4.596	4.742	4.994	5.253
3	Kredit															
	- Lokasi Bank (LB)	2.713	2.941	2.991	3.065	3.073	3.202	3.305	3.493	3.580	3.729	3.746	3.915	3.981	4.081	4.108
	- Lokasi Proyek (LP)	1.784	1.949	1.965	2.006	2.011	2.104	2.193	2.324	2.401	2.522	2.572	2.690	2.717	2.817	2.847
4	Pertumbuhan :															
	- g. Asset (% , yoy)	11,01	9,83	7,31	9,89	9,32	8,25	7,16	4,96	7,20	8,46	7,32	4,35	6,80	6,44	9,86
	- g. DPK (% , yoy)	11,43	10,89	6,65	11,83	9,42	7,85	8,31	3,23	7,78	8,80	6,36	3,03	4,48	9,52	16,62
	- g. Kredit Lokasi Bank (% , yoy)	6,85	12,78	13,34	14,11	13,26	8,89	10,52	13,98	16,51	16,48	13,32	12,06	11,20	9,43	9,67
	- g. Kredit Lokasi Proyek (% , yoy)	4,69	11,35	8,84	14,55	12,69	7,96	11,60	15,83	19,41	19,90	17,30	15,76	13,16	11,69	10,69
5	Intermediasi (tanpa SB)															
	-Lokasi Bank	70,48	75,66	76,48	70,92	72,96	76,39	78,04	78,31	78,87	81,78	83,15	85,18	83,95	81,72	78,19
	-Lokasi Proyek	46,36	50,13	50,25	46,42	47,75	50,18	51,78	52,09	52,90	55,31	57,10	58,52	57,30	56,41	54,20
6	Non performing loan (NPL)															
	- Lokasi Bank	2,86	2,57	2,48	2,13	2,13	2,14	2,08	1,81	1,83	1,86	1,78	1,69	1,65	1,55	1,57
	- Lokasi Proyek	1,94	1,70	1,62	1,42	1,37	1,41	1,45	1,33	1,34	1,22	1,20	1,14	1,14	1,08	1,13

Sumber: Bank Indonesia, diolah

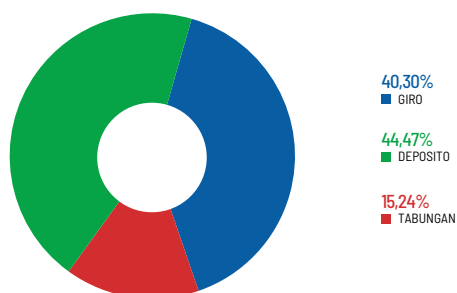
## Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum

Pada triwulan III 2025, kegiatan penghimpunan DPK tercatat tumbuh sebesar 16,62% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,52% (yoy) (Grafik 5.2). Peningkatan pertumbuhan DPK, terutama ditopang oleh pertumbuhan Giro dan Deposito. Berdasarkan pangsa, DPK di DKI Jakarta didominasi oleh Deposito dengan pangsa sebesar 44,47%, diikuti oleh Giro dengan pangsa 40,30% dan Tabungan dengan pangsa 15,24% (Grafik 5.3).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.2 Pertumbuhan DPK Jakarta

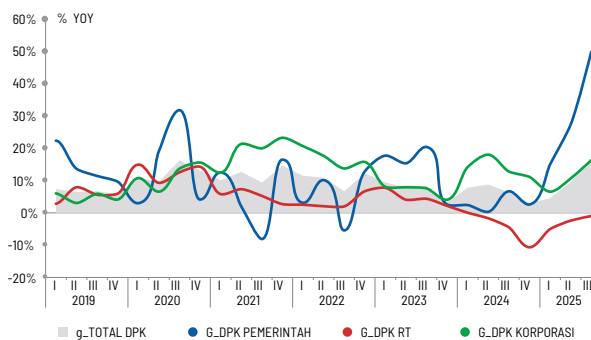


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.3 Komposisi DPK Jakarta

Berdasarkan kepemilikan, pertumbuhan DPK ditopang oleh DPK milik Korporasi dan Pemerintah. DPK korporasi tumbuh positif sebesar 16,26% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 10,63% (yoy). Pertumbuhan yang tinggi diiringi dengan pangasanya yang besar, mencapai 55,64% dari total DPK sehingga menjadikan DPK Korporasi tetap menjadi penopang utama pertumbuhan. Meningkatnya pertumbuhan DPK Korporasi diperkirakan terkait dengan sikap *wait and see* terhadap implementasi kebijakan pemerintah sertaantisipasi atas ketidakpastian situasi ekonomi global. DPK Pemerintah juga tumbuh tinggi sebesar 49,78% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya 27,03% (yoy). Kenaikan ini disinyalir dipengaruhi oleh normalisasi belanja pegawai di triwulan II dan masih terbatasnya belanja modal pada paruh pertama tahun 2025. Selain itu, kebijakan penempatan dana SAL pemerintah pada akhir triwulan III dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan signifikan tersebut. Sementara itu, pertumbuhan DPK Rumah Tangga mengalami

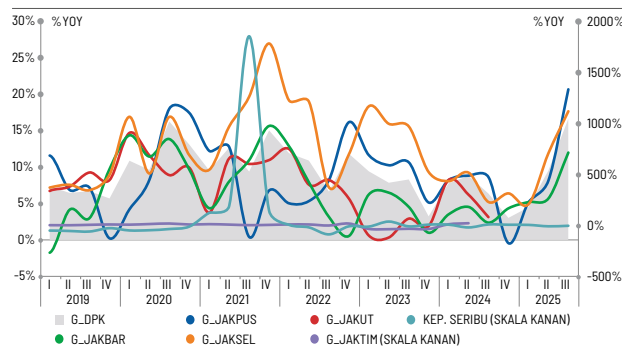
kontraksi 1,00% (yoy), namun tidak sedalam triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi 2,40% (yoy). Terjadinya kontraksi pertumbuhan DPK milik rumah tangga dipengaruhi diversifikasi penempatan dana masyarakat, terutama kelas menengah atas, kepada instrumen keuangan lainnya yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi. Selain itu, terdapat kecenderungan penarikan DPK untuk kebutuhan konsumsi oleh masyarakat kelompok menengah bawah seiring melemahnya daya beli (Grafik 5.4).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.4 Komposisi Pemilik DPK Jakarta

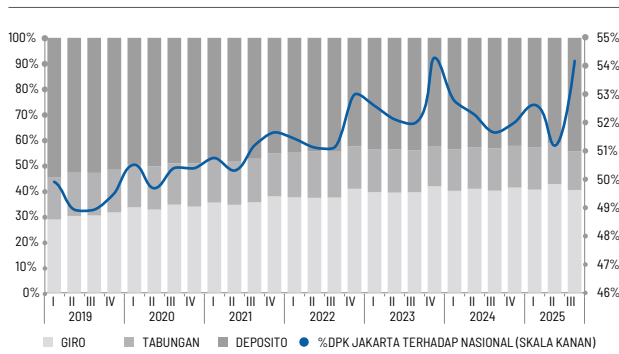
Secara spasial, DPK di seluruh wilayah Jakarta mencatatkan pertumbuhan positif, kecuali Kepulauan Seribu yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,51% (yoy). Berdasarkan kontribusinya, pertumbuhan DPK Jakarta pada triwulan III 2025 ditopang oleh Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, seiring besarnya pangsa DPK di kedua wilayah tersebut, mengingat peran keduanya sebagai kota pusat bisnis utama di Jakarta (Grafik 5.5).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.5 Perkembangan DPK Spasial Jakarta

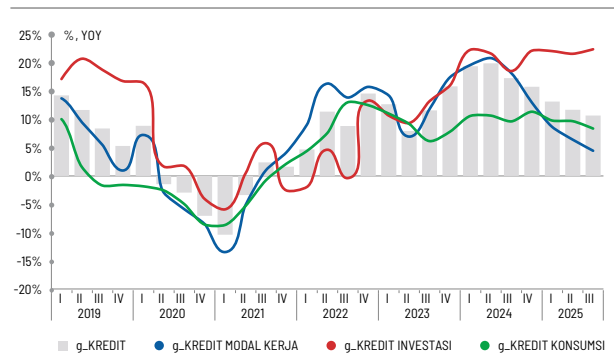
Kenaikan DPK Jakarta mendorong tetap dominannya pangsa DPK DKI Jakarta terhadap Nasional. Dengan kedudukannya sebagai kota pusat ekonomi dan bisnis, pangsa DPK DKI Jakarta mencapai lebih dari 50% DPK perbankan nasional (Grafik 5.6). Hal tersebut menjadikan DKI Jakarta tetap sebagai tumpuan penghimpunan dana perbankan secara nasional, terutama Deposito. Besarnya sumber dana di DKI Jakarta menyebabkan banyak bank yang membuka kantor pusat ataupun kantor cabang di Jakarta. Pertumbuhan DPK DKI Jakarta sangat dominan memengaruhi pertumbuhan DPK di nasional. Pertumbuhan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

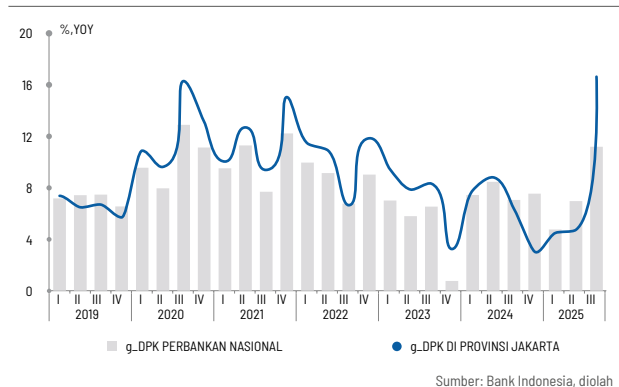
Grafik 5.6 Kontribusi DPK Jakarta terhadap DPK Nasional

DPK DKI Jakarta pada triwulan III 2025 adalah sebesar 16,62% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK Nasional yang sebesar 9,52% (yoy) (Grafik 5.7).



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.8 Pertumbuhan Kredit Jakarta

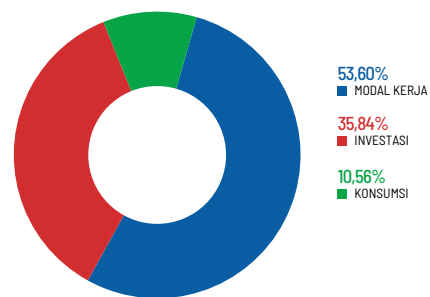


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.7 Pertumbuhan DPK Jakarta dan Nasional

## Perkembangan Kredit Bank Umum

Sejalan dengan DPK, pada triwulan III 2025, kredit bank umum di DKI Jakarta juga masih tumbuh solid meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit berdasarkan lokasi proyek tercatat tumbuh sebesar 10,69% (yoy), sedikit dibawah triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,69% (yoy). Di sisi lain, kredit berdasarkan lokasi bank mencatatkan peningkatan dari 9,43% (yoy) menjadi sebesar 9,67% (yoy) pada triwulan III 2025. Pertumbuhan kredit terutama didorong oleh kredit produktif yaitu Kredit Investasi (KI) dan Kredit Modal Kerja (KMK). Kredit KI tumbuh relatif tinggi sebesar 22,39% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 21,59% (yoy). Kredit KMK juga tumbuh positif sebesar 4,46% (yoy), meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya 6,42% (yoy). Pertumbuhan pada kelompok kredit produktif ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat (Grafik 5.8). Sementara kredit konsumsi (KK) tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 9,69% (yoy) menjadi sebesar 8,36% (yoy) pada triwulan III 2025. Berdasarkan pangsaanya, KMK memiliki pangsa terbesar terhadap total kredit Provinsi DKI Jakarta yaitu 53,60%, diikuti oleh Kredit Investasi dan Konsumsi yaitu masing-masing sebesar 35,84% dan 10,56% (Grafik 5.9).



Sumber: Bank Indonesia

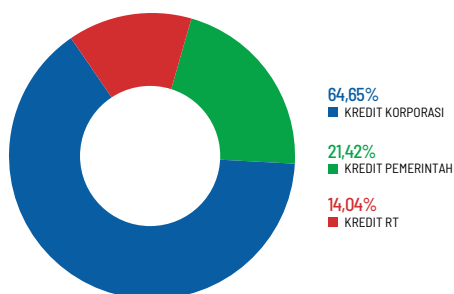
Grafik 5.9 Komposisi Kredit Jakarta Berdasarkan Penggunaan

Pertumbuhan kredit yang tetap tinggi utamanya dipengaruhi oleh permintaan kredit dari dunia usaha sejalan dengan dukungan kapasitas pembiayaan dari perbankan yang memadai sebagai dampak penerapan bauran kebijakan Bank Indonesia. Pelonggaran dan penerapan kebijakan akomodatif terhadap berbagai instrumen kebijakan makroprudensial seperti rasio *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan penguatan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), serta kebijakan insentif Likuiditas Makroprudensial yang terus diperkuat dan inovatif mampu membantu perbankan dalam mengendalikan risiko sehingga penyaluran kredit tetap optimal.

Fungsi intermediasi bank yang tetap terjaga, juga didukung oleh koordinasi dan sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah maupun otoritas keuangan, baik di lingkup global maupun domestik. Berlanjutnya penurunan suku bunga acuan BI rate seiring perkiraan tingkat inflasi nasional yang terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1%, serta terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah diharapkan dapat meningkatkan kinerja intermediasi perbankan.

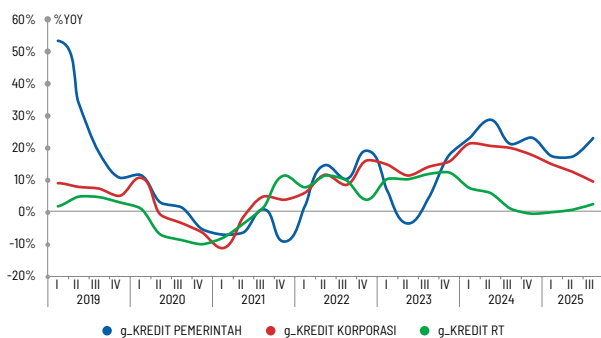
Kondisi pertumbuhan kredit yang terjaga baik, terkonfirmasi dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan bahwa Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) pada triwulan III 2025 tetap tinggi sebesar 65 pada zona optimis. Optimisme tersebut terutama didorong ekspektasi terhadap berlanjutnya perbaikan kinerja intermediasi perbankan ke depan.

Berdasarkan kelompok debitur, pada triwulan III 2025, penyaluran kredit kepada sektor korporasi masih mendominasi dengan pangsa mencapai 64,55% dari total kredit bank umum di DKI Jakarta, diikuti oleh kredit kepada sektor pemerintah sebesar 21,42% dan rumah tangga sebesar 14,04% (Grafik 5.10). Dilihat dari pertumbuhannya, kredit kelompok Pemerintah mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 22,80% (yoy), diikuti oleh kredit korporasi 9,24% (yoy). Kredit kelompok Pemerintah menunjukkan peningkatan, sedangkan kredit korporasi menunjukkan perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Adapun kredit kelompok Rumah Tangga mengalami peningkatan hingga pada triwulan III 2025 dan mencatatkan pertumbuhan yang positif sebesar 2,23% (yoy), setelah mengalami kontraksi pertumbuhan sejak triwulan IV 2024 (Grafik 5.11).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

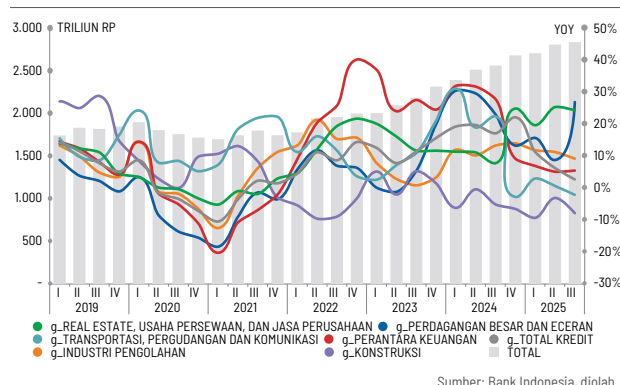
Grafik 5.10 Komposisi Kredit Berdasarkan Kepemilikan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.11 Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Kepemilikan

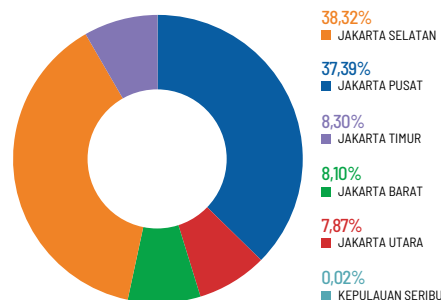
Ditinjau berdasarkan sektornya, semua sektor utama kecuali sektor konstruksi dan penyediaan akomodasi & makan minum, masih mencatat laju pertumbuhan kredit yang positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Transportasi dan Pergudangan, diikuti Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan, serta Perantara Keuangan. Sedangkan, sektor konstruksi mengalami pertumbuhan yang terkontraksi lebih dalam dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan kredit pada sektor-sektor utama tersebut secara umum sejalan dengan membaiknya kinerja pada masing-masing sektor usaha (Grafik 5.12).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.12 Pertumbuhan Kredit Sektoral

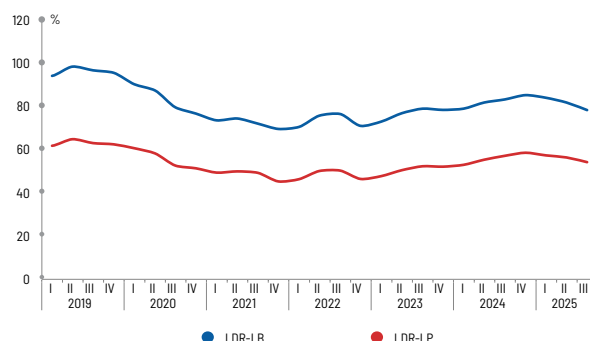
Secara spasial, penyaluran kredit perbankan terutama ditujukan ke Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat sebagai sentra perekonomian dan niaga, sejalan dengan tingginya pertumbuhan DPK pada kedua wilayah tersebut. Pada triwulan III 2025, porsi kredit yang disalurkan kepada kedua daerah tersebut melebihi 50% dari total kredit bank umum DKI Jakarta, yaitu masing-masing dengan pangsa sebesar 38,32% dan 37,39% (Grafik 5.13).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.13 Sebaran Kredit di Provinsi DKI Jakarta

Dengan melihat perkembangan laju pertumbuhan kredit triwulan laporan yang dibawah triwulan sebelumnya, mengindikasikan melambatnya rasio intermediasi perbankan. Pada triwulan III 2025, rasio intermediasi berdasarkan lokasi proyek dan lokasi bank masing-masing sebesar 54,20% dan 78,19%. Rasio ini sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 56,41% dan 81,72% sejalan dengan melambatnya pertumbuhan kredit di tengah kenaikan pertumbuhan DPK (Grafik 5.14).



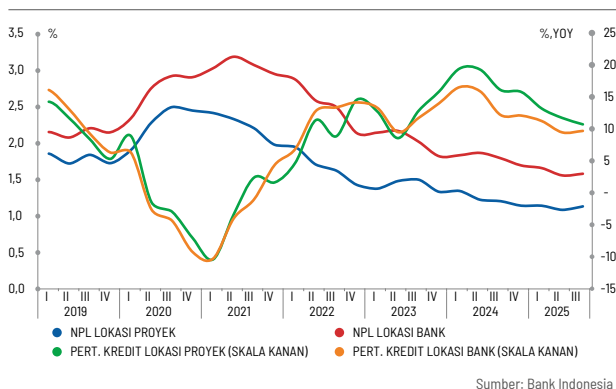
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.14 Perkembangan LDR Berdasarkan Lokasi Bank dan Lokasi Proyek

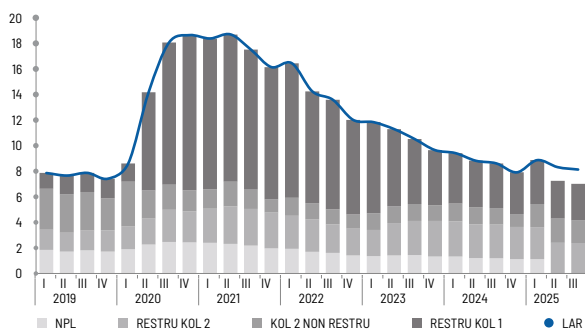
Angka rasio intermediasi perbankan berdasarkan lokasi proyek yang relatif rendah mencerminkan bahwa DKI Jakarta cenderung sebagai daerah penghimpun dana. Namun demikian, dana yang terhimpun tidak diimbangi dengan jumlah kredit yang disalurkan karena sebagian kredit juga disalurkan ke luar DKI Jakarta termasuk BodeTABEK. Hal ini menjadi salah satu indikator eratnya hubungan ekonomi dan keuangan antara Jakarta dengan daerah sekitar Jakarta sebagai satu kawasan aglomerasi.

### Risiko Kredit Bank Umum

Sementara itu, tingkat ketahanan perbankan pada triwulan laporan masih tetap terjaga dengan baik. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh tetap rendahnya rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Pada triwulan III 2025, rasio NPL kredit berdasarkan lokasi proyek (LP) adalah sebesar 1,13%, sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,08%. Rasio NPL pada kredit berdasarkan lokasi bank (LB) juga tetap rendah sebesar 1,57%, walaupun sedikit lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 1,55% (Grafik 5.15). Kendati demikian, rasio kredit kolektibilitas 2 non restrukturisasi menurun dari 1,89% menjadi 1,76% (Grafik 5.16).



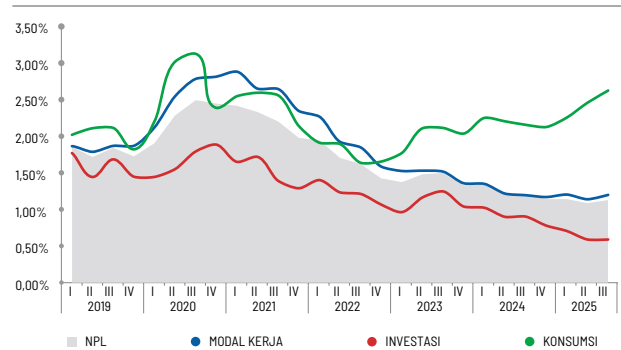
Grafik 5.15 Perkembangan NPL DKI Jakarta



Sumber: Bank Indonesia

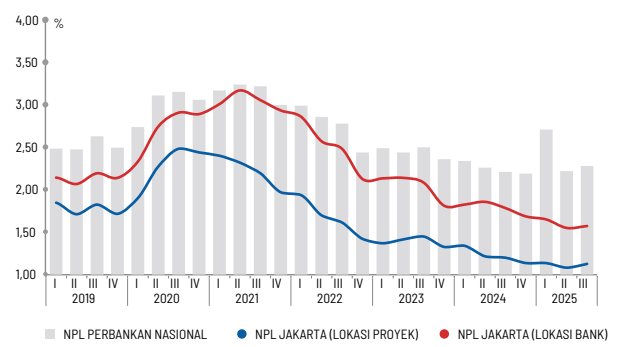
Grafik 5.16 Perkembangan LaR DKI Jakarta

Berdasarkan jenis penggunaan, rasio NPL yang meningkat dipengaruhi oleh meningkatnya rasio NPL Kredit Modal Kerja dan NPL Kredit Konsumsi di tengah menurunnya rasio NPL Kredit Investasi (Grafik 5.17). Jika dibandingkan dengan nasional, rasio NPL di DKI Jakarta baik berdasarkan lokasi proyek ataupun lokasi bank, masih tercatat lebih rendah (Grafik 5.18).



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.17 NPL di Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.18 Perbandingan NPL di Provinsi DKI Jakarta dan Nasional

Tetap terjaganya rasio NPL perbankan DKI Jakarta di bawah *threshold* 5% tidak lepas dari upaya dan strategi perbankan dalam mengantisipasi potensi kenaikan risiko kredit baik yang dipengaruhi faktor global terkait dampak kebijakan perang tarif AS maupun faktor domestik seiring kebijakan efisiensi keuangan pemerintah. Perbankan terutama bank-bank besar telah menyiapkan strategi dan penguatan manajemen risiko untuk menghadapi kenaikan risiko kredit. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain diversifikasi aset dan mengembangkan berbagai *credit risk tools* seperti penguatan aspek *credit risk scoring* dan *early warning signal* untuk mendeteksi debitur yang berpotensi mengalami pemburuan kualitas kredit.

Ke depan, risiko kredit perbankan diperkirakan akan tetap terjaga rendah namun perlu diwaspadai dampak lebih lanjut risiko makroekonomi terhadap penurunan kemampuan membayar korporasi dan rumah tangga. Dari sisi korporasi, risiko makroekonomi antara lain potensi pelemahan permintaan ekspor sejalan meluasnya implementasi tarif resiprokal AS, risiko nilai tukar di tengah tetap tingginya ketidakpastian di pasar global, serta terus berlanjutnya konsolidasi fiskal, diprakirakan dapat menahan laju pemulihan kinerja korporasi sehingga memengaruhi pendapatan dan kemampuan membayar korporasi. Adapun di sisi rumah tangga, potensi tertahannya pemulihan korporasi lebih lanjut dapat memengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja sehingga menekan kinerja rumah tangga dan memengaruhi kemampuan membayar rumah tangga.

## B. PERKEMBANGAN KINERJA SEKTOR KORPORASI

### Sumber Kerentanan dan Risiko Sektor Korporasi

Pada triwulan III 2025, ketidakpastian ekonomi global seiring berlanjutnya tensi geopolitik serta implementasi tarif dagang oleh AS, masih menjadi faktor utama yang dapat memengaruhi kinerja korporasi, terutama yang berorientasi ekspor. Hal tersebut diikuti dengan potensi gangguan rantai pasok dan volatilitas harga komoditas global yang terdampak eskalasi geopolitik, yang dapat memengaruhi kinerja korporasi, terutama yang memiliki ketergantungan pada bahan baku impor. Keketatan likuiditas di pasar global seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi, juga memengaruhi kinerja korporasi, terutama untuk korporasi-korporasi yang memiliki utang luar negeri dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap pendanaan dari luar negeri. Sementara itu di sisi domestik, kinerja korporasi dipengaruhi oleh perkembangan inflasi serta konsolidasi fiskal seiring berbagai kebijakan pemerintah baru, baik di tingkat pusat maupun daerah.

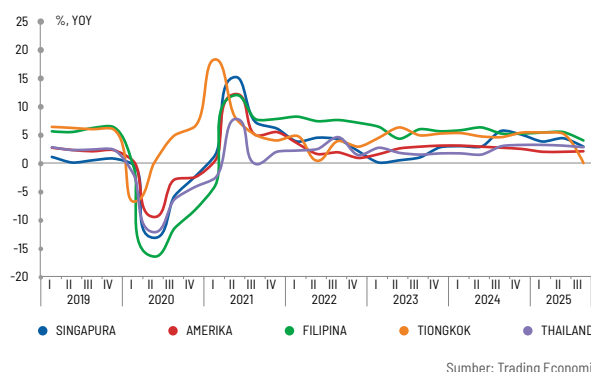
#### 1. Risiko perlambatan ekonomi global, ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi serta tensi geopolitik yang terus berlanjut

Pada triwulan III 2025, hampir semua negara mitra dagang utama Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 5.19). Hal ini sejalan dengan prakiraan pertumbuhan ekonomi global yang pada 2025 berpotensi tumbuh lebih rendah dari prakiraan sebelumnya sekitar 3,0% (yoy). Kendati demikian, kinerja ekspor kepada negara mitra dagang utama meningkat. Kondisi ini disinyalir diakibatkan efek *seasonal* pada triwulan III dan IV dimana permintaan terhadap komoditas ekspor Indonesia meningkat cukup signifikan (Grafik 5.20).

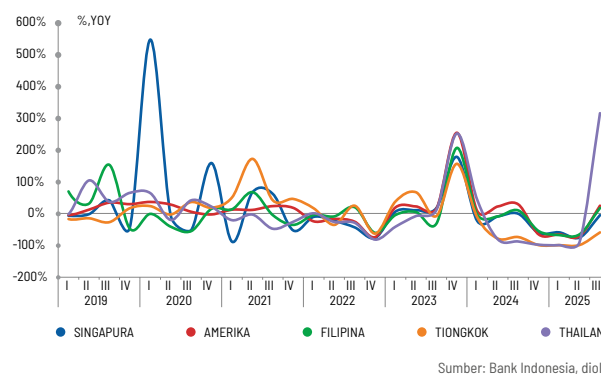
Ke depan, risiko pelemahan ekonomi global diprakirakan tetap tinggi di tengah masih berlanjutnya ketegangan geopolitik dan fragmentasi perdagangan. Kecenderungan pertumbuhan yang lebih rendah dan menurunnya inflasi mendorong sebagian besar bank sentral menempuh kebijakan moneter akomodatif. Perkembangan ini mendorong semakin kuatnya ekspektasi penurunan Fed Fund Rate (FFR). Namun demikian, kondisi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi menyebabkan tingginya volatilitas aliran modal global yang lebih lanjut berdampak terhadap perekonomian global.

Dari sisi *financial channel*, kondisi tersebut berpotensi melemahkan nilai tukar berbagai negara. Kondisi ini perlu diantisipasi karena pelemahan Rupiah akan mengakibatkan peningkatan harga barang impor yang akan berdampak pula pada penurunan kinerja sektor perdagangan di Indonesia maupun DKI Jakarta. Dari sisi *commodity channel*, volatilitas harga komoditas dapat menambah tekanan inflasi di dalam negeri yang pada gilirannya juga akan memengaruhi kinerja usaha korporasi. Dari sisi *trade channel*,

terdapat potensi meningkatkan ekspor ke AS, menggantikan produk Tiongkok dan produk negara lain yang tarif resiprokalnya lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Namun demikian, di saat bersamaan terdapat potensi membanjirnya produk Tiongkok ke negara non-AS, termasuk Indonesia yang dapat memengaruhi kinerja net ekspor.



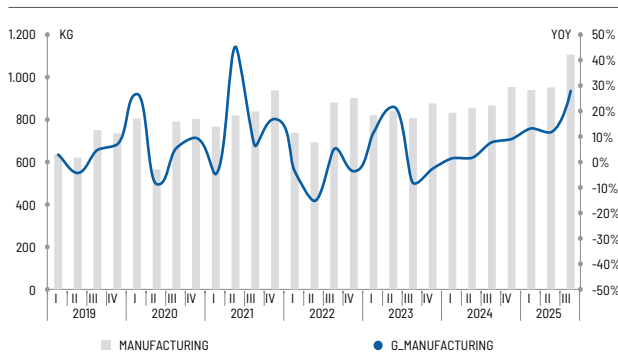
Sumber: Trading Economics  
Grafik 5.19 Pertumbuhan Ekonomi Mitra Dagang Utama



Sumber: Bank Indonesia, diolah  
Grafik 5.20 Pertumbuhan Volume Ekspor ke Negara Tujuan Utama DKI Jakarta

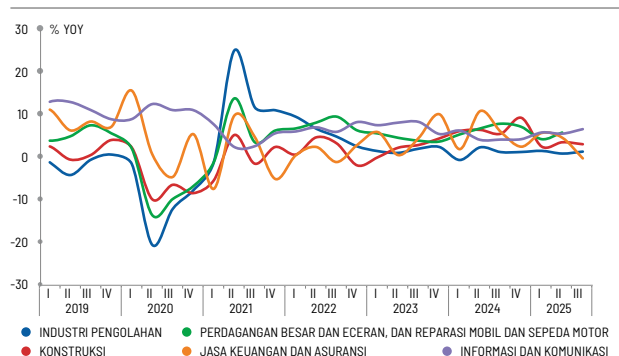
#### 2. Volume Ekspor Manufaktur sebagai industri utama Jakarta tumbuh positif namun belum cukup kuat

Ekspor produk manufaktur Jakarta pada triwulan III 2025 menunjukkan perbaikan. Ekspor produk otomotif sebagai ekspor utama produk manufaktur Jakarta yang sempat tertekan pada akhir 2024 karena permasalahan pemenuhan standar uji keselamatan, secara bertahap sudah menunjukkan pemulihan (Grafik 5.21). Ke depan, tekanan fragmentasi perdagangan dan tensi geopolitik global yang berpotensi meningkat, dapat memengaruhi pola dan volume perdagangan global. Untuk itu, penguatan kebijakan hilirisasi industri menjadi faktor kunci kemandirian dan kemajuan ekonomi nasional guna peningkatan nilai tambah sumber daya, mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor dan dapat memperkuat volume ekspor korporasi pada industri manufaktur. Selain itu, diversifikasi ekspor ke negara-negara non-tradisional menjadi kunci untuk menjaga kinerja ekspor manufaktur khususnya otomotif.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.21 Pertumbuhan Volume Ekspor Industri DKI Jakarta



Sumber: BPS

Grafik 5.22 Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Unggulan DKI Jakarta

### 3. Kegiatan investasi melanjutkan pertumbuhan yang positif dan perlu terus didukung

Realisasi kumulatif investasi di DKI Jakarta s.d. triwulan III 2025 mengalami peningkatan. Nilai realisasi PMA dan PMDN DKI Jakarta s.d triwulan III 2025 mencapai Rp204,20 triliun, atau 84,43% dari total realisasi investasi pada tahun 2024, dengan realisasi PMDN s.d triwulan III melampaui realisasi PMDN secara keseluruhan pada tahun 2024. Kenaikan ini terutama ditopang kenaikan realisasi investasi pada sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi, sektor Jasa Lainnya, sektor Perdagangan, serta sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran.

Kinerja investasi yang positif didukung oleh berlanjutnya pelaksanaan proyek-proyek strategis pemerintah dan swasta yang bersifat multitaluh. Selain itu, kondisi makroekonomi dan stabilitas keuangan yang terjaga dengan tingkat inflasi yang terkendali, juga mendorong peningkatan kepercayaan investor untuk menjadikan Jakarta sebagai salah satu pilihan investasi utama mereka. Ke depan, kepastian hukum, sinergi kebijakan pusat dan daerah, serta simplifikasi dan kejelasan proses perizinan perlu diperkuat untuk menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif.

#### Kinerja Korporasi - Umum

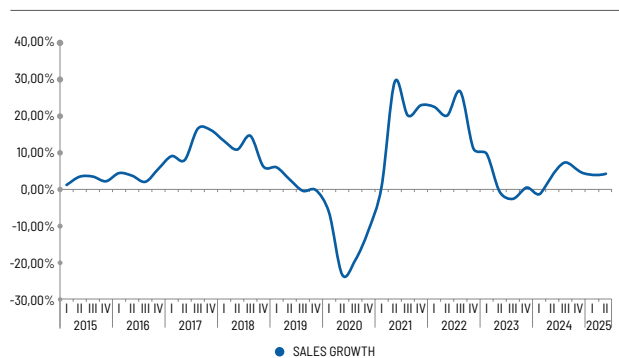
Di tengah berbagai tantangan, baik dari sisi eksternal maupun domestik, perekonomian DKI Jakarta tetap resilien dengan pertumbuhan dikisaran 5%. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi triwulan III 2025 didukung oleh pertumbuhan yang relatif stabil dengan kecenderungan perlambatan yang moderat (Grafik 5.22). Perkembangan kegiatan usaha berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengonfirmasi fenomena tersebut di DKI Jakarta. Pada triwulan III 2025, nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) dari hasil survei sedikit menurun menjadi 33,36% dari triwulan sebelumnya yang sebesar 35,84%. Perkembangan kegiatan usaha tersebut diperkirakan berdampak pada stabilnya penghasilan sehingga turut menopang konsumsi RT.

#### Kinerja Korporasi Nonkeuangan

Berdasarkan data terkini (data triwulan II 2025), kinerja korporasi non-keuangan DKI Jakarta yang terdaftar di bursa (selanjutnya disebut korporasi) tetap baik, relatif stabil terhadap kinerja triwulan I 2025. Kondisi ini ditunjukkan oleh kemampuan membayar korporasi meningkat dan profitabilitas korporasi yang tetap terjaga stabil terutama pada sektor-sektor utama Jakarta seperti Jasa Dunia Usaha, Perdagangan, dan Industri (Tabel 5.2).

Kinerja penjualan korporasi tetap solid dan menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2025, kinerja penjualan korporasi tumbuh positif sebesar 4,11% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 3,56% (yoy) (Grafik 5.23). Pertumbuhan penjualan yang positif tersebut ditopang oleh tingginya permintaan domestik seiring periode perayaan HBKN Imlek, Ramadan dan Idulfitri, serta dampak berbagai aktivitas MICE yang ada di Jakarta.

Kinerja penjualan yang masih tetap solid berdampak positif terhadap profitabilitas tahunan korporasi yang tercermin dari rasio *return on asset* (ROA) korporasi yang tetap berada pada level dikisaran 5%. Pemilik modal dan investor juga masih menerima tingkat imbal hasil yang memadai sebagaimana tercermin dari nilai *return on equity* (ROE) yang relatif stabil pada level 9,60% (Grafik 5.24).



Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah

Grafik 5.23 Penjualan Korporasi DKI Jakarta

**Tabel 5.2** Tabel Rasio Keuangan Korporasi Nonkeuangan

NO	SEKTOR	SALES GROWTH		ROA		ROE		CURRENT RATIO	
		TW I'2025	TW II'2025	TW I'2025	TW II'2025	TW I'2025	TW II'2025	TW I'2025	TW II'2025
1	Pertanian	19,10%	21,31%	2,93%	4,01%	5,78%	7,88%	1,67	1,49
2	Pertambangan	65,18%	48,97%	10,54%	8,83%	15,39%	13,08%	2,21	1,95
3	Industri	0,68%	-0,45%	5,81%	5,99%	10,80%	11,33%	1,57	1,51
4	Listrik, Gas, dan Air	6,70%	11,13%	4,28%	4,75%	7,66%	8,68%	1,89	1,59
5	Konstruksi	-10,16%	-14,88%	3,12%	0,55%	7,51%	1,30%	1,45	1,49
6	Perdagangan	3,76%	5,15%	6,90%	7,00%	14,57%	14,51%	1,34	1,33
7	Pengangkutan	2,31%	0,18%	4,12%	3,67%	12,04%	11,43%	0,62	0,56
8	Jasa dunia Usaha	-37,38%	26,05%	1,99%	4,88%	2,93%	7,05%	1,35	1,35
9	Jasa Sosial	6,25%	4,58%	5,09%	6,06%	7,48%	8,91%	1,92	2,12
<b>Agregat</b>		<b>3,56%</b>	<b>4,11%</b>	<b>5,11%</b>	<b>4,62%</b>	<b>10,47%</b>	<b>9,60%</b>	<b>1,36</b>	<b>1,31</b>

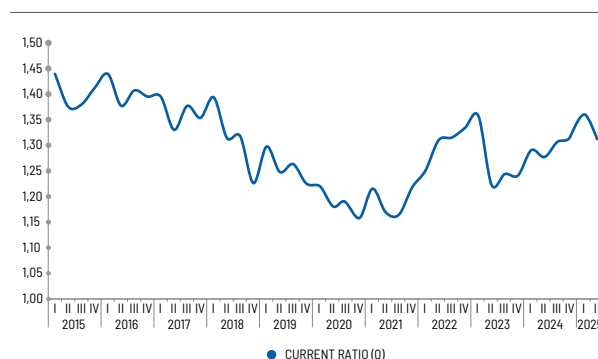
NO	SEKTOR	DER		ICR		ASSET TO		INVENTORY TO	
		TW I'2025	TW II'2025	TW I'2025	TW II'2025	TW I'2025	TW II'2025	TW I'2025	TW II'2025
1	Pertanian	0,78	0,72	2,88	5,01	1,60	1,65	7,80	8,06
2	Pertambangan	0,21	0,23	6,03	5,32	0,76	0,84	17,54	19,99
3	Industri	0,48	0,48	2,70	2,12	0,84	0,84	5,91	5,93
4	Listrik, Gas, dan Air	0,36	0,37	6,27	5,01	0,57	0,62	50,02	39,22
5	Konstruksi	0,76	0,79	1,11	2,00	0,22	0,21	1,46	1,43
6	Perdagangan	0,39	0,42	1,80	3,03	1,29	1,35	6,59	7,12
7	Pengangkutan	1,22	1,41	2,33	2,25	0,44	0,43	89,64	96,93
8	Jasa dunia Usaha	0,18	0,17	3,46	2,47	0,54	0,56	7,68	7,51
9	Jasa Sosial	0,27	0,26	1,35	1,60	0,32	0,32	4,98	5,02
<b>Agregat</b>		<b>0,58</b>	<b>0,61</b>	<b>2,10</b>	<b>2,45</b>	<b>0,65</b>	<b>0,66</b>	<b>6,02</b>	<b>6,18</b>

Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah



Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah

**Grafik 5.24** Profitabilitas Korporasi DKI Jakarta

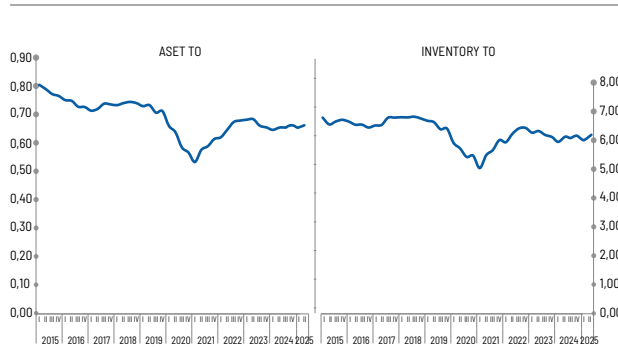


Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah

**Grafik 5.25** Likuiditas Korporasi DKI Jakarta

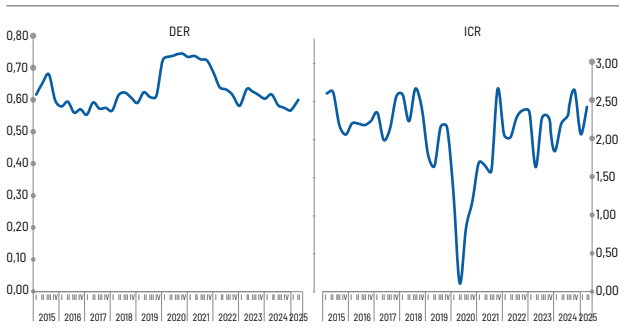
Kinerja likuiditas korporasi juga terjaga baik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *current ratio* yang stabil di leve 1,31 walaupun sedikit melambat dari triwulan sebelumnya (1,36). Nilai rasio yang semakin tinggi diatas 1 menunjukkan bahwa korporasi non-keuangan DKI Jakarta memiliki kondisi likuiditas yang cukup kuat dan sehat (Grafik 5.25).

Sejalan dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat, rasio *inventory turnover* korporasi juga meningkat dari 6,02 pada triwulan I 2025 menjadi sebesar 6,18 pada triwulan II 2025. Selain itu, Korporasi masih cukup efisien dan mampu mengoptimalkan penjualan korporasi dari total aset yang dimiliki sehingga rasio *Asset turnover* (ATO) stabil pada level 0,66 (Grafik 5.26).



Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah

**Grafik 5.26** Produktivitas Korporasi DKI Jakarta

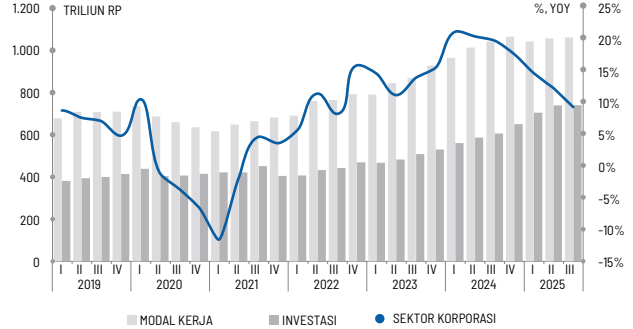


Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah  
Grafik 5.27 Kemampuan Membayar Korporasi DKI Jakarta

Penawaran kredit yang cukup kuat dari perbankan dengan didukung perluasan kebijakan makprudensial longgar Bank Indonesia mampu menjaga minat sektor korporasi untuk menarik kredit dari perbankan sebagaimana tecermin dari rasio *leverage* yang relatif stabil sebesar 0,61 pada triwulan II 2025. Sejalan dengan kondisi likuiditas yang masih memadai serta didukung berbagai upaya efisiensi, sektor korporasi terindikasi mempunyai tingkat kelayakan kredit yang cukup baik (*creditworthiness*). Hal ini tercermin dari rasio median *Interest Coverage Ratio* (ICR) korporasi secara agregat yang sebesar 2,45 kali pada triwulan I 2025 (Grafik 5.27). Nilai rasio ICR di atas 1 menunjukkan bahwa korporasi memiliki kondisi keuangan yang cukup sehat.

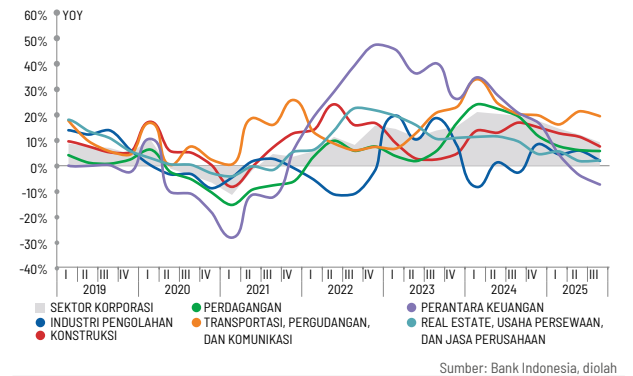
### Eksposur Perbankan pada Sektor Korporasi Perkreditan

Kredit korporasi di DKI Jakarta pada triwulan III 2025 tercatat tetap tumbuh tinggi sebesar 9,24% (yoy), meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya 12,26% (yoy). Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh kredit investasi korporasi yang tumbuh sebesar 21,98% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh



Sumber: Bank Indonesia, diolah  
Grafik 5.28 Pertumbuhan kredit Korporasi

sebesar 26,04% (yoy) (Grafik 5.28). Secara sektoral, kredit korporasi pada sektor-sektor utama Jakarta mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Transportasi Pergudangan dan Komunikasi, Industri Pengolahan, dan Perdagangan tersebut (Tabel 5.3 dan Grafik 5.29).

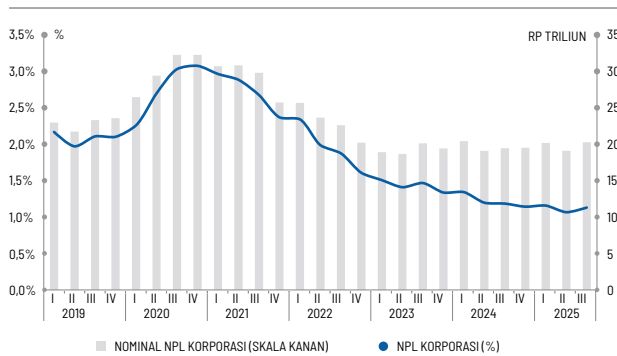


Sumber: Bank Indonesia, diolah  
Grafik 5.29 Penyaluran Kredit pada Sektor Utama Korporasi

Tabel 5.3 Kredit Korporasi menurut Sektor Ekonomi

NO	SEKTOR EKONOMI	Sep-24			Dec-24			Jun-25			Sep-25		
		BAKI DEBET (Rp T)	PANGSA (%)	PERTUMB. KREDIT (%.yoy)	BAKI DEBET (Rp T)	PANGSA (%)	PERTUMB. KREDIT (%.yoy)	BAKI DEBET (Rp T)	PANGSA (%)	PERTUMB. KREDIT (%.yoy)	BAKI DEBET (Rp T)	PANGSA (%)	PERTUMB. KREDIT (%.yoy)
1	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	247,41	15,06%	19,51%	253,06	14,81%	11,63%	265,31	14,83%	6,08%	261,70	14,58%	5,78%
2	INDUSTRI PENGOLAHAN	331,84	20,20%	16,98%	340,79	19,95%	15,15%	352,69	19,72%	11,40%	356,91	19,89%	7,55%
3	PERANTARA KEUANGAN	302,55	18,41%	20,83%	307,59	18,00%	16,92%	287,98	16,10%	-3,81%	280,00	15,60%	-7,45%
4	REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN	205,90	12,53%	9,62%	204,87	11,99%	4,61%	208,20	11,64%	1,86%	210,38	11,72%	2,18%
5	TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI	201,32	12,25%	20,36%	215,97	12,64%	19,81%	242,61	13,56%	21,46%	240,55	13,40%	19,49%
6	KONSTRUKSI	87,57	5,33%	-2,73%	91,70	5,37%	8,57%	87,93	4,92%	5,91%	89,23	4,97%	1,90%
7	PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN	59,45	3,62%	27,48%	62,87	3,68%	16,31%	92,20	5,15%	59,30%	88,47	4,93%	48,80%
8	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	102,18	6,22%	140,52%	121,37	7,10%	130,39%	130,31	7,29%	52,92%	133,53	7,44%	30,68%
9	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	26,82	1,63%	-5,11%	27,40	1,60%	-3,76%	26,93	1,51%	0,58%	26,27	1,46%	-2,07%
10	LISTRIK, GAS DAN AIR	33,28	2,03%	-0,94%	34,04	1,99%	3,49%	39,53	2,21%	18,36%	45,89	2,56%	37,89%
11	LAIN-LAIN	44,64	2,72%	26,40%	48,74	2,85%	26,52%	55,05	3,08%	49,07%	61,81	3,44%	38,46%
Total		1642,96	100,00%	19,70%	1708,39	100,00%	17,58%	1788,73	100,00%	12,26%	1794,74	100,00%	9,24%

Sumber: Bank Indonesia



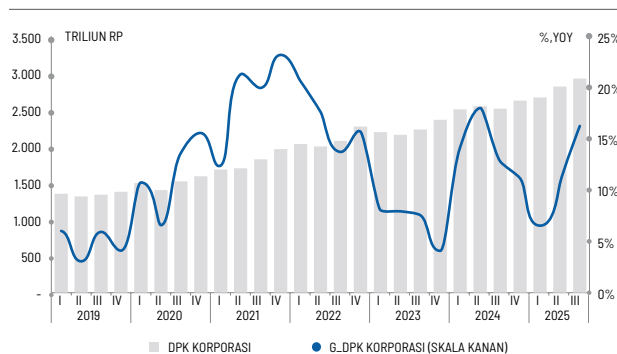
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.30 NPL pada Sektor Korporasi

Dari sisi kualitas kredit, *Non-Performing Loan* (NPL) kredit korporasi terjaga di level rendah sebesar 1,14%, sedikit lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 1,08% (Grafik 5.30). Kondisi ini dipengaruhi oleh tetap baiknya kemampuan membayar korporasi dan terjaganya kondisi likuiditas korporasi.

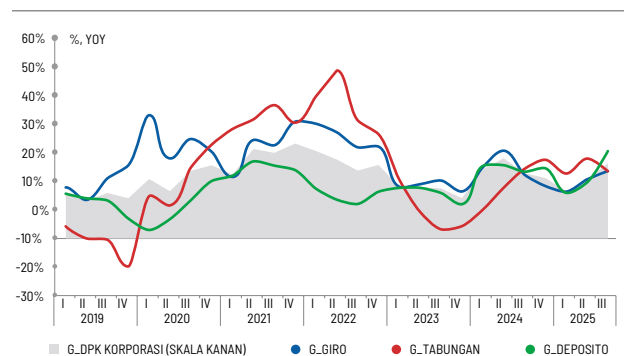
### Dana Pihak Ketiga

Dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) korporasi tumbuh meningkat sejalan dengan meningkatnya DPK bank umum. Pada triwulan III 2025, DPK Korporasi tumbuh sebesar 16,26% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 10,63% (yoy) (Grafik 5.31). Peningkatan pertumbuhan terjadi pada semua jenis DPK Korporasi dengan kontributor utama pertumbuhan adalah Giro Korporasi diikuti oleh Deposito dan Tabungan Korporasi (Grafik 5.32). Laju pertumbuhan komponen Giro pada triwulan III 2025 mencapai 13,54% (yoy) dan menjadi kontributor utama pertumbuhan, mengingat pangsa yang dominan sebesar 54,83% terhadap keseluruhan DPK korporasi (Grafik 5.33).



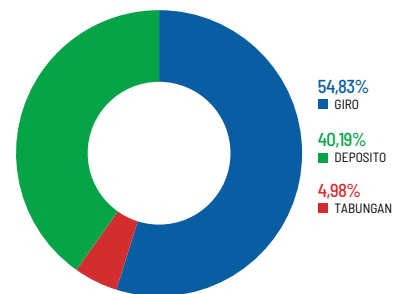
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.31 Perkembangan DPK Korporasi



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.32 Pertumbuhan Komponen DPK Korporasi



Sumber: Bank Indonesia, diolah

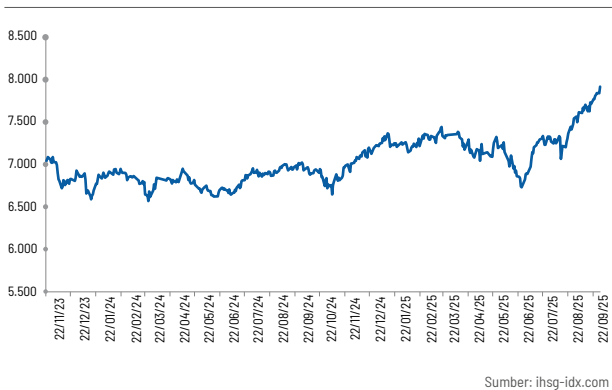
Grafik 5.33 Komposisi DPK Korporasi

### Eksposur Pasar Modal pada Sektor Korporasi

Pembiayaan korporasi dapat bersumber dari dana internal dan eksternal. Sumber dana eksternal korporasi antara lain dari perbankan dan sumber-sumber eksternal lainnya seperti pasar modal berupa penerbitan obligasi, *Initial Public Offering* (IPO) dan *Right Issue*.

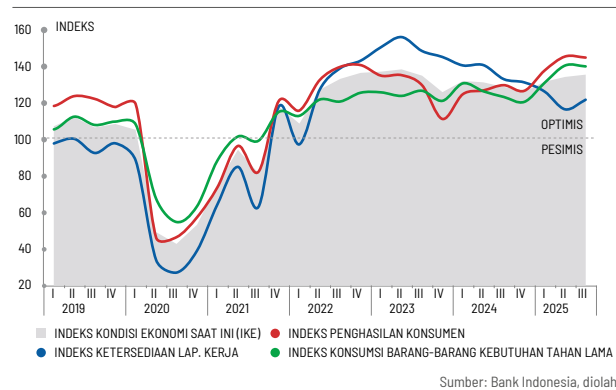
Di tengah sentimen terhadap dinamika tensi perdagangan dan geopolitik global, kinerja pasar modal Indonesia pada triwulan III 2025 menunjukkan perkembangan yang membaik periode yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan III 2025, indeks pasar saham domestik mencapai level 8.061,06 meningkat secara ytd sebesar 13,86%, serta menguat secara qtq sebesar 16,36% dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp12.178 triliun (Grafik 5.34). Penghimpunan dana di pasar modal menunjukkan tren yang positif, tercatat dengan nilai penawaran umum mencapai Rp142,62 triliun, yang mana sebesar Rp8,49 triliun diantaranya adalah *fundraising* dari 16 emiten baru. Sementara itu, masih terdapat 13 rencana penawaran umum dengan perkiraan nilai indikatif sebesar Rp9 triliun<sup>1</sup>.

1 Kinerja Pasar Saham Menguat 6,41 Persen di Kuartal II 2025 | Infobanknews



Grafik 5.34 Indeks Harga Saham Gabungan BEI

Sumber: ihsq-idx.com



Grafik 5.36 Perkembangan Indeks Ketersediaan Lap.Kerja, Penghasilan Konsumen, dan Konsumsi Barang Tahan Lama

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Ke depan, kinerja pasar saham dan obligasi Indonesia berpotensi melanjutkan penguatan. Potensi tersebut ditopang beberapa faktor. Pertama, sentimen positif terhadap fundamental makroekonomi yang solid, inflasi yang terkendali dan prakiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat. Kedua, berlanjutnya reformasi sektor keuangan Indonesia seiring dengan disahkannya Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) yang diperkirakan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan perlindungan investor serta konsumen, mendorong efisiensi di sektor keuangan, serta semakin bervariasinya instrumen keuangan. Ketiga, didukung sentimen positif tren pelonggaran kebijakan moneter bank sentral utama dunia.

### C. PERKEMBANGAN KINERJA SEKTOR RUMAH TANGGA

#### Sumber Kerentanan dan Risiko Sektor Rumah Tangga

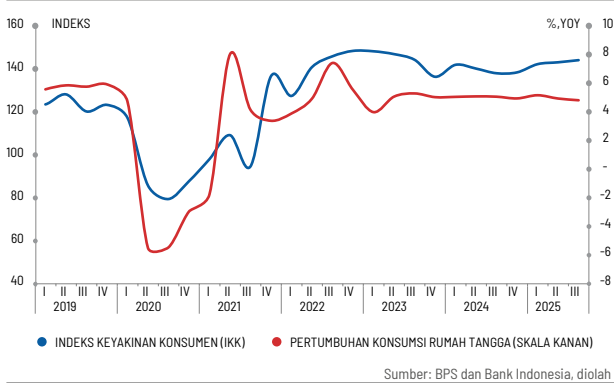
Sejalan dengan perkembangan kinerja korporasi, kinerja rumah tangga pada triwulan III 2025 secara umum masih kuat. Kinerja rumah tangga yang berdaya tahan tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang pada triwulan III 2025 terjaga tinggi pada level optimis sebesar 145,5, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 144,5 (Grafik 5.35). Optimisme tersebut diperkuat dengan meningkatnya Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE) dari 132,90 pada triwulan II 2025 menjadi

134,20 pada triwulan III 2025. Kenaikan indeks IKE didukung oleh kenaikan indeks Ketersediaan Lapangan Kerja dan Indeks Konsumsi barang-barang kebutuhan tahan lama. Adapun indeks Penghasilan Konsumen mengalami penurunan namun masih tetap terjaga pada zona optimis (Grafik 5.36).

Namun demikian, apabila dilihat lebih dalam lagi berdasarkan tingkat pendapatannya, terjadi potensi peningkatan risiko pada rumah tangga seiring pelemahan daya beli rumah tangga khususnya pada kelas menengah ke bawah seiring penurunan nilai pada tingkat upah rill-nya.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pelemahan konsumsi rumah tangga yaitu: (i) Penurunan porsi pekerja formal di Jakarta yaitu dari 63,94% (Feb 2024) menjadi 62,05% (Feb 2025), di sisi lain hampir setengah ( $\pm 48\%$ ) pekerja formal masih menerima upah di bawah Upah Minimum Regional (UMR); (ii) Terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK)/*layoff* oleh beberapa perusahaan. Angka ini terkonfirmasi dari angka Tingkat Pengangguran Terbuka di Jakarta yang pada Februari 2025 tercatat sebesar 6,18%, atau meningkat 0,15% poin dibandingkan Februari 2024; (iii) Tren penurunan kontribusi dari kelompok bawah terhadap total pengeluaran di Jakarta. Berdasarkan data BPS, distribusi pengeluaran penduduk Jakarta didominasi kelompok terkaya. Sebanyak 20% masyarakat kelompok pengeluaran tertinggi menguasai 52,45% dari total pengeluaran rumah tangga. Sementara itu, 40% kelompok masyarakat terbawah hanya menguasai 16,12% total pengeluaran. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa sebagian besar daya beli masyarakat Jakarta masih terkonsentrasi pada kelompok kaya; (iv) Penyesuaian alokasi dan efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah yang berampak pada kinerja lapangan usaha sehingga memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat; serta (v) Dinamika kondisi ekonomi global dan domestik a.l. perlambatan ekonomi global, fragmentasi perdagangan yang semakin meluas, serta kebijakan Pemerintah yang sangat dinamis hingga pelaku usaha maupun konsumen cenderung *wait and see* dan menahan belanja.

Peningkatan potensi *spillover* risiko Rumah Tangga terhadap perbankan tercermin dari peningkatan rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) Rumah Tangga meskipun masih di bawah



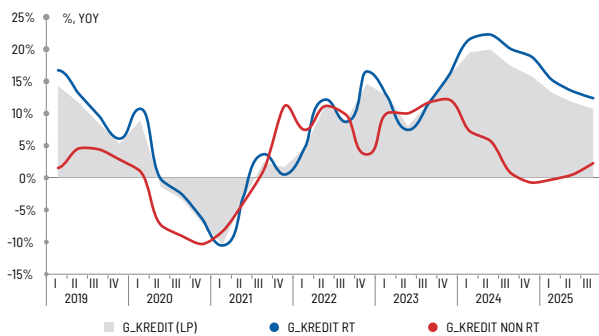
Grafik 5.35 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen dan Konsumsi RT

Sumber: BPS dan Bank Indonesia, diolah

*threshold* 5%. Ke depan, perlu diwaspadai beberapa faktor risiko yang berpotensi dapat semakin menekan daya beli dan mengurangi kemampuan membayar sektor Rumah Tangga. Pertama, kenaikan inflasi yang berpotensi meningkatkan alokasi pendapatan debitur untuk membiayai kebutuhannya sehari-hari, seperti biaya makanan dan transportasi, sehingga mengurangi alokasi pendapatannya untuk pembayaran cicilan. Kedua, risiko kenaikan suku bunga yang dapat meningkatkan beban bunga debitur terutama debitur dengan kredit suku bunga mengambang. Ketiga, potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan nasional yang dapat memengaruhi kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga.

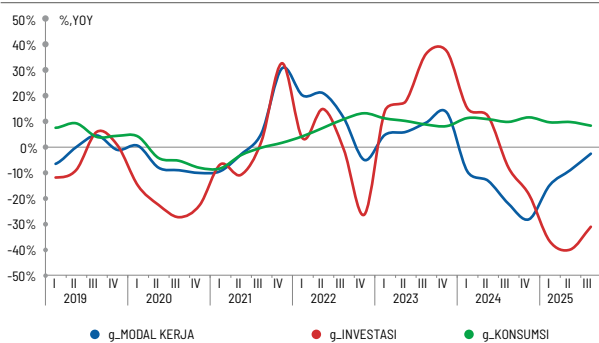
### Eksposur Perbankan pada Sektor Rumah Tangga Perkreditan

Berbeda dengan total kredit dan kredit korporasi, kredit pada sektor rumah tangga menunjukkan peningkatan pada triwulan III 2025 meskipun tumbuh terbatas. Kredit rumah tangga tercatat tumbuh positif sebesar 2,23% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,46% (yoy) (Grafik 5.37). Berdasarkan jenisnya, perbaikan kredit rumah tangga dipengaruhi oleh kenaikan kredit konsumsi yang tumbuh sebesar 8,36% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 9,78% (yoy). Kinerja kredit konsumsi rumah tangga tersebut menahan penurunan total kredit rumah tangga lebih lanjut di tengah kontraksi pertumbuhan pada kredit modal kerja dan kredit investasi (Grafik 5.38). Hal ini dikarenakan kredit konsumsi rumah tangga mendominasi total kredit rumah tangga dengan pangsa mencapai 76,48% (5.39).



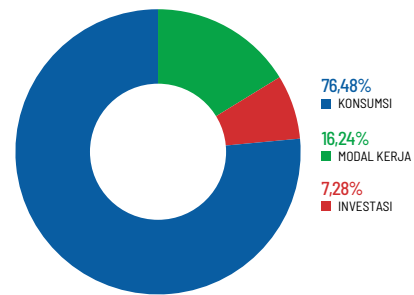
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.37 Perkembangan Kredit Rumah Tangga



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.38 Perkembangan Jenis Penggunaan Kredit Rumah Tangga

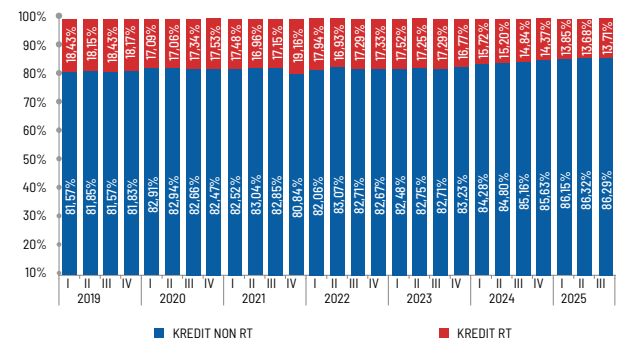


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.39 Komposisi Jenis Penggunaan Kredit Rumah Tangga

Kinerja kredit konsumsi rumah tangga yang relatif stabil tersebut dipengaruhi oleh tetap terjaganya daya beli masyarakat seiring meningkatnya optimisme masyarakat yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK). Perkembangan tersebut juga didukung oleh kondisi ekonomi moneter yang kondusif sejalan dengan tren penurunan suku bunga kredit merespons penurunan BI rate, serta pelonggaran standar penyaluran kredit oleh bank, terutama pada aspek agunan, sehingga mempermudah masyarakat mengakses kredit konsumsi.

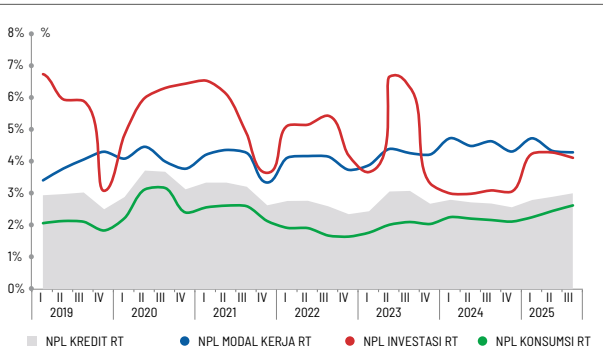
Meskipun menunjukkan peningkatan, namun kenaikan nominal kredit rumah tangga tidak setinggi kenaikan nominal kredit non-rumah tangga sehingga pada triwulan III 2025 pangsa kredit rumah tangga masih melanjutkan tren penurunan menjadi 13,71% (Grafik 5.40).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.40 Komposisi Kredit RT dan Non-RT

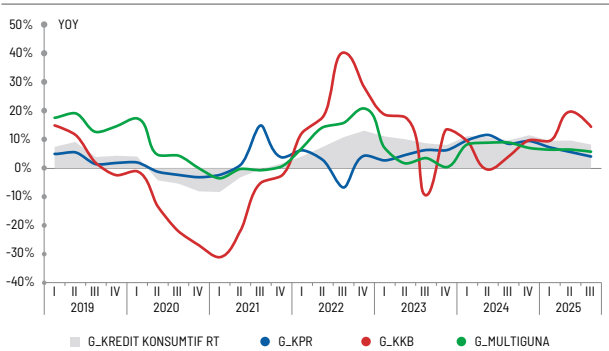
Dari sisi kualitas kredit, rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/ NPL*) Rumah Tangga masih relatif rendah yaitu sebesar 2,99%, cukup jauh di bawah *threshold* 5%. Namun demikian, rasio NPL pada triwulan III 2025 ini sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,88%. Kenaikan NPL RT terutama didorong kenaikan NPL pada kredit konsumsi rumah tangga (Grafik 5.41).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.41 NPL Kredit Rumah Tangga

Berdasarkan tujuan penyalurannya, perlambatan kredit konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2025 terutama didorong oleh penurunan kredit Multiguna, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Kendati demikian, penurunan tersebut tidak signifikan dan tetap relatif tinggi, khususnya KPR dan kredit Multiguna yang memiliki pangsa lebih dari 50% total penyaluran kredit konsumsi RT DKI Jakarta (Grafik 5.42 dan 5.43).

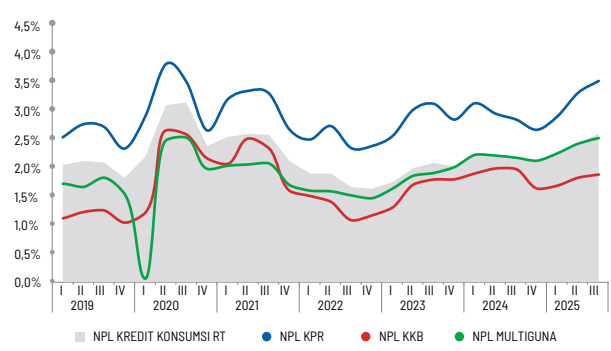


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.42 Perkembangan Kredit Konsumsi Rumah Tangga

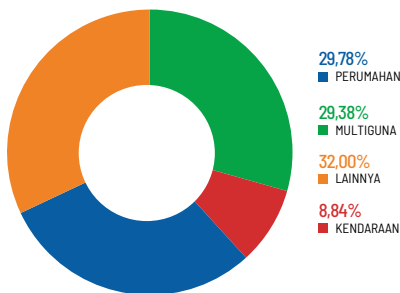
membutuhkan dana untuk berbagai tujuan, terutama saat kebutuhan mendesak atau prioritas lainnya. Adapun peningkatan kredit KPR didukung kebijakan pemerintah memberikan insentif PPN DTP pembelian rumah tapak dan rumah. Selain itu, untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pemerintah menambah alokasi KPR subsidi sebanyak 34.000 unit melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi MBR diantaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Biaya Administrasi (BBA), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan bantuan Rumah Sederhana Terpadu (RST). Sementara itu, peningkatan kredit KKB didukung oleh kebijakan Bank Indonesia untuk memperpanjang insentif uang muka kredit (DP) 0% untuk kendaraan bermotor baru hingga Desember 2025.

Dari sisi risiko kredit, sejalan dengan kenaikan NPL kredit konsumsi rumah tangga, kenaikan NPL juga terjadi pada semua jenis kredit konsumsi rumah tangga. Kenaikan NPL terbesar terjadi pada kredit KPR diikuti Multiguna dan KKB (Grafik 5.44).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.44 NPL Kredit Konsumsi Rumah Tangga



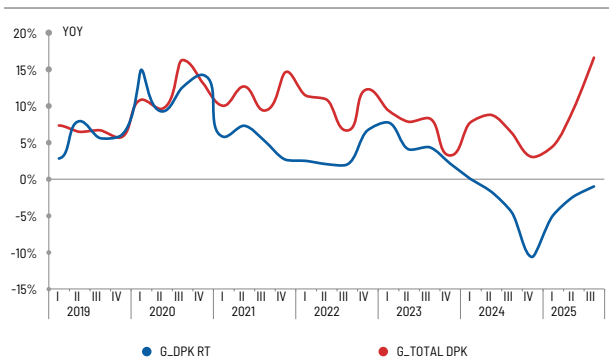
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.43 Komposisi Kredit Konsumsi Rumah Tangga

Tumbuhnya kredit multiguna didorong oleh tingginya permintaan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga seperti renovasi rumah, biaya pendidikan, pengobatan, serta pembelian barang-barang. Fleksibilitas kredit multiguna menjadi daya tarik utama bagi masyarakat yang

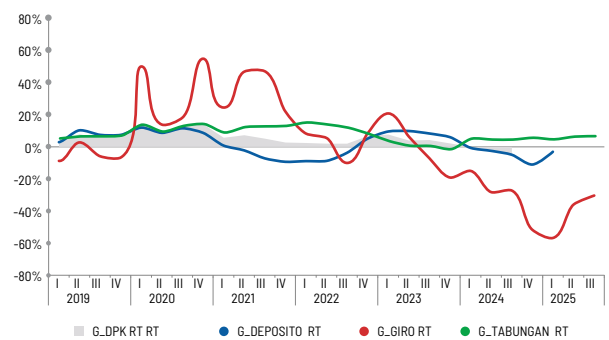
### Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK rumah tangga di DKI Jakarta pada triwulan III 2025 mencatat pertumbuhan yang terkontraksi, namun membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. DPK rumah tangga mencatat kontraksi 1,00% (yoy), tidak sedalam triwulan sebelumnya yang mencatat kontraksi 2,40% (yoy) (Grafik 5.45). Berdasarkan jenisnya, penurunan DPK rumah tangga disebabkan oleh penurunan pada komponen Giro dan Deposito. Giro rumah tangga pada triwulan III 2025 mengalami kontraksi 30,43% (yoy), namun lebih baik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 35,93% (yoy). Adapun Deposito rumah tangga juga mencatat kontraksi 3,80% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 4,97% (yoy). Sementara itu, Tabungan rumah tangga masih meningkat dengan pertumbuhan yang positif sebesar 6,05% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,80% (yoy) (Grafik 5.46).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.45 Pertumbuhan DPK Rumah Tangga

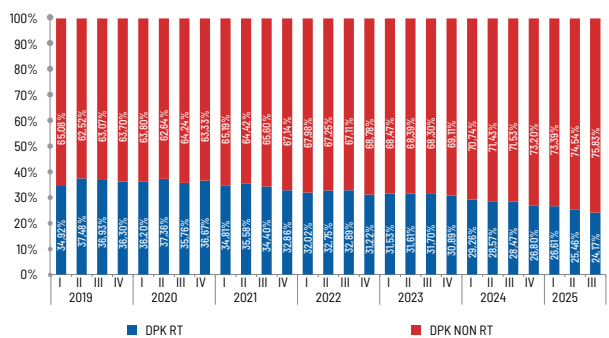


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.46 Pertumbuhan DPK per jenis Simpanan

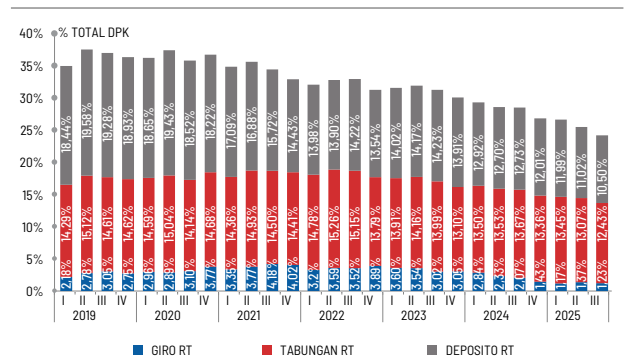
Kontraksi pertumbuhan pada DPK rumah tangga disinyalir dipengaruhi oleh fenomena "makan tabungan" terutama dari rumah tangga golongan menengah dan bawah seiring tingkat upah riil yang terbatas dan pola konsumsi yang cenderung meningkat. Sementara itu, dari golongan rumah tangga menengah atas, perlambatan DPK rumah tangga disinyalir dipengaruhi oleh kecenderungan rumah tangga mengalihkan sebagian dana simpanannya kepada instrumen keuangan yang memberikan imbal hasil lebih tinggi untuk memaksimalkan keuntungan.

Jika dilihat dari komposisinya, porsi DPK rumah tangga terhadap total DPK di DKI Jakarta cenderung menurun (Grafik 5.47). Sementara itu, pangsa DPK rumah tangga terhadap total DPK didominasi oleh tabungan sebesar 12,43%, diikuti oleh deposito dan giro masing-masing sebesar 10,50% dan 1,23% (Grafik 5.48).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.47 Komposisi DPK



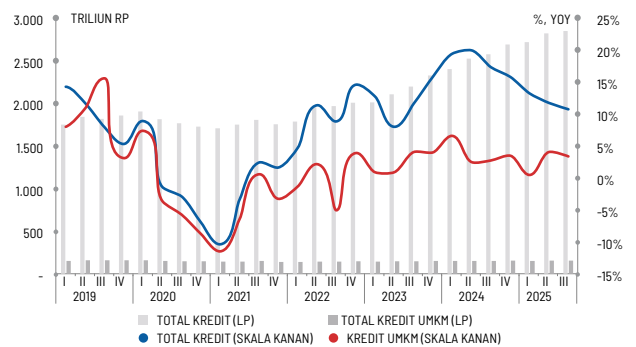
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.48 Komposisi DPK Rumah Tangga

## D. PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

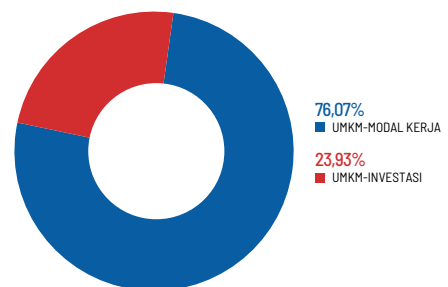
### Akses Keuangan kepada UMKM

Penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menunjukkan peningkatan di tengah perlambatan kredit bank umum. Pada triwulan III 2025, kredit UMKM tumbuh sebesar 3,35% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,02% (yoy) (Grafik 5.49). Dilihat dari jenis penggunaannya, kredit UMKM terutama diberikan untuk kredit modal kerja dengan pangsa sebesar 76,07% dan diikuti kredit investasi sebesar 23,93% (Grafik 5.50).



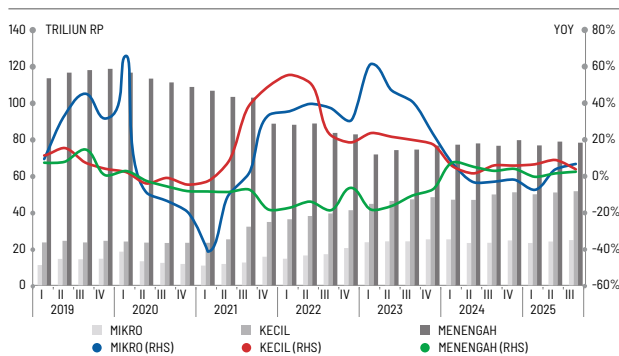
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.49 Pertumbuhan Kredit UMKM di Jakarta



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.50 Porsi Kredit UMKM di Jakarta Berdasarkan Jenis Penggunaan



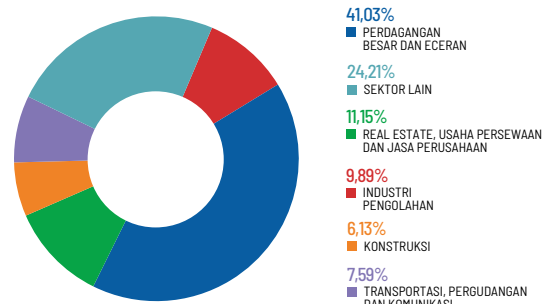
Grafik 5.51 UMKM Berdasarkan Skala Usaha

Berdasarkan skala usahanya, kenaikan kredit UMKM ditopang oleh pertumbuhan kredit skala mikro. Pada triwulan III 2025, kredit UMKM skala mikro tumbuh sebesar 6,54% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,51% (yoy). Sejalan dengan itu, pertumbuhan kredit skala menengah dan kecil masing-masing juga meningkat dari 1,36% (yoy) dan 8,68% (yoy) menjadi 2,23% (yoy) dan 3,57% (yoy) (Grafik 5.51).

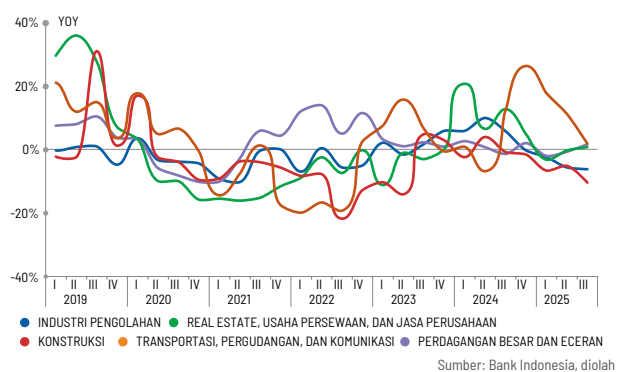
Meskipun mengalami peningkatan, namun secara keseluruhan, pangsa kredit UMKM di Jakarta masih cukup rendah yaitu sekitar 5,4% dari total kredit perbankan. Kondisi ini antara lain dipengaruhi karakteristik sektor usaha di Jakarta yang lebih didominasi oleh sektor korporasi. Karakter Jakarta sebagai kota pusat ekonomi dan bisnis menyebabkan harga lahan dan upah tenaga kerja di Jakarta menjadi lebih tinggi dibandingkan wilayah sekitarnya. Berbagai faktor tersebut menyebabkan pertumbuhan kredit UMKM berdasarkan lokasi proyek di Jakarta cenderung terbatas. Secara umum, pelaku UMKM cenderung hanya memanfaatkan wilayah DKI Jakarta sebagai tempat penjualan/transaksi. Sedangkan untuk pengolahan maupun lokasi usaha lebih banyak berada di daerah penyangga ibukota, seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok.

Berdasarkan lapangan usaha, penyaluran kredit UMKM lebih diarahkan kepada sektor-sektor ekonomi utama di Jakarta. Sektor-sektor ekonomi yang banyak menerima pembiayaan UMKM yaitu sektor perdagangan besar dan eceran dengan pangsa 41,03%, diikuti sektor *real estate*, usaha persewaan dan jasa perusahaan (11,15%), industri pengolahan (9,89%), sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi (7,59%) dan sektor konstruksi (6,13%) (Grafik 5.52). Dilihat dari pertumbuhannya, peningkatan kredit UMKM terutama terjadi pada sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi (Grafik 5.53).

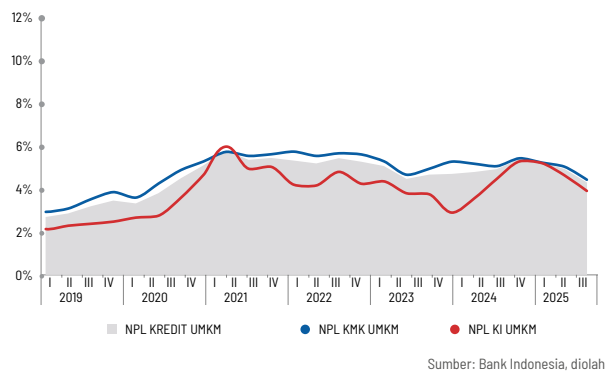
Pertumbuhan kredit yang positif ini mengindikasikan perbankan masih mempunyai minat untuk membiayai kredit kepada UMKM dengan tetap menjaga kehati-hatian. Hal ini seiring dengan risiko kredit UMKM yang masih cukup tinggi meskipun mulai menunjukkan penurunan, baik jenis kredit Modal Kerja maupun Investasi (Grafik 5.54). Berdasarkan kelompok debiturnya, penurunan risiko kredit UMKM terjadi pada kelompok menengah (Grafik 5.55).



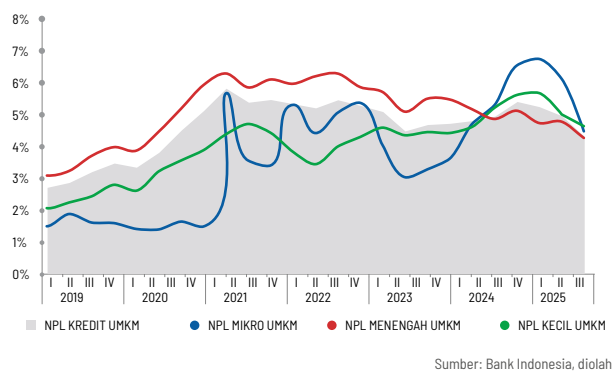
Grafik 5.52 Porsi Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi



Grafik 5.53 Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Utama



Grafik 5.54 NPL Kredit UMKM



Grafik 5.55 NPL Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha

Kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) No.47 tahun 2024 perihal Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sudah diimplementasi secara bertahap sejak Januari 2025<sup>2</sup> berpotensi memberi ruang kepada UMKM yang sudah ada untuk bangkit dan kembali mendapatkan akses pembiayaan. Kebijakan ini bertujuan untuk membersihkan catatan kredit macet, sehingga UMKM yang sebelumnya masuk daftar hitam dapat kembali mendapatkan akses permodalan, yang pada akhirnya diharapkan mendukung terus berlanjutnya peningkatan penyaluran kredit baru di masa mendatang. Dari sisi perbankan, kebijakan penghapusan piutang macet UMKM diperkirakan tidak memengaruhi kinerja keuangan perbankan mengingat kredit yg dihapus tagih merupakan kredit yang sudah dihapus buku sehingga bank sudah membukukan beban kerugian (CKPN 100%) dan mengeluarkan pencatatan kredit macet tersebut dari neraca bank.

## Pengembangan UMKM

Pelaksanaan program pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia didasarkan pada 3 (tiga) pilar kebijakan, yaitu korporatisasi, pengembangan kapasitas, dan perluasan akses pembiayaan. Selaras dengan kebijakan tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan sejumlah kegiatan pengembangan UMKM pada triwulan III tahun 2025 (Juli-September 2025), yang mencakup:

1. Program Jagoan Wirausaha Jakarta (JAWARA)  
Sebagai program unggulan pengembangan UMKM, Jagoan Wirausaha Jakarta (JAWARA) kembali diselenggarakan oleh KPwBI Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2025. Program ini dirancang sebagai akselerator bisnis untuk mendorong pelaku usaha naik kelas, berinovasi, serta memperluas daya saing di pasar domestik maupun global. Antusiasme pelaku UMKM pada tahun ini meningkat signifikan dengan 960 pendaftar atau tumbuh 114% dibandingkan tahun 2024. Dari jumlah tersebut, 40 UMKM terpilih melalui seleksi administrasi dan wawancara, yang terdiri dari kategori *food and beverage*, *craft*, dan *fashion*, untuk mengikuti rangkaian program pengembangan.

Hingga akhir triwulan II 2025, program telah memasuki tahap *bootcamp* yang dilaksanakan pada 22-24 April 2025 di Jakarta. Dalam *bootcamp*, peserta memperoleh pembekalan antara lain mengenai *entrepreneur mindset*, *growth mindset*, strategi bertahan dan berkembang di era digital, penguatan jejaring bisnis serta *personal coaching*. Selain itu, digelar juga *talkshow* inspiratif bersama mitra strategis seperti Bank Tabungan Negara (BTN) terkait pembiayaan UMKM, serta berbagi pengalaman sukses dari UMKM binaan BI Jakarta, yaitu Ayam Penyet Bandung dan Alfee Coffee, yang telah berhasil mengakses pembiayaan dan menembus pasar ekspor.

Peserta JAWARA 2025 akan melanjutkan rangkaian kegiatan pendampingan yang terdiri dari tiga tahap, yaitu penguatan dasar usaha, *onboarding* digital dan penguatan branding, akselerasi

pasar domestik maupun ekspor, serta *capacity building* terkait inovasi dan keberlanjutan, hingga nantinya ditutup dengan *graduation* JAWARA. Dengan tahapan ini, peserta diharapkan mampu tumbuh berkelanjutan dan tidak hanya sukses secara individu tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem yang saling menguatkan.

Lebih dari itu, JAWARA menekankan pentingnya jejaring dan kolaborasi. Peserta JAWARA 2025 diharapkan dapat terhubung tidak hanya dengan alumni JAWARA sebelumnya, tetapi juga dengan pelaku UMKM lainnya, komunitas bisnis, akademisi, dan mitra strategis. Dengan demikian, terbentuk komunitas UMKM binaan Bank Indonesia yang lebih solid, inklusif, dan berkelanjutan, yang mampu saling mendukung sekaligus memperkuat kontribusi UMKM bagi perekonomian nasional.

Dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan, KPwBI Provinsi DKI Jakarta akan terus mendorong terwujudnya UMKM yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global.

## 2. Promosi dan Fasilitasi Perdagangan

Dalam upaya memperluas akses pasar bagi UMKM, promosi produk-produk unggulan terus diakselerasi melalui berbagai *platform* dan *strategic event* berskala nasional maupun internasional, berkolaborasi dengan Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia. Pada Triwulan II 2025, sejumlah UMKM binaan dan mitra KPwBI Provinsi DKI Jakarta telah mengikuti kegiatan promosi perdagangan, baik di dalam maupun luar negeri, antara lain dalam kegiatan:

- a. Food and Hotel Asia (FHA), Singapura (8-11 April 2025). Lima UMKM yaitu Acaraki, Casa Grata, Pelita Lumpang Mas, Ayam Penyet Bandung dan Ing Pawon berhasil tampil pada ajang pameran internasional ini.
- b. The 37th UN Tourism Joint Commission Meeting CAP-CSA, Indonesia (15-16 April 2025). Tiga UMKM yaitu Draft Indonesia, Acaraki, dan Mozass berpartisipasi dalam pameran produk ini.
- c. Osaka Expo, Jepang (5-18 Mei 2025). Empat UMKM yaitu Tiyasa, Long Story Short, Indhe, dan Suwe Ora Jamu) berpartisipasi dalam ajang promosi berskala global ini.
- d. Tuttofood Milano, Italia (5-8 Mei 2025). UMKM Suwe Ora Jamu turut serta mempromosikan produk jamu dan wellness drink pada pameran internasional ini.
- e. Seoul Food & Hotel (SFH) Expo, Korea Selatan (10-13 Juni 2025). Acaraki kembali mewakili UMKM binaan dalam pameran internasional terbesar di Korea Selatan.
- f. Halal Expo Sarajevo 2025, Bosnia (17-19 Juni 2025). Dua UMKM terpilih yang mengikuti kegiatan tersebut adalah Acaraki dan Kultiva.

Ke depan, sinergi kegiatan/program dengan berbagai pihak terkait dalam memfasilitasi partisipasi UMKM pada ajang promosi perdagangan, baik di dalam maupun luar negeri, akan terus diperkuat.

2 Pemerintah upayakan perkuat akses pembiayaan UMKM lewat hapus piutang - ANTARA News

Upaya ini menjadi bagian dari strategi berkelanjutan untuk membuka akses pasar yang lebih luas, memperluas peluang ekspor, serta diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM di tingkat nasional dan global.

## E. SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA

Dengan telah disahkannya UU No.21 tahun 2023 sebagai perubahan UU No.3 tahun 2022 tentang IKN dan UU No.2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta seiring kepindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara, maka ke depan Jakarta bukan lagi menjadi kota pusat pemerintahan. Sehubungan dengan kepindahan Ibu Kota tersebut, maka pengeluaran belanja Pemerintah Pusat/Kementerian dan Lembaga di Jakarta secara bertahap akan berkurang. Oleh karena itu diperlukan pengembangan potensi dan sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta dalam rangka memperkuat peran Jakarta untuk tetap berkontribusi sebagai kota pusat ekonomi dan bisnis nasional serta menjadi kota global yang berdaya saing.

Sejalan perubahan status dan visi Jakarta ke depan sebagai kota global yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan maka pembangunan Jakarta akan diarahkan kepada pembangunan yang berbasis ekonomi hijau. Selain itu, eratnya keterkaitan ekonomi dan keuangan

wilayah sekitar terhadap Jakarta, maka pembangunan Jakarta ke depan juga akan bersinergi dengan wilayah sekitar sebagai satu kawasan aglomerasi. Pembangunan akan berfokus kepada perbaikan infrastruktur strategis daerah untuk mengurai berbagai permasalahan yang ada mencakup perbaikan infrastruktur strategis di bidang transportasi, pengendalian banjir, air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah.

Pembiayaan proyek-proyek Pembangunan tersebut diindikasikan bersumber dari APBN, APBD, ataupun pinjaman daerah. Adapun pembangunan proyek dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau dinas-dinas terkait. Pemrov DKI Jakarta memberikan dukungan penuh baik dalam bentuk penyertaan modal ke BUMD maupun mendorong proyek untuk mendapatkan dukungan pusat, baik melalui APBN, pinjaman daerah, atau pinjaman PEN. Pembahasan strategi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek serta upaya promosi investasi untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dilakukan secara bersama-sama melalui wadah Regional Investor Relation Unit (RIRU) Provinsi DKI Jakarta yang mencakup sinergi antara Pemrov DKI Jakarta, KPwBI Provinsi DKI Jakarta, BUMD dan instansi. Ke depan, sejalan dengan perubahan status Jakarta menjadi Daerah Khusus, maka terdapat peluang sumber-sumber pembiayaan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai turunan dari Undang-undang Daerah Khusus Jakarta.



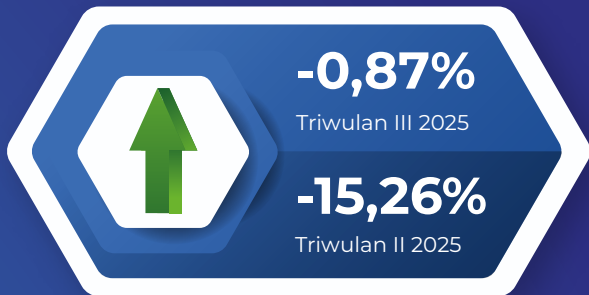
## BAB 6

# SISTEM PEMBAYARAN

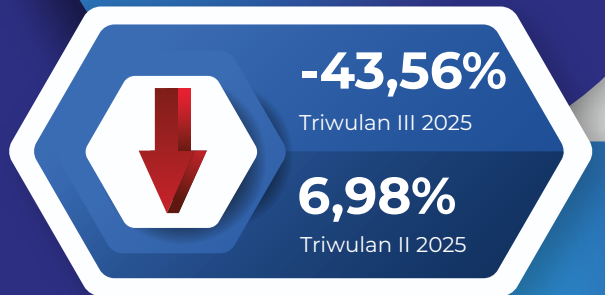
Pada triwulan III 2025, peredaran uang kartal di DKI Jakarta tercatat mengalami *net outflow*, sementara transaksi pembayaran nontunai terus menguat sejalan dengan perekonomian Jakarta yang tetap tumbuh kuat. Perkembangan nilai transaksi sistem pembayaran pada triwulan III 2025 mengonfirmasi masih kuatnya pertumbuhan ekonomi Jakarta. Hal ini terindikasi dari arus kas yang mencatat *net outflow* dan transaksi nontunai BI-RTGS yang tumbuh meningkat. Selain itu, tren transaksi digital semakin berkembang, seiring peningkatan transaksi QRIS. Sementara transaksi kartu kredit dan kartu debit menurun. Dari sisi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), nilai transaksi jual dan beli valuta asing (dalam Rupiah) mengalami pertumbuhan sebesar 13,19% (yoy) pada triwulan III 2025, melanjutkan tren pertumbuhan positif triwulan sebelumnya sebesar 11,98% (yoy). Dari sisi Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR), tetap mengalami pertumbuhan positif sebesar 7,30% (yoy) meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 15,77% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan pertumbuhan nilai transaksi *outgoing* (dari DKI Jakarta ke luar negeri) dan domestik (di wilayah DKI Jakarta) yang tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara, transaksi *incoming* (dari luar negeri ke DKI Jakarta) tercatat mengalami perbaikan pertumbuhan meskipun tetap terkontraksi.



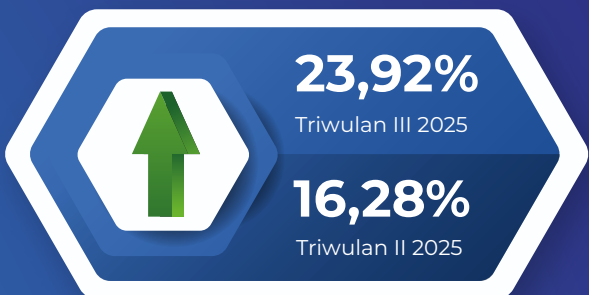
**Pertumbuhan *Inflow*  
Transaksi Uang Kartal (yoy)**



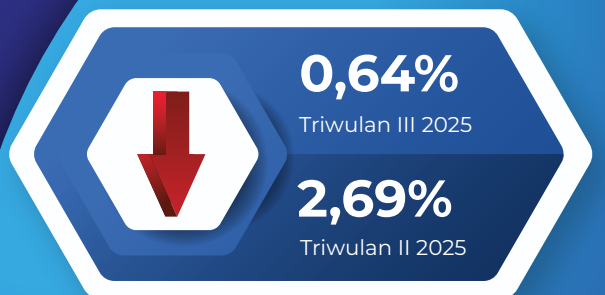
**Pertumbuhan *Outflow*  
Transaksi Uang Kartal (yoy)**



**Pertumbuhan Nilai  
Transaksi BI-RTGS (yoy)**



**Pertumbuhan Nilai  
Transaksi SKN-BI (yoy)**



## A. KONDISI UMUM

Pada triwulan III 2025, arus kas di DKI Jakarta tercatat pada posisi *net outflow*, berbeda dari triwulan sebelumnya yang tercatat *net inflow*. Perkembangan ini sejalan dengan meningkatnya ekspektasi permintaan uang kartal masyarakat menjelang periode Natal dan Tahun Baru.

Transaksi pada sistem pembayaran nontunai tetap kuat di tengah perekonomian Jakarta yang tetap tumbuh solid. Aktivitas transaksi nontunai bernilai besar melalui *Bank Indonesia Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), dan retail individu melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) mengalami peningkatan menjelang akhir tahun. Sementara itu transaksi menggunakan APMK (kartu kredit, dan debit), dan QRIS tetap tumbuh kuat seiring dengan pola perilaku masyarakat yang terus bergeser menuju digital.

Kenaikan transaksi QRIS didukung oleh penyelenggaraan berbagai event strategis dan implementasi fitur QRIS Tap In-Tap Out yang diluncurkan pada FEKDI x IFSE 2025, khususnya pada sektor transportasi publik. Sampai dengan triwulan III tahun 2025, volume transaksi QRIS meningkat sebesar 172% (ctc) secara akumulatif, atau mencapai 3,85 miliar transaksi, dengan pangsa Jakarta terhadap nasional sebesar 37%.

## B. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DI PROVINSI DKI JAKARTA

### Pengelolaan Uang Rupiah

Peredaran uang kartal di DKI Jakarta pada triwulan III 2025 mengalami *net outflow* sebesar Rp15,66 triliun, berbalik dari triwulan sebelumnya yang mencatat *net inflow* sebesar Rp17,39 triliun (Tabel 6.1). *Net*

*outflow* terutama dipengaruhi oleh penurunan *inflow* menjadi Rp18,67 triliun atau terkontraksi 51,52% (qtq), di tengah *outflow* yang tetap meningkat menjadi Rp34,34 triliun atau tumbuh 62,52% (qtq) (Grafik 6.1). Peningkatan *outflow* tersebut sejalan dengan tingginya kebutuhan uang kartal selama periode menjelang akhir tahun.

Berdasarkan pecahan, Uang Pecahan Besar (Rp100.000 dan Rp50.000) mencatat *net outflow*, sementara Uang Pecahan Kecil (Rp20.000 hingga Rp1.000) mencatat *net inflow*. Peredaran uang di masyarakat masih didominasi oleh UPB (Grafik 6.2).

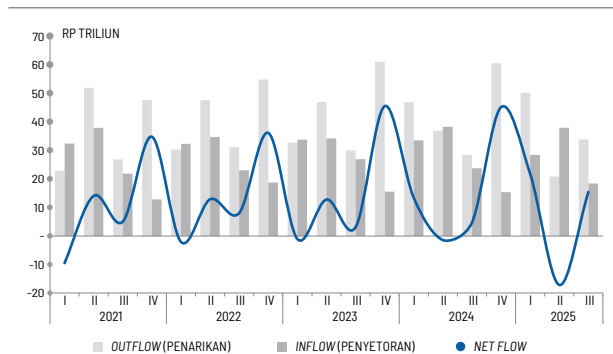
Jumlah temuan uang yang diragukan keasliannya (uang palsu) di DKI Jakarta pada triwulan III 2025 tercatat sebanyak 37.726 lembar atau naik 44,10% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 26.180 lembar (Grafik 6.3). Kenaikan ini bersumber dari laporan masyarakat serta hasil setoran perbankan, dan mengindikasikan perlunya peningkatan kewaspadaan terhadap peredaran uang tidak asli di tengah intensitas aktivitas ekonomi masyarakat yang meningkat

Sebagai tindak lanjut, KPw BI Provinsi DKI Jakarta memperkuat pelaksanaan kampanye Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah (CBP) sebagai upaya menjaga kualitas dan keaslian uang Rupiah yang beredar di masyarakat. Penguatan kampanye dilakukan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi yang menekankan pemahaman masyarakat dalam mengenali ciri keaslian uang Rupiah dengan menerapkan prinsip 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang). Selain itu, edukasi turut diarahkan pada pentingnya menjaga kualitas uang Rupiah kertas agar tetap layak edar melalui prinsip 5J yaitu Jangan Dilipat, Jangan Dicoret, Jangan Distapler, Jangan Diremas, dan Jangan Dibasahi. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik serta memperkuat integritas uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.

Tabel 6.1 Perkembangan Transaksi Uang Kartal

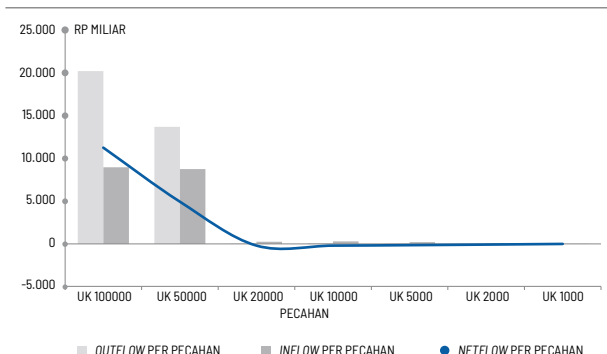
INDIKATOR (RP MILIAR)	2022				2023				2024				2025		
	01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03
Penarikan / <i>Outflow</i>	30.728,45	48.319,59	31.594,94	55.707,70	33.252,42	47.711,56	30.476,99	62.000,31	47.603,55	37.441,46	28.890,65	61.463,98	50.925,95	21.133,16	34.344,63
Penyetoran / <i>Inflow</i>	32.803,23	35.262,53	23.425,89	19.014,24	34.305,48	34.729,91	27.363,28	15.787,47	34.017,71	38.868,05	24.104,55	15.615,50	28.826,13	38.531,84	18.679,53
<i>Net Flow</i>	-2.074,77	13.057,06	8.169,05	36.693,46	-1.053,06	12.981,64	3.113,71	46.212,84	13.585,84	-1.426,59	4.786,10	45.848,48	22.099,82	-17.398,67	15.665,10

Sumber: Bank Indonesia



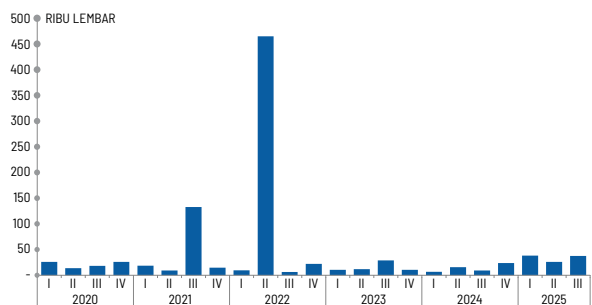
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.1 Perkembangan *Inflow*, *Outflow*, dan *Net Flow* Uang Kartal



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.2 *Inflow*, *Outflow*, dan *Net Flow* per Pecahan



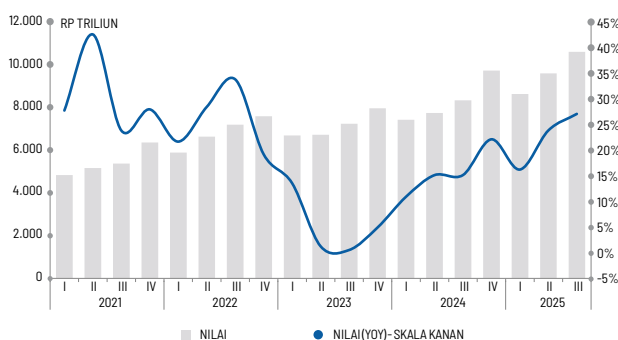
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.3 Perkembangan Temuan Uang yang Diragukan Keasiannya

### Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement (BI-RTGS)

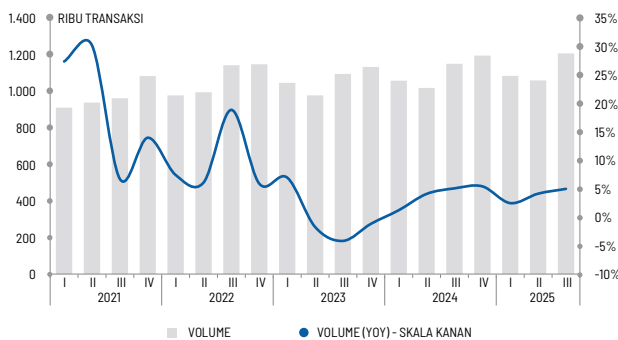
Nilai dan volume transaksi BI RTGS di triwulan III 2025 tercatat mengalami pertumbuhan dibandingkan dari triwulan sebelumnya.

Nilai transaksi BI-RTGS mencapai Rp10.630 triliun atau tumbuh 27,16% (yoy) meningkat dari periode sebelumnya yang tumbuh 23,92% (yoy) (Grafik 6.4). Sementara itu, volume transaksi BI-RTGS tercatat 1,20 juta transaksi atau tumbuh 4,97% (yoy) (Grafik 6.5). Pertumbuhan transaksi bernilai besar melalui BI-RTGS ini terutama bersumber dari pertumbuhan transaksi pemerintah yang tercatat mengalami peningkatan pada triwulan III 2025, sejalan dengan tren akselerasi realisasi belanja Pemerintah menjelang akhir tahun.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.4 Perkembangan Nilai Transaksi RTGS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

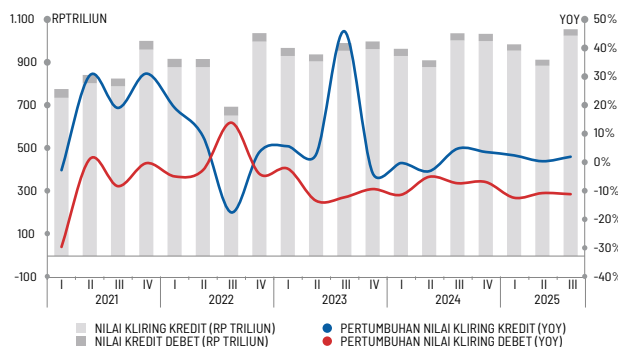
Grafik 6.5 Perkembangan Volume Transaksi RTGS

### Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Transaksi SKNBI pada triwulan III 2025 juga tercatat mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dari triwulan sebelumnya. Nilai transaksi SKNBI kliring kredit tercatat mencapai Rp1.026,65 triliun dengan volume sebanyak 31,68 juta transaksi pada triwulan laporan. Secara tahunan, nilai transaksi SKNBI kliring kredit tersebut tumbuh 2,21% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh 0,64% (yoy). Dari sisi volume, jumlah aktivitas pembayaran menggunakan SKNBI kliring kredit juga mengalami pertumbuhan sebesar 2,79% (yoy) berbeda dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 1,14% (yoy).

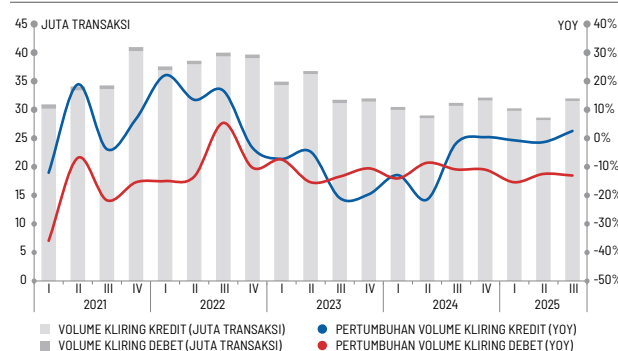
Sementara itu, nilai transaksi SKNBI kliring debit pada triwulan III 2025 mencapai Rp30,06 triliun dengan volume sebanyak 452,50 ribu transaksi. Nilai dan volume tersebut masing-masing mengalami kontraksi 10,87(yoy) dan 12,87% (yoy), tidak berbeda jauh dari triwulan sebelumnya yang juga terkontraksi masing-masing sebesar 12,31% (yoy) dan 10,49% (yoy)(Grafik 6.7).

Peningkatan transaksi SKNBI Kliring Kredit pada triwulan III 2025 mencerminkan menguatnya aktivitas pembayaran *outgoing*, terutama sejalan dengan peningkatan kegiatan korporasi, belanja pemerintah, dan kebutuhan pembayaran menjelang akhir tahun. Sebaliknya, perlambatan pada SKNBI Kliring Debit lebih disebabkan oleh pergeseran preferensi masyarakat dan pelaku usaha menuju instrumen pembayaran yang lebih efisien, seperti BI-FAST dan kanal *mobile banking*.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.6 Perkembangan Nilai Transaksi SKNBI



Sumber: Bank Indonesia, diolah

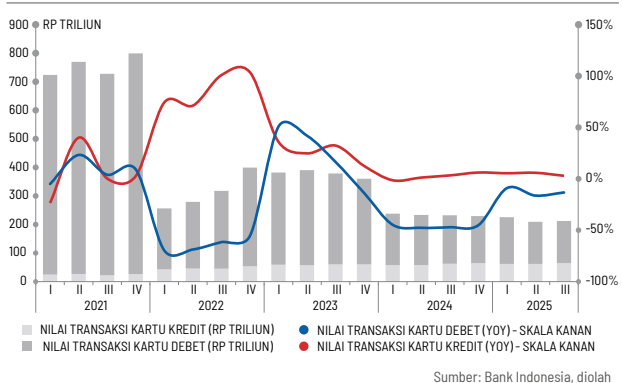
Grafik 6.7 Perkembangan Volume Transaksi SKNBI

### Instrumen Pembayaran Nontunai

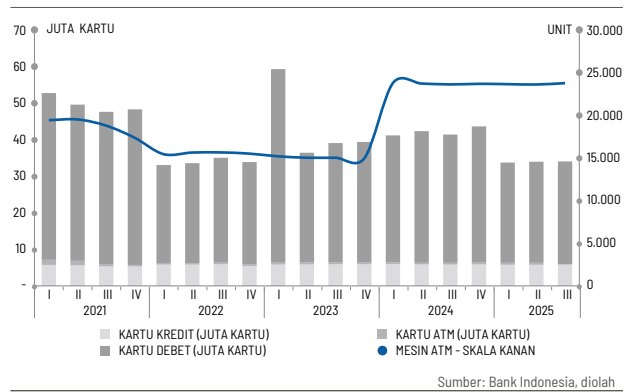
Pada triwulan III 2025, transaksi pada Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) jenis kredit tetap kuat. Transaksi kartu kredit mengalami pertumbuhan positif baik dari sisi nilai dan volume. Nilai transaksi kartu kredit pada triwulan laporan tercatat mencapai Rp64,97 triliun dengan volume transaksi sebanyak 74,97 juta. Nilai transaksi tersebut tumbuh positif sebesar 3,36% (yoy), meskipun mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,31% (yoy). Sementara itu dari sisi volume transaksi, tercatat tumbuh positif 11,96% (yoy) melambat dibandingkan dari triwulan sebelumnya sebesar 13,41% (yoy) (Grafik 6.8). Kondisi ini terkonfirmasi sebagaimana pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta khususnya Konsumsi Rumah Tangga yang sedikit mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Di sisi lain, transaksi kartu debit mengalami kontraksi baik dari sisi nilai maupun volume. Nilai transaksi kartu debit tercatat sebesar Rp148,44 triliun dengan volume sebanyak 182,69 juta transaksi. Nilai transaksi tersebut mengalami kontraksi sebesar 12,84% (yoy) sedikit membaik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 15,92% (yoy). Dari sisi volume transaksi kartu debit juga terkontraksi sebesar 17,52% (yoy), lebih dalam dibandingkan dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 2,88% (yoy) (Grafik 6.8). Bergesernya preferensi pembayaran masyarakat menuju instrumen digital seperti QRIS diperkirakan menjadi salah satu faktor melambatnya penggunaan kartu debit.

Meskipun demikian, jumlah penerbitan kartu kredit maupun debit terus mengalami pertumbuhan di DKI Jakarta. Jumlah kartu kredit mencapai 5,88 juta kartu atau tumbuh sebesar 0,20% (yoy), sedangkan jumlah kartu debit mencapai 28,32 juta atau tumbuh sebesar 10,79% (yoy) (Grafik 6.9).



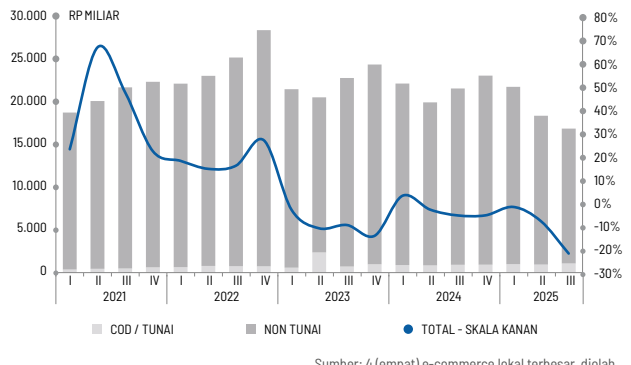
Grafik 6.8 Perkembangan Nilai Transaksi Kartu Kredit dan Debit



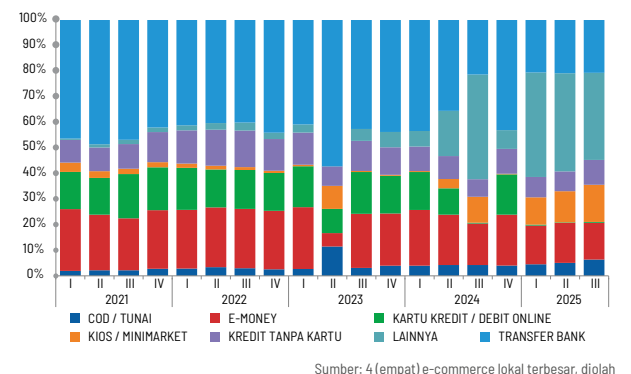
Grafik 6.9 Perkembangan Jumlah Kartu Kredit, Debit dan ATM

### Digital Payment E-Commerce

Transaksi pembayaran non tunai melalui e-commerce pada triwulan III 2025 tetap tumbuh positif meskipun lebih rendah dari sebelumnya. Nilai transaksi pembayaran non tunai melalui e-commerce menyumbang 93,64% dari seluruh total transaksi pembayaran melalui e-commerce. Pada triwulan laporan, nilai transaksi non tunai melalui e-commerce terkontraksi sebesar 23,54% (yoy) dari Rp20,71 triliun menjadi Rp15,83 triliun (Grafik 6.10). Adapun, metode pembayaran transaksi e-commerce didominasi oleh lainnya (34,04%), disusul transfer bank (20,63%), kemudian diikuti kios dan e-money masing-masing sebesar 14,54% dan 14,37% (Grafik 6.11).



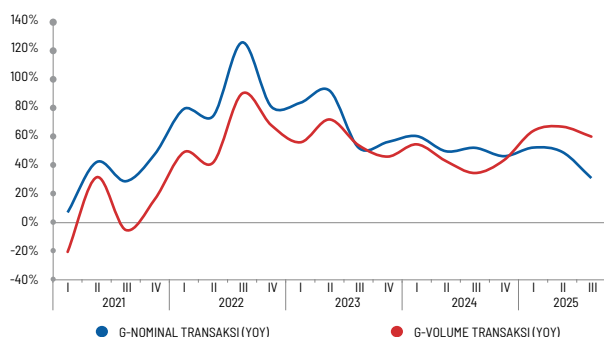
Grafik 6.10 Perkembangan Transaksi E-commerce Berdasarkan Metode Pembayaran



Grafik 6.11 Pangsa Transaksi E-commerce Berdasarkan Metode Pembayaran

## Uang Elektronik

Pertumbuhan nominal maupun volume transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik, baik yang berbasis server maupun berbasis chip mengalami perlambatan seiring dengan diversifikasi produk sistem pembayaran yang tersedia. Pada triwulan III tahun 2025, pertumbuhan nominal transaksi uang elektronik mencapai 30,75% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 48,80% (yoy). Selanjutnya, pertumbuhan volume transaksi uang elektronik tercatat mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya dari 66,30% (yoy) menjadi 59,44% (yoy). Penurunan nominal maupun volume transaksi uang elektronik ini terjadi seiring dengan diversifikasi produk dan instrumen pembayaran digital yang tersedia di masyarakat.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.12 Perkembangan Transaksi Uang Elektronik



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.13 Perkembangan Instrumen dan Mesin Reader Uang Elektronik

## Akselerasi Pembayaran Non Tunai QRIS

Adopsi QR Code Indonesian Standard (QRIS) di DKI Jakarta terus meluas didukung pelaksanaan edukasi dan sosialisasi QRIS, pendalaman user experience pada pusat perbelanjaan dan transportasi publik, serta sinergi penyelenggaraan berbagai event strategis dengan stakeholder. Sampai dengan triwulan III 2025, jumlah pengguna QRIS di DKI Jakarta meningkat 3,42% (yoy) dengan mencapai 6,08 juta pengguna QRIS atau terdapat penambahan 140,49 ribu pengguna baru dari tahun sebelumnya (Grafik 6.14). Selanjutnya, jumlah merchant QRIS di Jakarta meningkat 13,60% (yoy) dengan

mencapai 6,38 juta merchant atau terdapat penambahan 601,36 ribu merchant baru dari tahun sebelumnya (Grafik 6.15).

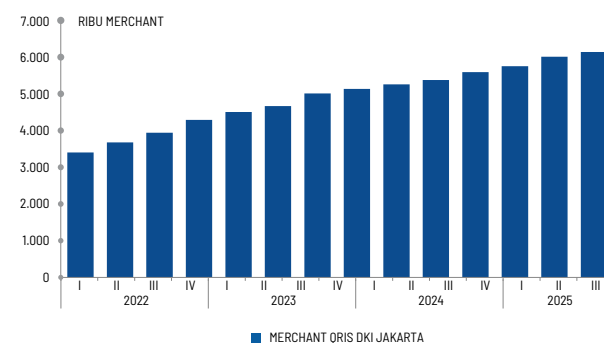
Berdasarkan wilayahnya, merchant QRIS terbanyak terdapat di Kota Administratif Jakarta Selatan dengan porsi 40,17% disusul Kota Administratif Jakarta Timur dengan pangsa 21,07% (Grafik 6.16). Saat ini, profil merchant QRIS di Jakarta sebagian besar merupakan usaha mikro dengan pangsa sebesar 40,39%, disusul usaha reguler 30,16% (Grafik 6.17).

Sejalan dengan kenaikan pengguna dan merchant QRIS baru, volume transaksi QRIS juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 1,59 miliar transaksi pada triwulan laporan atau tumbuh secara akumulatif mencapai 3,85 miliar transaksi (Jan – Sep 2025) dengan 172% (ctc) (Grafik 6.18).



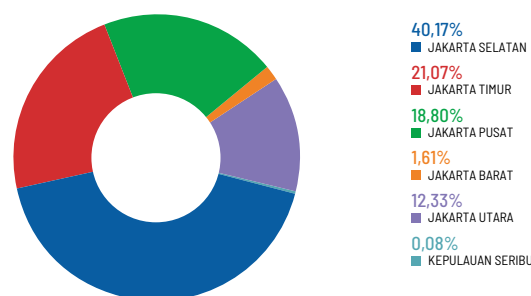
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.14 Perkembangan Pengguna QRIS di DKI Jakarta



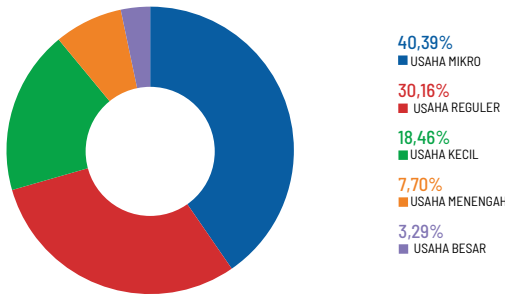
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.15 Perkembangan Merchant QRIS di DKI Jakarta



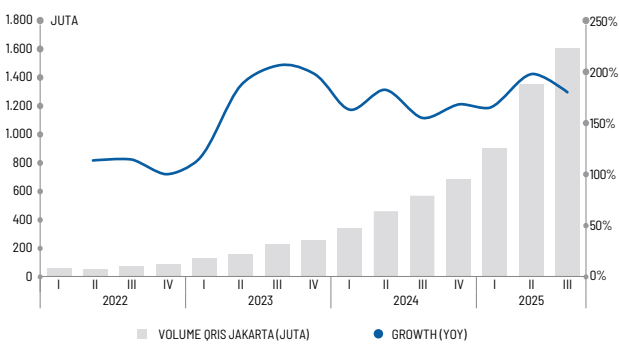
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.16 Pangsa Merchant QRIS per Wilayah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.17 Pangsa Merchant QRIS per Jenis Usaha



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.18 Perkembangan Volume transaksi QRIS di DKI Jakarta

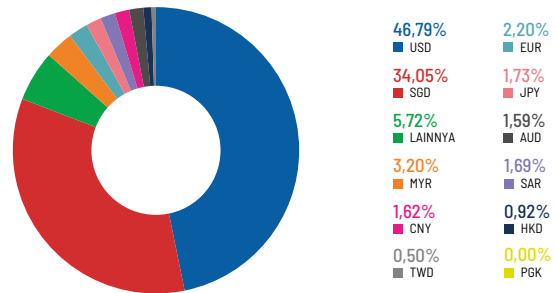
### C. UPAYA MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN

#### Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

Pada Triwulan III 2025, nilai transaksi Penyelenggara KUPVA BB tercatat tumbuh **13,19% (yoy)** dengan nominal sebesar Rp143,94 triliun, **meningkat** dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,98% (yoy) dengan nilai transaksi sebesar Rp110,75 triliun.

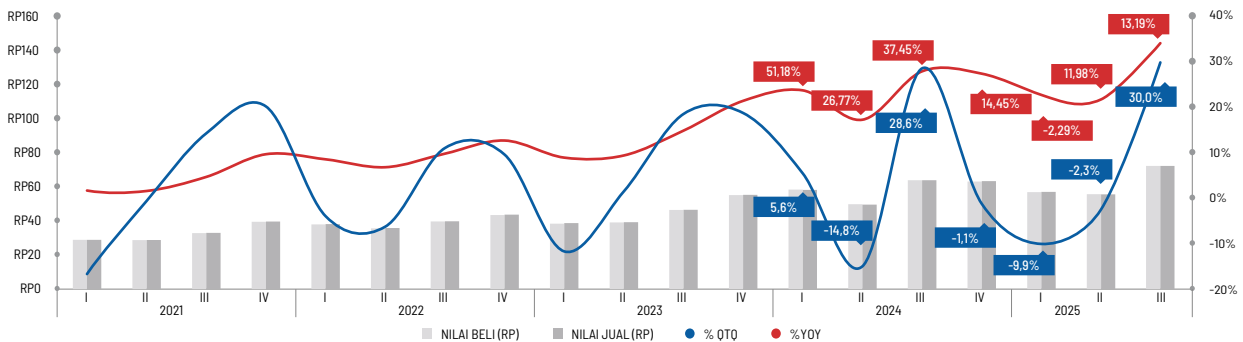
Secara kuartalan, nilai transaksi meningkat **sebesar 30,00% (qtq)** dari triwulan sebelumnya (Grafik 6.19). Berlanjutnya tren peningkatan tersebut mengindikasikan adanya pemulihan permintaan terhadap valuta asing.

Perkembangan ini sejalan dengan meningkatnya kembali aktivitas perjalanan luar negeri serta kebutuhan transaksi valas masyarakat untuk kepentingan haji/umroh dan liburan akhir tahun. Namun, ketidakpastian ekonomi global dan pergeseran preferensi terhadap instrumen pembayaran digital tetap menjadi faktor yang membatasi pertumbuhan transaksi fisik valuta asing oleh Penyelenggara KUPVA BB. Pada triwulan III 2025, terdapat 318 (Kantor Pusat) dan 189 (Kantor Cabang) Penyelenggara KUPVA BB yang telah diberikan izin operasional dan diawasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi DKI Jakarta (Tabel 6.2). Industri KUPVA BB saat ini banyak beroperasi di wilayah Jakarta Selatan (19,6%) dan Jakarta Pusat (9,5%). Adapun *market share* valuta asing yang ditransaksikan di wilayah pengawasan KPw BI Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh mata uang USD dan SGD dengan persentase masing-masing sebesar 46,79% dan 34,05% (Grafik 6.20).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.20 Market Share Valuta Asing



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.19 Perkembangan Transaksi KUPVA BB

**Tabel 6.2** Persebaran KUPVA BB

NO	WILAYAH	KP	KC	JUMLAH
1	DKI Jakarta	284	89	373
2	Bogor	8	8	16
3	Depok	8	3	11
4	Bekasi	15	6	21
5	Karawang	3	1	4
6	Tangerang	0	21	21
7	Pulau Jawa (Lainnya)		37	37
8	Pulau Bali		11	11
9	Pulau Sulawesi		2	2
10	Pulau Sumatera		11	11
<b>TOTAL</b>		<b>318</b>	<b>189</b>	<b>507</b>

Sumber: Bank Indonesia, diolah

### Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR)

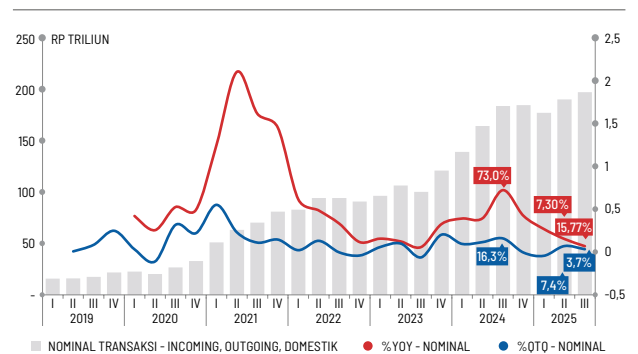
Berdasarkan data Laporan Transfer Dana Bukan Bank, perkembangan nilai transaksi transfer dana yang diselenggarakan oleh PJP LR pada triwulan III 2025 menunjukkan pergerakan yang beragam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai transaksi *outgoing* dan domestik masih tercatat mengalami pertumbuhan positif meskipun lebih rendah dari triwulan sebelumnya, sementara transaksi *incoming* mengalami perbaikan pertumbuhan meskipun tetap terkontraksi. Rincian pergerakan transaksi adalah sebagai berikut:

- Nilai transaksi *outgoing* di wilayah kerja KPwBI DKI Jakarta pada triwulan III 2025 tercatat tumbuh sebesar 13,32% (yoy) dengan nilai nominal sebesar Rp15,65 triliun, tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 106,46% (yoy) dengan nominal sebesar Rp21,78 triliun. Sementara itu, frekuensi transaksi *outgoing* tercatat tumbuh meningkat sebesar 32,22% (yoy) atau sebanyak 666.697 transaksi, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 27,22% (yoy) dengan frekuensi sebanyak 591.844 transaksi.
- Nilai transaksi *incoming* di wilayah kerja KPwBI DKI Jakarta pada triwulan III 2025 tercatat terkontraksi 28,53% (yoy) dengan nominal sebesar Rp22,58 triliun, mengalami perbaikan pertumbuhan

setelah triwulan sebelumnya mengalami kontraksi yang lebih dalam sebesar -41,86% (yoy) dengan nominal sebesar Rp23,54 triliun. Sejalan dengan nilai transaksi, dari sisi volume transaksi turut mengalami kontraksi 37,11% (yoy) dengan frekuensi sebesar 3,15 juta transaksi. Pertumbuhan ini mengalami perbaikan setelah triwulan sebelumnya mengalami kontraksi yang lebih dalam sebesar -42,24% (yoy) dengan frekuensi sebesar 3,54 juta transaksi.

- Nilai transaksi domestik pada triwulan III 2025 tercatat tumbuh sebesar 14,77% (yoy) dengan nominal sebesar Rp159,93 triliun, tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 27,83% (yoy) dengan nominal sebesar Rp145,82 triliun. Sejalan dengan nilai transaksi, volume transaksi tercatat tumbuh sebesar 5,54% (yoy) dengan frekuensi sebesar 81,73 juta transaksi, tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 19,07% (yoy) dengan frekuensi sebanyak 84,04 juta transaksi.

Secara keseluruhan terjadi pertumbuhan yang positif secara tahunan pada nilai dan frekuensi total transaksi *outgoing*, *incoming*, dan domestik transfer dana yang diselenggarakan oleh PJP LR. Total nilai transaksi tercatat sebesar Rp198,16 triliun atau tumbuh 7,30% (yoy), sementara total frekuensi transaksi mencapai 85,55 juta transaksi atau tumbuh 3,12% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik 6.21).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 6.21** Perkembangan Transaksi PJP LR

**Tabel 6.3** Perkembangan Transaksi PJP LR

PERIODE	OUTGOING		INCOMING		DOMESTIK		TOTAL		
	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	
TW I 2020	Jan-20	19.244	876.029.558.924	2.790.747	2.448.962.056.681	2.318.460	3.652.836.612.761	5.128.451	6.977.828.228.366
	Feb-20	17.820	705.196.274.574	464.055	2.541.422.928.345	3.207.777	4.268.574.298.242	3.689.652	7.515.193.501.161
	Mar-20	14.973	786.786.445.415	513.070	3.249.878.679.624	3.187.842	4.291.224.204.144	3.715.885	8.327.889.329.183
	<b>Total</b>	<b>52037</b>	<b>2.368.012.278.913</b>	<b>3.767.872</b>	<b>8.240.263.664.650</b>	<b>8.714.079</b>	<b>12.212.635.115.147</b>	<b>12.533.988</b>	<b>22.820.911.058.710</b>
TW II 2020	Apr-20	9.843	451.330.534.267	518.556	3.109.213.840.919	1.835.884	3.035.059.526.763	2.364.283	6.595.603.901.949
	May-20	11.846	317.617.797.609	638.902	3.272.985.284.693	2.190.258	3.100.375.671.350	2.840.806	6.690.978.753.652
	Jun-20	16.362	609.234.172.893	592.505	3.021.071.820.858	2.547.826	3.469.218.209.499	3.156.693	7.099.524.203.250
	<b>Total</b>	<b>37.851</b>	<b>1.378.182.504.769</b>	<b>1.749.963</b>	<b>9.403.270.946.470</b>	<b>6.573.968</b>	<b>9.604.653.407.612</b>	<b>8.361.782</b>	<b>20.386.106.858.851</b>
TW III 2020	Jul-20	17.307	776.735.132.076	625.951	3.578.380.589.317	3.196.653	4.498.767.441.505	3.839.911	8.853.883.162.898
	Aug-20	16.536	682.778.854.093	562.361	3.331.395.275.865	3.745.893	4.536.278.891.917	4.324.790	8.550.453.021.875
	Sep-20	17.272	872.519.689.320	570.496	3.371.000.771.677	4.273.546	5.311.898.312.574	4.861.314	9.555.418.773.571
	<b>Total</b>	<b>51.115</b>	<b>2.332.033.675.489</b>	<b>1.758.808</b>	<b>10.280.776.636.859</b>	<b>11.216.092</b>	<b>14.346.944.645.996</b>	<b>13.026.015</b>	<b>26.959.754.958.344</b>
TW IV 2020	Oct-20	17.695	970.727.059.198	593.571	3.281.780.541.285	4.997.412	6.184.066.710.486	5.608.678	10.436.574.310.969
	Nov-20	20.811	1.382.025.507.414	531.845	2.885.258.608.907	5.429.305	7.050.762.370.538	5.981.961	11.318.046.486.859
	Dec-20	23.083	1.275.443.128.213	598.304	3.018.815.956.838	5.639.375	6.988.830.657.280	6.260.762	11.283.089.742.331
	<b>Total</b>	<b>61.589</b>	<b>3.628.195.694.825</b>	<b>1.723.720</b>	<b>9.185.855.107.030</b>	<b>16.066.092</b>	<b>20.223.659.738.304</b>	<b>17.851.401</b>	<b>33.037.710.540.159</b>
TW I 2021	Jan-21	21.726	1.741.457.787.387	602.773	2.991.156.931.488	6.924.581	11.536.770.574.232	7.549.080	16.269.385.293.107
	Feb-21	20.941	1.721.643.886.343	636.155	3.206.717.228.676	7.181.263	11.198.616.289.229	7.838.359	16.126.977.404.248
	Mar-21	24.788	1.800.355.972.601	748.668	4.200.335.445.525	8.056.932	13.050.057.206.091	8.830.388	19.050.748.624.217
	<b>Total</b>	<b>67.455</b>	<b>5.263.457.646.331</b>	<b>1.987.596</b>	<b>10.398.209.605.689</b>	<b>22.162.776</b>	<b>35.785.444.069.552</b>	<b>24.217.827</b>	<b>51.447.111.321.572</b>
TW II 2021	Apr-21	23.526	1.910.947.591.495	782.361	4.380.193.932.569	8.443.134	14.649.820.451.794	9.249.021	20.940.961.975.858
	May-21	25.291	2.129.640.509.196	801.262	4.023.213.606.203	8.859.710	15.498.808.588.234	9.686.263	21.651.662.703.633
	Jun-21	27.811	1.597.292.074.810	689.981	3.858.043.970.924	9.572.630	15.464.282.991.151	10.290.422	20.919.619.036.885
	<b>Total</b>	<b>76.628</b>	<b>5.637.880.175.501</b>	<b>2.273.604</b>	<b>12.261.451.509.696</b>	<b>26.875.474</b>	<b>45.612.912.031.179</b>	<b>29.225.706</b>	<b>63.512.243.716.376</b>
TW III 2021	Jul-21	27.544	1.557.649.197.078	748.349	4.028.836.392.802	10.946.079	17.343.385.085.306	11.721.972	22.929.870.675.186
	Aug-21	32.709	1.882.464.840.771	732.673	3.673.710.587.218	11.546.029	18.240.033.185.328	12.311.411	23.796.208.613.317
	Sep-21	37.379	2.395.543.528.447	695.051	3.792.521.359.819	10.721.645	17.863.854.189.666	11.454.075	24.051.919.077.932
	<b>Total</b>	<b>97.632</b>	<b>5.835.657.566.296</b>	<b>2.176.073</b>	<b>11.495.068.339.839</b>	<b>33.213.753</b>	<b>53.447.272.460.300</b>	<b>35.487.458</b>	<b>70.777.998.366.435</b>
TW IV 2021	Oct-21	44.692	1.665.458.149.146	865.278	4.678.048.147.998	11.901.324	19.718.417.463.247	12.811.294	26.061.923.760.391
	Nov-21	47.330	2.280.183.690.703	860.062	4.337.538.438.064	12.296.639	19.772.832.790.543	13.204.031	26.390.554.919.310
	Dec-21	51.347	2.354.809.539.298	899.734	4.562.790.327.433	13.864.975	21.998.721.000.286	14.816.056	28.916.320.867.017
	<b>Total</b>	<b>143.369</b>	<b>6.300.451.379.147</b>	<b>2.625.074</b>	<b>13.578.376.913.495</b>	<b>38.062.938</b>	<b>61.489.971.254.076</b>	<b>40.831.381</b>	<b>81.368.799.546.718</b>
TW I 2022	Jan-22	51.628	2.701.112.895.750	856.897	4.449.009.613.453	13.945.338	21.276.650.265.317	14.853.863	28.426.772.574.520
	Feb-22	50.467	2.174.429.338.961	763.251	3.913.050.656.759	13.261.702	18.698.420.551.277	14.075.420	24.785.900.546.997
	Mar-22	61.305	2.498.231.799.915	864.253	4.510.919.780.009	15.911.984	23.232.489.225.313	16.837.542	30.241.640.805.237
	<b>Total</b>	<b>163.400</b>	<b>7.373.774.034.626</b>	<b>2.484.401</b>	<b>12.872.980.050.221</b>	<b>43.119.024</b>	<b>63.207.560.041.907</b>	<b>45.766.825</b>	<b>83.454.314.126.754</b>
TW II 2022	Apr-22	60.384	3.612.733.838.880	960.426	5.091.901.296.134	17.379.120	25.894.326.976.935	18.399.930	34.598.962.111.949
	May-22	103.895	2.910.275.109.260	960.208	3.568.568.025.155	14.786.905	22.095.641.826.505	15.851.008	28.574.484.960.920
	Jun-22	112.629	2.526.485.373.078	993.800	4.071.142.999.492	16.869.809	24.098.078.056.629	17.976.238	30.695.706.429.199
	<b>Total</b>	<b>276.908</b>	<b>9.049.494.321.218</b>	<b>2.914.434</b>	<b>12.731.612.320.781</b>	<b>49.035.834</b>	<b>72.088.046.860.069</b>	<b>52.227.176</b>	<b>93.869.153.502.068</b>
TW III 2022	Jul-22	337.911	3.273.993.931.950	1.045.343	4.674.318.696.750	18.116.128	25.518.115.462.080	19.499.382	33.466.428.090.780
	Aug-22	336.824	3.213.384.141.909	809.921	3.475.043.980.438	17.553.090	24.691.222.695.268	18.699.835	31.379.608.817.615
	Sep-22	358.458	3.476.017.082.373	821.254	3.610.053.172.188	16.916.743	22.772.172.389.235	18.096.455	29.858.242.643.796
	<b>Total</b>	<b>1.033.193</b>	<b>9.963.395.156.232</b>	<b>2.676.518</b>	<b>11.759.415.849.376</b>	<b>52.585.961</b>	<b>72.981.510.546.583</b>	<b>56.295.672</b>	<b>94.704.321.552.191</b>
TW IV 2022	Oct-22	347.348	3.209.904.766.688	826.067	3.498.815.511.210	16.857.239	21.432.734.318.000	17.830.654	28.141.454.595.898
	Nov-22	349.029	3.270.207.410.868	1.030.146	4.660.248.534.081	16.617.865	21.771.323.623.705	17.997.040	29.701.779.568.654
	Dec-22	175.900	2.849.529.906.824	1.089.837	4.964.763.505.699	17.728.054	25.553.442.712.594	18.993.791	33.367.736.125.117
	<b>Total</b>	<b>872.277</b>	<b>9.329.642.084.380</b>	<b>2.946.050</b>	<b>13.123.827.550.990</b>	<b>51.003.158</b>	<b>68.757.500.654.299</b>	<b>54.821.485</b>	<b>91.210.970.289.669</b>
TW I 2023	Jan-23	206.853	3.031.663.147.712	1.060.915	4.172.178.454.812	17.166.451	23.422.773.401.867	18.434.219	30.626.615.004.391
	Feb-23	188.141	2.541.796.523.358	1.255.634	4.984.718.627.496	15.713.344	21.636.054.827.967	17.157.119	29.162.569.978.821
	Mar-23	206.014	6.271.350.309.317	1.370.890	5.632.361.765.112	17.986.604	26.324.340.424.361	19.563.508	38.228.052.498.790
	<b>Total</b>	<b>601.008</b>	<b>11.844.809.980.387</b>	<b>3.687.439</b>	<b>14.789.258.847.420</b>	<b>50.866.399</b>	<b>71.383.168.654.195</b>	<b>55.154.846</b>	<b>98.017.237.482.002</b>
TW II 2023	Apr-23	206.505	2.669.338.138.416	1.227.373	4.676.310.240.207	17.799.845	25.530.062.603.041	19.233.723	32.875.710.981.664
	May-23	245.253	3.156.441.613.325	1.324.557	5.389.577.591.989	17.560.216	24.951.878.726.113	19.130.026	33.497.897.931.427
	Jun-23	247.246	2.675.347.301.006	1.458.598	5.900.609.310.299	20.042.400	31.990.595.585.855	21.748.244	40.566.552.197.160
	<b>Total</b>	<b>699.004</b>	<b>8.501.127.052.747</b>	<b>4.010.528</b>	<b>15.966.497.142.495</b>	<b>55.402.461</b>	<b>82.472.536.915.009</b>	<b>60.111.993</b>	<b>106.940.161.110.251</b>
TW III 2023	Jul-23	245.468	2.672.778.528.424	1.234.758	5.567.750.963.697	18.217.682	25.701.541.146.742	19.697.908	33.942.070.638.863
	Aug-23	272.700	2.986.632.796.251	1.208.366	5.387.603.973.108	18.961.370	24.235.934.246.395	20.442.436	32.610.171.015.754
	Sep-23	281.232	2.964.115.516.896	1.181.297	5.265.620.629.852	18.037.861	25.875.297.213.086	19.500.390	34.105.033.359.834
	<b>Total</b>	<b>799.400</b>	<b>8.623.528.841.571</b>	<b>3.624.421</b>	<b>16.220.975.566.657</b>	<b>55.216.913</b>	<b>75.812.772.606.223</b>	<b>59.640.734</b>	<b>100.657.275.014.451</b>
TW IV 2023	Oct-23	297.665	3.341.174.508.381	1.344.927	6.122.309.658.091	23.441.197	30.412.963.804.944	25.083.789	39.876.447.971.416
	Nov-23	158.796	3.113.258.356.874	1.076.976	5.502.165.624.171	20.364.548	30.652.789.833.843	21.600.320	39.268.213.814.888
	Dec-23	158.421	3.299.192.281.008	1.208.815	6.152.900.385.938	20.906.792	32.960.977.317.490	22.274.028	42.413.069.984.436
	<b>Total</b>	<b>614.882</b>	<b>9.753.625.146.263</b>	<b>3.630.718</b>	<b>17.777.375.668.200</b>	<b>64.712.537</b>	<b>94.026.730.956.277</b>	<b>68.958.137</b>	<b>121.557.731.770.740</b>
TW I 2024	Jan-24	164.853	3.542.320.689.096	1.149.198	6.546.289.317.870	20.134.309	33.308.830.591.428	21.448.360	43.397.440.598.394
	Feb-24	146.838	3.155.098.647.522	1.122.486	7.069.174.073.388	19.490.424	33.262.462.144.272	20.759.748	43.486.734.865.182
	Mar-24	151.913	3.347.482.549.612	1.319.088	8.068.088.794.892	22.434.290	35.324.096.189.978		

PERIODE	OUTGOING		INCOMING		DOMESTIK		TOTAL		
	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	
TW II 2024	Apr-24	152.595	3.116.325.807.983	1.513.702	8.963.120.524.159	21.991.219	34.707.823.244.702	23.657.516	46.787.269.576.844
	May-24	159.208	3.684.703.251.154	1.360.498	8.267.486.900.714	24.025.918	38.363.701.519.121	25.545.624	50.315.891.670.989
	Jun-24	152.825	3.677.435.279.743	1.311.905	7.913.112.578.674	24.564.070	40.997.949.584.626	26.028.800	52.588.497.443.043
	<b>Total</b>	<b>464.628</b>	<b>10.478.464.338.880</b>	<b>4.186.105</b>	<b>25.143.720.003.547</b>	<b>70.581.207</b>	<b>114.069.474.348.449</b>	<b>75.231.940</b>	<b>149.691.658.690.876</b>
TW III 2024	Jul-24	170.844	4.286.252.310.689	1.254.388	7.253.837.600.268	23.608.049	47.785.360.191.808	25.033.281	59.325.450.102.765
	Aug-24	165.438	4.769.314.105.747	1.249.523	7.540.207.796.939	24.627.251	45.731.778.010.778	26.042.212	58.041.299.913.464
	Sep-24	167.964	4.755.459.387.757	1.027.373	6.156.438.717.382	29.202.399	45.840.712.560.218	30.397.736	56.752.610.665.357
	<b>Total</b>	<b>504.246</b>	<b>13.811.025.804.193</b>	<b>3.531.284</b>	<b>20.950.484.114.589</b>	<b>77.437.699</b>	<b>139.357.850.762.804</b>	<b>81.473.229</b>	<b>174.119.360.681.586</b>
TW IV 2024	Oct-24	156.281	4.406.153.123.565	1.136.260	6.970.586.639.211	31.126.073	45.334.021.099.509	32.418.614	56.710.760.862.285
	Nov-24	170.656	4.617.925.897.335	1.092.969	6.713.456.411.351	26.491.850	40.682.410.626.798	27.755.475	52.013.792.935.484
	Dec-24	181.990	5.316.793.381.989	1.234.435	7.527.339.722.595	33.585.398	52.178.026.458.269	35.001.823	65.022.159.562.853
	<b>Total</b>	<b>508.927</b>	<b>14.340.872.402.889</b>	<b>3.463.664</b>	<b>21.211.382.773.157</b>	<b>91.203.321</b>	<b>138.194.458.184.576</b>	<b>95.175.912</b>	<b>173.746.713.380.622</b>
TW I 2025	Jan-25	177.878	4.842.827.046.010	1.191.286	7.459.985.998.064	11.107.408	18.153.606.119.248	12.476.572	30.456.419.163.322
	Feb-25	164.374	4.799.437.496.484	1.273.485	7.874.464.076.194	33.299.993	41.890.550.432.665	34.737.852	54.564.452.005.343
	Mar-25	184.244	4.655.793.930.793	1.664.259	10.110.398.671.016	31.676.346	48.078.446.498.877	33.524.849	62.844.639.100.686
	<b>Total</b>	<b>526.496</b>	<b>14.298.058.473.287</b>	<b>4.129.030</b>	<b>25.444.848.745.274</b>	<b>76.083.747</b>	<b>108.122.603.050.790</b>	<b>80.739.273</b>	<b>147.865.510.269.351</b>
TW II 2025	Apr-25	184.176	5.169.460.395.115	1.241.857	7.783.997.649.627	26.538.783	45.865.543.463.830	27.964.816	58.819.001.508.572
	May-25	207.449	11.714.605.422.440	1.286.246	8.316.406.201.392	29.642.291	45.940.189.453.098	31.135.986	65.971.211.076.930
	Jun-25	200.219	4.897.355.799.238	1.013.970	7.440.197.023.456	27.857.548	54.009.398.363.060	29.071.737	66.346.951.185.754
	<b>Total</b>	<b>591.844</b>	<b>21.781.421.616.793</b>	<b>3.542.073</b>	<b>23.540.600.874.475</b>	<b>84.038.622</b>	<b>145.815.141.279.988</b>	<b>88.172.539</b>	<b>191.137.163.771.256</b>
TW III 2025	Jul-25	223.431	5.308.166.493.760	1.037.551	7.551.937.505.375	28.114.667	54.602.217.919.182	29.375.649	67.462.321.918.317
	Aug-25	226.009	5.592.132.487.108	1.132.175	7.935.151.829.562	28.382.556	55.315.588.699.999	29.740.740	68.842.873.016.669
	Sep-25	217.257	4.750.599.974.475	984.898	7.092.132.952.613	25.228.716	50.016.783.355.135	26.430.871	61.859.516.282.223
	<b>Total</b>	<b>666.697</b>	<b>15.650.898.955.343</b>	<b>3.154.624</b>	<b>22.579.222.287.550</b>	<b>81.725.939</b>	<b>159.934.589.974.316</b>	<b>85.547.260</b>	<b>198.164.711.217.209</b>
<b>Grand Total</b>	<b>9.284.961</b>	<b>203.951.315.811.257</b>	<b>70.999.558</b>	<b>390.702.038.949.741</b>	<b>1.134.592.790</b>	<b>1.765.060.765.773.860</b>	<b>1.197.740.465</b>	<b>2.225.530.789.210.370</b>	

Sumber: Bank Indonesia



### BOKS 3

## Implementasi QRIS Tap: Memperkuat Transformasi Pembayaran Sektor Transportasi di DKI Jakarta

Peluncuran QRIS Tanpa Pindai (TAP) menjadi salah satu tonggak penting dalam akselerasi digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia. Menggunakan teknologi *Near Field Communication* (NFC), QRIS TAP menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih cepat dan efisien, sehingga sangat relevan untuk layanan dengan mobilitas tinggi seperti transportasi publik. Inovasi ini secara resmi diluncurkan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, pada 14 Maret 2025 di Stasiun MRT Bundaran HI, disaksikan oleh Menteri Perhubungan, Gubernur DKI Jakarta, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, dan jajaran pemangku kepentingan industri sistem pembayaran. Peluncuran ini menegaskan komitmen Bank Indonesia dalam memperkuat ekosistem pembayaran digital dan mendukung Jakarta sebagai kota global yang modern dan inklusif. Dengan waktu pemrosesan yang dapat dilakukan dalam kurang dari 0,3 detik, QRIS TAP menjadi solusi yang ideal untuk memenuhi kebutuhan transaksi cepat dan *seamless* pada sektor transportasi dan layanan publik.

Implementasi QRIS Tap di Provinsi DKI Jakarta selanjutnya menjadi bagian integral dari upaya memperkuat transformasi digital di sektor transportasi. Jakarta, sebagai wilayah metropolitan dengan tingkat literasi digital tinggi dan ekosistem pembayaran yang telah matang, menjadikan DKI Jakarta sebagai Provinsi yang paling siap dalam penerapan QRIS Tap secara terintegrasi pada berbagai moda transportasi. Selanjutnya, peluncuran QRIS Tap In-Tap Out pada acara

FEKDI x IFSE 2025 menjadi momentum penting untuk menunjukkan kesiapan Jakarta dalam mengadopsi sistem pembayaran digital yang efisien dan dapat diandalkan.

Berbagai langkah koordinasi dan harmonisasi kebijakan telah dilakukan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perhubungan, operator transportasi antara lain MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, KCI, dan TransJakarta, serta JakLingko dan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). Kolaborasi ini berfokus pada interoperabilitas sistem, penguatan infrastruktur jaringan, kesiapan perangkat *gate* dan *reader*, serta penjaminan keamanan transaksi. Pendekatan ini menjadi landasan penting untuk memastikan integrasi layanan di seluruh moda transportasi berjalan selaras dan memenuhi standar nasional sistem pembayaran dengan prinsip CEMUMUAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman, Handal).

Implementasi QRIS Tap juga telah diperluas ke sektor layanan publik lainnya. Kolaborasi dengan penyelenggara parkir seperti Skyparking dan Parkee memperluas penggunaan QRIS Tap pada berbagai lokasi parkir komersial sehingga memperluas ekosistem transaksi digital di Jakarta. Selain aspek teknologi, berbagai program sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan publik serta rangkaian inisiatif FORWRD Jakarta dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong literasi digital dan memperkuat kesiapan masyarakat terhadap inovasi sistem pembayaran.

Ke depan, pengembangan sistem pembayaran berbasis QRIS Tap akan difokuskan pada integrasi tarif lintas moda melalui skema *fare capping*, peningkatan literasi publik, serta perluasan implementasi ke moda transportasi non-BRT dan layanan perairan. Potensi penerapan di kawasan wisata seperti Kepulauan Seribu juga menjadi agenda yang dapat dilakukan, mengingat tingginya kebutuhan mobilitas wisatawan dan masyarakat. Upaya ini diharapkan memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global dengan ekosistem transportasi digital yang terintegrasi dan berdaya saing.

## BAB 7

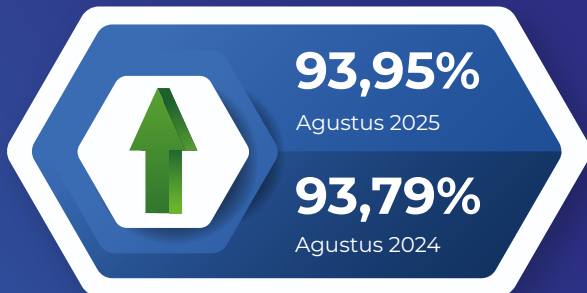
# KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN

Ditengah kinerja ekonomi yang tertahan, serapan tenaga kerja di DKI Jakarta periode Agustus 2025 masih mencatat kenaikan, yang diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran. Berdasarkan status pekerjaan utama, sektor formal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Dari sisi LU, peningkatan serapan tenaga kerja terutama terjadi pada LU Perdagangan Besar dan Eceran. Kemudian, diikuti oleh LU sektor-sektor utama Jakarta lainnya yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, LU Transportasi dan Pergudangan, LU Industri Pengolahan, LU Jasa Lainnya.

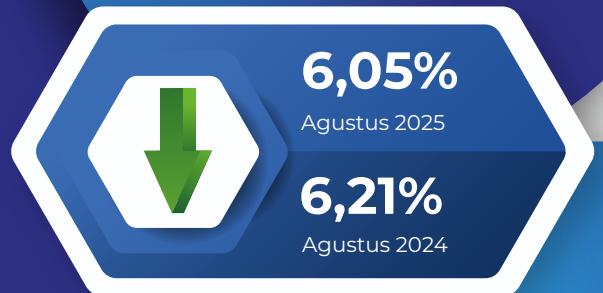
Sementara itu, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta juga mengalami penurunan menjadi 4,28% pada Maret 2025, dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 4,30%. Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta juga tercatat lebih rendah dibandingkan Nasional yang pada September 2024 berada pada level 8,47%. Menurunnya tingkat kemiskinan tersebut sejalan dengan upaya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang secara konsisten terus melakukan program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial antara lain melalui program pemberian subsidi pangan dan transportasi serta pemberian bantuan sosial bagi warga penerima manfaat.



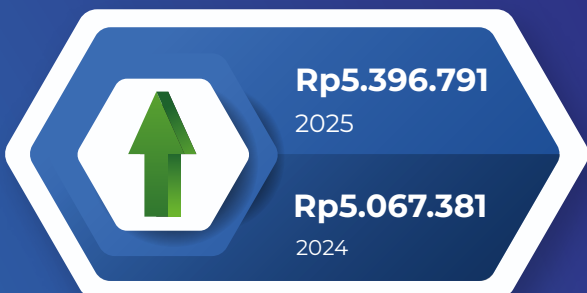
### Tingkat Kesempatan Kerja



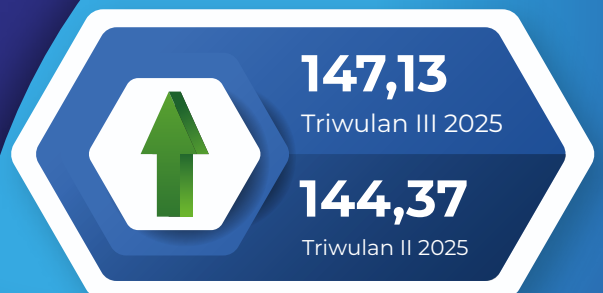
### Tingkat Pengangguran Terbuka



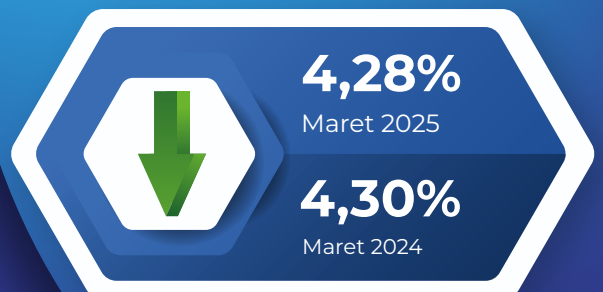
### Upah Minimum Provinsi (UMP)



### Indeks Penghasilan Konsumen



### Presentase Penduduk Miskin



## A. KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan kondisi ketenagakerjaan per Agustus 2025, angka penduduk bekerja di DKI Jakarta tercatat sebanyak 5,13 juta orang, atau tumbuh sebesar 0,40% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 0,69% (yoy) (Grafik 7.1 dan Tabel 7.1). Dari sisi serapan tenaga kerja, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) tercatat sebesar 93,95%, lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya (93,79%) (Grafik 7.2).

Kondisi pekerja di Jakarta didominasi oleh pekerja penuh yaitu penduduk yang bekerja dengan jam kerja minimal 35 jam per minggu dengan pangsa sebesar 83,44%. Sementara itu, sisanya merupakan pekerja tidak penuh yaitu penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu), dengan pangsa sebesar 16,56%. Dibandingkan Agustus 2024, presentase pekerja penuh mengalami peningkatan sebesar 1,29 persen poin.

Sektor formal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta, yakni sebanyak 63,37% dari total pekerja dan sisanya sebanyak 36,63% bekerja pada sektor informal. Jumlah pekerja sektor formal pada Agustus 2025 mengalami kontraksi sebesar 0,1% (yoy) dibandingkan pertumbuhan pada Agustus 2024 sebesar 0,58% (yoy). Sementara itu, jumlah pekerja sektor informal meningkat sebesar

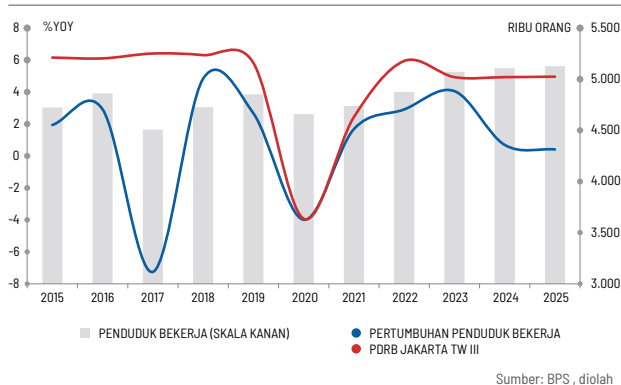
1,3% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 0,89% (yoy). Peningkatan ini juga tercermin dari kenaikan pangsa pekerja informal sebesar 0,32 persen poin dibandingkan Agustus 2024 (Grafik 7.4).

Ditinjau dari status pekerjaan utama, penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai yang termasuk dalam kategori pekerja sektor formal, masih mendominasi total penduduk bekerja di DKI Jakarta, yakni lebih dari 3,08 juta orang. Sementara itu, status berusaha sendiri yang termasuk dalam kategori pekerja sektor informal menempati urutan kedua, yakni lebih dari 1,2 juta orang (Tabel 7.2).



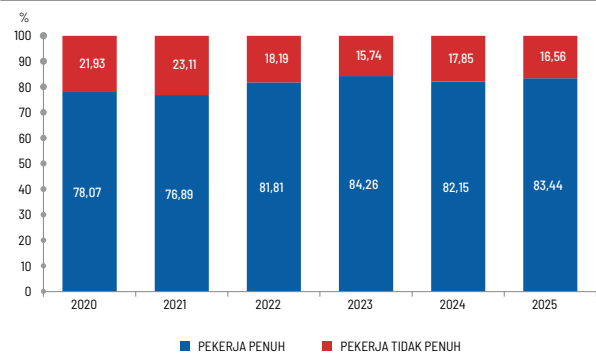
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.2 Persentase Penyerapan Suplai Tenaga Kerja



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.1 Pertumbuhan Jumlah Orang Bekerja dan Pertumbuhan Ekonomi Jakarta



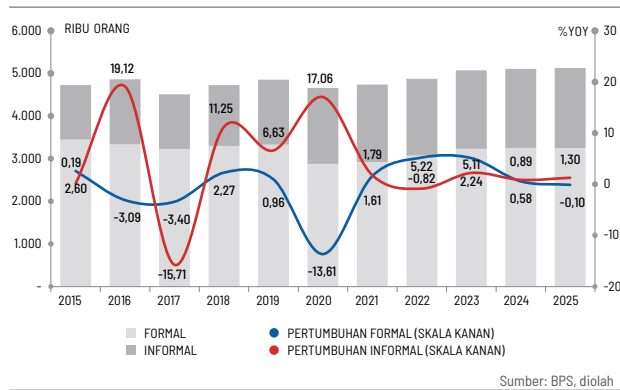
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.3 Proporsi Penduduk Bekerja Berdasarkan Jam Kerja

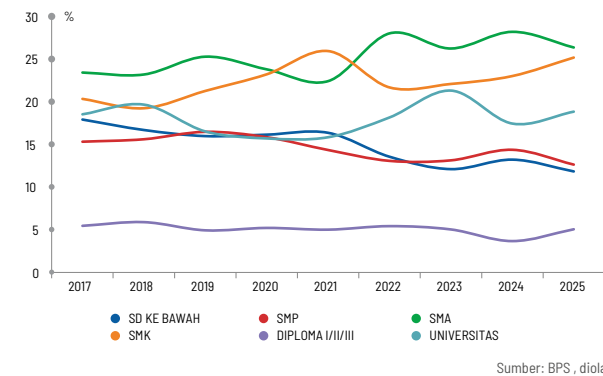
Tabel 7.1 Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan

KEADAAN KETENAGAKERJAAN	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS
Penduduk Usia Kerja (ribu orang)	8.004,78	8.199,69	8.239,83	8.266,36	8.245,33	8.327,00	8.332,26	8.322,91	8.339,08	8.364,83	8.373,46	8.430,62
Angkatan Kerja (ribu orang)	5.438,99	5.232,03	5.365,77	5.177,31	5.134,13	5.252,40	5.255,24	5.427,23	5.434,37	5.445,77	5.476,00	5.458,80
Bekerja (ribu orang)	5.170,67	4.659,25	4.909,17	4.737,42	4.723,54	4.875,10	4.857,62	5.072,74	5.106,78	5.107,78	5.137,60	5.128,46
Pengangguran (ribu orang)	268,32	572,78	456,60	439,90	410,59	377,29	397,62	354,49	327,59	337,99	338,39	330,34
Bukan Angkatan Kerja (ribu orang)	2.565,78	2.967,66	2.874,05	3.089,04	3.111,20	3.074,61	3.077,02	2.895,68	2.904,71	2.919,06	2.897,46	2.971,82
Pekerja Sektor Formal (ribu orang)	3.509,49	2.878,42	3.146,80	2.924,71	2.985,37	3.077,31	3.167,99	3.234,64	3.265,17	3.253,39	3.187,79	3.249,98
Pekerja Sektor Informal (ribu orang)	1.661,18	1.780,83	1.762,38	1.812,71	1.738,17	1.797,80	1.689,63	1.838,10	1.841,61	1.854,39	1.949,81	1.878,48
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,95	63,81	65,12	62,63	62,27	63,08	63,07	65,21	65,17	65,10	65,40	64,75
Tingkat Kesempatan Kerja (%)	95,07	89,05	91,49	91,50	92,00	92,82	92,43	93,47	93,97	93,79	93,82	93,95
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,93	10,95	8,51	8,50	8,00	7,18	7,57	6,53	6,03	6,21	6,18	6,05

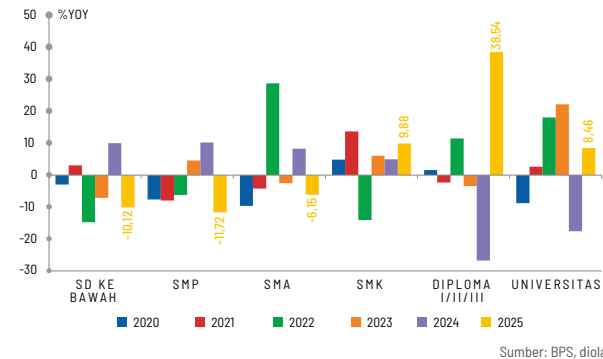
Sumber: BPS, diolah



Sumber: BPS, diolah  
**Grafik 7.4** Perkembangan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan



Sumber: BPS, diolah  
**Grafik 7.5** Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: BPS, diolah  
**Grafik 7.6** Pertumbuhan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan

**Tabel 7.2** Perkembangan Status Pekerjaan Utama

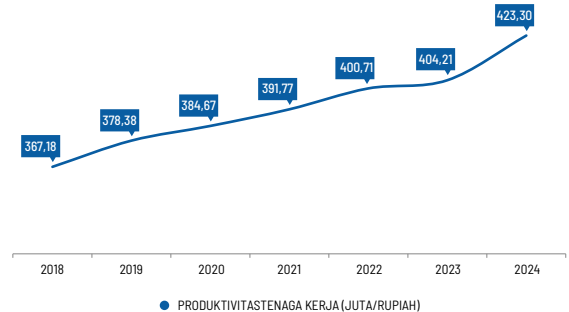
STATUS PEKERJAAN UTAMA (ribu orang)	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS
<b>Pekerja Sektor Formal</b>	3.509,49	2.878,42	3.146,80	2.924,71	2.985,37	3.077,31	3.167,99	3.234,64	3.265,17	3.253,39	3.187,79	3.249,98
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	252,49	152,65	203,20	151,53	186,23	154,15	269,38	186,11	306,94	193,65	192,65	166,87
Buruh/karyawan/pegawai	3.274,00	2.725,78	2.943,60	2.773,22	2.799,15	2.923,16	2.898,61	3.048,53	2.958,23	3.059,74	2.995,14	3.083,12
<b>Pekerja Sektor Informal</b>	1.661,18	1.780,83	1.762,38	1.812,71	1.738,17	1.797,80	1.689,63	1.838,10	1.841,61	1.854,39	1.949,81	1.878,48
Berusaha sendiri	1.129,09	1.136,33	1.112,88	1.111,80	1.080,50	1.183,10	1.084,94	1.162,88	1.115,36	1.173,98	1.200,29	1.211,85
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	227,02	241,51	254,75	253,86	249,18	195,35	253,32	248,45	343,32	267,78	337,16	300,82
Pekerja bebas pertanian	2,19	0,23	0,10	0,88	3,62	2,49	-	1,55	-	1,49	-	0,78
Pekerja bebas non pertanian	75,69	150,29	135,26	191,32	126,84	174,41	90,72	140,26	121,92	127,23	123,51	114,42
Pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga	227,97	252,47	259,39	254,81	278,04	242,45	260,65	284,95	261,01	283,91	288,85	250,62

Sumber: BPS, diolah

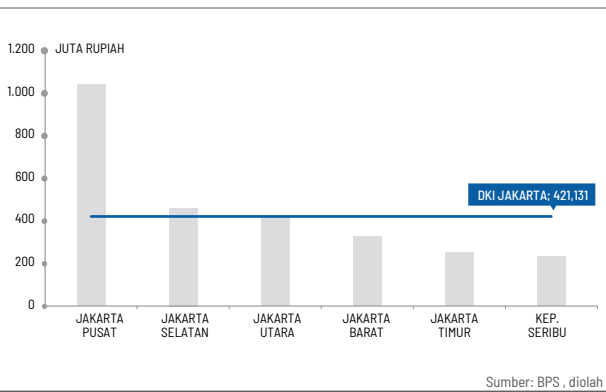
Berdasarkan tingkat pendidikan, penyerapan tenaga kerja dari lulusan SMA mendominasi penduduk bekerja pada periode laporan. Jumlah tenaga kerja yang menamatkan pendidikan hingga tamat SMA memiliki pangsa sebesar 26,39% terhadap total penduduk bekerja, tercatat mengalami kontraksi sebesar 6,15% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,22% (yoy). Peringkat kedua diduduki oleh tenaga kerja yang merupakan lulusan SMK dengan pangsa sebesar 25,21%.

Dibandingkan Agustus 2024, pangsa tenaga kerja lulusan SMK meningkat 2,17 persen poin, lulusan universitas meningkat 1,40 persen poin, dan lulusan Diploma I/II/III meningkat 1,39 persen poin. Sementara itu, pangsa tenaga kerja lulusan SMA, SMP, dan SD ke bawah masing-masing turun sebesar 1,84 persen poin, 1,74 persen poin, dan 1,39 persen poin.

Lebih lanjut, tingkat pendidikan tenaga kerja yang membaik tersebut turut mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja di DKI Jakarta. Pada tahun 2024, produktivitas tenaga kerja DKI Jakarta tercatat sebesar Rp423,30 juta rupiah, meningkat dibandingkan 6 tahun sebelumnya (Grafik 7.7). Produktivitas tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan perbedaan antarwilayah. Tercatat tiga kota dengan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara. (Grafik 7.8).

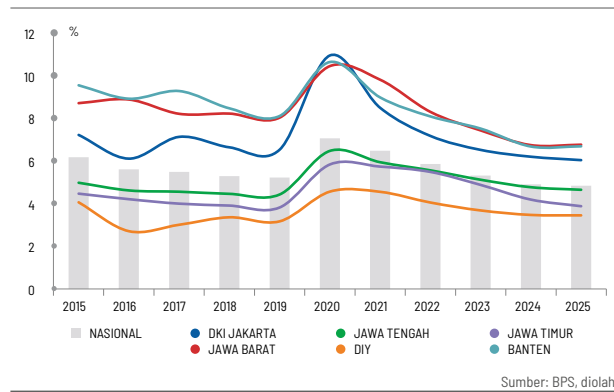


Sumber: Disnakertrans DKI Jakarta  
**Grafik 7.7** Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta (Juta Rupiah)



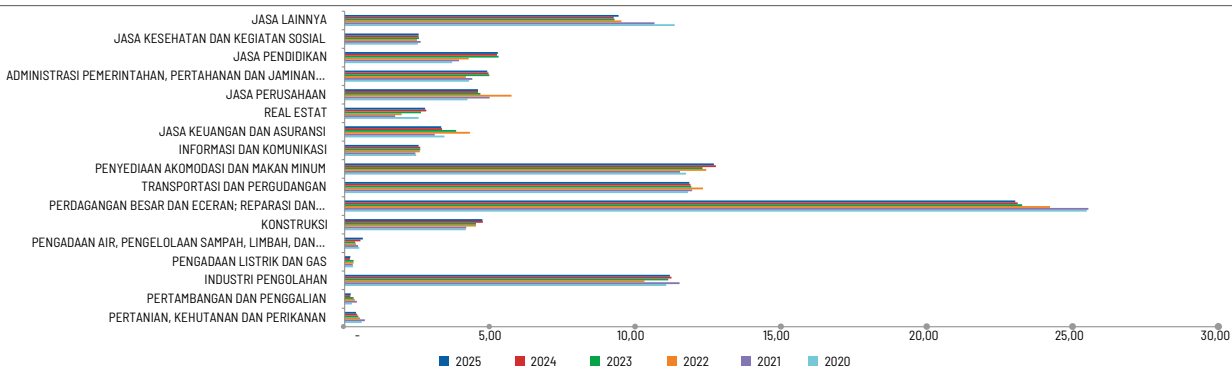
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.8 Produktivitas TK menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2024 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.11 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.9 Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha

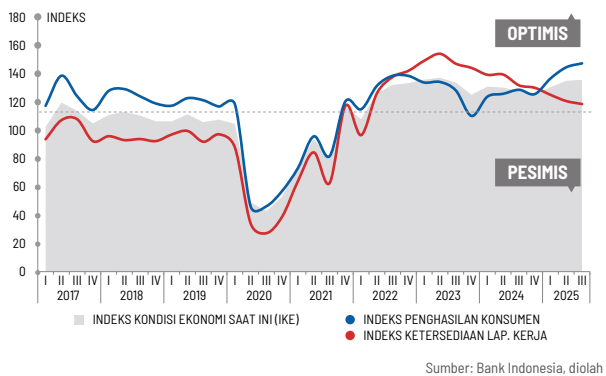
Dari sisi lapangan usaha (LU), penyerapan tenaga kerja terbesar terdapat pada LU Perdagangan Besar dan Eceran sejalan dengan pertumbuhan positif sektor tersebut. Pangsa serapan tenaga kerja pada LU Perdagangan Besar dan Eceran mencapai 23,01% terhadap total penduduk bekerja Agustus 2025. Kemudian, diikuti oleh LU sektor-sektor utama Jakarta lainnya yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum (12,67%), LU Transportasi dan Pergudangan (11,83%), LU Industri Pengolahan (11,14%), LU Jasa Lainnya (9,40%)(Grafik 7.9).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode Agustus 2025 tercatat mencapai 6,05%, menunjukkan penurunan dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 6,21%. Hasil

Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa indeks ketersediaan lapangan kerja, indeks penghasilan konsumen (IKK), indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) masih berada di atas batas level optimis (100) pada triwulan III 2025. (Grafik 7.10). Level TPT di DKI Jakarta masih lebih tinggi dibandingkan Nasional dan berada di posisi ketiga tertinggi di wilayah Jawa setelah Banten dan Jawa Barat (Grafik 7.11).

## B. KEMISKINAN

Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta mengalami penurunan. Berdasarkan data Maret 2025, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta tercatat sebesar 4,28%, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 4,30% (Tabel 7.3). Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta juga tercatat lebih rendah dibandingkan Nasional yang pada Maret 2025 berada pada level 8,47% (Grafik 7.12). Dalam tiga tahun terakhir, tingkat kemiskinan baik di tingkat nasional maupun DKI Jakarta menunjukkan tren penurunan. Secara nasional, tingkat kemiskinan menurun dari 9,36% (Maret 2023) menjadi 8,47% (Maret 2025). Sementara itu, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta juga mengalami penurunan dari 4,44% (Maret 2023) menjadi 4,28% (Maret 2025), meskipun penurunannya cenderung melambat pada periode 2024–2025. Menurunnya tingkat kemiskinan pada Maret 2025 sejalan dengan peningkatan kinerja perekonomian DKI Jakarta pada triwulan I 2025 yang tumbuh 4,95% (yoy), meningkat dibandingkan 4,78% (yoy) (Grafik 7.13). Program bantuan dari Pemerintah Pusat



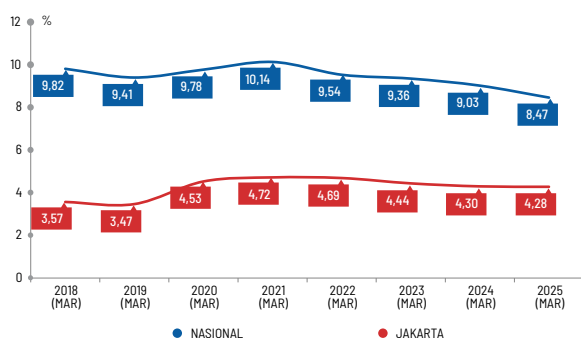
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 7.10 Indeks Kondisi Ekonomi, Penghasilan, dan Ketersediaan Lapangan Kerja

**Tabel 7.3** Profil Kemiskinan DKI Jakarta

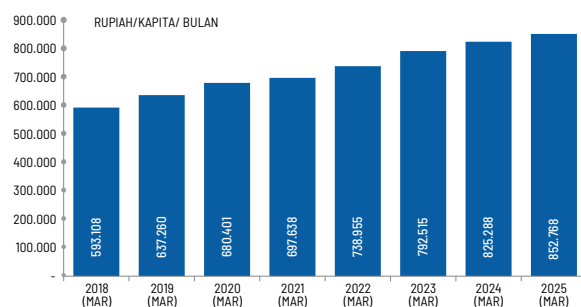
PROFIL KEMISKINAN DKI JAKARTA	2020		2021		2022		2023	2024		2025
	MARET	SEPTEMBER	MARET	SEPTEMBER	MARET	SEPTEMBER	MARET	MARET	SEPTEMBER	MARET
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu orang)	480,86	496,84	501,92	498,29	502,04	494,93	477,83	464,93	449,07	464,87
Presentase Penduduk Miskin (%)	4,53	4,69	4,72	4,67	4,69	4,61	4,44	4,30	4,14	4,28
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	680.401	683.339	697.638	715.052	738.955	773.370	792.515	825.288	846.085	852.768
Makanan	466.156	467.847	479.332	490.918	508.239	534.819	548.628	571.647	590.704	591.933
Non Makanan	214.245	215.491	218.306	224.134	230.716	238.551	243.887	253.641	255.381	260.835
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,59	0,67	0,64	0,75	0,77	0,68	0,70	0,65	0,55	0,57
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,11	0,15	0,14	0,18	0,19	0,16	0,18	0,13	0,11	0,11

Sumber: BPS, diolah



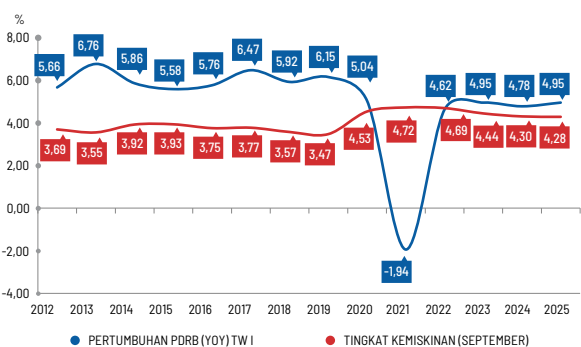
Sumber: BPS, diolah

**Grafik 7.12** Tingkat Kemiskinan Jakarta dan Nasional



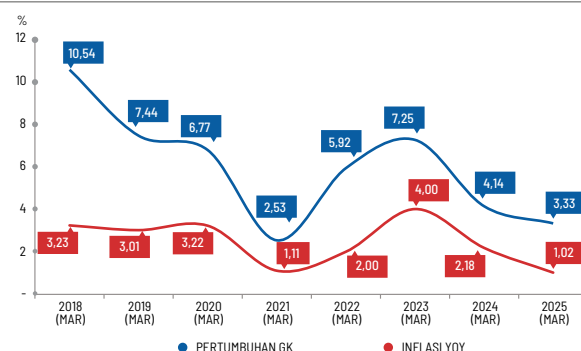
Sumber: BPS, diolah

**Grafik 7.14** Garis Kemiskinan DKI Jakarta



Sumber: BPS, diolah

**Grafik 7.13** Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta



Sumber: BPS, diolah

**Grafik 7.15** Pertumbuhan Garis Kemiskinan dan Inflasi IHK Jakarta

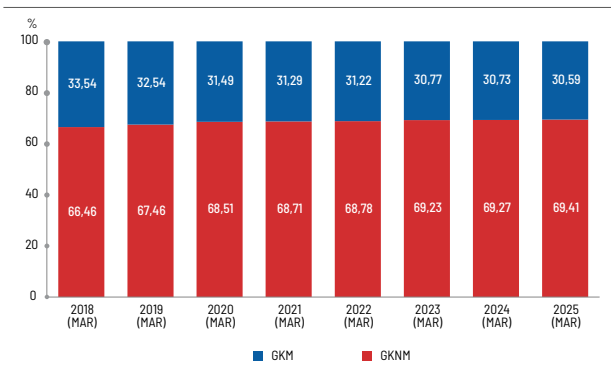
meliputi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan berbagai program lainnya. Di tingkat daerah, penurunan tingkat kemiskinan ini menjadi indikator keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang secara konsisten terus melakukan program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial antara lain Bantuan Sosial Tunai, Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Jamkesda, Kartu Lansia Jakarta (KLJ), serta Program Bantuan Pangan. Selain itu, Pemprov DKI memberikan insentif bagi pelaku UMKM, membebaskan biaya sewa bagi penghuni rusunawa, serta menyediakan pelatihan kerja gratis melalui Balai Latihan Kerja.

Angka Garis Kemiskinan (GK) terus mengalami kenaikan. Angka Garis Kemiskinan (GK) Provinsi DKI Jakarta pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp852.768 per kapita per bulan atau mengalami peningkatan sebesar 3,33% (yoy) dari angka GK Maret 2024 yang tercatat Rp825.288

per kapita per bulan (Grafik 7.14 dan Grafik 7.15).

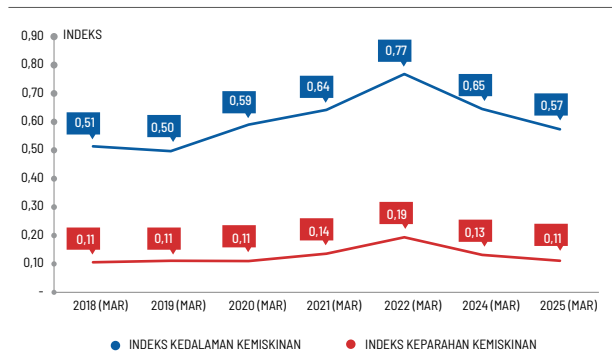
Dari sisi komoditas, peningkatan GK DKI Jakarta lebih dipengaruhi oleh komoditas makanan dibandingkan peranan komoditas non makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2025 sebesar 69,41% sedangkan sumbangan GKNM terhadap GK sebesar 30,59% (Grafik 7.16).

Dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan paling rendah namun dengan Garis Kemiskinan (GK) yang paling tinggi (Grafik 7.17 dan Grafik 7.18). Sementara itu, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan DKI Jakarta periode Maret 2025 juga menurun masing-masing sebesar 0,57 dan 0,11, lebih rendah dibandingkan Maret 2024 yang masing-masing sebesar 0,65 dan 0,11 (Grafik 7.19).



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.16 Porsi Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan

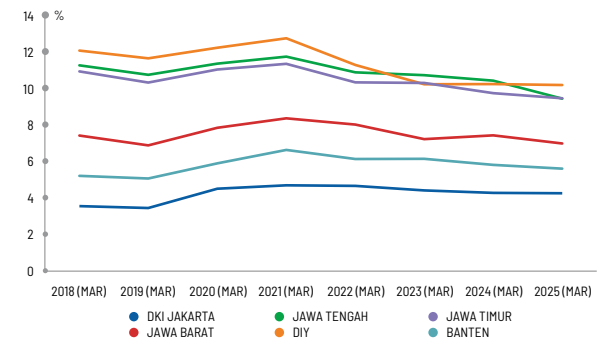


Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.19 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

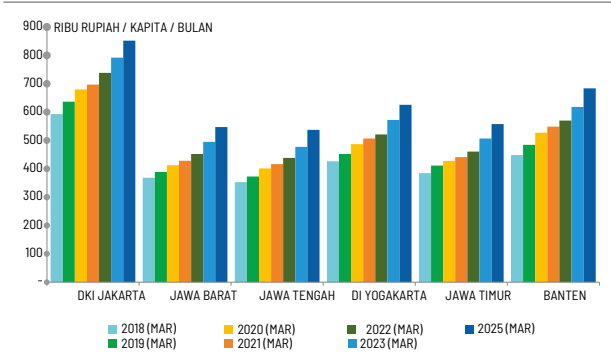
Meskipun tingkat kemiskinan di DKI Jakarta pada Maret 2025 menurun, namun terjadi kenaikan rasio gini. *Gap* antara pengeluaran penduduk pada kelas bawah dan kelas atas semakin tinggi, menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya merata di seluruh lapisan penduduk. Pada periode pencatatan, indeks Rasio Gini DKI Jakarta tercatat 0,441. Indeks tersebut lebih tinggi dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 0,423 (Grafik 7.20). Indeks rasio gini tersebut juga di atas capaian nasional yang sebesar 0,375. Dari sisi nilai indeks, ketimpangan di DKI Jakarta termasuk dalam kategori sedang, melihat nilainya berada pada rentang 0,4-0,5.

Ketimpangan pengeluaran antara kelompok pengeluaran terendah dan kelompok pengeluaran atas masih cukup besar. Proporsi jumlah pendapatan penduduk pada kelompok 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk, yakni sebesar 16,12% pada Maret 2025 (Grafik 7.21). Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan Maret 2024 yakni sebesar 16,71%. Sementara itu, kontribusi pengeluaran kelompok 20 persen teratas mengalami kenaikan dari 50,66% menjadi 52,45%. Apabila fokus penanganan kemiskinan dapat lebih ditujukan untuk mendorong peningkatan alokasi pendapatan kepada 40% masyarakat berpendapatan rendah, maka perbaikan kondisi ketimpangan pendapatan dapat perlahan membaik.



Sumber: BPS, diolah

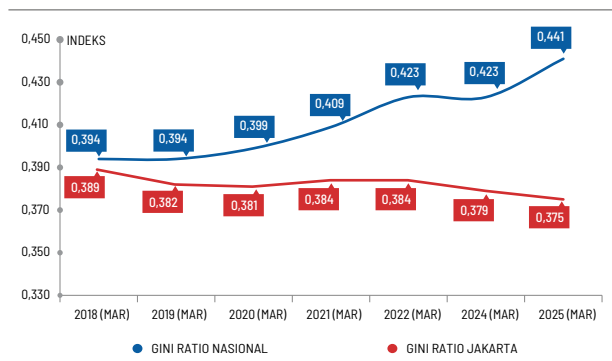
Grafik 7.17 Tingkat Kemiskinan Provinsi di Jawa



Sumber: BPS, diolah

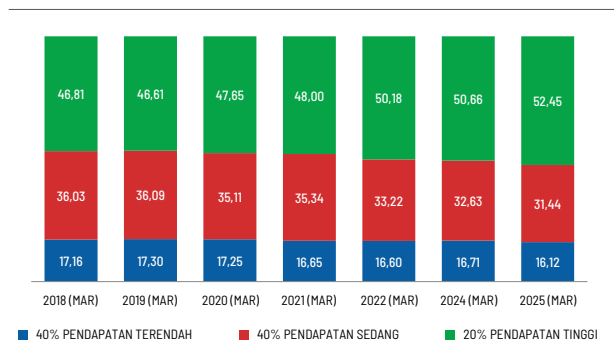
Grafik 7.18 Garis Kemiskinan Provinsi di Jawa

Di tengah penurunan tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan DKI Jakarta periode Maret 2025 juga mengalami penurunan. Kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan mengalami penurunan, tercermin dari indeks kedalaman kemiskinan yang menurun menjadi 0,57 dari sebelumnya 0,65 dibandingkan Maret 2024. (Grafik 7.19). Lebih lanjut, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin mengalami penurunan, tercermin dari indeks keparahan kemiskinan pada Maret 2025 tercatat 0,11, turun dibandingkan Maret 2024 yang tercatat sebesar 0,13.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.20 Rasio Gini Jakarta dan Nasional



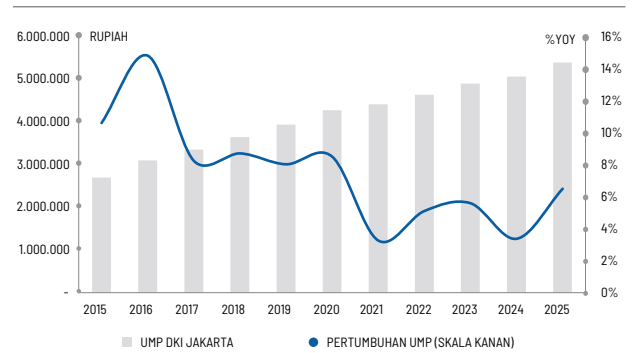
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.21 Distribusi Pendapatan DKI Jakarta

### C. UPAH TENAGA KERJA

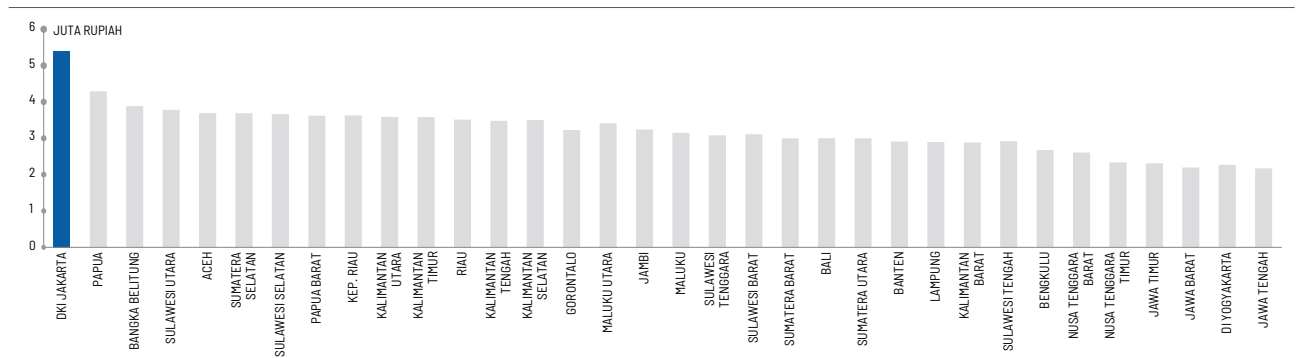
Pada tahun 2025, Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta kembali mengalami kenaikan. UMP DKI Jakarta telah ditetapkan sebesar Rp5.396.761, meningkat 6,5% dibandingkan tahun 2024 (Rp5.067.381) (Grafik 7.26). Ketetapan tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta 829/2024 tentang UMP Jakarta 2024 tanggal 10 Desember 2024.

UMP DKI Jakarta untuk tahun 2025 menduduki peringkat tertinggi di Indonesia, kenaikan UMP yang cukup besar ini mencerminkan tekad Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat dukungan terhadap kesejahteraan pekerja dalam menghadapi tantangan ekonomi.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.22 Perkembangan UMP DKI Jakarta



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.23 UMP Provinsi di Indonesia

## BAB 8

# PROSPEK PEREKONOMIAN

Pada 2025, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta diperkirakan masih tetap tumbuh kuat pada kisaran 4,6-5,4% (yoy). Dari sisi pengeluaran, meningkatnya perekonomian Jakarta pada 2025 terutama ditopang oleh investasi khususnya investasi bangunan sejalan dengan masih berlangsungnya pembangunan proyek strategis baik Pemerintah maupun swasta yang sudah berjalan dan bersifat multitahun seperti LRT dan MRT. Selain itu, realisasi investasi juga didorong oleh meningkatnya target pencapaian investasi Jakarta pada 2025 yaitu sebesar 13,38% dari target nasional, meningkat dibandingkan tahun lalu (12,00%). Konsumsi Pemerintah pada 2025 juga diperkirakan tumbuh lebih baik didorong oleh penyaluran berbagai stimulus dan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Ekspor diperkirakan tumbuh meningkat sejalan dengan diversifikasi negara tujuan ekspor Jakarta seperti ke Amerika Latin dan Timur Tengah untuk komoditas otomotif, serta meningkatnya ekspor komoditas utama Jakarta lainnya seperti alas kaki dan perhiasan/permata didorong oleh meningkatnya permintaan. Adapun pertumbuhan komponen lainnya seperti konsumsi RT tetap tumbuh positif meski diperkirakan tidak setinggi tahun sebelumnya. Tetap positifnya pertumbuhan konsumsi RT sejalan dengan adanya beberapa insentif fiskal yang diberikan oleh Pemerintah yaitu antara lain berupa diskon tarif listrik, diskon pajak, dan bantuan pangan. Dari sisi lapangan usaha (LU) perekonomian DKI Jakarta pada 2025 masih akan ditopang oleh pertumbuhan positif 5 (lima) sektor ekonomi utama yaitu perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan. Namun demikian, beberapa risiko yang perlu dicermati yang dapat menahan perbaikan lebih lanjut utamanya yaitu perlambatan ekonomi global, berlanjutnya ketegangan tensi geopolitik, fragmentasi perdagangan serta dinamika kebijakan AS.

Dari sisi harga, inflasi DKI Jakarta pada 2025 diperkirakan akan tetap terkendali, dengan sasaran inflasi 2,5±1% (yoy). Prakiraan tersebut terutama didukung oleh implementasi berbagai kebijakan Pemerintah dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, serta penguatan program pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).



**Proyeksi Ekonomi Global  
WEO IMF (yoy)**

**3,2%**

Tahun 2025, yoy

**3,3%**

Tahun 2024, yoy

**Proyeksi Pertumbuhan Volume  
Perdagangan Dunia WEO IMF (yoy)**

**3,6%**

Tahun 2025, yoy

**3,8%**

Tahun 2024, yoy

**Proyeksi Pertumbuhan  
Ekonomi DKI Jakarta (yoy)**

**4,6% - 5,4%**

Tahun 2025, yoy

**Proyeksi Inflasi IHK  
DKI Jakarta**

**2,5% ± 1%**

Tahun 2025, yoy

## A. PROSPEK PEREKONOMIAN GLOBAL DAN NASIONAL

### Prospek Perekonomian Global

Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025 diprakirakan lebih baik dari proyeksi sebelumnya sejalan dengan proyeksi ekonomi AS, Eropa, Jepang dan India yang diprakirakan lebih baik dibandingkan proyeksi sebelumnya (tabel 8.1). Namun demikian, di tengah perkembangan yang positif tersebut ketidakpastian pasar keuangan global masih tinggi sejalan dengan terjadinya *temporary government shutdown* dan arah suku bunga kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) yang dinilai pasar lebih berhati-hati (*dovish*) sejalan dengan penurunan inflasi AS yang lebih terbatas. Selain itu, meningkatnya ketegangan geopolitik yang bersumber dari dinamika perang tarif dagang antara AS dan Tiongkok, ketegangan geopolitik antara Tiongkok dan Jepang serta Tiongkok dan Taiwan menambah tekanan pada perekonomian global. Aliran modal global ke komoditas emas dan aset keuangan AS sebagai *safe haven assets* terus berlanjut sehingga mendorong peningkatan harga emas dan penguatan indeks mata uang dolar AS (DXY). Sementara itu, aliran modal ke *emerging market* lebih terbatas ke pasar saham.

Perekonomian Amerika Serikat (AS) pada 2025 diprakirakan tumbuh lebih baik dibandingkan proyeksi sebelumnya, namun tetap melambat dibandingkan tahun 2024. Revisi proyeksi menjadi lebih baik terutama ditopang oleh dorongan fiskal dari disahkannya *The One Big Beautiful Bill Act* (OBBBA). OBBBA mencakup reformasi pajak, pengurangan kebijakan sosial, dan pergeseran prioritas domestik serta global yang berdampak pada berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan infrastruktur dengan tujuan untuk merangsang aktivitas ekonomi melalui keringanan pajak dan investasi militer yang diperluas.

Pengumuman pemberlakuan tarif dagang oleh Amerika Serikat sejak awal tahun 2025 memberikan dampak pada ketidakpastian ekonomi global. Sejak Februari 2025, AS telah mengumumkan beberapa kebijakan tarif terhadap mitra dagang, yang ditindaklanjuti oleh mitra

dagang tersebut dengan langkah-langkah balasan. Pasar awalnya merespons pengumuman tersebut dengan cukup baik, sampai dilakukan penerapan tarif yang hampir universal oleh AS pada 2 April 2025, yang memicu penurunan historis pada indeks ekuitas utama dan lonjakan imbal hasil obligasi. Setelah implementasi tersebut, AS kemudian mengumumkan jeda penerapan tarif dan pemotongan tambahan yang diumumkan pada 9 April 2025, menyebabkan berbagai negara yang dikenakan tarif melakukan negosiasi kepada AS. AS kemudian mengumumkan implementasi tarif berdasarkan hasil negosiasi yang akan berlaku mulai 1 Agustus 2025. Namun, sejak 7 Agustus 2025, tarif resiprokal AS kemudian meluas dari 44 negara menjadi 70 negara dengan tarif kepada sebagian negara seperti India dan Swiss lebih tinggi dari pengumuman semula sehingga berdampak pada semakin tingginya ketidakpastian ekonomi global. Kemudian, mulai 1 November 2025 ketegangan AS dan Tiongkok semakin memanas sejalan dengan AS yang mengumumkan kebijakan baru berupa tarif tambahan 100% terhadap seluruh impor dari Tiongkok. Langkah ini merupakan respons atas keputusan Tiongkok yang menerapkan pembatasan ekspor mineral tanah jarang (*rare earths*), bahan vital bagi berbagai industri teknologi tinggi.

Pada 1 Oktober sampai dengan 12 November 2025, Pemerintah Amerika Serikat melakukan *temporary government shutdown* atau berhentinya aktivitas Pemerintah setelah kongres Amerika Serikat gagal mengesahkan pendanaan untuk program dan layanan federal. Berhentinya aktivitas Pemerintah yang terlama sepanjang sejarah tersebut berdampak pada layanan publik serta tidak diterimanya gaji untuk pegawai federal. Selain itu, kebijakan imigrasi yang lebih ketat mengurangi jumlah tenaga kerja terutama dari asing. Kondisi tersebut diperkirakan akan berdampak pada penurunan *domestic demand*.

Dari sisi inflasi, tekanan inflasi di AS cenderung meningkat, sehingga menambah tekanan bagi The Fed dalam menentukan kebijakan suku bunga. Kebijakan tarif resiprokal oleh Presiden Trump diperkirakan sudah mulai berdampak pada harga barang dan jasa di AS dan berpotensi meningkatkan tekanan inflasi lebih lanjut ke depan.

Tabel 8.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (Persen (yoy))

	REALISASI		ESTIMASI		WEO INF			WORLD BANK		OECD						
	2023	2024	APR-25	JUL-25	OCT-25	JAN-25	JUN-25	MAR-25	JUN-25							
			2025	2025	2025	2025	2025	2025								
Dunia	3,3	3,3	▽	2,8	△	3,0	△	3,2	▽	2,7	▽	2,3	▽	2,9	△	3,2
Negara Maju	1,7	1,8	▽	1,4	△	1,5	△	1,6	▽	1,7	▽	1,2				
Amerika Serikat	2,9	2,8	▽	1,8	△	1,9	△	2,0	△	2,3	▽	1,4	▽	1,6	△	1,8
Kawasan Euro	0,4	0,9	▽	0,8	△	1,0	△	1,2	▽	1,0	▽	0,7	▽	1,0	△	1,2
Jepang	1,5	0,2	▽	0,6	△	0,7	△	1,1	△	1,2	▽	0,7	▽	0,7	△	1,1
Negara Berkembang	4,4	4,3	▽	3,7	△	4,1	△	4,2	△	4,1	▽	3,8				
Tiongkok	5,2	5,0	▽	4,0	△	4,8		4,8	△	4,5		4,5	▽	4,7	△	4,9
India	8,2	6,5	▽	6,2	△	6,4	△	6,6		6,7	▽	6,3	▽	6,3	△	6,7
Volume Perdagangan Dunia	0,7	3,5	▽	1,7	△	2,6	△	3,6	▽	3,1	▽	1,8				
Harga Minyak (USD)	-16,4	-1,8	▽	-15,5	△	-13,9	△	-12,9	▽	72	▽	66				

Sumber: World Economic Outlook (WEO) IMF, World Bank, OECD

Di Kawasan Euro (EA), pertumbuhan ekonomi pada 2025 diperkirakan membaik dibandingkan proyeksi sebelumnya sejalan dengan realisasi triwulan III 2025 yang lebih baik ditopang oleh peningkatan konsumsi RT dan investasi seiring pelonggaran kebijakan moneter. Pemulihan konsumsi swasta dari upah riil yang lebih tinggi dan pelonggaran fiskal di Jerman berperan dalam mendorong pertumbuhan pada tahun 2025. Namun, pertumbuhan ekonomi EA pada 2025 masih lemah sejalan dengan semakin tingginya ketidakpastian di berbagai bidang dan tarif yang lebih tinggi sehingga mempengaruhi optimisme dan keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depan. Selain itu, semakin tingginya ketidakpastian juga memberikan dampak pada masih lemahnya kinerja ekspor barang di tengah meningkatnya ekspor jasa. Di sisi lain, tekanan inflasi mulai menurun akibat meredanya harga energi sehingga diharapkan dapat mendorong konsumsi RT tumbuh lebih tinggi.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Jepang pada 2025 diperkirakan tumbuh meningkat, dan lebih baik dari prakiraan sebelumnya. Kondisi ini didorong oleh kenaikan pertumbuhan upah riil yang mendukung konsumsi swasta meskipun terdapat hambatan dari ketidakpastian kebijakan perdagangan yang tinggi dan melemahnya permintaan eksternal. Di sektor korporasi, kinerja ekspor dan produksi diperkirakan akan meningkat sejalan dengan pemulihan permintaan global untuk barang-barang terkait IT. Sementara itu, permintaan *inbound tourism* atau ekspor jasa diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan investasi juga diperkirakan akan terus berlanjut terutama investasi terkait digital, investasi penelitian dan pengembangan (R&D), investasi terkait dengan area pertumbuhan dan dekarbonisasi, dan investasi yang terkait dengan penguatan rantai pasokan. Namun demikian, meningkatnya ketegangan Tiongkok dan Jepang yang semakin meluas ke perdagangan, pariwisata dan keamanan regional diperkirakan akan berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi Jepang lebih lanjut.

Di Tiongkok, pertumbuhan ekonomi pada 2025 diperkirakan masih akan lemah sejalan dengan masih berlanjutnya penurunan kinerja sektor *real estate* dan perumahan. Perlambatan juga dipengaruhi oleh semakin tingginya ketegangan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat serta tertahannya pertumbuhan konsumsi RT. Meskipun demikian, kinerja investasi khususnya pada sektor infrastruktur dan manufaktur masih tumbuh stabil dan moderat. Namun, kontribusi kuat dari sektor manufaktur diperkirakan tidak akan bertahan lama sejalan dengan besarnya subsidi untuk sektor manufaktur yang telah mencapai batas. Pemulihan impor pariwisata yang lemah juga berdampak positif pada tertahannya pertumbuhan impor sehingga mendorong surplus transaksi berjalan.

Perekonomian India pada 2025 diperkirakan tetap tinggi dan lebih baik dibandingkan proyeksi sebelumnya. Revisi ke atas terutama bersumber dari dampak positif pertumbuhan ekonomi di triwulan I 2025 di tengah peningkatan tarif resiprokal AS terhadap India. Perekonomian yang masih tetap tumbuh tinggi diperkirakan bersumber dari masih

kuatnya permintaan domestik terutama pada area pedesaan didukung oleh kinerja pertanian yang kuat serta sektor jasa yang menjadi pendorong utama pertumbuhan. Pertumbuhan juga didorong oleh ekspor manufaktur terutama dalam komponen bernilai tambah tinggi (seperti elektronik, semikonduktor, dan farmasi), di tengah adanya potensi risiko terganggunya perdagangan global akibat berlanjutnya ketegangan geopolitik. Investasi juga turut menjadi penopang pertumbuhan terutama pada sektor transportasi, energi dan jasa didukung oleh meningkatnya kepercayaan bisnis di India. Permintaan *real estate* dari pihak swasta juga diperkirakan masih akan tumbuh kuat sehingga turut menopang perekonomian India pada 2025.

### Prospek Perekonomian Nasional

Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan akan berada dalam kisaran 4,7-5,5%, (Tabel 8.2). Prospek ini terutama dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi global terkini serta dengan melihat realisasi pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III 2025 yang sebesar 5,04% (yoy). Pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 terutama didorong oleh investasi sejalan dengan penanaman modal yang tumbuh positif. Sementara itu, Konsumsi rumah tangga masih lemah, khususnya golongan menengah ke bawah sehubungan dengan belum kuatnya ekspektasi penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja. Konsumsi rumah tangga perlu didorong sehingga dapat semakin menopang permintaan domestik. Namun, pada semester II 2025, permintaan domestik diperkirakan akan lebih baik yang didorong oleh akselerasi belanja Pemerintah. Dari eksternal, kinerja ekspor diperkirakan tetap baik namun berbagai upaya perlu terus ditingkatkan guna memitigasi dampak melambatnya permintaan negara-negara mitra dagang utama. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi nasional ditopang berbagai lapangan usaha seperti sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Konstruksi, serta Perdagangan Besar dan Eceran. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah diperkirakan tetap baik terutama wilayah Jawa dan Sumatera yang diperkirakan lebih baik dari prakiraan, didorong oleh LU Industri Pengolahan dan LU Pertanian. Namun, pertumbuhan ekonomi masih perlu terus didorong sehingga tetap dapat menjaga keyakinan pelaku ekonomi terhadap prospek perekonomian nasional.

Investasi diperkirakan akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025. Penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) diperkirakan akan meningkatkan investasi khususnya investasi swasta. Selain itu, masuknya investasi asing untuk mendorong proyek *green investment* juga diperkirakan akan mendorong kinerja investasi. Selain itu, kinerja investasi juga didukung oleh belanja modal perusahaan serta volume produksi dan pesanan seperti tercermin pada indeks Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan masih tetap tumbuh positif pada 2025 meskipun masih lemah, khususnya golongan menengah ke bawah sehubungan dengan belum kuatnya ekspektasi penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja. Namun disisi lain, implementasi

berbagai insentif yang dikeluarkan oleh Pemerintah serta inflasi yang diprakirakan tetap terkendali diprakirakan akan memberikan dampak positif pada terjaganya daya beli masyarakat.

Dukungan fiskal untuk mendukung perekonomian masih kuat. Di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah cepat, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun 2025 memiliki arah baru kebijakan yang penting. Pemerintah tidak sekadar mengejar pertumbuhan, tetapi merancang strategi fiskal jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang yang ditopang oleh orientasi keberlanjutan, inklusivitas, dan transformasi struktural ekonomi nasional.

Untuk strategi jangka pendek, kebijakan fiskal 2025 difokuskan pada kesinambungan dukungan terhadap pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan. Dalam jangka menengah panjang, kebijakan fiskal memasuki fase transformasional dengan fokus utama adalah hilirisasi industri, transformasi ekonomi hijau, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, serta penguatan kualitas SDM.

Untuk itu, berbagai program prioritas Pemerintah akan terus berjalan dan terus ditingkatkan kualitasnya, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), renovasi sekolah, sekolah unggulan, pemeriksaan kesehatan gratis, serta peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan.

Pembukaan blokir anggaran senilai Rp86,6 triliun pada triwulan II 2025 pascaefisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD TA 2025 juga diprakirakan akan semakin mempercepat belanja K/L untuk program prioritas Pemerintah.

Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah juga meluncurkan program 8+4+5 yang mencakup 8 program akselerasi di 2025, 4 program lanjutan di 2026 dan 5 program penciptaan lapangan kerja. Adapun 8 program akselerasi di 2025 mencakup program magang lulusan baru, perluasan PPh 21 ditanggung Pemerintah, bantuan pangan, subsidi JKK dan JKM, program perumahan BPJS Ketenagakerjaan, relaksasi SLIK OJK untuk mempermudah pekerja memperoleh akses pembiayaan, program padat karya tunai serta percepatan deregulasi perizinan usaha. Sementara itu, 4 program lanjutan di 2026 mencakup insentif PPh final 0,5% untuk UMKM, perpanjangan PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pariwisata, PPh 21 DTP untuk industri padat karya serta perluasan diskon iuran JKK dan JKM. Adapun 5 program penciptaan lapangan kerja mencakup koperasi desa merah putih, kampung nelayan merah putih, revitalisasi tambak di kawasan pantura, modernisasi kapal nelayan, serta program perkebunan rakyat.

Pemerintah juga memberikan diskon tarif angkutan darat, laut, udara dan penyeberangan saat libur akhir tahun untuk melengkapi

paket stimulus. Serangkaian kebijakan fiskal dan stimulus tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat serta dapat menjadi penopang ekonomi nasional dalam menghadapi ketidakpastian global.

Dari sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi nasional di 2025 akan ditopang sejumlah sektor yang diperkirakan akan tumbuh kuat, seperti Pertanian sejalan dengan implementasi program Pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan, Industri sejalan dengan program hilirisasi industri, Pertambangan dan Penggalian dan Konstruksi ditopang oleh berlanjutnya berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Pemerintah yang sudah berjalan.

Dari sisi eksternal, kinerja ekspor pada tahun 2025 diprakirakan masih akan tumbuh positif meski tidak setinggi tahun sebelumnya seiring dengan melambatnya perekonomian global dan masih tertahannya perekonomian negara tujuan ekspor. Meski demikian, ekspor pada triwulan III 2025 masih tumbuh baik ditopang oleh kinerja ekspor nonmigas. Kinerja ekspor nonmigas cukup tinggi didorong oleh permintaan idiosinkratik komoditas tertentu diantaranya peningkatan ekspor *crude palm oil* (CPO) ke India untuk kebutuhan Diwali, ekspor besi baja ke Tiongkok seiring *banning* sementara produk Australia ke Tiongkok, dan ekspor emas (perhiasan) ke Swiss.

Kinerja impor pada tahun 2025 masih akan tumbuh positif dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tetap positifnya kinerja impor ditopang oleh impor bahan baku sejalan dengan meningkatnya kinerja industri pengolahan didukung oleh implementasi program hilirisasi. Impor barang modal juga diperkirakan meningkat, seiring dengan berlanjutnya pembangunan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sudah berjalan.

Dari sisi harga, inflasi pada tahun 2025 diprakirakan tetap terkendali dalam kisaran 2,5±1%. Perkembangan tersebut seiring ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar, *imported inflation* yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi. Inflasi pangan juga diprakirakan tetap terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) dan penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional. Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas kebijakan moneter guna menjaga inflasi tahun 2025 terkendali dalam sasaran 2,5±1%, dengan tetap mendukung upaya turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 8.2** Proyeksi PDB Nasional

	SATUAN	2024				2024	2025			2025*
		I	II	III	IV		I	II	III	
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,11	5,05	4,95	5,02	5,03	4,87	5,12	5,04	4,7-5,5
Inflasi IHK	%	3,05	2,51	1,84	1,57	1,57	1,03	1,87	2,65	2,5±1
Kredit Perbankan	%	12,40	12,36	10,85	10,39	10,36	9,16	7,77	7,70	8-11

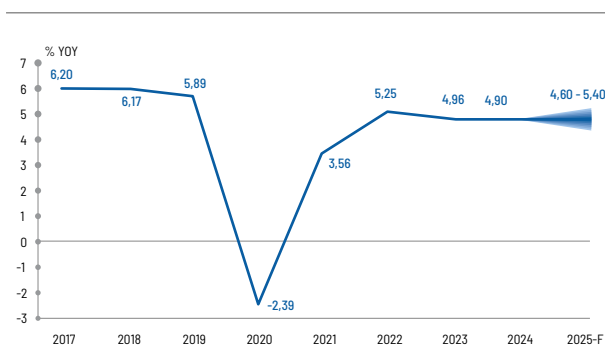
Sumber : BPS dan Proyeksi Bank Indonesia

## B. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI JAKARTA

Pada 2025, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta diperkirakan masih tetap tumbuh kuat pada kisaran titik tengah 4,6-5,4% (yoy) (Grafik 8.1). Dari sisi pengeluaran, meningkatnya perekonomian Jakarta pada 2025 terutama ditopang oleh investasi khususnya investasi bangunan sejalan dengan masih berlangsungnya pembangunan proyek strategis baik Pemerintah maupun swasta yang sudah berjalan dan bersifat multitaluh seperti LRT dan MRT. Selain itu, realisasi investasi juga didorong oleh meningkatnya target pencapaian investasi Jakarta pada 2025 yaitu sebesar 13,38% dari target nasional, meningkat dibandingkan tahun lalu (12,00%). Konsumsi Pemerintah pada 2025 juga diperkirakan tumbuh lebih baik didorong oleh penyaluran berbagai stimulus dan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Ekspor diperkirakan tumbuh meningkat sejalan dengan diversifikasi negara tujuan ekspor Jakarta seperti ke Amerika Latin dan Timur Tengah untuk komoditas otomotif, serta meningkatnya ekspor komoditas utama Jakarta lainnya seperti alas kaki dan perhiasan/permata didorong oleh meningkatnya permintaan. Adapun pertumbuhan komponen lainnya seperti konsumsi RT tetap tumbuh positif meski diperkirakan tidak setinggi tahun sebelumnya. Tetap positifnya pertumbuhan konsumsi RT sejalan dengan adanya beberapa insentif fiskal yang diberikan oleh Pemerintah yaitu antara lain berupa diskon tarif listrik, diskon pajak, dan bantuan pangan.

Dari sisi lapangan usaha (LU), perekonomian DKI Jakarta pada 2025 masih akan ditopang oleh pertumbuhan positif 5 (lima) sektor ekonomi utama yaitu perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan. Pertumbuhan LU perdagangan masih akan ditopang oleh berlangsungnya beberapa *event* (konser musik dan olahraga) skala internasional yang diselenggarakan di Jakarta. Sementara itu, LU konstruksi masih akan didorong oleh berlanjutnya proyek multitaluh Pemerintah seperti MRT dan LRT yang terus berlanjut sesuai dengan timeline, proyek PSN 2025 (*Giant Sea Wall* Pantura, Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Listrik-*Waste to Energy*, dan Jakarta Sewerage System), serta proyek lainnya a.l Pelabuhan Kalibaru, pengembangan kawasan wisata Kepulauan Seribu, kawasan residensial, hotel, apartemen, rumah sakit dan bangunan kantor. Pertumbuhan LU Jasa keuangan juga masih akan ditopang oleh masih tingginya penyaluran kredit didukung oleh kebijakan akselerasi penyaluran kredit yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM).

Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2025 diperkirakan masih tetap tumbuh kuat. Kondisi tersebut didorong oleh adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta sebesar 6,5%. Selain itu, adanya kebijakan insentif yang diberikan oleh Pemerintah antara lain berupa insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian perumahan serta insentif penerapan Pajak



Sumber : BPS, Proyeksi BI

Grafik 8.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta 2025

Pertambahan Nilai (PPN) 12% berupa paket stimulus sebesar Rp38,6 triliun berupa : bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan, diskon listrik 50% untuk pelanggan daya maksimal 2200 VA, insentif PPh final 0,5% untuk UMKM juga mendorong konsumsi RT. Selain itu, rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan memberikan akses gratis bagi 15 kategori masyarakat dalam penggunaan transportasi umum seperti TransJakarta, MRT, dan LRT juga turut menjaga kemampuan konsumsi RT. Masih kuatnya konsumsi RT juga dipengaruhi oleh maraknya penyelenggaraan *event* skala internasional di Jakarta seperti *event* musik : Maroon 5, The Script, Green Day, Linkin Park, Boyz II Men, Cigarette After Sex, INFINITE 15th Anniversary Concert: Limited Edition, Taeyang 2025 Tour dan *event* olahraga antara lain Jakarta Running Festival dan BTN Jakarta International Marathon. Penyaluran stimulus dan insentif fiskal lanjutan berupa paket 8+4+5 serta diskon tarif angkutan dan tarif tol di akhir tahun juga diperkirakan akan mendorong konsumsi RT. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang berpotensi menahan kinerja konsumsi RT Jakarta pada 2025 yaitu : (i) PHK dan *layoff* yg terjadi pada beberapa perusahaan sehingga berdampak pada tertahannya daya beli; (ii) tertahannya daya beli, *wait and see* konsumen terhadap kondisi ekonomi serta pergeseran perilaku konsumsi yang cenderung membeli barang-barang dengan harga murah/terjangkau; serta (iii) dinamika global dan domestik (a.l fragmentasi perdagangan terkait kebijakan tarif resiprosal AS, serta berlanjutnya ketegangan geopolitik) berdampak pada kinerja lapangan usaha sehingga mempengaruhi pendapatan masyarakat.

Konsumsi Pemerintah pada 2025 diperkirakan tumbuh lebih baik. Meski dilakukan efisiensi anggaran berdasarkan Inpres No 1 Tahun 2025 pada semester I 2025, konsumsi Pemerintah yang tercermin dari realisasi belanja melalui APBD dan APBN diperkirakan masih dapat terakselerasi pada semester II 2025. Akselerasi diperkirakan terdapat pada belanja pegawai sejalan dengan pembayaran kenaikan tunjangan kinerja beberapa K/L serta belanja bantuan sosial yang didorong oleh pemberian stimulus dan insentif fiskal oleh Pemerintah. Belanja modal juga diperkirakan masih akan tumbuh sejalan dengan berlanjutnya pembangunan proyek strategis Pemerintah yang sudah berjalan dan bersifat multitaluh. Selain itu, pelaksanaan berbagai program prioritas Pemerintah yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG), renovasi sekolah,

sekolah unggulan, pemeriksaan kesehatan gratis, dan peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan juga menjadi faktor pendorong realisasi belanja Pemerintah yang lebih baik pada 2025.

Adapun kinerja investasi pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Meningkatnya kinerja investasi terutama didorong oleh investasi bangunan sejalan dengan masih berlanjutnya pembangunan berbagai proyek strategis Pemerintah dan swasta. Proyek strategis Pemerintah multitalun di DKI Jakarta yaitu antara lain seperti NCICD (pelaksanaan proyek pada 2022-2028), MRT fase II, III, dan IV, dan LRT Jakarta. Perkiraan kinerja investasi yang meningkat juga tercermin dari persentase target investasi Jakarta oleh Pemerintah Pusat yang tinggi yaitu sebesar Rp 255 Triliun atau 13,38% dari target nasional. Target investasi Jakarta tersebut merupakan yang tertinggi kedua secara nasional setelah Provinsi Jawa Barat. Implementasi beberapa program prioritas Pemerintah juga diperkirakan akan mendorong investasi Jakarta yaitu : (i) Program MBG diperkirakan akan mendorong investasi dan pengembangan usaha khususnya di sektor penyediaan makanan dan minuman; (ii) Dibentuknya BPI Danantara memberikan potensi promosi proyek investasi di Jakarta; serta (iii) Program Pemerintah dalam mendorong ekonomi kreatif seperti pembentukan Jakarta Film Commission dan Jakarta Collaboration Fund juga diperkirakan akan semakin meningkatkan investasi di Jakarta. Meskipun demikian, Jakarta masih menghadapi tantangan dalam mendorong investasi sejalan dengan ICOR nya yang masih tinggi. ICOR Jakarta pada 2023 tercatat sebesar 7,86; lebih tinggi dibandingkan tahun lalu (7,53) dan lebih tinggi dibandingkan nasional (6,33). Kondisi tersebut menggambarkan efisiensi investasi yang masih rendah. Selain tantangan tingginya ICOR, Jakarta juga dihadapkan dengan tantangan inefisiensi ekonomi, yang tercermin dari penurunan produktivitas tenaga kerja. Hal ini menjadi faktor penghambat dalam percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

Kinerja ekspor pada 2025 diperkirakan tumbuh meningkat, didorong oleh diversifikasi negara tujuan utama ekspor Jakarta seperti ke Amerika Latin dan Timur Tengah untuk komoditas otomotif, selesainya permasalahan irregulasi dan homologasi terhadap beberapa negara tujuan ekspor komoditas kendaraan dan bagiannya a.l Jepang, percepatan realisasi ekspor (*front loading*) oleh beberapa pelaku usaha sebagai implikasi penerapan kebijakan tarif resiprosal AS, serta meningkatnya ekspor komoditas utama Jakarta lainnya seperti alas kaki dan perhiasan/permata didorong oleh meningkatnya permintaan. Tetap positifnya pertumbuhan ekspor juga didorong oleh ekspor jasa yang masih tetap tumbuh tinggi didorong oleh meningkatnya kunjungan wisman ke DKI Jakarta, baik untuk tujuan *leisure* maupun bisnis sejalan dengan berlangsungnya berbagai kegiatan MICE dan *event* (musik dan olahraga) baik skala domestik maupun internasional di 2025.

Sejalan dengan kinerja ekspor yang masih positif, kinerja impor DKI Jakarta pada tahun 2025 juga diperkirakan masih tetap tumbuh tinggi terutama bersumber dari meningkatnya impor barang modal sejalan dengan meningkatnya investasi.

Dari sisi LU, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 masih akan ditopang oleh kinerja lapangan usaha utama seperti LU perdagangan, LU konstruksi, LU industri pengolahan, LU infokom dan LU jasa keuangan.

Pada 2025, LU perdagangan diperkirakan masih akan tumbuh positif sejalan dengan tetap kuatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang didorong oleh kenaikan UMP dan beberapa kebijakan insentif oleh Pemerintah. Selain itu, faktor lainnya yang mendorong kinerja LU Perdagangan yaitu semakin masifnya pelaksanaan MICE dan *event* skala internasional di DKI Jakarta sehingga mendorong jumlah wisman dan wisnus datang ke Jakarta.

LU konstruksi pada 2025 diperkirakan akan tumbuh tinggi sejalan dengan meningkatnya investasi. Meningkatnya LU konstruksi terutama didorong oleh masih berlanjutnya pembangunan beberapa proyek strategis Pemerintah di DKI Jakarta yang bersifat multitalun yaitu antara lain NCICD, 6 ruas jalan tol dalam kota, MRT, LRT Jakarta, proyek PSN 2025 (*Giant Sea Wall* Pantura, Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Listrik-*Waste to Energy*, dan Jakarta Sewerage System), serta proyek lainnya a.l Pelabuhan Kalibaru, pengembangan kawasan wisata Kepulauan Seribu, kawasan residensial, hotel, apartemen, rumah sakit dan bangunan kantor.

LU industri pengolahan pada 2025 diperkirakan juga tetap tumbuh positif sejalan dengan meningkatnya kinerja ekspor. Beberapa jenis industri yang diperkirakan akan tumbuh meningkat yaitu industri alas kaki, industri makan dan minum, serta industri kimia.

LU utama lainnya seperti LU jasa keuangan diperkirakan masih akan tumbuh meningkat seiring dengan intermediasi perbankan yang diperkirakan masih tetap kuat. Masih kuatnya intermediasi perbankan diperkirakan akan dipengaruhi oleh masih tingginya penyaluran kredit perbankan yang didukung oleh penerapan kebijakan penyaluran kredit. Bank Indonesia menerapkan kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong penyaluran kredit seperti Kredit Likuiditas Makroprudensial (KLM), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), dan *Loan to Value Ratio* (LTV). Khusus untuk KLM, penguatan KLM kembali dilakukan dan mulai berlaku sejak 1 Desember 2025. Penguatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan secara lebih *targeted*.

Aspek penguatan KLM secara umum terdapat pada skema, besaran KLM dan cakupan. Pada skema sebelumnya, pemberian insentif didasarkan pada realisasi penyaluran kredit. Sementara itu pada skema terkini, pemberian insentif dilakukan berbasis kinerja dan berorientasi ke depan, yang didasarkan dari komitmen rencana penyaluran kredit/pembiayaan sektoral bank (*lending channel*) dan transmisi suku bunga (*interest rate channel*). Untuk besaran insentif juga ditingkatkan dari 5% menjadi 5,5%. Adapun untuk cakupan pemberian insentif didasarkan pada komitmen rencana penyaluran kredit ke beberapa sektor yaitu (i)

pertanian, industri, dan hilirisasi; (ii) sektor jasa termasuk ekraf; (iii) konstruksi, real estate, dan perumahan; (iv) sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan ditambah dengan penetapan suku bunga kredit baru/% imbalan pembiayaan baru yang sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia.

Pemerintah juga mengimplementasikan beberapa kebijakan untuk mendorong penyaluran kredit seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan peningkatan kuota menjadi 420.000 rumah subsidi, serta insentif pajak yang secara tidak langsung juga mendorong penyaluran kredit properti dan kendaraan bermotor.

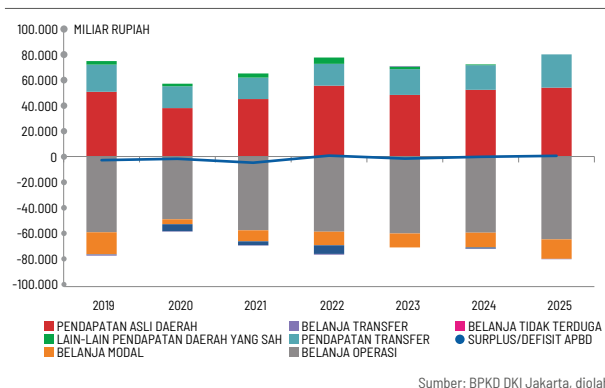
LU infokom juga diperkirakan masih mencatatkan pertumbuhan yang tinggi didorong oleh tingginya produksi film dan permintaan film di berbagai kanal (bioskop, dan beberapa aplikasi *mobile streaming*) sehingga diperkirakan akan mendorong pertumbuhan LU Infokom. Selain itu, meningkatnya penggunaan paket data dan internet juga diperkirakan akan mendorong pertumbuhan LU infokom. Pertumbuhan LU Infokom juga didorong oleh meningkatnya preferensi masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi digital, sejalan dengan perkembangan digitalisasi yang terus berlangsung.

Adapun lapangan usaha lainnya juga diperkirakan masih akan tetap tumbuh positif pada tahun 2025 yaitu LU transportasi dan pergudangan didorong oleh kinerja transportasi penumpang sejalan dengan tetap tingginya mobilitas masyarakat, transportasi barang (*freight*) serta transportasi logistik dalam mendukung kegiatan perdagangan ekspor dan *online*. LU Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman juga diperkirakan masih akan tumbuh yang didukung oleh pelaksanaan *event* dan MICE skala internasional. Pertumbuhan positif juga terjadi pada LU jasa perusahaan seiring dengan pelaksanaan berbagai *event* sehingga meningkatkan kinerja *event organizer/EO*, dan LU lainnya.

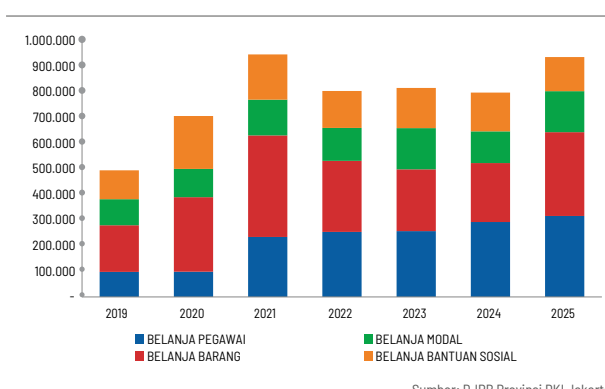
### Prospek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Belanja Kementerian Negara / Lembaga (K/L) di Provinsi DKI Jakarta 2025

Pada 2025, pagu anggaran APBD DKI Jakarta meningkat sebesar 10,17% dari Rp82,91 triliun menjadi Rp91,34 triliun (Grafik 8.2). Dari sisi pendapatan, pagu RAPBD DKI Jakarta 2025 mengalami kenaikan sebesar 9,05% dibandingkan APBD-P 2024 dari Rp74,95 triliun menjadi Rp81,73 triliun. Kenaikan pagu RAPBD DKI Jakarta 2025 dari sisi pendapatan bersumber dari kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 7,36%, dipengaruhi oleh kenaikan pajak dan retribusi. Kenaikan pagu pendapatan dalam RAPBD DKI Jakarta 2025 diharapkan dapat mendorong belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2025.

Dari sisi belanja, pagu APBD DKI Jakarta 2025 mengalami kenaikan sebesar 8,73% dibandingkan APBD-P 2024 dari Rp76,02 triliun menjadi Rp82,67 triliun. Berdasarkan komponennya, kenaikan pagu belanja RAPBD DKI Jakarta 2025 terutama bersumber dari kenaikan komponen belanja modal (17,64%) dan belanja operasional (5,99%).



Grafik 8.2 Perkembangan Pagu APBD DKI Jakarta 2025



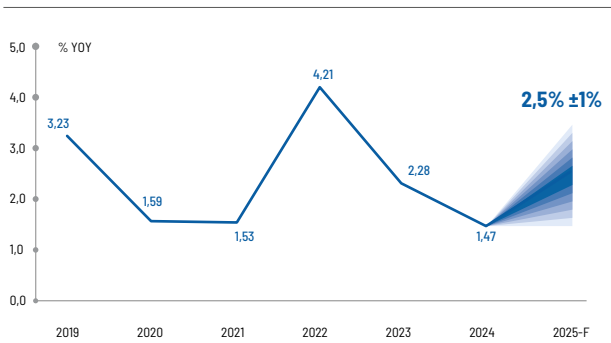
Grafik 8.3 Perkembangan Pagu Belanja APBN di DKI Jakarta 2025

Dari sisi APBN, DPR telah mengesahkan APBN 2025 dengan postur pendapatan sebesar Rp3.005,1 triliun atau naik sebesar 7,24% dari APBN 2024 dan postur belanja sebesar Rp3.621,3 triliun atau naik 8,91% dari APBN 2024 (Grafik 8.3). Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2025 direncanakan sebesar Rp3.005,1 triliun atau naik sebesar 7,24% dari APBN 2024 yang sebesar Rp2.802,3 triliun. Besaran tersebut bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun.

Sementara itu, Belanja Negara dalam APBN 2025 disepakati sebesar Rp3.621,3 triliun atau naik 8,91% dari APBN 2024 yang sebesar Rp 3.325,1 triliun. Belanja tersebut dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.701,4 triliun (termasuk sebesar Rp1.541,4 triliun Belanja Non-KL pada Belanja Pemerintah Pusat) serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp919,9 triliun. Belanja tersebut dialokasikan untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, perlindungan sosial serta hukum dan hankam.

### Prospek Inflasi Jakarta

Pada 2025, inflasi Jakarta diprakirakan tetap terkendali pada kisaran titik tengah 2,5±1% (yoy) (Grafik 8.4). Prakiraan tersebut terutama didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, serta penguatan program pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Meskipun demikian, masih terdapat berbagai risiko



Sumber : BPS (diolah), Proyeksi BI

Grafik 8.4 Proyeksi Inflasi DKI Jakarta 2025

yang diperkirakan akan mendorong peningkatan inflasi pada 2025 yaitu :

1. Masih tingginya ketegangan geopolitik sehingga berdampak pada volatilitas harga energi dan pangan global;
2. Fragmentasi perdagangan yang meluas sebagai dampak dari dinamika kebijakan AS;
3. Meningkatnya harga bahan pangan sejalan dengan implementasi kebijakan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan pembatasan impor;
4. Meningkatnya tarif layanan publik;
5. Persistensi harga gabah pada level tinggi di tengah musim tanam;
6. Anomali cuaca yang memengaruhi produktivitas dan kualitas hortikultura;
7. Berlanjutnya peningkatan harga emas global sehingga mendorong kenaikan pada harga logam mulia dan emas perhiasan

Terkendalnya laju inflasi di DKI Jakarta pada 2025 tidak terlepas dari dukungan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jakarta untuk menjaga kestabilan inflasi melalui 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif). Kegiatan yang sudah dilakukan antara lain berupa pasar murah dan program pangan bersubsidi berkolaborasi dengan BUMD Pangan, perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), penyelenggaraan *talkshow* untuk menjaga ekspektasi masyarakat serta melakukan *Capacity Building* TPID. Selain itu, untuk menjaga stabilitas harga pangan, Bank Indonesia bersama dengan TPIP dan TPID Provinsi DKI Jakarta juga secara konsisten melaksanakan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dilakukan melalui Operasi Pasar, hilirisasi pangan dan diversifikasi produk olahan, penyaluran alsintan dan saprodi untuk peningkatan produksi pangan, fasilitas distribusi pangan, penguatan infrastruktur digitalisasi informasi pangan, dan penguatan koordinasi dan komunikasi melalui *High Level Meeting* TPID.

## Faktor Risiko Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Berbagai risiko yang muncul pada 2025 yaitu perlambatan ekonomi global, berlanjutnya ketegangan geopolitik, serta fragmentasi perdagangan yang semakin meluas sebagai dampak dari dinamika kebijakan AS memberikan potensi risiko menahan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada 2025. Di samping itu, dari sisi domestik, juga terdapat berbagai tantangan yang dapat berdampak terhadap perekonomian Jakarta dan perlu untuk diwaspadai, baik yang bersifat struktural maupun siklikal. Tantangan struktural bersumber dari daya dukung Jakarta seperti ketersediaan lahan, tingkat upah minimum, ketersediaan air yang semakin terbatas, serta masalah struktural lainnya seperti kemacetan, ketimpangan sosial, dan polusi udara. Sementara itu, tantangan yang bersifat siklikal bersumber dari tertahannya daya beli masyarakat, PHK dan perubahan perilaku konsumsi masyarakat.

Oleh karena itu, untuk dapat semakin memperkuat daya tahan perekonomian Jakarta di tengah berbagai tantangan yang terutama bersumber dari eksternal, serta dalam rangka meningkatkan daya saing Jakarta sebagai kota global, perlu dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi baik dengan Pemerintah Pusat maupun Daerah melalui :

1. Menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi agar tetap terjaga pada kisaran yang telah ditetapkan (2,5%±1%);
2. Mendorong kegiatan MICE dan *event* (musik, olahraga, dan lainnya) di Jakarta, serta *urban tourism*;
3. Mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan sektor potensial yaitu sektor perdagangan (*hub ecommerce*), sektor informasi komunikasi (ekosistem digital dan *start up*), sektor keuangan (*regional financial center*), sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (MICE dan Urban), sektor jasa pendidikan, serta sektor jasa kesehatan; termasuk UMKM go digital dan go ekspor;
4. Memperkuat koordinasi dengan daerah aglomerasi Bodetabek untuk pertumbuhan ekonomi Jakarta yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan sebagai kota global;
5. Mendorong berlanjutnya pelaksanaan proyek strategis sesuai rencana, perbaikan iklim investasi melalui optimalisasi sektor prioritas, serta promosi investasi;
6. Mendorong digitalisasi UMKM dalam sistem pembayaran dan akses pembiayaan untuk pembangunan ekonomi dan keuangan yang lebih inklusif; serta
7. Mendorong digitalisasi pemda dan masyarakat, melalui: (i) Inklusi dan resiliensi SP Non Tunai (terutama QRIS) terutama di beberapa sektor potensial (pariwisata, kesehatan dan pendidikan); (ii) Peningkatan literasi digital melalui edukasi publik dan kampanye QRIS a.l Jakarta Kreatif Festival, QRIS Fun Zumba dan QRIS

Jelajah Indonesia; serta (iii) Optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD) dalam mempertahankan status Pemda Digital dan peningkatan Indeks ETPD dengan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi melalui QRIS, akselerasi implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah serta Sinergi dan Kolaborasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Adapun tantangan dalam pengendalian inflasi terutama terkait dengan berbagai permasalahan struktural di Jakarta, meliputi jumlah populasi kota yang dinamis dengan penambahan arus masuk dari daerah sekitar (bodetabek) pada siang hari, serta karakteristik Jakarta yang bukan merupakan wilayah sentra produksi sehingga 99% pemenuhan komoditas pangan bersumber dari daerah penghasil. Untuk itu, diperlukan strategi khusus pengendalian inflasi daerah non-produsen yaitu melalui penguatan strategi 4K dalam inflasi pangan, yaitu :

1. Menjaga ketersediaan pasokan melalui peningkatan produktivitas dengan program *urban farming* dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan daerah produsen potensial yang surplus serta memperkuat kerjasama dengan TPID Bodetabek yang mempunyai hubungan ekonomi kuat dengan Jakarta;
2. Menjaga keterjangkauan harga melalui pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah komoditas yang masih mengalami tekanan harga bekerja sama dengan Bulog dan BUMD pangan;
3. Menjaga kelancaran distribusi melalui perluasan distribusi via kanal TPID-BUMD pangan, serta;
4. Melaksanakan komunikasi efektif melalui penguatan koordinasi dan komunikasi dalam pengendalian ekspektasi inflasi.

Di samping itu, penguatan ekosistem digital juga perlu untuk terus didorong yang tidak hanya terkait dengan transaksi Pemerintah Daerah, digitalisasi transportasi, serta digitalisasi bantuan sosial namun juga menasar pada sektor ekonomi potensial seperti pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Pengembangan UMKM juga akan terus didorong dan diarahkan untuk menjadi pemasok sektor-sektor ekonomi yang produktif seperti industri dan pariwisata melalui pengembangan kapasitas dan pembiayaan. Di sisi lain, dalam rangka upaya stabilisasi harga, UMKM dapat dikembangkan dengan berfokus untuk mendukung kerja sama antar daerah dalam rangka menjaga pasokan bahan pangan. Inovasi juga perlu diperkuat dalam mengakselerasi perkembangan digitalisasi UMKM melalui program pengembangan UMKM digital dan UMKM ekspor. Lebih lanjut, inovasi kebijakan dan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah serta ekonomi dan keuangan hijau juga diperlukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Jakarta yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan serta mendukung penguatan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing.

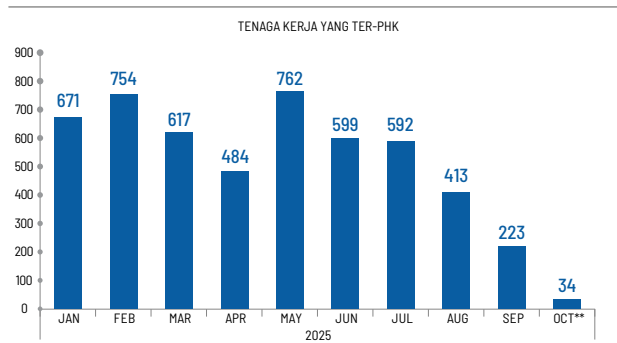


## BOKS 4

# Dampak Stimulus 8+4+5 Terhadap Perekonomian Jakarta

Tertahannya daya beli masyarakat khususnya menengah ke bawah masih berlanjut dan berdampak terhadap perekonomian Jakarta. Kondisi ini tercermin dari konsumsi rumah tangga yang pada triwulan III 2025 tumbuh 5,01% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (5,13%; yoy) (Grafik B4.1). Perlambatan ini antara lain dipengaruhi oleh berlanjutnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Jakarta sehingga menahan daya beli. Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), pekerja Jakarta yang di PHK masih terus berlanjut meski secara jumlah masih lebih rendah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya (Grafik B4.2).

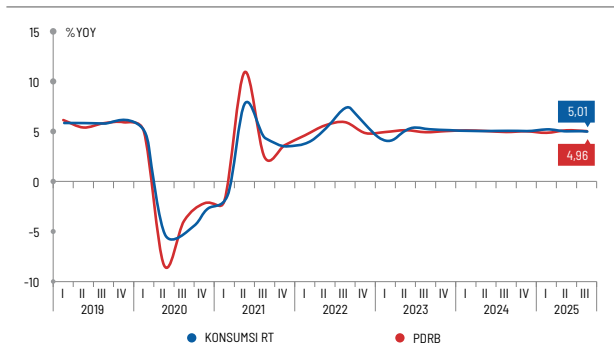
Selain itu, tertahannya daya beli juga dipengaruhi oleh bergesernya preferensi belanja masyarakat menengah ke bawah yang lebih memilih untuk melakukan *spending* pada bahan pokok dan memilih untuk membeli barang-barang yang lebih terjangkau. Masyarakat juga cenderung menahan konsumsi barang tersier dan tahan lama. Tertahannya daya beli juga sejalan dengan pangsa tenaga kerja



Sumber : Kemnaker, data s.d Oktober 2025

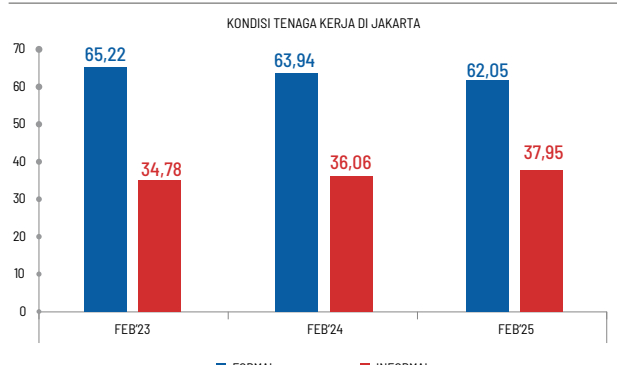
Grafik B4.2 Jumlah Tenaga Kerja Ter-PHK di Jakarta

informal di Jakarta yang meningkat. Dari total 5,47 juta tenaga kerja di Jakarta, 37,95% merupakan tenaga kerja informal (Data Februari 2025). Pangsa tersebut meningkat dari posisi Februari 2024 yang sebesar 36,06%. Sementara itu, pangsa tenaga kerja formal di Jakarta terus menunjukkan tren penurunan meski secara porsi masih lebih dominan terhadap total tenaga kerja di Jakarta (Grafik B4.3).



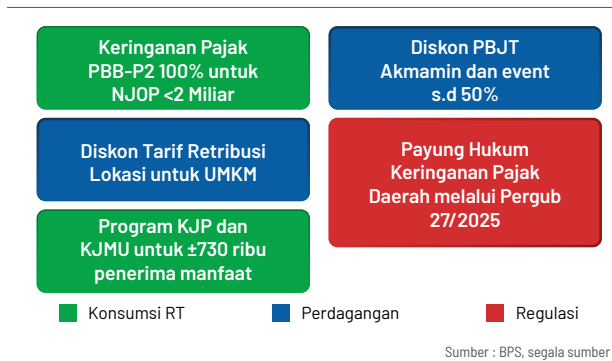
Sumber : BPS, diolah

Grafik B4.1 Pertumbuhan ekonomi dan Konsumsi RT di Jakarta

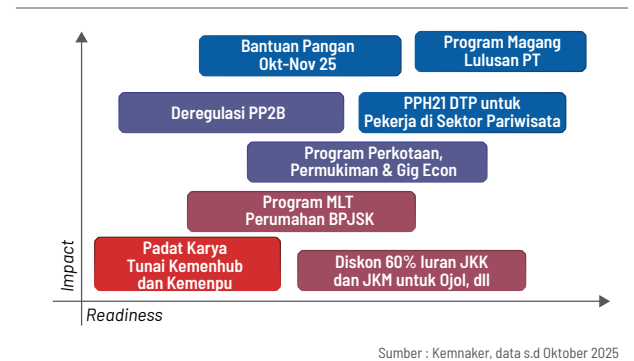


Sumber : BPS, diolah

Grafik B4.3 Kondisi Tenaga Kerja di Jakarta



Gambar B4.1 Insentif dan Stimulus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta



Gambar B4.2 Insentif dan Stimulus

Untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah mengumumkan paket stimulus ekonomi yang disebut dengan 8+4+5 pada 15 September 2025. Paket tersebut mencakup 8 program akselerasi di 2025, 4 program lanjutan di 2026 dan 5 program penciptaan lapangan kerja. 8 program akselerasi di 2025 mencakup program magang lulusan baru, perluasan PPh 21 ditanggung Pemerintah, bantuan pangan, subsidi JKK dan JKM, program perumahan BPJS Ketenagakerjaan, relaksasi SLIK OJK untuk mempermudah pekerja memperoleh akses pembiayaan, program padat karya tunai serta percepatan deregulasi perizinan usaha. Sementara itu, 4 program lanjutan di 2026 mencakup insentif PPh final 0,5% untuk UMKM, perpanjangan PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pariwisata, PPh 21 DTP untuk industri padat karya serta perluasan diskon iuran JKK dan JKM. Adapun 5 program penciptaan lapangan kerja mencakup koperasi desa merah putih, kampung nelayan merah putih, revitalisasi tambak di kawasan pantura, modernisasi kapal nelayan, serta program perkebunan rakyat.

Selain stimulus 8+4+5, Jakarta juga mendapatkan alokasi dana khusus sebagai *pilot project* pengembangan program perkotaan dan *gig economy*. Dalam program perkotaan, Jakarta akan mengembangkan *placemaking* di Glodok, Kota Tua dan Pasar Baru, serta merevitalisasi pasar-pasar Jakarta. Dalam program *gig economy*, Jakarta akan membangun fasilitas *co-working space* sekaligus ruang bagi pelaku *gig economy*.

Program stimulus yang diluncurkan pemerintah, mulai dari bantuan pangan, pelatihan dan padat karya, hingga insentif pajak UMKM dan program perlindungan tenaga kerja, diperkirakan akan memberikan dampak positif. Program-program tersebut diperkirakan dapat memberikan pengaruh langsung terhadap konsumsi RT pada akhir 2025. Beberapa program stimulus seperti bantuan pangan Okt-Nov 2025, program magang lulusan PT serta PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor jasa diperkirakan akan menambah konsumsi rumah tangga Jakarta hingga sekitar Rp134,7 miliar pada triwulan IV 2025, sehingga diharapkan akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025.

Dengan adanya penyaluran berbagai stimulus ekonomi, diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat Jakarta di akhir tahun 2025 dan 2026. Selain itu, dengan dipilihnya Jakarta sebagai *pilot project* pengembangan ekonomi perkotaan, revitalisasi kawasan seperti Glodok dan Kota Tua, serta penguatan ekosistem *gig economy*, diharapkan pertumbuhan ekonomi Jakarta dapat lebih inklusif dan berkelanjutan.

# Tim Penyusun

## PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB

Iwan Setiawan

## KOORDINATOR PENYUSUN

Sakti Arif Wicaksono

## TIM PENULIS

Reska Prasetya

Dewa Ayu Komang Bintari Dewi

Ratu Humairah Balqis

Binar Tyas Aini

Dhia Atika Anggraini

Reza Kianendra

Adhityas Ghaniyya Tejo

Dea Ananda Nabila

Muhammad Zaydan Musyaffa

Chendy Dea Andriany

Olivia Citra Octaviani

Hafidh Afif Ardhi

## KONTRIBUTOR

Divisi Implementasi KEKDA Provinsi

Divisi Perizinan dan Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran

Divisi Pengawasan Sistem Pembayaran

## KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 42 – Jakarta – 10410

No. Telp. 62-21-35110321



Halaman ini sengaja dikosongkan



**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA  
PROVINSI DKI JAKARTA**

Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 42  
Jakarta - 10410



SCAN HERE



LPP BI DKI JAKARTA

Ebook dapat diunduh melalui menu pencarian google atau pindai QR code atau tautan berikut:

[bit.ly/LPP-DKI](https://bit.ly/LPP-DKI)

